EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

MENGUMUMKAN PROGRAM-PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN 2024

1. Laporan Kinerja tahun 2024
2. Rencana Kerja tahun 2024
3. Rencana Strategis tahun 2024

BPSPL PONTIANAK

2024

LAPORAN KINERJA

BPSPL PONTIANAK
TAHUN 2024

1. Laporan Kinerja Triwulan I
2. Laporan Kinerja Triwulan II
3. Laporan Kinerja Triwulan III
4. Laporan Kinerja Triwulan IV

2024

BPSPL
PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Djoeff Irvan Fariana Arkadia, S.T., M.Si.

Penyusun:

Gradiano Raymond P, S.Pi, M.Si.

Jamal Fathu Rohman, S.Si

Ita Fitriana Indyasari, S.Si

Ratih Tribuwana Dhani, S.Kel.

Kontributor:

Sekretariat Umum KKP, Pembahas

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai bersama. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada negara ini adalah dituangkannya Laporan Kinerja (LK) BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Dalam hal, LK ini memberikan informasi mengenai capaian perencanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai sarana evaluasi perencanaan dan kebijakan berikutnya dalam rangka pengelolaan kawasan dan Ruang Laut. Dihasilkan program dan kegiatan di Balai BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder kami.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak terhadap terlaksanganannya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, disampaikan terima kasih.

Pontianak, 25 April 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui http://kinerja.kkp.go.id. Proses pertanggungan kinerja menghasilkan Hasil IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses pertanggungan dilakukan oleh para pengelola kinerja cukup cakupan strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudahan aplikasi eKinerja, Hasil Perjanjian Bersama Strategis (HPBS) PC-HKV atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 115 (sangat Baik + istimewa).

Pencapaian Indikator Kinerja BPSPL Pontianak yang fokus pada Triwulan I yaitu :

1. IKU 10 Laporan SPIP yang cakupan Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) target 1 dan capaian 1
2. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang memanfaatkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terdistribusi (%) target 24% dan capaian 116,67%
3. IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang ditindaklanjuti Tindak Lanjutnya telah ditanggapi dan ditampaikan (%) target 100% dan capaian 100%

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 19.686.113.000. Realisasi anggaran pada Triwulan I berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 31 Maret 2024 yaitu Rp 3.603.583.909 atau 19,47% dari pagu efektif. Berdasarkan kondisi teknis pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak sangat dan hanya, terdapat beberapa kendala teknis dengan kegiatan pendukung untuk kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru. Hal ini dikarenakan adanya anggaran masih dalam proses Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan I dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengkoordinasikan untuk proses revisi anggaran dalam rangka memenuhi anggaran yang diperlukan
2. Melakukan pembinaan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kelulusan pelatihan pada dilakukan bimbingan teknis dan seminar.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2022 yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut.

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 1
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Kelengkapan SDM 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pemanfaatan Kekuatan dan Pemkaran 4
1.4.1. Potensi 4
1.4.2. Permasalahan 5
1.5. Dasar Hukum 6
1.6. Sistematika Penyajian 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 9
2.1.1. Visi 9
2.1.2. Misi 9
2.1.3. Tujuan 10
2.1.4. Sasaran Strategis 10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 14
2.3.1. Kumpulan Pengukuran 14
2.3.2. Pelaporan Pengukuran Kinerja 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 19
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PAEP BPSPL Pontianak 21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlatih dalam Sarana Prasarana Bidang Diklat Lainnya di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 34

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terlaksanakannya pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 29
3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 33
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terwujudkannya kesesuaian vaksin penebaran kawasan konservasi di tingkat pasar di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 39
3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pengelolaan konvensi dan komitmen internasional (pkl/mg) dan kerjasama untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 41
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah KKP3K Pontianak ... 47
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 53
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dirisk Kritis/Kritis di Wilayah BPSPL Pontianak ... 57
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 63
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direservasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak 65
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... 70
3.2. Realisasi Anggaran ... 83
BAB IV PENUTUP ... 87
4.1. Kesimpulan ... 87
4.2. Rekomendasi ... 87
4.3. Tindak Lanjut ... 87
LAMPIRAN ... 88

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 2
Gambar 1.1.3-1. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 2.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sebelum Aplikasi Kinerja) 10
Gambar 2.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I 10
Gambar 2.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I 33
Gambar 2.1.2-1. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Selatan 34
Gambar 2.1.2-2. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Tengah 36
Gambar 2.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 37
Gambar 2.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 37
Gambar 2.1.2-1. Verifikasi Lapangan Pemohonan KKPRL 21
Gambar 2.1.2-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 21
Gambar 2.1.4-1. Bagan Perizinan Online 33
Gambar 2.1.4-2. Pengamatan Kecepatan Pekat 34
Gambar 2.1.4-2. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi 37
Gambar 2.1.7-1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan 43
Gambar 2.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat 43
Gambar 2.1.8-1. Survei Pecahan Kima di Kalimantan Barat 54
Gambar 2.1.8-2. Pembuatan Zona Stock Center di Kalimantan Timur 33
Gambar 2.1.8-4. Dokumentasi Pengangkutan Biota Tertangkap 44
Gambar 2.1.9-1. Pemanasan Sosial Kemitraan 99
Gambar 2.1.9-2. Pelatihkasi SAJI 59
Gambar 2.1.12-1. Sosialisasi Pentingnya Berusaha Jasa Kelautan 64
Gambar 2.1.11-1. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Selatan 67
Gambar 2.1.11-2. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Tengah 67
Gambar 2.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 69
Gambar 2.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Kalimar 44
Gambar 2.1.12-1. Kegiatan Pelaksanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 83

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 12
Tabel 2.2.3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 2.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 33
Tabel 2.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan I 33
Tabel 2.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 34
Tabel 2.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I 35
Tabel 2.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 35
Tabel 2.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I 35
Tabel 2.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I 35
Tabel 2.1.4-1. Jumlah Kolektor, Kolektif dan Jumlah Partisipasi pada setiap Kimatra 35
Tabel 2.1.4-2. Perhitungan Hasil Sub Elemen Ka 36
Tabel 2.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 36
Tabel 2.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 36
Tabel 2.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Rotifer 36
Tabel 2.1.4-6. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I 37
Tabel 2.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 39
Tabel 2.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I 40
Tabel 2.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 41
Tabel 2.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan I 42
Tabel 2.1.7-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 44
Tabel 2.1.7-2. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 47
Tabel 2.1.7-3. Realisasi IKU 8 Triwulan I 50
Tabel 2.1.7-4. Realisasi IKU 9 Triwulan I 51
Tabel 2.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 53
Tabel 2.1.8-2. Hasil Kanal Populasi Kima di Kecamatan Kanal 54
Tabel 2.1.8-3. Rehabilitasi Kegiatan Biota Terlindungi 59
Tabel 2.1.9-1. Realisasi IKU 10 Triwulan I 59
Tabel 2.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 61
Tabel 2.1.9-2. PNBP Triwulan I 60
Tabel 2.1.9-3. Realisasi IKU 11 Triwulan I 61
Tabel 2.1.10-1. Capaian IKU 12 BHLP BPSPL Pontianak 63
Tabel 2.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan I 64
Tabel 2.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 65
Tabel 2.1.11-2. Realisasi Anggaran IKU 13 Triwulan I 69
Tabel 2.1.12-1. Capaian IKU 14 Nilai IKK BPSPL Pontianak 70
Tabel 2.1.12-2. Realisasi Anggaran IKK 14 Triwulan I 72
Tabel 2.1.12-3. Capaian IKU 15 IKK BPSPL Pontianak 73
Tabel 2.1.12-4. Capaian IKU 16 Nilai IKK BPSPL Pontianak 76
Tabel 2.1.12-5. Realisasi Anggaran IKK 16 Triwulan I 79
Tabel 2.1.12-6. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak 77
Tabel 2.1.12-7. Realisasi Anggaran IKU 17 79
Tabel 2.1.13-8. Kategori Hiu Ikan Sapi 79
Tabel 2.1.12-9. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak 80
Tabel 2.1.12-10. Realisasi Anggaran IKU 18 Triwulan I 82
Tabel 2.1.12-11. Capaian IKU 19 BPSPL Pontianak 83

Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dan capaian IKK 12 Triwulan I 83
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK 12 pada Triwulan I 84
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKK 22 BPDPL Pontianak 85
Tabel 3.1.13-15. Efisiensi dan capaian IKK 23 Triwulan I 86
Tabel 3.1.13-16. Capaian IKK 21 BPSPL Pontianak 87
Tabel 3.1.13-17. Capaian IKK 22 BPDPL Pontianak 88
Tabel 3.1.13-18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah 90
Tabel 3.1.13-19. Capaian IKK 23 BPSPL Pontianak 91
Tabel 3.1.13-20. Realisasi Anggaran IKK 23 Triwulan I 92
Tabel 3.1.13-21. Kategori Nilai Pengelolaan Keuangan 93
Tabel 3.1.13-22. Capaian IKK 24 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.13-23. Realisasi Anggaran IKK 24 Triwulan I 94
Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran BPDPL Pontianak Triwulan I 95
Tabel 3.2.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022 96

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemudahan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dan dapat berwujud barang, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 44/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Kepolisian Direktur Jenderal (Kadirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1 Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2 Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai kriteria pelestarian perlindungan yang berlaku.

Selain itu sejak terbitnya Kepolisian Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi di Perairan Maluku Wilayah Hulu Kabupaten Kubu Raya/Kepulauan.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai beberapa fungsi:

a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas pengangkutan jenis ikan yang dilindungi;
f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Pelatihan pengelolaan mangrove pesisir dan laut;
h. Pelaksanaan pemetaan dan pelatihan wilayah pesisir terbaru serta pendayagunaan citra satelit; dan
i. Pelaksanaan analisis kelestariannya.

Disamping itu, selama pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa aksesi penting dalam melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistem nya di daerah, antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
c. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan kekuatan sistem tertentu yang daerah pelestariannya tidak dapat dilanggarkan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik: Kolokal dan breeding; Mengunjungi nilai dan kepentingan konservasi kawasan (terutama internasional) secara ekologi terutama untuk fungsi, melindungi habitat dan daerah rujuk jenis migrasi. Potensi sebagai wariskan alam, dan dan atau warisan wilayah nasional;
c. Penyelenggaraan koordinasi Indonesia dalam mendapatkan/lanjut ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHC (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya telah dan dilaksanakan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat), serta menerapkan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
d. Pelaksanaan sebagian hargai Ditjen PRL dalam manifestasikan daerah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan melaksanakan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Pemberian dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan koordinasi nasional dalam melaksanakan tujuan SDG (Sustainable Development Goals), antar lain mengkaji dan/atau dampak dan kepentingan, mengimplementasikan ingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 58/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Bengkayan, Kalimantan Timur dan Sambaliung, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat pada di bawah ini.

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak dipimpin oleh seorang kepala Balai dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Subbagian Umum mempunyai tugas memimpin tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan kepegawaian, hukum dan kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pengadaan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, serta oceanografi dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengelolaan Jasa Kawasan (APJK).

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, mempunyai Perlindungan dan Pelestarian; (2) Tim Kerja 2, mempunyai Pemberdayaan Masyarakat; (3) Tim Kerja 3, mempunyai Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut; Sarana 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajemen yang melaksanakan indikator kinerja Manajemen yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum.

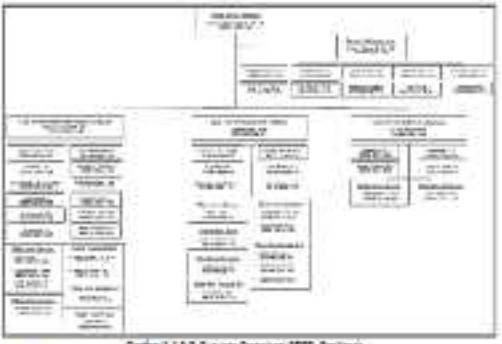

Gambar 1.1 S.S. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Kerangka Isi SLHI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2020 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun jumlah PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Sabjam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan. Hubungan Kerja Pengguna Penyedia dan Pengemban. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di tahun sebagai berikut:

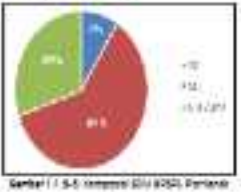

Gambar 1.2 S.S. komposisi ASN BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kalantan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.433,98 km^2 lebih dari dua pertiga daratannya dikelompok Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 33

Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 8.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 770 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

I.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki beberapa isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dipecahkan melalui kegiatannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang masih belum optimal. Hal ini perlu adanya integrasi antara mana kawasan konservasi dan mana laut yang diusulkan masuk ke kawasan antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut existing dengan rencana tata ruang zonasi. Dalam hal pemantau pemanfaatan ruang laut, dilaksanakan dengan pemantauan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengacu amanat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (termasuk appendiks CITES secara spesifik). KKP sebagai Otoritas Management (OTM) perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan Nilai Jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
d. Masih minimnya kesadaran/peran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
e. Ancaman adanya pemutihan yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan pemantauan mangrove dan pemulungan pemutihan karang. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam dilakukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti efisiensi pesisir dan laut serta pemberdayaan kepada masyarakat.
g. Keterbatasan tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar/pulau-pulau kecil lainnya. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk pengelolaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, sehingga dengan tetap memperhitungkan aspek pelestarian ekosistem.
h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti bioteknologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2022 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Penyelian Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEPMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang berisi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya pemaknaan/pemberian sinyal terhadap pencapaian untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara kesekretariatan. Pemaparan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan strategi sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
vii. Kegiatan Pendukung
viii. Realisasi Anggaran

ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja
   b. Lampiran yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan menjadikan title tugas dalam mencapai asasan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan analisis RPJPN 2005-2025 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam tahapan misi yang disebut sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan visi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut diterjemahkan dalam delapan sasaran strategis untuk mencapai tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Membangun kelahiran ekonomi untuk berkembang yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kesempatan dan pemerataan pembangunan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memodernisasi infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Membangun stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Keuangan dan Perbankan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemerintah, kepentingan kebutuhan dan perbankan mempercepat kepada rakyat, pembuat daya kan, pelambat garam, pengelola pemasar hasil nelayan dan perbankan, dan perbankan garam, serta cara petani, usaha hilirisi nasional dan perbankan;
2. membangun dan mengoptimalkan program perbankan budidaya.

Dalam melaksanakan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2023 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Renstra Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tersebut, Balai Pengelolaan Kawasan Laut Pesisir dan Laut (BPKPL) Pontianak, menyusun Renstra BPKPL Pontianak Tahun 2022 – 2024 sebagai acuan dan pelaksanaan agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi acuan dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut selama 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 diharapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Dirjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Berkesinambungan dan Berkeadilan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPKPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di wilayah Kalimantan menuju terwujudnya visi dirjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menyusun misi pelaksanaan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut untuk sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Membangun Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran konservasi laut
2. Penanganan illegal fishing

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembatasan sampah plastik di laut melalui Gerakan pemanfaat wilayah atau Buang Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Mempertahankan misi di atas, BPSPL Pontianak menentukan tujuan pengelolaan kurun laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan penegakan dan pemulihan kondisian pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Pelestarian dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Misi Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Hasil Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan deskripsi atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan pelayanan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya perairan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya zona-zona kecil dan kawasan kecil lainnya yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terwujudnya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan konservasi konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di Wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya spesies, komoditas merupakan dan konservasi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
6. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terlaksana pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan indikator kinerja beserta nilai yang seluruh ini harus kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan secara berjenjang agenda penyusunan dan ketetapan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, output, program, dan kegiatan. Selain itu, memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran kegiatan dengan program/nya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen Aset 2024 tersebut komunikasi dikomunikasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). PK BPSPL Pontianak orientasinya oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 (1) Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan (tahun 2023)	Sasaran Kegiatan (tahun 2024)
[SK-7] Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	**[SK-7]** Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	**[SK-8]** Meningkatnya tenaga kerja yang terlindungan Jaminan Kesehatan Bukan Cerita Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-8] Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut	**[SK-9]** Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
Pulau dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	pulau dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-4] Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-4]** Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-5] Terkelolanya kawasan konservasi yang ditetapkan di lingkup daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	**[SK-5]** Terselenggaranya pengelolaan wisata pemanfaatan kawasan konservasi di lingkup daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Tercapai Sasaran Kegiatan	**[SK-6]** Meningkatnya pengelolaan kawasan dan konflikan terkelola, dialog, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-6] Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-7]** Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-7] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi Kondisi Ekosistem di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-8]** Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi kondisi ekosistem di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-8] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-9]** Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Tercapai Sasaran Kegiatan	**[SK-10]** Terfasilitasinya Pemanfaatan Ex Laut Selatan Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Tercapai Sasaran Kegiatan	**[SK-11]** Meningkatnya kawasan zonasi dan (Lokasi) laut yang ditetapkan dalam rangka pengelolaannya pemanfaatan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-1] Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Inventar 2023 dan Hasil 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IK-1] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	**[IK-1]** Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)
Tidak Tercapai Indikator Kegiatan	**[IK-2]** Tersedia sarana yang terdiri dalam Gedung Nasional Buku Data Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Unit)

[illegible] Tahun 2023	[illegible] Tahun 2024
[IK-1] Dokumen Operasionalisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut yang Berada di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IK-1] Dokumen operasionalisasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang laut yang berada di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-2] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	[IK-2] Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
[IK-3] Daerah yang difasilitasi penyusunan aturan pendayagunaan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	[IK-3] Daerah yang difasilitasi penyusunan aturan pendayagunaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-4] Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-5] Kemitraan konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)
[IK-3] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (KOMPAK) yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IK-6] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (KOMPAK) yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-7] Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Dalam (ada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)
[IK-4] Jenis dan Timbulan Sampah yang ditanggulangi Pengelola, Pemerintah/Pemda, Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Lainnya di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-8] Jenis dan timbulan sampah yang ditanggulangi pengelola, pemerintah/pemda, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IK-5] Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-11] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-12] Pemanfaatan air laut selain energi yang dikembangkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-13] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola perangkat lingkup pemerintah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

[illegible] Tahun 2023	[illegible] Tahun 2024
[IK-13] Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-14] Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-14] Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-15] Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-15] Nilai Unit Kerja Akuntabel Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-16] Nilai Unit Kerja Akuntabel Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-16] Indeks pengelolaan publik yang dimanfaatkan pada BPSPL Pontianak (Indeks)	Tidak Terdapat Indikator Kegiatan
[IK-17] Indeks Pemberantasan Korupsi Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[IK-17] Indeks Pemberantasan Korupsi Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-18] Nilai PNI Korsup Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IK-18] Nilai PNI Korsup Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-19] Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IK-19] Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-20] Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Memanfaatkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tersedia (%)	[IK-20] Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang memanfaatkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tersedia (%)
[IK-21] Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindak Lanjuti dan Diselesaikan (%)	[IK-21] Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindak Tindak Lanjuti tepat diselesaikan dan disempurnakan (%)
[IK-22] Persentase Penyelesaian Tuntutan (TP/TPR) lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IK-22] Persentase Penyelesaian Tuntutan (TP/TPR) lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IK-23] Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IK-23] Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-24] Nilai pengelolaan internal keuangan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Revisi DIPA Tahun 2023

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9-8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.900.000

KEGIATAN BERBASIS PBB	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	100
7. Terlaksananya pemantauan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	7. Dokumen rekomendasi hasil pemantauan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektifitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5. Terverifikasinya kelayakan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kontribusi ekosistem, jejaring, dan keterkaitan untuk keberlanjutan sumberdaya yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kawasan konservasi yang dikelola di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan/site)	1
	7. Kemitraan konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok/site)	1
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
	9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi dengan bangkit mata pencaharian baru (kelompok)	1
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan konsumsi prioritas yang dilakukan pendataan pemanfaatannya, perbaikan habitat atau perlindungan induk dan pengelolaan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9. Meningkatnya pengelolaan kearsipanlangsung hasil pelaksanaan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis rekomendasi pemanfaatan hasil pelaksanaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut sebagai energi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Lokasi)	1
11. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kapasitas pelaku dan pengelola hasil yang difasilitasi peningkatannya dalam pengelolaan perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	3
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,75
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	90
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	68
	18. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	61
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan yang Terkendali (%)	34
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang ditindaklanjuti Tindak Lanjutnya oleh Terlaksana dan Kemajuan (%)	40
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100

		23. Tingkat Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Inputs) BPSPL Pontianak (%)	40
		24. Nilai pengelolaan Inventaris Barang (Inputs) BPSPL Pontianak (Nilai)	10

Sumber data: BPSPL Pontianak, 2020, diolah oleh penulis

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2020, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam kolomm Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam menentukan penentuan target kinerja telah disepakati Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang tahapan kinerja yang akan dilakukan dan tata cara pengukurannya. Pelaporan kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dijelaskan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik;
   b. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah hirarki (level 1/ satpel ke level 2); dan
   c. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara realisasi/capaian dengan target/rencana dari pencapaian kinerja tersebut/nya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja
   Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atau PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dokungan sistem informasi.

3. Manual IKU
   Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi: karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memonitoring, mengukur, mengevaluasi dan mengamankan IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengukuran pertriwulan dan monitor (Kuo Data)
2. Mengirimkan realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://www.kkp.go.id/spk/)

8. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan objektif.
9. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
10. Menghitung capaian nilai Kinerja Pelaksanaan (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
11. Menyebarluaskan hasil/hasil penilaian. Nilai maksimum penilaian adalah 120% (untuk menghitung NKP gaming).
12. Pengarsipan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
13. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja (eselon I kepada masing-masing pimpinan unit kerja) di lingkungannya paling lambat 5 hari setelah periode pemantauan triwulan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, sehingga penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PHL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, koordinasi PHL melanjutkan seluruh hasil yang diraih dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

Contents

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 8
2.1.1. Misi 9
2.1.2. Visi 9
2.1.3. Tujuan 10
2.1.4. Sasaran Strategis 10
2.2. Rekonstruksi Kinerja Tahun 2024 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 17
2.3.1. Rumusan Pengukuran 17
2.3.2. Indikator Pengukuran Kinerja 17

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan indikator Kinerja Kegiatan (IKK dan IKM). Perhitungan IKU dan IKM diatur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSIPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program, koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis yang bertanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSIPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan penanggungjawabnya.

Gambar 3.1.1-1. Hasil Kinerja Organisasi BPSIPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBAHKP BPSIPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu 1185 (masuk kategori sangat + achieved). NKO ini pada Tahun 2023 (Triwulan I) sebesar 111,45%. Terdapat peningkatan 3,35% dari Triwulan I Tahun 2023. Peningkatan nilai disebabkan capaian/realisasi target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 indikator yang memiliki periode penilaian Triwulanan. Terdapat 2 indikator kinerja yang tercapai dari satu indikator yang belum tercapai, yaitu IKU 5 Berhasil Memfasilitasi untuk Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi. Hal itu dikarenakan pada Triwulan I masih dilakukan identifikasi dan verifikasi kelompok masyarakat tersebut dahulu. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan I dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

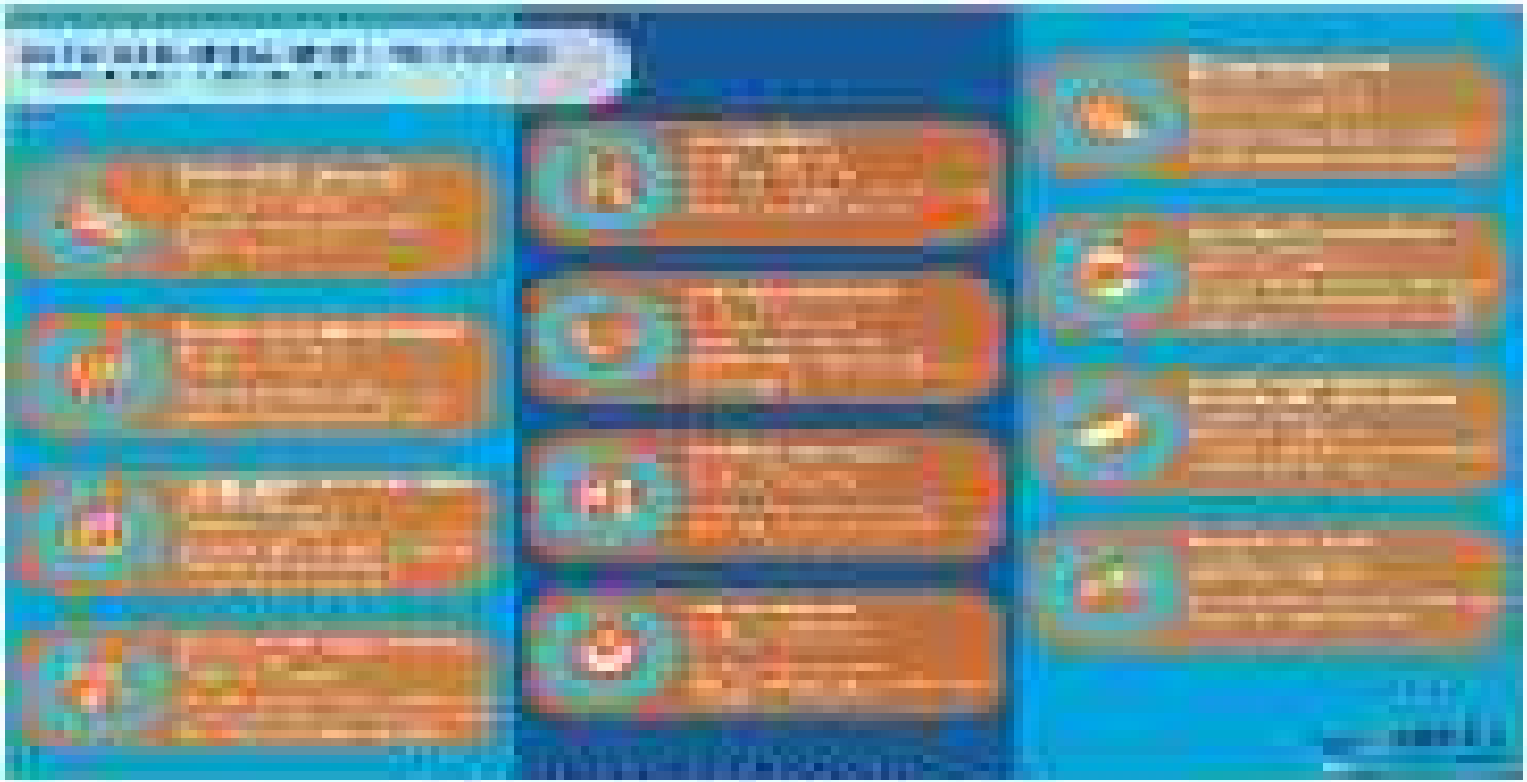

3.1.1. Susunan Kegiatan 1 Menghitungkan Nilai PNBP BPSPL Pontianak (KU 1: Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi contohnya dilestasi pemanfaatannya sama penerimaan dari sumber lain

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Jasa Tahun Berjalan (425121) + Pendapatan Jasa Kesantan dan Pertelaan Lainnya (425439) + Pendapatan Pertelaan Lainnya (425240) yang diperoleh dari Bastar kerja BPSPL Pontianak

$PNBP_{total} = PNBP_{SAJI} + PNBP_{R} + PNBP_{D} + PNBP_{lain}$

Simana:

$PNBP_{total}$ = SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJI DN	=	Penjelan atas Dokumen SAJI DN 1) + Penjelan Perdagangan + Pungutan Pengamatan 1)
Surat Rekomendasi	=	Penjelan atas Dokumen Rekomendasi + Penjelan Perdagangan
$PNBP_{SAJI}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa kesantan dan Pertelaan
$PNBP_{R}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
$PNBP_{lain}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Transfer Gantt Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:
1) untuk Usaha Ikan Hias Kecil (UIHK) dikenakan tarif 0%
2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengembiakan dan alam berdasarkan kuota yang ditetapkan

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengamatan	=	Jumlah Individu x Tarif PNBP 1) + Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Perdagangan	=	Volume x Tarif PNBP 2) Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSFL Pontianak

IKU 1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSFL Pontianak								
IKU 1	Nilai PNBP BPSFL Pontianak (Rupiah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Semester I (SPAN) Pontianak		Semester I (LHK) 2024/2023	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Target IKU (Rp)	% Realisasi thd Target IKU	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Semester
3.371.033.000	Periode Capaian Triwulan		2.000.000	0	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSFL Pontianak dan SIMPEL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Maret (Rp) dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBP Triwulan I (per tanggal buku 1 Januari – 31 Maret 2024) yaitu sebesar Rp 593.589.912 atau 29,68% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2024 (Rp 593.589.912,-) mengalami penurunan sebesar 100% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2023 (Rp 971.410.800,-).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PHKL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSFL Pontianak 2020 – 2024. Namun pada tahun 2024 ditetapkan target sebesar Rp 2.000.000.000,- Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSFL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 29,68% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Kebercapaian/Kegagalan dan Penyimpanan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 30% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh pengalaman aktifasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang mungkin apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pembayaran PNBP. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I, sehingga IKPSS belum dapat dihitung. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPSS, realisasi anggaran dan selisih dari IKPSS dengan realisasi anggaran, upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi SIMPOH untuk memetakan dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung berupa 84 WO yaitu Pelayanan Operasional Pertimbangan (Verifikasi SPJ, SAJI dan Rekomendasi), selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu, ada juga pungutan PNBP dari sewa gedung dan bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan I 2024.

Tabel 2.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPPK Pontianak Triwulan I

Jenis PNBP	Jumlah	Pagu Tahun	Target
Pemanfaatan Barang Tetap, Gedung, dan Bangunan	Rp156.667	Rp156.667	Rp156.667
Pendidikan Pelatihan Lainnya	Rp97.600.000	Rp93.040.000	Rp93.060.000
Pemanfaatan Jasa Keuangan dan Perbankan Lainnya	Rp84.600.419	Rp132.154.000	Rp100.364.000
Total	Rp182.607.086	Rp217.391.092	Rp193.581.267
Total Tiki			Rp90.969.912

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Kendala Aksi Triwulan II Tahun 2024

Pelayanan operasional pertimbangan (verifikasi SPJ, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPPK. Pantikmen, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang memenuhi kualitas dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas tidak adanya konflik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bersifat nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Hitung Suku

$TK_{Jumlah} = TK_{Lk} + TK_{Pr} + TK_{Lns} + TK_{Dis}$

Keterangan:

TK_{Jumlah} = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak

TK_{Lk} = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SKIP	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW (RKA)	% Realisasi thd Target TW	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			300	0	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak (LAKIP), Unit (RA)

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IKU dilakukan setelah tahun. Proses kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gemas SDL, identifikasi dan verifikasi relasipan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kerangka Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra SUPERL 2020-2024 yaitu sebanyak 2 kerangka peralih dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hasil ini diharapkan KU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya 0% (nol) di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kerangka Strategis KU tersebut belum tercantum dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena KU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mencapai tercapainya target di akhir tahun. Meskipun kagitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan berpartung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan data terkait target di Triwulan I setiap kpa belum dapat diinput. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPD realisasi anggaran dan setiap dari RPD dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasinya dalam dan Ahli-Ahli atau Kasi dengan mengikuti kegiatan secara daring.

D. Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan kegiatan (aktivitas) terkadang KU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya

a. **Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerhas BDL**

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti Cinta Laut dilaksanakan di tiga lokasi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat .

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Arin – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kotau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 10 – 22 Januari 2024 . Di Desa Tanjung, sudah ada masin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun masin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Tentapat kendaraan retayan sdff yang sebagian besar angkutannya adalah memiliki KUDAN di kedua lokasi tersebut. Sampah yang dihasilkan di kedua desa tersebut dominasi oleh sampah rayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada tempat sampah di sekitar Desa Tanjung, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Tentapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi kualitasnya.

Gambar 3.1.3-1. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Rakai, Desa Teluk Bogam dan Desa Kereye, Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 16 – 18 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki modal pengelolaan sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Rakai dan Desa Kereye belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.3-2. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Kabupon Besar, Desa Kiara dan Desa Nanah Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi dengan lahan sampah dengan ritba perjalanan sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon percontohan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 16 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada terpisahnya dengan ritba bank sampah untuk penjualan sampah yang bernilai ekonomi atau model economy circular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Kelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Calon Inisiatif Aksi Iklim Layak dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan inisiatif dalam dan kelayan sebelumnya. Terdapat 30 kelayan dan KUK yang sudah diidentifikasi. Identifikasi tersebut antara yang berkontribusi untuk mendukung kejadian SDL, bekerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah pengepul sampah juga sempat diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan tersedia dan mudah melalui serta muslim pesisir juga sudah dilakukan. Kesepakatan data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan bersama IKI.

Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan memastikan inisiatif dalam dan kelompok kelayan sebelumnya. Dari kelompok tersebut bekerja dengan DKI sebanyak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok kelayan di Daerah Aliran Kali Kelas Banjar dan Banga Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan disepakati data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi kualitasnya.

Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data survey di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah induk dan Bank Sampah unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Pengelola Pariwisata Kota Singkawang dengan hasil banyak pada lokasi pok nelayan di Selakau Besar dan Kuala secanyak 0 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil identifikasi dengan OPD Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gemas BDL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gemas ini dapa dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dan kita tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gemas BDL.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (satumaret dan Januari 2024) yaitu Rp 75.460.934 atau 4,57% dari pagu anggaran sebesar Rp 500.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 2.1.2.5. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4346.QDD.001.941] Hasil Penanggulangan Sampah Kemaritiman di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Rp500.000.000	Rp 23.970.034 (4,57%)	-
TOTAL		Rp500.000.000	Rp75.460.934 (4,57%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gemas BDL dengan melibatkan nelayan lokal, komunitas pesisir dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen pemanfaatan/perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Definisi Operasional/cara Perhitungan Pemanfaatan Ruang Laut yang dimaksud adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknis menghitung diperoleh dengan menghimpun/merekapitulasi dan menganalisa dokumen operasional hasil pantau pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, asistensi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilaksanakan sesuai dengan kebentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

IKK/S	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 3	Dokumen pemanfaatan/perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2023	% Capaian thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Pendokumentasian Terkumpul			3		-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena berbasis pengunduran dan pelaporan capaian pada Maret IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut: verifikasi lapangan perizinan KKPRL di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, mengikuti bimtek teknis KKPRL di Kota Denpasar dan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut di Kalimantan Timur.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 2 dok, dari dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena kebijakan tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran kebijakan dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tahunan dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu penerbitan penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan IKU ini hanya memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

a. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah (5) tersebut belum tercapai (lebih Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 namun pada tahun 2024 terdapat target adalah 3 Dokumen. Capaian triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena (5) hanya memiliki target Renstra di tahun 2024.

b. Analisis Penyebab Kebrhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat memenuhi tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang tata, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Balai KIPPIKIP Pontianak dan Balai KIPPIKIP Tarakan dalam rangka Pengamanan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga RPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPSS, realisasi anggaran dan selisih dari RPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri kesesuaian dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut dan melakukan perhitungan teknis secara cermat.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Konservasi Ruang Laut kepada 16 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL tersebut dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 10 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Utara sebanyak satu pemohon.

Tabel 2.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	3	Januari, Maret
Kalimantan Selatan	2	Januari, Februari
Kalimantan Timur	10	Januari – Maret
Kalimantan Utara	1	Februari
Total		

Kegiatan ini juga didorong lebih lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21 – 24 Februari 2024. Selain itu, ada juga verifikasi lapangan untuk Permohonan KKPRL PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 5 – 6 Maret 2024.

Gambar 2.1.3-1. Verifikasi Lapangan Pemrosesan KKPRL

c. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut BUT Eni Muara Bakau dan BUT Eni East Sanga Limited di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Pendampingan Pengawasan KKPRL PT Citra Manajemen di Kabupaten Kayong Utara tanggal 12 – 14 Februari 2024, Pendampingan Pengawasan KKPRL PT PT. Elnusa Exploitasi Nusantara dan CV. Bomec Profitera di Kabupaten Bengkayang tanggal 22 – 23 Februari 2024. Selain itu, juga dilakukan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk PT Ismo Dorly Sea di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21 – 24 Februari 2024.

Gambar 2.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya rapat penyelenggaraan KKPRL UPT Ditjen Ditjen PKRL di Kota Bandung, Pelatihan Pemanfaatan Ruang Laut Bidang Perikanan di Kota Malang, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Dki Jakarta.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3344.997.003] Rekomendasi kesiapan monitoring dan verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 134.102.040 atau 12,07% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.140.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Tabel 3.1.2.2. Realisasi Anggaran PK 3 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/+
1.	[054.LP87.009.049] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 174.774.000	Rp 34.032.000 (19,65%)	-
2.	[054.LP87.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 272.226.000	Rp 78.408.840 (28,91%)	
3.	[054.LP87.009.040] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 467.836.000	Rp 93.932.000 (19,02%)	
	TOTAL	Rp 1.150.000.000	Rp 156.122.840 (18,37%)	-

B. Kendala Atau Tantangan di Triwulan II Tahun 2024

Hasil dari koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melalui rapat verifikasi teknis pertama ini 93%, sehingga untuk bulan April - Juni serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya adalah 13.647,90 Hektar yaitu kawasan Konservasi di Taman Hutan Raya Wilayah Kota Kabupaten Kubu Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat dicapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 28/KEPDJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya aspek tersebut dikembangkan indikatornya menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

Gambar 3.1.4.1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4.1. Jumlah indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	3	10.00	9
Proses	3	10.00	13
Output	3	10.00	13
Outcome	4	20.00	8
Total	24		43

Tabel 3.1-A-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	Nk	Nmaks	Bobot (%)	Bk	Hasil (%)
Input	...	1070	...	0,22	...
Proses	...	420	...	0,35	...
Output	...	840	...	0,39	...
Outcome	...	420	...	0,14	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

Nilai indikator (Nk) : Hasil penilaian terhadap setiap indikator
Nilai Maksimum (Nmaks) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai kriteria (Nk) : Nk / Nmaks x 100%
Bobot kriteria (Bk) : Nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai akhir kriteria (Hasil) : Nk x Bk
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Hasil

Tabel 3.1-A-3. Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<60%	Merah	Belum Efektif	Desain dan rencana pengelolaan sudah disiapkan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan
60-80%	Kuning	Cukup Efektif	Kurang lengkap pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan sebagian tujuan pengelolaan sudah tercapai
>80%	Hijau	Sangat Efektif	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terpelihara dan lestari

Tabel 3.1-A-4. Capaian KU 1 BPSPL Pontianak

IKU-1	Terbentuknya area perlindungan dan pengelolaan yang luas di Wilayah Kerja, seperti dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
IKU-2	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023					Realisasi BPSPL Pontianak		Realisasi DJPPI (sesuai Lampiran)	
	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian	Target (Rp 000)	% Realisasi thd Target (Rp)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Capaian
IKU-02	Persen Capaian Tahunan		12					17,23	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPI, Maret 2024

1. Capaian IKU 1 (Tahun 2023)

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Maret IKU dilakukan secara tahunan. Proses kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya pemantauan ekosistem strategis pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut, survey jenis biota dilindungi di Kawasan Konservasi Maharkam Hulu, monitoring sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Maharkam Hulu dan pengadaan sarana/prasarana pendukung konservasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena belum ada capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 39,44% lebih besar dari pada target tahun ini yang sebesar 14%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PHPL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, adanya yang digunakan dalam pengukuran kinerja tentatif dengan target Renstra (tidak final), sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Manakam Hulu, seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra DPHPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 20% di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut belum tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai 8,96%, sehingga capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DPHPL Pontianak. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

6. Analisis Penyebab Kebrhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Penyerapan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat memberikan tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Manakam Hulu. Selain itu perlu peningkatan alat pendukung survei tentatma dalam monitoring. Hasil tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Konservasi.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan fisik fantastis target di Triwulan I sehingga RPD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPD realisasi anggaran dan selisih dari RPD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Manakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pisuit manakam pada tanggal 9 – 10 maret 2024 di Kawasan Konservasi Manakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pisuit dilakukan menggunakan kacai Drosella in Sk Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kayu dan juga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Selain itu juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1-40. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang diamati berada di Muara Pinang-Pinang sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 (waktu Indonesia Tengah, Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 09.17. Sementara waktu paling siang ditemukannya pesut yaitu pukul 14.07.

Tabel 3.1-44. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Sungai Mahakam	9	13.13	Sighting
2.	Sungai Kedang Rantau	2	14.07	Sighting
3.	Muara Wis	6	17.58	Sighting
4.	Hulu Muara Ayu	14	13.48	Sighting
5.	Muara Danau Semayang	5	09.17	Sighting
6.	Muara Pela	3	10.01	Sighting
7.	Muara Jan	3	10.29	Sighting

Pada hasil analisis parameter kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sesuai dengan kelas 2 pada peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau pembudidayaan ikan yang mempersyaratkan mutu tersebut. Hasil pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukan nilai suhu berkisar antara 33.4 – 31.5. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 3.7 – 8.2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 6.8 – 7.06. Sementara nilai TDS berkisar antara 10 – 45 ppm.

b. **Koordinasi Garmal Mari Kerja Sosial Ekonomi**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Januari 2024 bertempat di Laboratorium Pengembangan Masyarakat Kawasan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi awal dari BPSPL Pontianak dilakukan bersama akademisi dosen sosial ekonomi Universitas Mulawarman dengan membahas rencana survei monitoring Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Wilayah Hulu. Setelah pertemuan akademisi dari Universitas Mulawarman kemudian memberikan kuisioner yang telah disesuaikan, yakni Kuisioner Masyarakat Kantor Kawasan (UMK), Kuisioner Rumah Tangga Nelayan (RTP), Kuisioner Pariwisata dan Kuisioner Pengepul Individu. Kemudian kuisioner yang telah

Meeting ini akan dilaksanakan di 5 desa dari 8 kecamatan. Komoditas kelor yang dipanen akan dikirimkan dan dianalisa, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menjadi pertimbangan survei sosial ekonomi di desa berikutnya.

Gambar 3.1.A-5 Kunjungan lapangan monitoring kopi Mandailing

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mandailing Hulu dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya air conditioner split, longboat coverwhel, televisi, echosounder, drone DJI, alat komunikasi longboat HHT dan lab operasional.

B. Realisasi Anggaran

Pendapatan HKI ini diperoleh dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2042.REA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dioperasikan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung HKI ini pada Triwulan I (januari-maret dari Januari 2024) yaitu Rp 399.600.294 atau 14,03% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.481.334.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan dan Belanja Bahan.

Tabel 3.1.A-6. Realisasi anggaran HKI 4 Triwulan I

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2042.REA.002.001] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 955.000.000	Rp 283.977.333 (47,04%)	-
2.	[2042.REA.002.002] Data dan informasi kawasan konservasi	Rp 715.300.000	Rp 32.987.154 (4,21%)	-
3.	[2042.REA.002.003] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 800.044.000	Rp 42.000.400 (5,21%)	-
4	[2042.REA.002.004] Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rp 260.994.000	Rp 484.400 (0,11%)	-
	TOTAL	Rp 2.481.334.000	Rp 399.448.286 (14,33%)	-

5. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan II diantaranya monitoring sosial ekonomi, pendataan jaring ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, stabilisasi rencana pengelolaan dan zonasi biota dilindungi di Kawasan Konservasi Maluku Hulu.

3.1.3. Sasaran Regional 3: Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan penapatan usulan penetapan konservasi dapat meskipun pendampingan penyusunan rancana zonasi, pendampingan penyusunan rancana pengelolaan atau pendampingan fasilitasi kondisi kawasan konservasi. Teknis perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.3.1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

Sasaran	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 5	Daerah yang difasilitasi penyesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Nama Indikator Kinerja	Tahun 2024					Realisasi (2020-2023)		Capaian (2020-2024)	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target IPK 2024	% Realisasi thd Target IPK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan		1	-	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIAPPL Versi 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Belum terdapat output kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 3 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 29,3 Juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sama dengan tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka pencapaian penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini diarahkan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat pertahun secara rutin.

7. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat progres kegiatan yang telah direncanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [054.LBA.007] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran dari kegiatan (akumulatif) IKU ini pada Triwulan I (akumulatif) dari Januari 2024 yaitu Rp 3.983.526 atau 3,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Kegiatan Pengelolan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.2.2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[054.LBA.007.067] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi: perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 3.983.526 (3,98%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka pencapaian penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama Konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama antara kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satuan kerja lain, lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun ini menghitung indikator kinerja dilakukan dengan mengkonversikan dan menormalisasikan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan kemitraannya kepada kami, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SS 6	Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 6	Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target Thn I	Realisasi Thn I	% Capaian	Target Thn 2021	% Realisasi thd Target Thn	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan		1	1	-	8	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Juni 2022

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2021

Pada tahun 2022 tidak terdapat IKU Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", Sehingga capaian dilakukan pada tahun 2024 mengacam peningkatan capaian. Pada triwulan I, capaian tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran kerena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah Inisiasi Lapang Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan Pertemuan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dilakukan pada 22 Maret 2024 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya draf 3 Perjanjian Kerja Sama telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.865/BPSPL.2/TU.210/IV/2024 tanggal 26 Maret 2024 Hal Penyampaian Draf 3 Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", Sehingga Triwulan I tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

3. Permasalahan Capaian Kinerja dengan Target Kontrak Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra 2019 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola bersama/kolaborasi (kumulatif) 19 Ha ketika pada 2023 menjadi 23 Ha hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat disandingkan dengan tercapai jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Permasalahan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan bidang kerjasama dan kolaborasi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dapat disandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan dan Permasalahan/Penyesuaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mencerminkan terlaksananya target pada akhir tahun, hal ini didukung dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota kantor/kerja kolaborasi dan/atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (UPTK), untuk dilaksanakannya kegiatan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hal ini dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I, sehingga NFED belum dapat dihitung. Pertimbangan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian NFED, realisasi anggaran dan contoh dari NFED dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan adalah Pendampingan implementasi Perjanjian Kerjasama Konservasi dan Rehabilitasi Kepolisian 2024 pada 30 Januari 2024 di Cilacap Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama dilakukan pemantauan capaian implementasi kerja sama setiap triwulan. Pada triwulan I BPSPL Pontianak telah menyampaikan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.901/BPSPL.3/TU.140/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Perjanjian Kerja Sama Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Kas/Real Triwulan Output [053] [2553.PSO] Kerja Sama dengan Kinerja Output [053.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut:

Tabel 2.1.0-8. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 8 pada Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen/Item	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[2553.PSO.001.001.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp78.000.000	Rp22.848.000 (33,54%)	-
TOTAL		Rp76.008.000	Rp25.848.000 (33,84%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RU II Triwulan I (enam bulan Januari 2024) yaitu Rp52.545.655 atau 32,54% dari pagu anggaran Rp72.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Stationery, Perangkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Fasilitasi Kegiatan Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Rapat Meeting dalam Kota (Transport Peserta).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun draf tersebut masih dalam proses pembahasan lanjutan pada Sekretariat DJPRL dan pasca hari.

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

a. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPRL, Direktorat Tegiuq DJPRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.
b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

IKU 7. Kemitraan konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koperasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik pemfungsian indikator Kinerja dilakukan dengan mengkomunikasikan dan mempromosikan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak antara masyarakat/kelompok kegiatan konservasi dan mendokumentasikan hasil-hasil dan pembelajaran hasil kegiatan kemitraan yang dilaksanakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 2.1.0.2. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

Misi III	Meningkatkan pelestarian kawasan dan ekosistem konservasi, pulang dan kemitraan untuk mendukung kawasan yang stabil di wilayah kerja (prov, kabupaten)
IKU 7	Kemitraan konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Indikator Kinerja	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKL 2020-2024	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw III 2024	% Realisasi thd Target Tw	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
1	Periode Capaian Tahunan		1	-	3	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak (Tw II 2024), Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga capaian diharapkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Pada triwulan I, capaian tersebut belum dapat dilaporkan pengukuran ketika periode pengukuran (tw) selesai/ini capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah inisiasi Jejaring Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Hiakalan Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu pembahasan finalisasi dan penandatanganan Nota Dinas Kesepakatan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 secara daring.

Selanjutnya, Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak (nomor S.743/BPSPL.3/HL.120/II/2024 tanggal 16 Maret 2024 ke Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah (FPIK UMMU). Dalam tersebut telah ditembuskan tanggapan melalui Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak nomor 6.17/II.3/UMPKL.1/PL.01/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang difasilasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga Triwulan I tahun 2024 lebih tepat dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini merupakan target jangka menengah dalam Renstra DJPKL 2020 – 2024 yaitu kemitraan konservasi yang difasilasi (terbentuk/dan ditandatangani) 19 (Sembilan belas) kemitraan pada 2023 menjadi 20 (dua belas) pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan

berjalan lancarnya jangka menengah kerena pelaporan capaian pada Maret (I) dilakukan secara tahunan.

6. Pertandingkan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan konservasi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 baik ini dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Maret (I) dilakukan secara tahunan

7. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat memastikan tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah dengan judul Pengelolaan Konservasi Konservasi di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf Perjanjian Kemitraan tersebut telah dilakukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan telah terlaksana hanya di Triwulan I sehingga RPD belum dapat direvisi. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian RPD, realisasi anggaran dan sisihan dari RPD dengan persentase realisasi anggaran.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan RO ini adalah penyampaian Surat Kepada BPSPL Pontianak Nomor B.631/BSPL.3/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret hal Permohonan Paraf Perjanjian Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah kepada Sekretaris DJPRL dan B.634/BSPL.3/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret hal Permohonan Paraf Kesepakatan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Selain itu, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Pembahasan Implementasi Perjanjian kerjasama Konservasi dan Kerkana Kegiatan 2024 pada 23 Januari 2024 di Cirebon, Jawa Barat.

10. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari kegiatan Aksion Output (KRO) 2164.3.NC Kerja Sama dengan Rincian Output (RKE.001) Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut.

Tabel 10. Realisasi anggaran Kegiatan Pendukung (KL) 7 pada Triwulan I

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2164.3.RKE.001.007.A] Inisiasi jejaring dan kemitraan	Rp100.000.000	Rp75.463.334 (75,46%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp75.498.334 (75,46%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RU 7 Triwulan I (prorate/bln dan Januari 2024) yaitu Rp75.460.834 atau 75,46% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Operasional, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi), Belanja Jasa (Honor Jasa/Honor Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi Pelaksana Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Paket Fullday di Kalimantan Timur).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kerjasama (PKS), Pembinaan lahjah Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Hahalaan Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihak Kemitraan (UPR) dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan II Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembinaan dengan Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Hahalaan Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.3 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis liar tertentu dan/atau jenis asli tertentu (Bintro.Id). Teknis pelaksanaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menominasikan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Hasang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1 Tabel IKU BPSPL Pontianak

SK.7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Tren Level 2020	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra (Link, Alignment)	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th.	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Prediksi Capaian Simulasi Triwulan II			0	-	0	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IKU simulasi pada Triwulan II. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU kelompok belum ditetapkan dalam Renstra (Input BKHL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian simulasi pada Triwulan II.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan

Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dimulai pada Triwulan II.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada kesediaan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administasi pernyataan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administasi pernyataan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam capaian dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dimana akan tidak tercapai target di Triwulan I sehingga KPBS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara KPBS realisasi anggaran dan selisih dari KPBS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU, yaitu:

a. **Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan**

Kegiatan Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2024 yang bertempat di Desa Teluk Tamiang dan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Pasisir dan POKMASWAS Sobayan Bontan.

Gambar 3.1.7-1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pasisir merupakan kelompok masyarakat yang berlokasi di Desa fokus Tamiang Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, penanganan biota laut terdampar dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2019, kelompok ini sudah/belum pernah mendapatkan bantuan KOMPAK dari BPSPL/UPT KKHL berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.

b. **Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat**

Kegiatan Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kandawangan. Identifikasi ditujukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Kompasan Lestari,

POKMASWAS Tangan Bersatu, POKMASWAS Sadar Wilayah Pesisir, POKMASWAS Mangrove Cinta Lestari.

Kelompok Masyarakat Pengawas Compassion Laporan berlokasi di Desa Pulau Sari Indah, Desa Kandenangan Kiri, Kec. Kandenangan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memantau kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba, paus dan penyu. Kelompok ini juga melaksanakan rehabilitasi habitat selama dilindungi dengan cara berkelanjutan mangrove dan lamun bersama masyarakat bekerjasama dengan Instansi/LSM/pengurusan tinggi. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan kapal fiber dengan kapasitas 4-6 orang dengan yang menggunakan mesin tempel 40 PK untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Kelompok Masyarakat Pengawas Tangan Bersatu berlokasi di Pulau Sarut, Dusun Bunga Tanjung, Desa Muara Ulaing, Kec. Kandenangan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif melakukan patroli kegiatan Illegal Fishing dan kemudian dilaporkan ke PSDKP Teluk Batang. Selain itu mereka juga memantau kemunculan biota dilindungi seperti dugong dan lumba-lumba. Kelompok Sadar Wilayah Pesisir juga melakukan rehabilitasi hal tersebut selama dilindungi dengan cara menanam bakau bersama masyarakat bekerjasama dengan Instansi/LSM/pengurusan tinggi. Kelompok ini pernah mengusulkan bantuan kompi dan Kecamatan. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan perahu penangkapan pelestarian atau rehabilitasi tersebut hanya untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Kelompok Masyarakat Pecut Mangrove Cemong Bersatu berlokasi di Desa Sidik Baru, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Pada saat ini Kelompok Cemong Bersatu aktif melakukan pelestarian mangrove baik secara swadaya maupun kerjasama dengan Instansi/LSM/pengurusan tinggi/swasta. Kelompok ini sebelumnya pernah mengirim bantuan dari DPRD Kalimantan berupa perahu, PC dan

(setiap serta berhasil tersimpan) menjadi dan Pemerintah Kabupaten Kebumen). Adapun untuk bantuan KOMPAK Kecamatan ini menjadikan sebelah/disekitar ekonomis rumah lingkungan yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan lahan kawasan konservasi.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian KU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3843.QBK.007] kegiatan Masyarakat Pengelola Konservasi. Alokasi anggaran dari kegiatan pendukung KU ini pada Triwulan I (akumulatif dari bulan 2024) yaitu Rp 24.000.000 atau 9,09% dari pagu anggaran sebesar Rp 222.040.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 2.1.2-2. Realisasi KU 2 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[3843.QBK.007] Pemberdayaan Kawasan KOMPAK	Rp 352.040.000	Rp 24.000.000 (9,09%)	-
TOTAL		Rp 352.040.000	Rp 24.000.000 (9,09%)	-

C. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Memperjelaskan pengadaan barang untuk bantuan Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Indikasinya akan terima pembelian bantuan KOMPAK.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Kelompok masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang memiliki pengurus dan struktur-struktur dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kehutanan dan perikanan. Teknik memfasilitasi dilakukan dengan mengimplementasikan dan memperbaiki kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

IKU	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
IKU 9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
Baseline 2023	Tahun 2024				Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPVL 2020-2024		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW II 2024	% Realisasi TW I/ Target TW II	Target 2024	% Realisasi TW I/ Target 2024	Target 2024	% Capaian TW I/ Target Renstra
1	Periode Capaian Tahunan			1	-	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilaksanakan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada wilayah kerja BBKK, Pontianak yang Difasilitasi Pengelolaannya Hasil Konservasinya Baik". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra DJPLHK PKHL 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPDPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima sertifikat konservasi di wilayah kerja BPDPL Pontianak. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pencairan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan angka NPSS, realisasi anggaran dan sisa/lebih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kendala/ Permasalahan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3943.994.A.001] Konservasi Keanekaragaman yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pencairan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1.3-2. Realisasi IKU 8 Triwulan I

No	Komponen/Kelompok/Jenis	Pagu	Realisasi	Sisa/Lebih
1.	[3943.994.A.001] Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000
TOTAL		Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Perlu adanya pencairan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

3.1.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Lisung

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis Ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keberadaannya hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Pelosi, Kima, Lola, Tenduk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan dilindungi/terancam punah dengan target jenis Pelosi, Kima, Lola, Tenduk, dan Pari Air Tawar
b. Perbaikan Habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengawasan Stok Jenis Ikan dengan target jenis karang
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkannya dari pendataan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

IKU-9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-10	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak Lisung								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Semara 2025		Semara 2026	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target s/d 2024	% Realisasi thd Target 5th	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target Semara
10	Periode Capaian Tahunan		7	-	0	-	20	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak Lisung, Tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian (pada Manual IKU disebutkan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu antara 3 jenis (antara: Kima (penyebaran bibit di zonasi), Karang (pemasangan Coral Stock Damar dan survei pemantauan coral bleaching), dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar).

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 baik fisik dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan I tahun 2023 terdapat capaian sebesar 5 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2024 (3 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan I tahun 2023

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I tersebut yaitu 3 jenis memiliki peran sebesar 15% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL

7. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I tersebut yaitu 3 jenis memiliki peran sebesar 33% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak

8. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyebaran data populasi kima, pembuatan Coral Stock Center dan restocking sehingga mampu meningkatkan populasi kima di perairan. Restocking dapat memulihkan populasi kima yang telah menurun akibat penangkapan berlebih dan kerusakan habitat

Gambar 3.1.9-1. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

Metode survey pendataan populasi kima yang diaplikasikan adalah metode belt transect yaitu dengan menarik garis transek lurus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 5 meter (2,5 meter kanan dan 2,5 meter kiri pengamatan) pada 7 stasiun pendataan. Total jumlah Kima (Tridacna spp.) yang ditemukan di 7 lokasi pendataan di Pulau Lemukutan yaitu 904 ekor dengan jenis Tridacna crocea, Tridacna maxima dan Tridacna squamosa. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Tanjung Kima sebanyak 378 ekor, kemudian jumlah kima paling sedikit ditemukan di Teluk Suraw dengan sebanyak 59 ekor.

Tabel. 3.1.9-1. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No.	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. Suraw	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	59
2	Tel. Dina	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	147
3	Tj. Pela Pelang	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	153
4	Taman Kima	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	378
5	Air Tina	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	116
6	Tj. Batu Belawi	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	55
7	Tj. Hanoman	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	04
Total			904

c. Pembuatan *Coral Stock Center*

Pembuatan Coral Stock Center (Biakakarang) di Pulau Maraba, Kabupaten Bintan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan Coral Stock Center ini Survey, Pemantauan Coral Bleaching di Pulau Maraba, Kabupaten Bintan, Kalimantan Timur (Biakakarang) oleh Ir. Hj. [illegible], Pembinaan dan diberikan oleh Kelompok Masyarakat Maraba Pelduli Lingkungan (MPL), Unit Pengelenggara Gerakan Lokal (UPGL) Maraba, TNI AL Pulau Maraba, PT. Surga Alam Lestari (Resort Nirwana Resort), dan PT. Pratasidha Jaya (Pratasidha Resort).

Gambar 3.1.3-2. Pemindahan Coral Stock Clonal di Kepulauan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media cluster dengan ukuran 1 x 1 meter, dengan jumlah titik pada masing-masing media berjumlah 16 fragmen titik karang. Bibit karang diambil dari donor lokasi Coral Stock Donor pada kedalaman sekitar 3-10 meter. Adapun 196 penelitian ini transplantasi berada pada kedalaman 0-12 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan dari 10 (sepuluh) titik pengamatan, jenis karang yang ditemukan adalah Acropora spp. Porites sp. Montipora sp. dan Hydnophora sp. dengan jumlah fragmen mencapai 160 fragmen karang.

ii. Laporan Kejadian Penanganan Biota Laut Bilindungi/Terancam Punah

Selama periode Januari hingga Maret 2024 tercatat 4 (empat) laporan kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang melibatkan kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Tercatat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang di laporkan penanganan yaitu dugong, lumba-lumba, penyu, dan paus. Sebanyak 1 (satu) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (biota 1) dan 3 (tiga) kejadian merupakan biota dengan kondisi mati (biota 2 dan biota 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikubur/dibuang pada sekitar lokasi penemuan.

Gambar 3.1.3-3. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

Tabel 3.1.3-3. Rekapitulasi Kejadian Biota Terdampar

No	Waktu Kejadian	Lokasi	Jenis Biota	Jumlah	Kode Kejadian	Keterangan
1	20 Januari 2024	Pantai Pulau Nusawaen, Kec. Pulau Gemburlen	Lumba-Lumba	4 Ekor	KODE 2	Dikubur/mati

3	21 Februari 2024	Pohon Beringin Desa Bukit Asmara, Kec. Hijauna Kemenangan	Pekerti	1 Ekor	KODE 5	Dimatikan
4	22 Februari 2024	Perumahan Central Kec. Kiat Selatan Ucu, Kec. Bahkapalam Kota Pusat	Bunga	1 Ekor	KODE 6	Dimatikan
5	14 Maret 2024	Dermaga Ikan, Desa Kandawangan Kiri, Kec. Kandawangan	Gugong	1 Ekor	KODE 1	Dimatikan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3943.RRR.001] Hasnonanggaran Hayati Rakmat Terancam Punah yang terindung dan/atau Dilestarikan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (awal hingga akhir Januari 2024) yaitu Rp 182.003.000 atau 20,03% dari pagu anggaran sebesar Rp 758.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

Tabel 3.1.04: Realisasi IKU 10 Triwulan I

No.	Komponen Keterangan	Pagu Akhir	Realisasi	Ket.
1.	[3943.RRR.001.041] Persentase (%) Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 344.700.000	Rp 43.784.000 (20,24%)	-
2.	[3943.RRR.001.042] Rekomendasi Pelestari Habitat Ikan Jenis Ikan dilindungi/terancam punah	Rp 224.000.000	Rp 129.000400 (48,33%)	-
3.	[3943.RRR.001.043] Rekom Cadal Pelestarian Biota dilindungi/terancam punah	Rp 83.346.000	Rp 5.112.813 (6,23%)	-
4.	[3943.RRR.001.044] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp 97.900.000	Rp 0 (100%)	-
TOTAL		Rp 758.000.000	Rp 182.003.000 (24,03%)	-

C. Kendala dan Triwulan II Tahun 2024

Hambatan dalam kegiatan pada saat Biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi tarsius di Kalimantan Barat, serta pendataan populasi penyu di Kalimantan Barat dan rangkaian kegiatan Festival Rokan Pesisir di Kalimantan Barat.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah SPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja SPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya meliputi:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan atau lock alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana);
b. Penyediaan data collorol dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana);
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan mengkontentasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan meliputi Pelayanan perizinan pemanfaatan Jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau lock alike species; penyediaan data collorol dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

IKSK	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw. 2024	% Realisasi thd Target Tw	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Periode Capaian Triwulan		0	-	-	0	-	33	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan I Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 0 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Terbang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver).

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL tahun 2020 – 2024 adalahnya 30 unit/a pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka menengah renstra (IKU ini tidak memiliki target triwulanan, melainkan progres kegiatan sebanyak 5 unit/a telah berbasis sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PHPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 adalahnya 5 unit/a pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak. Namun progres kegiatan sebanyak 5 unit/a telah berbasis sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Pemilihan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Komunikasi progres kegiatan dilakukan oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses penerbitan PNBP. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga RPD belum dapat diinput. Pemilihan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPD, realisasi anggaran dan selisih dari RPD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Pemilihan (Verifikasi SPJU, BAJI dan Rekomendasi)
   Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan (Januari – Maret). Kegiatan ini terdiri dari:
   - Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SPJI)
     Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang diinvestasi dari lalu sebanyak 0 ITES. Hasil verifikasi permohonan SPJI pada Triwulan I tercatat 0 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

  Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (look a-like species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [web.kkp.go.id](). Selama Triwulan I terdapat total 82 Surat Rekomendasi dengan 74 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 8 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis iku dan pari look a-like species, sebanyak 68 surat telah diterbitkan. Demikian ikt, sebanyak 12 Surat Rekomendasi untuk jenis kerapu telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk ikt dan pari look a-like terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 30 surat. Demikian pula terbitan Surat Rekomendasi untuk kerapu terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 surat.

Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

  Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Aplikasi dapat diakses secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [web.kkp.go.id](). Selama Triwulan I terdapat 30 SAJI DN untuk jenis ikt dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Demikian ikt, sebanyak 240 SAJI DN untuk jenis arwana telah diterbitkan. Pelayanan SAJI DN untuk ikt dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 71 surat. Demikian penerbitan surat rekomendasi untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 236 surat.

Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)
  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman keluar negeri. Hasil akhir dari verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktur PKHP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman sijilwanga.id. Selama Triwulan I terdapat 107 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 154 buah.

- Verifikasi Stok Ikan
  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.

- Verifikasi Hasil Panen
  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk ikan arwana termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Pembesaran
  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai. Selama Triwulan I terdapat ... Pengesahan Sertifikat untuk untuk jenis Arwana telah diterbitkan.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  Pada Triwulan I direalisasikan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sebagai berikut.

Tabel 2.1.9-5 PNBP Triwulan I

Bulan	PNBP	Total Triwulan I
Januari	Rp 102.443.416	
Februari	Rp 217.154.695	Rp 560.089.911
Maret	Rp 100.434.800	

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini dihitung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (3362.998.002) Koordinasi dalam Hasil Perikanan yang difokuskan pemanfaatannya secara berkesinambungan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (periode1 Januari 2024) yaitu Rp 110.080.007 atau 0,00% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

Tabel 3.1 IKT Realisasi RO IT Triwulan I

No.	Komponen Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3343.RBB.BO3.041] Penyediaan data pelaporan dan analisa pemanfaatan jenis hasil dilindungi dan atau sejenisnya DITEG	Rp 230.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
2.	[3343.RBB.BO3.042] Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan sejenisnya DITBS	Rp 1.160.000.000	Rp 110.550.077 (10,09%)	-
TOTAL		Rp 1.390.000.000	Rp 110.550.077 (8,00%)	-

4. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu Pelayanan operasional perizinan (verifikasi DPJ, DAJI dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/layanan/jasa tertentu yang berasal dari laut dalam jangka waktu lebih besar dari 30 (tiga puluh) bulan/satu periode pada kawasan konservasi serta dilakukan untuk kegiatan komersial selain laut yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah kegiatan inventarisasi pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk berupa data, jasa yang dapat dikenali jenis, potensi dan nilai. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan bila kebenaran dokumen dan data pengusulan pemanfaatan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan pemeriksaan di CKKK. Teknis perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah rekomendasi identifikasi dan hasil verifikasi pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 DHP BPSPL Pontianak

IKU 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Capaian 2023	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Th 2023	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	8	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL Unsel 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Progres kegiatan pada Tri dan I yaitu pada bisa pelaporan di dalam jasa kegiatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak tercapai IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 bisnis kawasan yang terfasilitasi pelatihan pengelolaan pesisir. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan di capaian di lakukan secara tahunan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kinerja IKU concourt belum tersedia dalam Renstra KKP, Perjanjian 2020 – 2024. Dalam Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi pembinaan Kelompok Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan tersebut oleh kualifikasi pemateri dalam menjelaskan pemanfaatan perairan air laut sebagai energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan pemanfaatan air laun sebagai energi.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan hasil tercapai target di Triwulan I sampingan MRS belum dapat dinilai. Pembuktian analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara HPSS, real bea anggaran dan selisih dari HPSS dengan real bea anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat kelautan dan melakukan optimalisasi pemilihan perusahaan bidang jasa kelautan secara cermat.

9. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Sosialisasi Pembinaan Kelompok Bidang Jasa Kelautan

Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Horizon Ballapapan. Kegiatan ini dihadiri oleh ... orang yang berasal dari instansi pemerintah. Sesuai ini, PP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sedang diterbit, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya. Contoh perizinan berusaha di sektor jasa kelautan antara lain izin pemanfaatan pasir laut, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut dan contoh lainnya. Kemudahan KLBB dibagi menjadi dua KBLI 36201 (penampungan, pengambilan dan penyaluran air minum) dan 36301 (penampungan dan penyaluran air baku). Dokumen dan pemenuhan khusus meliputi pada meliputi pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.1.19-1. Sosialisasi Pemilihan Berusaha Jasa Kelautan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari Kas/Riset Rincian Output [3344.PBW.003] Koordinasi Pemetaan Potensi Kelautannology dan Pemanfaatan Air Laut. Realisasi anggaran dan capaian pencapaian IKU ini pada Triwulan I (sumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 22.672.967 atau 22,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

Tabel 2.1.19-2. Capaian IKU 12 Triwulan I

No.	Komponen Rincian/anggaran	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3344.PBW.003.994] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp 100.000.000	Rp 22.672.967 (22,67%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 22.672.967 (22,67%)	-

C. Kendala Atau Triwulan II Tahun 2024

Pencapaian capaian yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi (ALDE) apabila ada terdapat permohonan perizinan Pemanfaatan ALDE.

3.1.11. Laporan Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 12. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak meliputi Selatan Bulan Cinta Laut (SCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi pada satuan wilayah kabupaten/kota Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penjabaran semangat Prabowo Laut, Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengelolaan sampah plastik yang masuk laut dan mengurangan upaya-upaya penanggulangan dan penyelesaian sampah plastik untuk kemudian dapat dilakukan oleh masyarakat. Teknik pemilahan sampah dilakukan dengan mengkompilasikan dan menjumlahkan kegiatan pesisir bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil dengan kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 12 BPSPL Pontianak

IKU 11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 12	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Kode Satuan (SSK)	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target IKU 2024	% Realisasi thd Target TW I	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Periode Capaian Tahunan			4					

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gemas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Hal ini karena Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini, capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra SUPIHK 2020-2024 yaitu sebanyak 2 laporan jasilah dan pulau-pulau hasil yang difasilitasi penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hasil ini diharapkan KU. ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis KU tercatat belum tersedia dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena KU. ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mencapai tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan berpartisipasi pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan

6. Analisis atas Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efektivitas penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Pembuatan analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan sebuah dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya KU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan di antaranya:

1. **Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gemas BOL**

   kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

   Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. Di Desa Tanjung, sudah ada musim pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun musim pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang di sini. Tempat kecamatan nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang dihasilkan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanjung, namun tersedia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Tumpukan sisa sampah di Kecamatan Kurau Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi kebenarannya.

Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah di antaranya Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Kondang, Kec. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 14 – 15 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme pengangkut sampah dan fasilitas TPA maupun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Kenaya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Sebubuk Besek, Desa Kuala dan Desa Kesam Kota Singkawang pada tanggal 16 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah hasil, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengolah sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pemanfaatan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya dibiarkan atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk pengelolaan sampah yang terkumpul atau model ecobrick. Sehingga sampah dari sampah dibuat lagi.

c. Identifikasi dan Verifikasi Kelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi dilakukan hampir di seluruh lokasi. Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan kelayan sebelumnya. Terdapat 30 kelayan dan KUK yang sudah diidentifikasi. Identifikasi tersebut antara yang berkontribusi untuk mendukung kegiatan BDL, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Sedangkan bank sampah pengepul sampah juga sempat diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan tersedia dan mudah melaut serta muatan pasokan juga sudah dilakukan. Kesimpulannya data dan informasi dari hasil identifikasi sosial potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan carnet BDL.

Gambar 3.1.11-5. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok kelayan sebelumnya dan hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya data kelompok kelayan di Daerah Aliran Hulu Sungai Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum teridentifikasi kualitasnya.

Gambar 3.1.11-6. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data survei di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah induk dan Bank Sampah unit, selain itu dilakukan koordinasi dengan Pengelola Kawasan Kota Singkawang dengan hasil banyak data kelompok nelayan di Sebubuk Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DPS Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gemasi BDL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gemasi ini dapa dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kemarinya dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih misalnya Gemasi BDL.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD.001.941] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (satumaret dan Januari 2024) yaitu Rp 75.460.934 atau 4,57% dari pagu anggaran sebesar Rp 808.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 3.1.1.2 Realisasi Anggaran IKU 12 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[4346.QDD.001.941] Alat Perlengkapan Gemasi Pemberdayaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp808.000.000	Rp 64.375.934 [4,57%]	-
TOTAL		Rp808.000.000	Rp75.460.934 [4,57%]	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gemasi BDL dengan melibatkan nelayan lokal, tokoh/ai daerah dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/Lembaga atau kualitas pengelolaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Deviasi Output – Bobot Penilaian 20%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 83 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ Nilai IKPA < 90 atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi dalang Old-SPAN Kementerian Keuangan pada laman https://spanlite.kemenkeu.go.id/spanlite/dashboard

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

Sasaran 12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024						Capaian 2023 (Pontianak)		Capaian 2023 (Kementerian)	
	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target RPJMN 2024	% Realisasi thd Target RPJMN	% Realisasi thd Target Kementerian	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Kementerian
93,02	Periode Capaian Semesteran		93,75				93		93	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPR, Kemenkeu 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan kepada pada triwulan IV dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya ditentukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Rencana Difan PNBL 2020 - 2024 yaitu nilai IKPA sebesar 98 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Hanya IKU ditentukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target pada Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 90 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung secara pengakuran semesteran.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dikarenakan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan indikator kinerja. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Upaya mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Bm pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Dengan begitu, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan diminimalisir permasalahannya.

6. Analisis atas Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis atas efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu/ target di Triwulan I sehingga NRR belum dapat dihitung. Perhitungan efektivitas efektivitas dilakukan dengan membandingkan RPDP, realisasi anggaran dan sasaran dari RPDP dengan realisasi anggaran. Upaya efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan, Revisi DIPA secara cepat, tepat, dan, sistem pelaksanaannya terhadap efektivitas berupa lembar/lembaran excel dan infografis untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan memecahkannya permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Revisi DIPA
b. Penyampaian Anggaran rampai sampai 01 Maret 2024 sebesar Rp 8.430.843.000 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.595.110.000.
c. Data Kontrak sebanyak 2 kontrak pada bulan Januari - Maret 2024
d. Pelaporan Bagian sampai setiap bulan
e. Penyelesaian LP selambat 2 hari
f. Penyelesaian Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari/Maret 2024
g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun mengikuti undangan eksternal sesuai rangka pelaksanaan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Komposisi IKK ini disusun dengan alokasi cloggaan dan Klasifikasi Rincian Output [2267.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2267.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan I (satu triwulan dari Jumlah 2024) yaitu Rp. 2.464.736.669 atau 28,75% dari pagu anggaran sebesar Rp 8.231.124.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pegawai Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang / Jasa.

Tabel 3.1.1.3.C. Realisasi Anggaran IKK I-4 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[2267.EBA.965.051] Layanan SDM	Rp 93.600.000	Rp 175.034 (0,29%)	-
2.	[2267.EBA.965.001] Layanan Kehumasan	Rp 82.000.000	Rp 7.430.339 (14,80%)	-
3.	[2267.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.297.000.000	Rp 1.901.845.732 (24,54%)	-
4.	[2267.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.733.444.000	Rp 1.070.732.871 (39,20%)	-
5.	[2267.EBA.965.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 153.680.000	Rp 40.537.797 (22,51%)	-
TOTAL		Rp 8.231.124.000	Rp 2.464.736.669 (28,75%)	-

C. Penyesuaian atau Triwulan II Tahun 2024

a. Revisi Halaman / DIPA (Kemenkeu/KPA)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Penyesuaian tagihan dan penyelesaian anggaran
d. Pelatihan DRO bulan April – Juni 2024

IKK 13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja terdiri atas Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Kontrol. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek manfaat adalah Evaluasi Kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemanfaat Kesenjangan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Kontrol adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai validasi informasi yang tertuang dalam dokumen RKA/KL terhadap relevansinya perkembangan kondisi kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek implementasi. Kategori capaian indikator kinerja anggaran sebagai berikut (3 (empat), antara lain:

a. Kategori Baik, apabila RKA > 90
b. Baik, apabila RKA >80 – 90
c. Cukup, apabila RKA >60 – 80

b. Kurang, apabila IKK <80 – 65
c. Sangat Kurang, apabila < 65

Capaian IKK 12 IKK BPDFL Pontianak Sebagai berikut

Tabel 3.1.12 Capaian IKK IS IKK BPDFL Pontianak

SKU-12	2.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata kelola Pemerintahan yang baik (Unit BPDFL Pontianak)
IKK-12	Nilai Kinerja Anggaran (Unit BPDFL Pontianak) (Nilai)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPDFL Pontianak		Renstra DJPPR 2020-2024	
	Target (Tw I)	Realisasi (Tw I)	% Capaian	Target (31 Des)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
93,82	Periode dalam tahunan			80		80		80	

Sumber data: BPDFL Pontianak dan DJPPR, tahun 2024

1. Capaian IKK Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat ditampilkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena sebelumnya tidak memiliki target triwulanan. Periode penyajian Tahun 2023 ditampilkan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I Tahun 2023 karena sebelumnya tidak memiliki target triwulanan. Periode pemadanan terhadap data ditampilkan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK tersebut terhitung dalam Renstra Ditjen PKN, 2020 – 2024 yaitu nilai IKK sebesar 80 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada masing-masing IKK ditetapkan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target capaian Renstra BPDFL Pontianak 2020-2024 yaitu 80 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPDFL belum dapat dibandingkan karena IKK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKK tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPDFL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan capaian-capaian yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran, adapun hal tersebut merupakan upaya tim untuk mengantisipasi masalah dan melindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis karena kita ada efisiensi pengunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga IKPSD belum dapat dihitung. Pemhungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPSD, realisasi anggaran dan selisih dari IKPSD

belum realisasi anggaran). Isinya efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyerapan Revisi DIPA dapat secara detil. Selain itu, pengoperasian aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya sehingga operator SMART DJA cukup kesenggap dapatkan rincian output. Rentangnya nilai yang berbasis aplikasi diakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Anjuran Perbaikan

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan berdukung terhadapnya RKA, yaitu input Dapalan Rincian Output (DRO) bulan Januari – Februari 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Koreksi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat koreksi anggaran pada Triwulan I.

9. Realisasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

Realisasi input Dapalan Rincian Output (DRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Kemajuan Tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKK 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar pemilaian sebagai bukti integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar pemilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (penguraian dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai penguraian adalah 40.
b. Adalah nilai garansi penguraian minimal 60% untuk semua area penguraian.
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 10,8, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 10,8 dan sub komponen Konsistensi WBK minimal 4,8.
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB dan PB) yang ditetapkan sesuai SK Inspektur KKP dan/atau Wagam Penghargaan yang diselenggarakan Inspektur KKP, jika pada tahun berjalan, telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2023 dengan hasil evaluasi sentral 93,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2023.

Tabel 3.1.12-6 Capaian IKU Ke-Nol VIBK BPSPL Pontianak

IKU 10	3.1.12. Nilai Capaian 10 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 10	Nilai Unit Kerja Berorientasi Hasil (UKE 2 BPSPL Pontianak (Nilai)								
Indikator 2022	Tahun 2022					Renstra BPSPL (Kumulatif)		Renstra DJPKL (Kumulatif)	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW IV 2022	% Realisasi thd Target TW I	Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target 2022	% Capaian thd Target Renstra
IKU 10	Terbaik Capaian Tahunan			78	-	80	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKL, Maret 2022

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 unit kerja yang berpredikat Mampu Wilayah Basis dan Kompeten Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai VIBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai IVBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala pertriwulanan dan pemantauan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga HP03 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan HP03, realisasi anggaran dan selisih dari HP03 dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dapat rapat internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan I ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan penunjang rencananya ini, yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari – Maret 2024.
b. Audit Internal persiapan sistem manajemen mutu pada tanggal 12 Februari 2024 secara hybrid di Kantor BPSPL Pontianak dan zoom meeting.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi KAK ini didukung dengan alokasi anggaran dan Realisasi Rincian Output [3947.994] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [3947.994] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan penunjang KAK ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.720.000 atau 6,23% dari pagu anggaran sebesar Rp 59.680.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang Alat dan Konsumsi Rapat.

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran KAK Ini Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	3947.994.WA.000.052 Layanan Pelaksanaan Administrasi Internal di Lingkungan KKP	Rp 59.680.000	Rp 3.720.000 (6,23%)	-
TOTAL		Rp 59.680.000	Rp 3.720.000 (6,23%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi internal sesi pembangunan Zona Integritas di BPSPL Pontianak.

IKK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas pada anggota profesi terhadap profesinya serta dalam pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melaksanakan tugas/kegiatannya. Indeks Profesionalitas ASN adalah alat ukur statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pelaksanaan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN kini yang diukur setiap tahun dari Skor 50/44. Sementara Jumlah Berdasarkan Peraturan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 34%
b. Kompetensi memiliki bobot 41%
c. Kinerja memiliki bobot 22%
d. Disiplin memiliki bobot 3%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal tertinggi yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat dari pembangunan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat pengisian

Kebutuhan diklat/in yang pernah diikuti selama 5 tahun terakhir. Kategori Profesi: IP ASN akan lebih

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Gandarung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Gandarung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran ketercapaian indikator tersebut diambil langsung dari dashboard IP ASN Kit7 yang bersumber Sistem Informasi Kepegawaian di laman https://kepeg.bkn.go.id.

Tabel 3.1.12-4. Capaian IKK 17 BPSDM, Pontianak

BPSDM	3.1.12. Terwujudnya Kejelasan 13 Juta Data Pemerintahan yang Berkualitas BPSDM, Pontianak								
IKK-17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSDM, Pontianak (Indeks)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Rencana RPJMN, Kemenpan RB		Rencana LLRK, BKN 2024	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target RPJMN 2024	% Realisasi thd Target RPJ	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target Rencana
80,84	Persepsi Capaian Kemampuan		80	-	-	76	-	76	-

Sumber data: BPSDM, Pontianak dan LLRKL, Tahun 2024

1. Capaian IKK Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Maret (K1) dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target (no data). Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PKRL sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kerangka Monitoring IKK tersebut tertuang dalam Renstra BPSDM, Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSDM Pontianak sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKK ini tidak lepas dari kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh setiap organisasi. Pengembangan kompetensi ini tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan pemahaman terkait Profesionalitas ASN, BerAKHLAK, Pemimpin.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis karena belum adanya realisasi penggunaan sumber daya dikarenakan baru terdapat target di Triwulan I sehingga IKK01 belum dapat dinilai. Pemahaman analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPIS, realisasi anggaran dan sarana dan IKK01 dengan realisasi capaian. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung terlaksananya IKK yaitu :

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai bulan Januari – Maret 2024.
b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari – Maret dan Monitoring Triwulan I 2024.
c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai bulan Januari – Maret tahun 2024.
f. Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Pelayanan Pandu Pemanfaatan Ruang Laut Direktorat PNL tanggal 31 Januari 2024.
g. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat PNL.
h. Mengikuti Bimbingan Teknis IGT Biota Laut Dilindungi yang diselenggarakan oleh Direktorat KKHP pada tanggal 6 – 7 Februari 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2047.BBC.994.051] Layanan Dukungan Manajemen Satker Internal. Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 18.904.000 atau 5,21% dari pagu anggaran sebesar Rp 364.482.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan rapat.

Tabel 3.1.12.7. Realisasi Anggaran IKK 12

No	Komponen/Sub-komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2047.BBC.994.051] Layanan Manajemen Satker Internal	Rp 364.482.000	Rp 18.904.000 (5,21 %)	-
TOTAL		Rp 364.482.000	Rp 18.904.000 (5,21%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu rekapitulasi dan monitoring pengembangan kompetensi pegawai, rekapitulasi dan monitoring kegiatan kinerja

Pegawai, terkadang dan monitoring Predikat Pegawai serta mengikuti peraturan, untuk, seminar ekasion nonformal yang diselenggarakan baik dari BPSPL Pontianak maupun dari pihak lain

BAB III. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Hasil PU SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak sh tang sonosa nan Pemen PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (30%). Hasil PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dievaluasi dari hasil Pemikiran Majelis Tim Sekretariat Dijen PKPL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1 (3-5. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	+80 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud good governance. Sistem kinerja efektif dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Individu.
A	+60 - 80	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja sepat memiliki perubahan dalam manajerial pemerintahan (pemerintah kecil, efektif) pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	+70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 3/4 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan nilai terwujudnya efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	+60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/2 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja.
CC	+50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan indikator-indikator

		memadai namun belum optimal dalam mendukung implementasi sistem manajemen kinerja di unit kerja.
0	<20.00	Kurang Dalam dan lampiran dalam AKIP kurang dapat dipercaya. Belum terimplementasi dalam manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di semua unsur.
0	0.00	Sangat Kurang Dalam dan lampiran dalam AKIP sama sekali tidak dapat dipercaya. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di semua unsur.

Capaian IKU 10 Sebagai berikut

Tabel 2.1.10.9. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

IKU 10	2.1.10. Jumlah Kegiatan 1) Tata Kelola Pemanfaatan yang Berkelanjutan (BPSPL Pontianak)								
IKU - 9	Jumlah IKU Eselon II Lingkup BPSPL Pontianak (Unit)								
Hasil Kerja 2024	Tahun 2024					Semester II 2024 (Pontianak)		Semester II 2024 (Unit Kerja)	
	Target Tahun	Realisasi Triw I	% Capaian	Target Triw 2024	% Capaian Triw Target Triw	Target 2024	% Capaian Triw Target 2024	Target 2024	% Capaian Triw Target Semester
09.3	Target Capaian Tahunan		01	-	-	-	-	03.73	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, Unit 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena kedunya tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran kedunya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tercantum tercantum dalam Renstra Ditjen PHKL 2020 – 2024 yaitu Nilai IKM SAKIP Lingkup Ditjen PHKL sebesar 83,75. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHKL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target jangka menengah IKU tercantum tertuang dalam Renstra BPSPL Denpasar 2020 – 2024 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92, Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan tercatat pada triwulan IV) dilakukan secara tahunan.

6. Analisis Penyebab Ketidaksesuaian/Kegagalan atau Keberhasilan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sangat sangat bergantung pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan nilai tercapai target di Triwulan I sehingga NIlai belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara IKPBS realisasi anggaran dan selisih dari IKPBS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengawasan kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pemrosesan bukti-bukti laporan serta data pendukungnya dengan memanfaatkan shortlink, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
b. Penyusunan Manual IKU Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring.
c. Sosialisasi Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Kegiatan lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 1 – 5 April 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
d. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024.

Gambar 2.1.15-1. Kegiatan Pemaparan, Pengaduan dan Pelaporan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dan realisasi Rincian Belanja [2267.BBO.992] Layanan Perencanaan dan Pengelenggaran dan [2267.BBO.993] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan I (akuntansi dan Januari 2024) yaitu Rp 29.000.000 atau 14,44% dari pagu anggaran sebesar Rp 224.500.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel xx. Realisasi Anggaran IKK 19 Triwulan I

Tabel 2.1.15-19. Realisasi Anggaran per 19 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2267.BBO.992] Layanan Perencanaan dan Penjaminan	Rp 97.000.000	Rp 17.727.364 (19,20%)	-
2.	[2267.BBO.993] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 169.480.000	Rp 12.111.000 (11,34%)	-
TOTAL		Rp 224.480.000	Rp 29.838.364 (14,44%)	-

C. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu monyusun laporan kinerja Triwulan I tahun 2024, pemantauan pengelola kinerja lingkup Eselon PKPL Triwulan I tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Eskalasi)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah oleh masing-masing pimpinan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKPL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan II Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik perhitungan disebutkan sangat mengkomunikasi dan menyimpulkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.12-11 Capaian IKU 12 BPSPL Ambon

IKU 12	3.1.12. Rasio Kegiatan 12 Tata Kelola Pemanfaatan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Indikator Kinerja	Tahun 2024					Renstra BPSPL (Dokumen)		Renstra DJPKL (Dokumen)	
	Target Thn I	Capaian Thn I	% Capaian	Target Thn 2024	% Capaian thd Target Thn	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
A	1	1	100	4	25	-	-	4	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKL, Mei 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 telah tercapai 1 (satu) dokumen (100%) dari target 1 (satu) dokumen. Capaian IKU 12 berupa Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor: B.90/BPSPL.3/TL.1/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bidok (kecamatan dan Triwulan IV Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan I Tahun 2023 adalah sama yaitu 1 (satu) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengan tercuang dalam Renstra DJPKL 2020 – 2024 yaitu total Historitas SPIP Efektif Pelabuhan Teluk Lada sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPKL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan jumlah 1 (satu) dokumen telah berkontribusi 25% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah semasa tercapai 100% dari target Triwulan I. Hal ini dimanfaatkan untuk disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKL tepat waktu setiap triwulan (minggu pertama setelah triwulan berakhir) maksimal tanggal 12.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-12 Efisiensi dari capaian IKU 12 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Anggaran Rupa (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
IKU 12. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	34.463.000	0	0	100

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya ini, yaitu:

a. Monitoring dan Evaluasi Form Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) Triwulan IV Tahun 2023 secara daring pada 18 Januari 2024.
b. Penyampaian usulan data personil Tim SPIP dari BPSPL Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.227/BPSPL.3/TU.110/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Penyampaian usulan Data Personil Tim SPIP DJPVKL.
c. Pembahasan Kelengkapan Surat Keputusan Satgas SPIP dan Tim SPIP Ditjen PHKL Tahun 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 secara daring.
d. Workshop SPIP dan Manajemen Risiko DJPVKL pada tanggal 13-14 Februari 2024 secara daring.
e. Pembahasan Laporan SPIP Bulan Februari pada tanggal 5 Maret 2024 secara daring.
f. Focus Group Discussion (FGD) dan Monitoring Pelaporan Manajemen Risiko (MR) Eselon Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PHKL pada tanggal 26 Maret 2024 secara daring.
g. Penyelenggaraan SPIP untuk Desember atau Triwulan IV telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.90/BPSPL.3/TU.140/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.
h. Penyelenggaraan SPIP Bulan Januari telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.378/BPSPL.3/TU.140/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember Tahun 2023.
i. Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari telah disampaikan melalui surat kepada BPSPL Pontianak Nomor B.689/BPSPL.3/TU.140/II/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [3267.002] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [3460.994] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung PDK 19 Triwulan I (Januari dan Januari 2024) yaitu Rp34.900.000 atau 3% dari pagu anggaran Rp34.900.000.

Tabel 3.1.19-19. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung PDK Triwulan I

No.	Komponen Output/Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3267.002.994.051.3] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP Unit)	Rp3.400.000	Rp0 (0%)	-
TOTAL		Rp34.900.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan I adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024, serta melakukan publikasi Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
b. Menyusun Laporan SPIP Bulan April, Mei, Juni dan Triwulan II Tahun 2024.

IKK 20. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang dibangkan oleh individu berkemitraan efektif sinergis untuk mengidentifikasi, menciptakan, menyebarkan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, disharuli dan digelolah. Penghitungan indikator ini berdasar dari gabungan 7 komponen, yaitu

Komponen kualitas data dalam aplikasi Informasi Manajemen Pengelolaan Hasil Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada laman https://portal.bkc.co.id/ibp. Penghitungan kualitas dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan nominal pada target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diraih adalah 4 poin sesuai kualitas sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pemenuhan yang dimaksud adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan (foto) berupa minimal 6 dokumentasi dengan memenuhi unsur 5W1H+ mendapatkan poin 2,5.
b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
c. Konten video/kompilasi dihasilkan berupa full edukasi atau sebagian dengan poin 2.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Kualitas/hari dinilai setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan kualitas dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan nominal minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin sesuai kualitas sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 4 dimulai dari eselon I.
- Sasaran PPE menyesuaikan data hasil rekaman capaian yang telah diisi pada setiap triwulan untuk dicek dan disahkan oleh KSI MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.19-14 Capaian IKU 32 BPBPL Pontianak

IKU-12	3.1.19. Sasaran Kegiatan 19 Tata Kelola Barang yang Kena Cukai (BPBPL Pontianak)
IKU-32	Persentase unit kerja Bidang BPBPL Pontianak yang memenuhi Sistem Manajemen Pengelolaan yang Terpercaya (%)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPBPL Pontianak		Renstra DJBC (2020-2024)	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target RK 2024	% Realisasi thd Target RK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
116,69	90	119,67	132,97	90	133	90	133	90	133

SUMBER DATA: BPBPL PONTIANAK (SIP, DJKPDN, SPAM, DSP)

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKU tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 114,44%, dari target nilai 90. Sehingga target pada Renstra BPBPL Pontianak maupun Renstra DJBC telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Lebih lanjut pada pada tahun 2023 target meningkat sebanyak 2 poin dari tahun 2022 yaitu dari 82 menjadi 84. Pada Triwulan I 2024 target IKP 84 dan telah tercapai 100% dari target triwulanan dengan persentase capaian 134,11%. Capaian IKP pada Triwulan I 2024 sebanding dengan capaian IKP Triwulan I 2023 yaitu 100%. Capaian IKU 32 disampaikan oleh Inspektur Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Lauh Nomor S-2070/DJPRL.1/TU.142/V/2024 tanggal 6 April 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPRL yang menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan yang Terpercaya Triwulan I Tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 yaitu 100% (105,70% dari target triwulanan), sedangkan capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu 100% (116,38% dari target triwulanan). Artinya terdapat penurunan capaian IKK pada Triwulan I 2024 sebesar 7,68%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHPL 2020 – 2024 yaitu Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengelolaan keanekaragaman sebesar 95%. Capaian 95%, maka pada Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian sebesar 104,11% dari target renstra 95%, Komentar.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 116,67% atau 104,11% dari target tahunan. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian aplikasi Portal KKP yang dipublikasi oleh pegawai lingkup BPDPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penyerapan sumber daya 100% karena pelaksanaan pendukung dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-16 Rincian dari capaian IKK 28 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian (%)	Realisasi Anggaran: Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
IKK 18. Laporan SPIP yang disusun (ngukup WKWK, Pontianak (Dokumen)	104,11	-	-	-	104,11

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK, yaitu:

a. Keputusan Pejabat Pungutama Tertentu (yang ditetapkan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam kontor portal Collaboration Office KKP

8. Realisasi Anggaran

Tidak tersedia anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan I yaitu keputusan Pejabat Pungutama Tertentu (yang ditetapkan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam kontor portal Collaboration Office KKP pada bulan April – Juni.

IKM 21, Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditanghapi dan Disempaikan (%)

Capaian IKU ini diraih dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan II Tahun 2022 s.d. Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara nyata (ditetapkan sebagai TL/HTAE) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan hasil rekomendasi tidak masuk dalam sistem maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Sekt/Ben PNL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerja sebesar 120%.

Tabel 3.1.12-19. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

IKU 19	3.1.12. Dokumen Capaian (1) Yang Kinerja Pemanfaatan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKU 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditanghapi dan Disempaikan (%)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Agency (UPPS, Kemenpan)		Canaan (UPPS, Kemenpan)	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Akhir 2024	% Realisasi thd Target Akhir	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Realisasi
100	100	100	100	100	-	80	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SJPPPL (Versi 2.0)

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024, telah dilakukan audit kinerja dan inspektorat Jenderal pada tanggal 5 Maret 2024. dari hasil audit tersebut diberikan jumlah rekomendasi sebanyak 6 temuan 6 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIDAK (100% ditindaklanjuti) sehingga persentase tingkat capaian sudah sebesar 100% dan target tercapai.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% dibandingkan sama dengan Capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100% dimanfaatkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Ditjen PHRL sebesar 90%. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PHRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti dan disempaikan sebesar 80%. Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra BPSPL Pontianak sebesar 125%.

5. Analisa Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut tidak terlepas oleh adanya monitoring melekat/rutin terhadap rekomendasi inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I, sehingga IKU5 belum dapat dihitung. Pencapaian analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara IKU5 realisasi anggaran dan serapan dari IKU5 dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kendala/ Permasalahan

Pada Triwulan I ini tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penerbitan rekomendasi hasil evaluasi atas audit Kinerja TA. 2022-2024 dengan nomor: T.1337/T.2.3/HP.115/11/2024 pada tanggal 8 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 9 (Sembilan) rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIDAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu melakukan monitoring rutin/berkala temuan inspektorat jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Pengelolaan Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang ditindaklanjuti adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan LHP maka tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.12-17 Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

IKU 22	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
Strategi	Pemantauan Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Capaian 2024/ Realisasi 2023		Capaian 2024/ Target 2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target RPJMN 2024	% Realisasi thd Target RPJMN	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target RPJMN
100	Terlaksa Capaian Tahunan			100	-	100	-	47	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKTI, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum tersedia progres capaian pada Triwulan I.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHKL 2020 – 2024 yaitu tidak terdapat rekomendasi temuan pengawasan eksternal oleh BPK atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHKL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSDM Kemenaker 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHKL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan dan Peningkatan Prasarana Kinerja yang Memenuhi Syarat yang Telah Dilakukan

Dalam IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tersedia target di Triwulan I sehingga IKNS belum dapat dihitung. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPS, realisasi anggaran dan selisih dari IKPS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum tersedia progres capaian pada Triwulan I.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang pencapaiannya IKU ini di triwulan II.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Analisis tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
b. Field Evaluation dan Physical Check pemeriksaan fisik dan uji substantif, yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap inflasi kesesuaian bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada point hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPVPL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1.12-15 Kategori Nilai Efektifitas Bantuan Pemerintah

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	**Memuaskan** Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	**Efektif** Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemeliharaan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	**Cukup Efektif** Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk memperkuat pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	**Kurang Efektif** Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya memenuhi sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	**Tidak Efektif** Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak memenuhi seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dievaluasi/dikaji untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Rujukan IKM 23 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.13-15 Capaian IKU Tl BPSPL Bontang

IKU 19	3.1.13. Nilai Kepatuhan 10 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Bontang								
IKU 22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Pemerintah Inghup BPSPL Pontianak (%)								
Indikator Kinerja	Tahun 2024				Renstra BPSPL Bontang		Renstra DJPPI, Ditjen KPDH		
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target Tw I	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	73,9	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPI, Kinerja 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi dampak KONTAK yang telah dilakukan dan melakukan koordinasi rencana dengan Monitoring dan Evaluasi KSDAHE.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target / indikator. Periode pelaporan keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra DJPPI 2020 – 2024 yaitu Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PHKL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat efektivitas kegiatan berbasis pemerintah lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,9% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan I.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NRSS belum dapat dihitung. Pembangan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NRSS realisasi anggaran dan serapan dari NRSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan kelompok masyarakat yang membantu bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dipersiapkan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terhadap IKU, yaitu

a. Melakukan monitoring terhadap Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dan BPSPL Pontianak
b. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah dicairkan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKH ini didukung dengan alokasi anggaran dan Klasifikasi Rincian Output [Sbsl.0]BM.001] Kelompok Masyarakat Pengguna Konservasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKH ini pada Triwulan I (satu/Kwartal dan Januari 2024) yaitu Rp 8.863.437 atau 18,68% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.450.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.19-08. Realisasi Anggaran IKH (S Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[Sbsl.0]BM.001.952] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.450.000	Rp 8.863.437 (18,68%)	-
TOTAL		Rp 47.450.000	Rp 8.863.437 (18,68%)	-

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Pencapaian kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu memfasilitasi kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IBM 24. Nilai Pengawasan Internal Kawasan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kawasan Internal adalah Audit Kawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kawasan Internal atas pengelolaan aset dan/atau kegiatan pengelola aset. Pengawasan kawasan internal yang meliputi ruang lingkup pada IKK dimana Eks Unyan dan PKJ melakukan pengawasan kawasan internal meliputi: Pengawasan sistem kawasan Internal; Pengawasan Pengelolaan Aset; Audit dan Pengawasan penyelamatan aset serta internal. Nilai pengawasan kawasan internal BPSPL Pontianak akan dilaksanakan oleh Eks Unyan dan PKJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kawasan yang dilakukan dan penilaian terhadap objek Pengawasan kawasan.

Tabel 3.1.19-01. Kategori Nilai Pengawasan Kawasan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>65 - 70
CC	Cukup	>60 - 65

C	Kurang	46 - 60
D	Sangat Kurang	0 - 45

Tabel 3.1.19-03 Capaian IKU Sekretariat Direktorat

IKU-13	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-24	Nilai Pengawasan Internal (Kendali Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Uraian IKU	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI, 2020-2024	
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (%) 2024	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan		60	-		-		-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPI, Tahun 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Pembandingan capaian kinerjanya dilakukan secara tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKL 2020 – 2024 Ditjen PPKL. Tahun 2024 belum dapat dilakukan dengan Renstra Ditjen PKL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PKL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis ketercapaian/kegagalan atau peningkatan/penurunan, kal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terkait efisiensi penggunaan sumber daya perlu dalam penyelesaian Renja OPA dapat dilakukan secara detail.

7. Kendala/ Permasalahan

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pengukuran/ kegiatan pengukuran terkait IKM tersebut.

6. Realisasi Anggaran

Komposisi KRI ini disusun dengan alokasi anggaran dan Klasifikasi Rincian Output [2047.EBA.962.001] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KRI ini pada Triwulan I (kumulatif) dan Januari 2024 yaitu Rp 0.943.427 atau 10,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.499.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tabel 3.1 12-06 Realisasi anggaran sd Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2047.EBA.962.001] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 33.343.000	Rp 1.900.000 (5,22%)	-
	TOTAL	Rp 47.499.000	Rp 1.900.000 (5,22%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU di di triwulan II.

3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar indikator kinerja cluster secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU bentuk kolaborasi masyarakat yang dilaporkan, semua unit kerja belum memiliki capaian dikarenakan penyerahan bantuan dijadwalkan akan dilakukan pada Triwulan II. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstruktur oleh BPSPL Pontianak tertinggi yang ke kedua diantara unit kerja lain dengan nilai sebesar 116,67% sementara unit kerja lain mendapatkan nilai 133, 33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor 69 DIPA 032.07.2.477439/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.499.113.000. Realisasi anggaran disampaikan dan dipantau secara [illegible]. Pada Triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 3.603.053.000 atau 19,43% dari pagu anggaran. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 981.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,84%. Adapun pagu dan realisasi per kegiatan sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 / 3.1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Sisa (Rp)
1.	[2368] Pemfungsian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PHP	5.670.359.000	559.440.944	9,87	380.000.000
2.	[2369] Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	150.000.000	33.871.000	22,57	-
3.	[2369] Pengelolaan Ruang Laut	RM dan PHP	1.100.000.000	134.133.940	12,87	-
4.	[2367] Dukungan Manajemen Mutu Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10.671.807.000	2.876.477.994	26,97	-
6.	[2366] Pengoperasian dan Pemeliharaan Kapal/alat Apung dan Pelabuhan Perikanan	RM	800.000.000	64.979.884	4,87	-
Total			**18.392.113.000**	**3.603.053.000**	**19,43**	

Sumber data: Aplikasi SMPP/RI BPSPL Pontianak per 31 Maret 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai: merupakan kompensasi (dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai tingkat pemerintah oleh yang berlaku dilakukan pegawai negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang: merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja pemeliharaan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional: merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang non Operasional: merupakan pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam jangka pendek untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi suatu satuan kerja dan umumnya pengadaan yang bersifat sistemik.
5. Belanja Modal: pengeluaran untuk pembayaran pembelian aset dan atau penambahan nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memiliki batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran DPDPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dimuatkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.150-2.1.12-5: Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Triwulan	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	521 Pegawai	Triwulan I	4.297.300.000	1.022.000.384	24,04
4.	522 Barang	Triwulan I	11.828.113.000 (200.000.000*)	2.037.396.000	17,62
5.	523 Modal	Triwulan I	760.000.000	60.400.000	7,92

(*) Belum Anggaran
Sumber Data : DPDPL Pontianak (Up Date Dimasyan per tanggal 31 Maret 2022)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Februari/Triwulan I) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 23%%, untuk belanja barang sebesar 61,89% dan untuk belanja modal 4,04%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I sebesar Rp 1.022.000.384 (24,04%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (suami/istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan Lainjangan untuk PNS yang meliputi pada pembayaran gaji PNS yang makan dan tunjangan kinerja PNS.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan I sebesar Rp 2.037.396.000 atau 17,62% dari pagu anggaran Rp 11.828.113.000 (16,17% revisi). Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, belanja perjalanan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kendaraan, perjalanan jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal Triwulan I sebesar Rp 60.400.000 (7,92%). Belanja modal digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya. Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 unit dan Penggantian Uang Persediaan (PUP) untuk Kepentingan Belanja Modal.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Triwulan I tahun berjalan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 ini diantaranya melalui SPIRE MSH-KM dan aplikasi simantab sebesar 114% dengan kategori sangat baik. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar Rp 3.600.000.000 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.000.113.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 200.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,84%, untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan SPIO yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 108%.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terintegrasi dengan capaian 116,67%.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindak Lanjuti/ya telah Ditindaklanjuti dengan capaian 100%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan I tercapai secara kesatuhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 10 indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang dinilai tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka suksi anggaran yang telah diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi PADH sampai dengan pencantuman gelar pendidikan, bagi ASN yang telah melaksanakan Tugas Belajar.
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk lebih berfokus pada hasil dengan melakukan pendampingan secara intensif pada kelompok penerima bantuan dalam rangka pelaporan pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti yaitu telah dilakukan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan yang telah ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan sinergitas diantara seluruh unsur di BPSPL Pontianak, koordinasi dan komunikasi baik dengan Dinas Pengelolaan Ruang Laut atau dengan stakeholder di daerah agar selalu dijaga hubungan ditingkatkan lebih sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan bisa sebagai pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor S-1123/SPSPL.2/TU.140/10/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyampaian Capaian Presentasi Satuan Kerja UPT Lingkup SUPER, yang menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor 2696.01.23/TL/TLA2/01/2024.

Contents

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Unggul (BPSP) Pontianak 70

3.2. Realisasi Anggaran 87

BAB IV PENUTUP 89

4.1. Kesimpulan 89

4.2. Rekomendasi 89

4.3. Tindak Lanjut 89

LAMPIRAN 100

Gambar 3.1.121. Kegiatan Pemrosesan, Pengujian dan Pengemasan Kimia 83

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKU 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 70
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKU 14 Triwulan I 70
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKU 15 Nilai BPSPL Pontianak 70
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKU 16 Nilai LKIM BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKU 16 Triwulan I 74
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak 77
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKU 17 78
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PNI SAKIP 79
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak 80
Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKU 18 Triwulan I 83
Tabel 3.1.13-11. Capaian IKK 19 BPSPL Pontianak 83
Tabel 3.1.13-12. Efisiensi dari capaian IKK 19 Triwulan I 83
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran kegiatan Pendukung IKK 19 pada Triwulan I 84
Tabel 3.1.13-14. Capaian IKK 20 BPSPL Pontianak 86
Tabel 3.1.13-15. Efisiensi dari capaian IKK 20 Triwulan I 86
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKK 21 BPSPL Pontianak 87
Tabel 3.1.12-17. Capaian IKK 22 BPSPL Pontianak 88
Tabel 3.1.13-18. Kategori Nilai Akuntabilitas Kemitraan Konservasi 90
Tabel 3.1.13-19. Capaian IKK 23 BPSPL Pontianak 91
Tabel 3.1.12-20. Realisasi Anggaran IKK 23 Triwulan I 92
Tabel 3.1.13-21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 93
Tabel 3.1.12-22. Capaian IKK 24 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKK 24 Triwulan I 94
Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I 97
Tabel 4.3-1. Rekapitasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023 99

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, meskipun terdapat beberapa belum dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan pada Triwulan I tahun tersebut. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu pada perjanjian kinerja/PPRB tidak ada sasaran strategis, sasaran 1 hingga dengan kategori baik/hijau. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar Rp 3.658.803.906 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.836.113.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 280.800.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,94%, untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan SKO yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 100%.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terkelola dengan capaian 116,67%.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindaklanjuti Tindak Lanjutnya telah Diselesaikan dengan capaian 100%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan I tampaknya secara keseluruhan belum tercapai dengan persentase capaian 100%. Perlu adanya target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena setidaknya 10 indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengoptimalkan untuk proses revisi anggaran dalam rangka memenuhi anggaran yang dibutuhkan.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kelulusan pelatihan pada bidang bimbingan teknis dan seminar.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti perlu telah dilakukan koordinasi secara intP dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan soliditas diantara sesama unsur di BPSPL mulai dari koordinasi dan komunikasi baik dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut atau dengan Stakeholder di daerah agar semua dapat berjalan dengan lancar sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Penyerahan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor S-1123/SPSPL.2/TU/140/III/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyerahan Capaian Prasyarat Satuan kerja UPT Lingkup DJPSTL yang memenuhi Dalam Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Penerimaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor 2696.01.23/IT.LP-L4/III/2024.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
PONTIANAK
JALAN RADEN WIJAYA NO. 1, KEL. TALANG MAS, KEC. PONTIANAK BARAT, PONTIANAK 78116
TELP. FOR. (0561) 736002, 736003, FAKSIMILE (0561) 735400
LAMAN www.bpsdpl.id

Nomor	:	B.1102/BPSPL.2/TU.140/IV/2024	19 April 2024
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024	

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di Kota Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2074/SJ/PKRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 hal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak pada tautan http://bit.ly/3WXfzz.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sekretaris kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pontianak,

Ditandatangani secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKT 10041
TELEPON (021) 3513670 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3522307
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL: ...@kkp.go.id

Nomor	: B.2070/DJPKRL.3/TU.140/X/2024	4 April 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Permohonan Copasar Presentasi Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tercantum Triwulan I Tahun 2024	

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengisian capaian kinerja Presentasi Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tercantum Triwulan I Tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian dan konfirmasi *posting* berbagi pengetahuan melalui laman https://pengetahuan.kkp.go.id dengan target 3 (tiga) dan dapat melebihi yang dapat diinput adalah 4 (empat) per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
   a. Dokumentasi kegiatan/ **laporan/pemberian rekomendasi/publikasi/artikel** yang diunggah dan disimpan tidak dan inovasi/ cerita/ opini/ menanyakan sesuatu (what, where, when, who, why, and how) memperoleh **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Agen Pagi** tidak termasuk apabila ada;
   b. Berbagi informasi berupa soft/e-book, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan memperoleh **bobot poin 1**; dan/atau
   c. Berbagi informasi berupa video atau **campaign** sesuai tema inovasi dan Perkuatan sesuai tugas dan fungsi jabatan memperoleh **bobot poin 2**.

   Target 3 (tiga) poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori pembobotan maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan rumus/cara sebagai berikut:

$$\text{Kuantitas} = \frac{\text{Jumlah poin terpublish yang valid}}{\text{Jumlah target poin terpublish yang valid}} \times 100\%$$

3. Hasil pengisian laman Modul Manajemen Pengetahuan Terlampir Triwulan I disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Kepala Biro Umum

Ditandatangani secara Elektronik

Kuswantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.2870/DJPRL.1/TU.140/4/2024
Tanggal : 4 April 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Ternate
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Donggala

a.n. Direktur Jenderal PHKL
Kasubdit. Dilgin PHL

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Lampiran 2 Surat
Nomor : B.2078/UPR/KL.570/4/2024
Tanggal : 4 April 2024

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPPKL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terdaftar Triwulan I Tahun 2024

No.	Satker	Target (%)	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1	BPSPL Padang	3	133,33	-	-	-	133,33
2	UKPPK Palembang	3	133,33	-	-	-	133,33
3	UPSPL Serang	3	133,33	-	-	-	133,33
4	BPSPL Pontianak	3	116,67	-	-	-	116,67
5	BPSPL Makassar	3	133,33	-	-	-	133,33
6	BPSPL Denpasar	3	133,33	-	-	-	133,33
7	BKKPN Kupang	3	133,33	-	-	-	133,33
8	UPSPL Sorong	3	133,33	-	-	-	133,33

B. Daftar Nilai Riwi per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPPKL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terdaftar Triwulan I Tahun 2024

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang	Keterangan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

2. UKPPK Palembang

UKPPK Palembang	Keterangan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

3. UPSPL Serang

UPSPL Serang	Keterangan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata – Rata Nilai MP TW I	133,33%

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak	Kesimpulan
Target	1
Realisasi	2,3
Skor	115,67%
Nilai IMP	115,67%
Rata – Rata Nilai IMP TW I	115,67%

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar	Kesimpulan
Target	1
Realisasi	1
Skor	133,33%
Nilai IMP	133,33%
Rata – Rata Nilai IMP TW I	133,33%

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar	Deskripsi	Kesimpulan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai IMP		133,33%
Rata – Rata Nilai IMP TW I		133,33%

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Kesimpulan
Target	1
Realisasi	1
Skor	133,33%
Nilai IMP	133,33%
Rata – Rata Nilai IMP TW I	133,33%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Kesimpulan
Target	1
Realisasi	1
Skor	133,33%
Nilai IMP	133,33%
Rata – Rata Nilai IMP TW I	133,33%

a.n. Direktur Jenderal PRL
Sekretaris Ditjen PRL

Ditandatangani Secara Elektronik

Kusdiantoro

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 6130/JKP 6130
TELEPON (021) 3513300 (LANGS), FAKSIMILE (021) 3520530
LAMAN www.kkp.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
RTA/BEREDAR KASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR : /IRJEN-2/ DATUPL/ADM/2020

Pada hari ini, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua puluh**, telah dilakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan pada LHA/LHR/SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL (SPHP) ADM/2020.

Diterima oleh :
Nama/Jabatan

1. Nama: Ir. Yoga Antoni Boediyo, M.M.
   NIP. 19670313 200003 1004
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Kepala Bagian Tata Usaha

Dari Pemantauan :

1. Nama: Ir. Yoga Antoni Boediyo, M.M.
   NIP. 19670313 200003 1004
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Kepala Bagian Tata Usaha
2. Nama: Tengku, S.H.I., S.H., M.M. Dwi
   NIP. 19801005 200501 2001
   Jabatan : Pelaksana Tugas
3. Nama: Ida Ayu Mahendra, S.H., M.A.
   NIP. 19700125 200003 2002
   Jabatan : Auditor Ahli
4. Nama: Wendawasi Kasdy S. S.H., LL.M.
   NIP. 19721021 199903 2002
   Jabatan : Auditor Ahli
5. Nama: Ahmad Sururie R., Se. ak.
   NIP. 19812019 200801 1002
   Jabatan : Auditor Ahli
6. Nama: Nina agung S., SE. ak., CA
   NIP. 19820126 200912 2001
   Jabatan : Auditor Ahli
7. Nama: Arifian, S.H., M.H.
   NIP. 19820220 201412 1001
   Jabatan : Auditor Ahli
8. Nama: Ida Fitriati, S.H.
   NIP. 19830417 200912 2002
   Jabatan : Auditor Ahli
9. Nama: Sungkono, S.H., M.H.
   NIP. 19810617 200912 1002
   Jabatan : Auditor Ahli
10. Nama: [illegible]
    NIP. 19811220 200912 1001
    Jabatan : Auditor Ahli
11. Nama: [illegible]
    NIP. 19840102 201412 2002
    Jabatan : Auditor Ahli
12. Nama: [illegible]
    NIP. 19850101 201412 1001
    Jabatan : Auditor Ahli

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MENTERI MENEGGA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4139 JKT 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3520038
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : /IJ/C.2/ /2015/PL-I/DITJEN
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas / dokumen
Hal : Permintaan Bahan Pelaksanaan

15 Mei 2015

Yth. Kepala Kantor Pengelolaan [illegible]
di [illegible]

Dengan ini disampaikan bahan pelaksanaan [illegible] Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan [illegible] untuk dapat [illegible] sebagai berikut:

NO	URAIAN	[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	
A	[illegible]			
	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B	[illegible]			[illegible]
	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C	[illegible]			[illegible]
	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] dan [illegible] dapat [illegible].

a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Ir

[illegible]
NIP. [illegible]

BPSPL PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Djoeff Irvan Tarsina Arkadifa, S.T., M.Si.

Penyusun:

Gradiano Raymond P, S.Pi, M.Si.

Jamal Fathu Rohman, S.Si

Ira Fitriana Indrayani, S.Si

Ratih Tiburiana Dhani, S.Kel.

Kontributor:

Sekretariat Umum BPSPL Pontianak

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai bersama. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LK) BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LK ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai sarana evaluasi perencanaan dan kebijakan berikutnya sehingga tercapai Indonesia dan Asing Lain. Dihasilkan program dan kegiatan di Balai BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder kami.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 15 Juni 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Syaiful Iwan Taruna Ahadi,ST., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Kotak Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui https://kinerja.kkp.go.id. Proses pemfungsian kinerja memperhatikan Manual IKU dan Petunjuk Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses pemfungsian dilakukan oleh para pengelola kinerja untuk capaian strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudahan aplikasi Kinerjaku, hasil Perjanjian Kinerja Strategis (KPMS) IKU-IKM atau Hasil Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 185,34% (Sangat Baik = Baik).

Pencapaian Indikator Kinerja BPSPL Pontianak yang fokus pada Triwulan I ialah:

1. Penjaringan Bantuan kompak dengan capaian sebanyak 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar 93,55 dari target sebesar 83 sehingga tercapai 112,67%.
3. Nilai IP 4DA dengan capaian sebesar 86,10 dari target sebesar 85 sehingga tercapai 102,44%.
4. Laporan SPIP yang disusun Unggul BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai 100%.
5. Persentase Unit Kerja Unggul BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terkandar dengan capaian 116,67 dari target 84 sehingga tercapai 138%.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Unggul BPSPL Pontianak yang Ditindaklanjuti Tindak Lanjutnya telah Ditangguhkan dengan capaian 100% dari target 93% sehingga tercapai 108%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 10.096.112.000. Realisasi anggaran pada Triwulan I berdasarkan aplikasi Simpan per tanggal 03 Juni 2024 yaitu Rp 6.015.864.431 atau 44,32% dari pagu tahun. Berdasarkan hasil dari beberapa pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Harapan, tercapai kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Kabupaten Kepulauan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Kecamatan Kepulauan Kecamatan Kepulauan Kecamatan

Upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi P ASN melalui pengumpulan sertifikat kelulusan/keahlian pegawai pada tingkat pimpinan tinggi, dan administrasi.
2. Melakukan koordinasi dengan Inspektur Kanwil Kemenkumham dan Biro Perencanaan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perbintar Kawasan Konservasi di Pelabuhan Dumai.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan I tahun 2024 yaitu telah mengusulkan untuk revisi nomor anggaran pada RKA-DIPA Anggaran untuk semua pada bulan Juni dan berubah menjadi 300.001. Selain itu, peningkatan kualifikasi P ASN melalui kelulusan/keahlian pegawai tanam tingkat, pimpinan tinggi dan sertifikat juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat.

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vii
Daftar Tabel viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 1
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Kewenangan SDM 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 4
1.4.1. Potensi 4
1.4.2. Permasalahan 5
1.5. Data Kelautan 6
1.6. Sistematika Penyajian 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 9
2.1.1. Visi 9
2.1.2. Misi 9
2.1.3. Tujuan 10
2.1.4. Kebijakan Strategis 10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 14
2.3.1. Kumulatif 14
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 19
3.1.1. Capaian Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak 21
3.1.2. Capaian Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlatih dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Dan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 34

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 29

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di lingkup Kerja BPSPL Pontianak ... 33

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usaha pemafaatan kawasan konservasi di lingkup daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 39

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 meningkatnya pelaksanaan konvensi dan komitmen internasional, regional, dan kemitraan untuk melindungi konservasi yang efektif di lingkup Kerja BPSPL Pontianak. ... 41

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pembinaan Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak ... 53

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Kesekelegahan Hajat Perairan yang Dilindungi dan atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 58

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Kesekelegahan Hajat Perairan yang Di Ke Kelola di Wilayah BPSPL Pontianak ... 69

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di lingkup Kerja BPSPL Pontianak ... 71

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola dalam rangka Pengelolaan Pemanfaatan di Wilayah BPSPL Pontianak 73

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Kelembagaan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... 112

3. 2. Realisasi Anggaran ... 114

BAB IV PENUTUP ... 116

4.1. Kesimpulan ... 116

4.2. Kesimpulan ... 116

4.3. Tindak Lanjut ... 116

LAMPIRAN ... 117

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 3
Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 2.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Berikan Aplikasi Kinerja) 18
Gambar 2.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II 19
Gambar 2.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II 20
Gambar 2.1.1-1. Hari Cegoan Tahun 2022 dan Tahun 2023 23
Gambar 2.1.2-1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya 25
Gambar 2.1.2-2. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya 26
Gambar 2.1.2-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 27
Gambar 2.1.2-4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang 28
Gambar 2.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 29
Gambar 2.1.2-6. Dokumentasi pengumpulan dan pemilahan sampah di Tanah Laut 29
Gambar 2.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Kotawaringin 30
Gambar 2.1.2-8. Realisasi Anggaran KU II Triwulan II 31
Gambar 2.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPPL 32
Gambar 2.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 33
Gambar 2.1.3-3. Sosialisasi KKPPL 33
Gambar 2.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran KU II Hingga Triwulan II 34
Gambar 2.1.4-1. Logo Peringatan Bhinneka 36
Gambar 2.1.4-2. Pengamatan Populasi Polen 38
Gambar 2.1.4-3. Survei Kualitas Air Kawasan Mangkalam Hulu 39
Gambar 2.1.4-4. Survei Pendaratan Ikan Ekosistem Penting 39
Gambar 2.1.4-5. Survei Sosial Ekonomi 40
Gambar 2.1.4-6. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi 40
Gambar 2.1.4-7. Grafik Pengetahuan Jenis Ikan Dilindungi 41
Gambar 2.1.4-8. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi 41
Gambar 2.1.4-9. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 43
Gambar 2.1.4-10. Realisasi Anggaran Kumulatif KU II Hingga Triwulan II 43
Gambar 2.1.5-1. Fasilitasi Usulan Penetapan KKPDA di Kalimantan Utara 45
Gambar 2.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif KU II Hingga Triwulan II 46
Gambar 2.1.6-1. Pendandatanganan Kesepakatan Kerja Sama 48
Gambar 2.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif KU II Hingga Triwulan II 49
Gambar 2.1.6-3. Pemandatanganan Nota Kesepakatan Kolaborasi 51
Gambar 2.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif KU II Hingga Triwulan II 53
Gambar 2.1.7-1. Grafik Capaian Sertifikasi KOMPAK Triwulan II Per Tahun 54
Gambar 2.1.7-2. Sarana Terima Sertifikat KOMPAK 55
Gambar 2.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II 56
Gambar 2.1.8-1. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat 60
Gambar 2.1.8-2. Dokumentasi Pelepasan Bibit Tukik 61
Gambar 2.1.8-3. Grafik Penangkaran Bibit Tukik 61
Gambar 2.1.8-4. Sosialisasi Bibit Ikan Napi 62
Gambar 2.1.8-5. Simbah Penangkaran Bibit Dilindungi 62
Gambar 2.1.8-6. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Agendika di PPN Pemangkat 63
Gambar 2.1.8-7. Dokumentasi pengukuran 64
Gambar 2.1.8-8. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Agendika di TP Sungai Kakap 65
Gambar 2.1.8-9. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Agendika PPI Nanggar 66
Gambar 2.1.8-10. Dokumentasi Pengukuran 66

Gambar 3.1.8.11. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 69
Gambar 3.1.9.1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi 80
Gambar 3.1.9.2. Pemeriksaan SAJ 80
Gambar 3.1.9.3. Grafik Pendapatan DHBP 10
Gambar 3.1.11.1. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 73
Gambar 3.1.11.1. Bimbingan Teknis di Kab. Kutai Raya 73
Gambar 3.1.11.2. Grafik data pengumpulan sampah 74
Gambar 3.1.11.3. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan 77
Gambar 3.1.11.4. Grafik data pengumpulan sampah 77
Gambar 3.1.11.5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 78
Gambar 3.1.11.6. Grafik data pengumpulan sampah 78
Gambar 3.1.11.7. Bimbingan Teknis di Kota Samarinda 79
Gambar 3.1.11.8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 79
Gambar 3.1.12.1. Nilai IKPA Tahun 2024 82
Gambar 3.1.12.2. Tren Nilai IKPA 83
Gambar 3.1.12.3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 83
Gambar 3.1.12.4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 89
Gambar 3.1.12.5. Tren IP UMK 91
Gambar 3.1.12.6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 91
Gambar 3.1.12.7. Kegiatan Diseminasi AKIP 94
Gambar 3.1.12.8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 97
Gambar 3.1.12.9. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 107

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 3.1.1.1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 33
Tabel 3.1.1.2 Progres Capaian IKU#01 BPSPL Pontianak Triwulan II 33
Tabel 3.1.2.1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 34
Tabel 3.1.2.2. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan SDL di Kab. Kubu Raya 35
Tabel 3.1.2.3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan SDL di Kota Singkawang 37
Tabel 3.1.2.4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan SDL di Kab. Tahkh Laut 38
Tabel 3.1.2.5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan SDL di Kota Ba Ripaban 39
Tabel 3.1.3.4. Realisasi anggaran IKU 3 Triwulan II 33
Tabel 3.1.3.1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 41
Tabel 3.1.3.2. Jumlah Sertifikat Teknis (KKP), Triwulan II 42
Tabel 3.1.3.3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II 43
Tabel 3.1.4.1. Jumlah reklamasi, bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria 44
Tabel 3.1.4.2. Pemfungsian Hasil Aksi EVKA 45
Tabel 3.1.4.3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 46
Tabel 3.1.4.4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 54
Tabel 3.1.4.5. Hasil Pengambilan Kompetensi Pokja 56
Tabel 3.1.4.6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mangkam Hulu 59
Tabel 3.1.4.7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II 42
Tabel 3.1.5.1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 44
Tabel 3.1.5.2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II 45
Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 47
Tabel 3.1.6.3. Realisasi anggaran kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II 48
Tabel 3.1.6.3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 50
Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 52
Tabel 3.1.7.2. Realisasi IKU 8 Triwulan II 55
Tabel 3.1.7.3. Realisasi IKU 9 Triwulan II 55
Tabel 3.1.8.1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 57
Tabel 3.1.8.2. Realisasi IKU 10 Triwulan II 54
Tabel 3.1.9.1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 64
Tabel 3.1.9.2. Realisasi IKU 11 Triwulan II 70
Tabel 3.1.10.1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak 71
Tabel 3.1.10.2. Capaian IKU 13 Triwulan II 72
Tabel 3.1.11.1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.11.2. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan SDL 73
Tabel 3.1.11.3 Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan SDL di Kota Singkawang 74
Tabel 3.1.11.4. Jumlah nelayan yang terlibat pelaksanaan SDL di Kab. Tahkh Laut 77
Tabel 3.1.11.5. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan SDL di Kota Ba Ripaban 78
Tabel 3.1.11.5. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II 79
Tabel 3.1.12.1. Capaian IKU 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 81
Tabel 3.1.12.2. Akuntasi Anggaran IKU 14 Triwulan II 84
Tabel 3.1.12.3. Capaian IKU 15 IKPA BPSPL Pontianak 85
Tabel 3.1.12.4. Capaian IKU 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak 88
Tabel 3.1.12.5. Akuntasi Anggaran IKU 16 Triwulan II 89

Tabel 3.1.12.6. Capaian IKK 17 BPSFL Pontianak 90
Tabel 3.1.12.7. Realisasi Anggaran IKK 17 92
Tabel 3.1.12.8. Kategori Hasil IKK Sakip 93
Tabel 3.1.12.9. Capaian IKK 18 BPSFL Pontianak 94
Tabel 3.1.12.10. Realisasi Anggaran IKK 18 Triwulan II 97
Tabel 3.1.12.11. Capaian IKK 19 BPSFL Pontianak 98
Tabel 3.1.12.12. Efisiensi dari capaian IKK 19 Triwulan II 99
Tabel 3.1.12.13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK 19 pada Triwulan II 99
Tabel 3.1.12.14. Capaian IKK 20 BPSFL Pontianak 100
Tabel 3.1.12.15. Capaian IKK 21 BPSFL Pontianak 102
Tabel 3.1.12.16. Capaian IKK 22 BPSFL Pontianak 104
Tabel 3.1.12.17. Kategori Nilai Kinerja Bantuan Pemerintah 105
Tabel 3.1.12.18. Capaian IKK 23 BPSFL Pontianak 106
Tabel 3.1.12.19. Realisasi Anggaran IKK 23 Triwulan II 107
Tabel 3.1.12.20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 108
Tabel 3.1.12.21. Capaian IKK 24 BPSFL Pontianak 109
Tabel 3.1.12.22. Realisasi Anggaran IKK 24 Triwulan II 109
Tabel 3.1.13.1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSFL Pontianak dengan Unit Kerja Lain 111
Tabel 3.25.1.13.1 Realisasi Anggaran BPSFL Pontianak Triwulan II 113
Tabel 3.7.1.22.3.1.13.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022 114

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di lingkung Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemanfaat yang berorientasi pada pemberdayaan bagi masyarakat, dengan cara untuk mengkoordinasi output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dilakukan pemanfaat dan dapat berwujud barang, bentuk dari jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya barang, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 44/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2020 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendayagunaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sejalan dengan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2020, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan kawasan konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kecamatan Kotak Kertanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan pengendalian pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas pengangkutan jenis ikan yang dimuliakan;
f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

g. Pelatihan pelestari hutan pesisir dan laut;
h. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan para-pihak kunci; dan
i. Pelaksanaan evaluasi kebutuhannya.

Disamping itu, selama pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efektif dan efisien antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
c. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan kekonteksan tertentu yang daerah pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan keberadaan spesifik; Kolektif dan breeding; Mengunyai nilai dan kepentingan konservasi khusus (ekologis/keanekaragaman); Kelangkaan/ancaman habitat/ras tinggi; Memiliki habitat dan daerah luas jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, serta dan/atau warisan wilayah nasional;
c. Penyelenggaraan komitmen nasional dalam mendorong/lanjut konflik konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHC (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat), serta menjalankan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
d. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi dalam untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Pemberdayaan dan fasilitasi daerah dalam memfungsikan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan komitmen nasional dalam melindungi/lanjut pencapaian tujuan CDD (Sustainable Development Goals), antar lain mengingat tingkat kemiskinan dan kerentanan, mengimbi kerusakan lingkungan hidup, dan pelanggaran hukum pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 58/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Kabupaten Kalimantan Timur dan Balikpapan, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat pada di bawah ini.

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas memonyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, perkantoran, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kesejahteraan pelayanan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut, dan pulau-pulau kecil, serta pengendaliannya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemanfaatan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan evaluasi kinerja manajerial yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum.

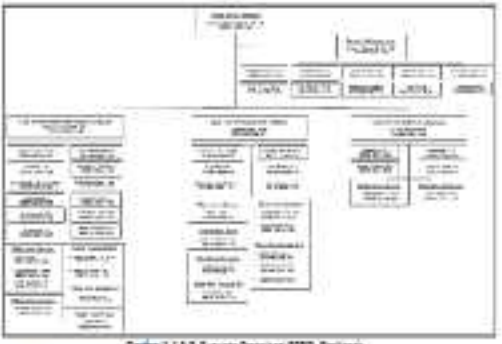

Gambar 1.1 S.S. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Kelengkapan SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2022 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun jumlah PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Satpam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan, Pramudi/Pengguna Kendaraan, dan Pengemudi. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menghantarkan capaian kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di bawah sebagai berikut:

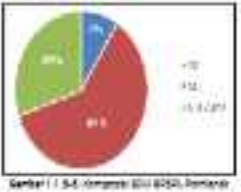

Gambar 1.2 S.S. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 443.418,99 km^2 terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan ialah sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30

Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 8.780,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 775 pulau/pulau kecil dan 4 pulau/pulau kecil terluar.

I.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, EPDPL Pantainak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Beragam tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara mana zonasi dan mana alur yang diwujudkan melalui integrasi antara tersedia tata ruang dengan tersedia zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang (zonasi). Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang laut, dilakukan dengan pelanggaran kesesuaian rencana pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu mengingat amanatnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan pengawasan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Termuktub dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan IPTEK dan teknologi.
d. Masih minimnya kesadaran/peran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
e. Ancaman adanya perairan yang rentan terhadap eksploitasi pasir. Hal ini dilakukan upaya pengendalian pasir melalui kegiatan pemanfaatan mangrove dan pemangkuan pantai/pulau pulau. Selain itu, kondisi ekosistem pasir dan pulau/pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam dilakukan pengukuran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
f. Pencemaran pasir dan laut yang mengganggu kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti efisi benthi pantai dan laut serta pelestarian kepada masyarakat.
g. Keterbatasnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluarnya pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pembangunan pengelolaan pulau/pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, kesehatan, dan kedaulatan serta kelestarian ekosistem untuk pengukuran ekonomi masyarakat di pulau/pulau kecil terluar kemandirian dengan tetap memperhitungkan aspek pelestarian ekosistem.
h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti bioteknologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2022 disusun dengan dasar hukum:

a. Keputusan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perhitungan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi anggaran;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2022 – 2024;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Pemerintahan Birokrasi.

1.3. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk menyediakan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya pertanggungjawaban sekaligus tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta jumlah pegawai secara kewilayahan. Perkenalan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan strategis sasaran strategis tersebut dianalisis analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan sebanyak tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pemotivasian/peningkatan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. kegiatan pendukung
viii. Realisasi Anggaran

ix. Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja
   b. Lampiran yang dianggap perlu

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan menjadikan title kuat dalam mencapai asaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. pertahanan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan penuangan Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam delapan belas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Keuangan dan Perkaran untuk:

1. meningkatkan kemampuan dengan pemerintah, kelembagaan kebijakan dan pelaksana dalamnya kepada kebijakan, pemberdayaan, pemberdayaan garam, pengelolaan pemasaran hasil kebijakan dan pertanian, dan pelaksanaan garam, serta para pelaku usaha terkait kebijakan dan pertanian;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program pertanian berbasis.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2010 – 2014 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2010 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Renstra Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2010 – 2014.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, mencoba Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2010 – 2014 sebagai acuan dan pedoman agenda pembangunan arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut dalam 4 (empat) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang memberikan Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2010-2014 diharapkan sinkron mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Dirjen PRL 2010 – 2014 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Dirjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sejalan KKP dan untuk mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2010-2014, KKP menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Perbatasan yang Belum Efektif dan Terjaganya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2014 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Pemberdayaan kawasan konservasi laut
2. Pelenggaraan ruang terbuka berbasis kota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembangunan sarana prasana di laut mendesi (apabila diperlukan) hanya atas ijin Dinas Laut

Dalam rangka melindungi misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak melindungi 3 (tiga) misi yaitu :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak menetapkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut :

1. Misi Perencanaan Ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan :
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan pemanfaatan dan pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan :

a. Meningkatnya pelaksanaan hasil dari pelaporan hasil tertentu yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Tujuan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sosio-kultur kearifan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terwujudnya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keberlanjutan hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ditetapkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya pengelolaan keberlanjutan hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keberlanjutan hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya sharing, kemitraan, kerjasama dan konsensi konservasi keberlanjutan hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

4. Tujuan meningkatkan pengawasan dan penegakan kedaulatan pasar dan pelaku usaha laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kepatuhan pasar dan pelaku usaha laut yang diverifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terlaksana pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan diselenggarakan oleh BPSPL Pontianak untuk mencapai kegiatan tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana sasaran kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sebing dengan agenda penyusunan dan kelolaan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk menciptakan kinerja pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, tahapan program, dan kegiatan. Selain itu, dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kompatibel dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/satker lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian dimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada akhirnya Januari (Kin). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Direktur PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran kegiatan dan 24 indikator kinerja (10 KL dan 11 KSK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
[SK-1] Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian hukum laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-1] Meningkatnya kinerja PNBP BPSPL Pontianak

Indikator Kinerja Tahun 2023	Indikator Kinerja Tahun 2024
Tidak digunakan	(**IK-2**) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-3**) Terrujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di lingkup daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(**IK-3**) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dalam rangka pengembangan pariwisata di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-4**) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(**IK-4**) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan hutan laut di wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-5**) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(**IK-5**) Meningkatnya distribusi kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-6**) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(**IK-6**) Terkelolanya kawasan konservasi yang ditetapkan di lingkup daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-6**) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(**IK-7**) Meningkatnya pendanaan berbasis dari kontribusi konservasi, objek, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-7**) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak	(**IK-8**) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(**IK-8**) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(**IK-9**) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(**IK-10**) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(**IK-11**) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(**IK-12**) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, tahun 2023 dan tahun 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
(IKK-1) Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi pemberian pemanfaatan ruang laut yang diusulkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan (IKK-1) Dokumen operasionalisasi pemberian pemanfaatan ruang laut yang diusulkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

[illegible] Tahun [illegible]	[illegible] Tahun [illegible]
[KBU-2] Kerjasama, pelatihan, sosialisasi, sertifikasi konservasi yang difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (kerjasama)	Tidak digunakan
Tidak Tersajikan (KL)	[KBU-2] Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
[KBU-3] Kawasan pencontoh untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KONPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[KBU-3] Kawasan pencontoh untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KONPAK) yang difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Tersajikan (KL)	[KBU-4] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Maritim Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
[KBU-4] Jenis dan ketersediaan benih yang dilakukan pendataan, pendaftaran, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkaran biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[KBU-5] Jenis dan ketersediaan benih yang dilakukan pendataan, pendaftaran, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkaran biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[KBU-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[KBU-6] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[KBU-6] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)	[KBU-7] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp100)
[KBU-7] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (nilai) Lingkup ARSIP, Pontianak (Nilai)	[KBH-8] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (nilai) Lingkup ARSIP, Pontianak (Nilai)
[KBH-8] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[KBH-9] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[KBH-9] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	[KBH-10] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Tersajikan (KL)	[KBH-11] Inovasi Pelayanan Publik yang Dilakukan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)
[KBH-10] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[KBH-12] Indeks profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[KBH-11] Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan digantikan dengan [KBH-13] Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[KBH-12] Laporan SPIP yang diaudit Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[KBH-14] Laporan SPIP yang diaudit Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[KBH-13] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	[KBH-15] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IKK-14] Persentase rekomendasi hasil pengawasan ingkat BPSPL Pontianak yang ditindaklanjuti dari seluruh rekomendasi hasil pengawasan (%)	[IKK-14] Persentase rekomendasi hasil pengawasan ingkat BPSPL Pontianak yang ditindaklanjuti dari seluruh rekomendasi hasil pengawasan (%)
[IKK-15] Persentase penyelesaian temuan ingkat BPSPL Pontianak (%)	[IKK-17] Persentase penyelesaian temuan ingkat BPSPL Pontianak (%)
[IKK-16] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah ingkat BPSPL Pontianak (%)	[IKK-18] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah ingkat BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2023 dan Maret 2024

Secara terperinci Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.363.000
2. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Ekosistem Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Ekosistem Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	100
3. Terlaksanakannya pengembangan dan pengembangan ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen operasionalisasi perairan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
4. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5. Terverifikasinya kelestarian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kolaborasi konservasi yang dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)	1
	7. Kemitraan konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)	1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung terlaksananya di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Bentuk Pemberdayaan atau Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi (KIMPAM) yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	3
	7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Darat/di pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi/dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan konservasi prioritas yang mendapat perlindungan perkembangbiakan, perlindungan habitat atau perlindungan populasi dari penangkapan serta dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Fasilitasi)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara terpadu berbasis ekosistem di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendapat penanganan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	03,70
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	98
	16. Nilai LKjIP Kinerja Berorientasi Hasil (WBK) di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	98
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	61

	19. Laporan BPP yang disatker ingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
	20. Persentase Unit Kerja ingkup BPSPL Pontianak yang memasukkan Rencana Pengelolaan yang Tersedotor (%)	84
	21. Persentase Unit Kerja Pengawasan ingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditangkap dan disimpulkan (%)	40
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK ingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kantor Pemerintah ingkup BPSPL Pontianak (%)	40
	24. Nilai pengawasan internal kesatuan ingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	80

Sumber data: BPSPL Pontianak - LAKIN, tahun 2021

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1. Rancangan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam menetapkan perhitungan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam peraturan tersebut telah mengatur tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodic
   b. Pengukuran kinerja dilakukan dan berupa kuatan (level) yang ia lebih (>) dari

1. Pembuatan Kinerja adalah menyatakan alur/proses keterkaitan komponen tercapai dan pencapaian kinerja berikutnya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja

Tahapan Pengukuran Kinerja (PK), Menetapkan Target Indikator Kinerja, Rancana Aksi atau PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan system informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian Kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam melaksanakan, mengukur, mengevaluasi dan mengarsipkan IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengarsipkan berupa bukti validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://smartasn.esp.go.id/sipk/)
5. Atasan langsung dan setingkat wajib memberikan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan objektif.
6. Sub Unit verifikasi dinilai di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja secara berjenjang Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perseorangan (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan mekanisme penyapaian nilai mekanisme penyapaian adalah 1 (satu) jenis menginput KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan laporan hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja merupakan salah satu pertanggungjawaban organisasi dan unit yang menjadi penanggungjawab kegiatan, sekaligus penanggungjawab jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sekretaris PRL melanjutkan seluruh hasil yang diterima dan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian pernyataan indikator Kinerja Kegiatan (IKK dan IKU). Perhitungan IKU dan IKK diatur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKIP) secara online yaitu, http://sakipkp.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah dibuat sebelumnya, serta format capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap satuan dengan penanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKIP) secara online yaitu http://sakipkp.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah dibuat sebelumnya, serta format capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap satuan strategis sesuai dengan penanggungjawabnya.

Gambar 3.1.1-1. Hasil Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerja)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO/ IKU-HKBK BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu 109,84% (masuk kategori Biru = tercapai), mengalami penurunan sebesar 9,74% dari Triwulan I (NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan I) sebesar 119%. Terdapat penurunan 10,76% dari Triwulan II Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan capaian dari target dan turunnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 34 indikator kinerja kegiatan, hanya 6 indikator yang memiliki periode pelaporan Triwulan II. Terdapat 6 indikator kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan II dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

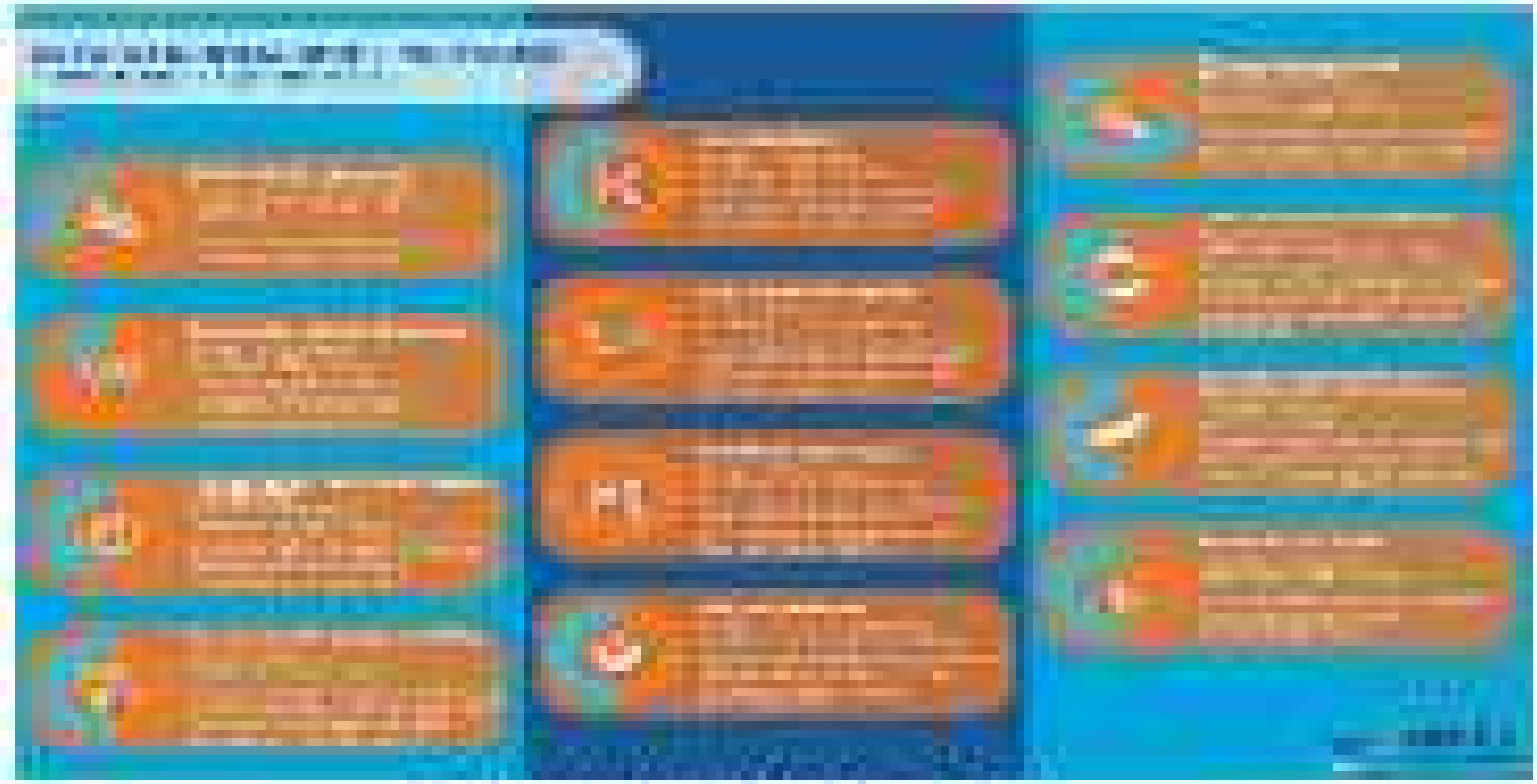

3.1.1. Susunan Kegiatan Mendapatkan Nilai PNBP BPSPL Pontianak

BKU 1: Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan sarana lain dilindungi oleh atau atas dasar pemanfaatan sumber daya alam pengolahan dan pemrosesan.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425121) + Pendapatan Jasa Kesehatan dan Perbekalan Lainnya (425622) + Pendapatan Penelitian Lainnya (425299) yang diperoleh dari kegiatan kerja BPSPL Pontianak.

$PNBP_{2024} = PNBP_{425121} + PNBP_{425622} + PNBP_{425299}$

Dimana,

$PNBP_{425121} = SAJI\ DN \times Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ Lit + Denda$

Keterangan:

SAJI DN	=	Pengolahan atas Dokumen SAJI DN -1 + Pengolahan Pendapatan + Dungaran Pengamatan n
Surat Rekomendasi	=	Pengolahan atas Dokumen Rekomendasi + Pengolahan Pendapatan
$PNBP_{425121}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Penelitian Lainnya dan Jasa Kesehatan dan Perbekalan
$PNBP_{425622}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
$PNBP_{425299}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Tambahan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pelanggaran jenis ikan yang melebihi kriteria pada dokumen angkut.

Keterangan:

	=	untuk Usaha Kriteria Kecil (Usaha) dikenakan tarif 3,4%
	=	dikenakan untuk pengangkutan ikan ikan yang berasal pengambilan dari alam sendiri ikan ikan yang dimiliki

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan	=	Jumlah Hasilnya x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Pembelanjaan	=	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Komoditinya

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

Misi	Meningkatkan nilai PHBP BPSPL Pontianak								
Sasaran	Nilai PHBP BPSPL Pontianak Sesuai								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Semester 1 (SEM1) Pontianak		Semester 2 (SEM2) 2023-2024	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target 4th (IKU)	% Realisasi thd Target 4th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Semester
2.071.630.000	Periode Capaian Tahunan		2.000.000	0	-	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIMPEL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan penguraian, karena periode penguraian dan pelaporan tercatat pada Maret-Mei dilaksanakan secara tahunan. Capaian nilai PHBP Triwulan II (per tanggal buku 1 Januari – 30 Juni 2024) yaitu sentra Rp1.284.826.677 atau 64,22% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya akan dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PHBP Triwulan II tahun 2024 (Rp1.284.826.677) mengalami peningkatan sebesar 114,47% jika dibandingkan dengan progres nilai PHBP Triwulan I tahun 2023 (Rp1.121.633.402).

Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PHBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I tahun dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 tercapai target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian

Hingga Triwulan I belum dapat dikelompokan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena RKL ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progress nilai PHBP Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 64,20% dari target tahunan.

6. Analisis Penyebab Ketidakcocokan/Kegagalan atau Penyimpangan Pelaksanaan Kerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 64,20% dari target tahunan. Hal itu disebabkan oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PHBP. Kendala yang muncul adalah terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut, sehingga menghambat proses pemangkasan PHBP. Untuk menghadapai hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PHBP melakukan pelayanan dan pemantauan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapainya target di Triwulan I sehingga RKM belum dapat direalisasi. Namun jika analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPS realisasi anggaran dan selisih dari IKPS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMROK untuk memantau dan memvalidasi PHBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya RKL yaitu Pelaporan Operasional Pemantauan (Visi Misi, SPJ, SAJ dan Rekomendasi) selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu ada pula pungutan PHBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PHBP hingga Triwulan II 2024.

Tabel 3.1-6 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan I

Jenis PNBP	Januari	Februari	Maret
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp155.667	Rp156.667	Rp.800.001
Pendapatan Pemberian Lainnya	Rp119.070.000	Rp139.474.000	Rp133.836.000
Pendapatan Jasa Kekurtan dan Pemberian Lainnya	Rp130.943.019	Rp38.707.140	Rp77.149.974
Total	Rp250.174.686	Rp211.218.807	Rp233.000.974
Total Tw II			Rp692.434.762

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan Traffic di SPJ, SAJ dan Rekomendasi pada bulan Juli – September 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Kawasan Saya Hutan dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa yang memenuhi kriteria, dan atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas Kelestarian non fisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Perhitungan:

$TK_{Capaian} = TK_{Lap.1} + TK_{Lap.2} + TK_{Lap.3} + TK_{Lap.n}$

Keterangan:

$TK_{Capaian}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{Lap.1}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SS 3	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024
	Target (Tw I)	Realisasi (Tw I)	% Capaian	Target (Tw 2024)	% Capaian vs Target (%)	Target 2024	% Realisasi vs Target 2024	Target 2024	% Capaian vs Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			320	0	-	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IKU dilakukan cascis tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Tanah Laut dan Kota Balikpapan. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 320 pelayan fraksional (100% dari target sebesar 320 orang) yang terdiri dari masing-masing 80 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, hilan terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum

dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DLHPR, 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan I 2024 belum dapat disandingkan dengan target jangka menengah, karena dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

c. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis (IKU) tersebut tahun tertuang dalam Renstra DPMPTSP, Periode 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat disandingkan dengan target dalam Renstra DPMPTSP, Pertanahan Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat memastikan tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan proses kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kualitas stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya komunikasi dapat mengoptimalkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Dan karena itu, diperlukan komunikasi yang cair dengan orang/tokoh masyarakat dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis secara utuh efisiensi penggunaan sumber daya, karena realisasi baru terdapat target di Triwulan I sehingga RPDS belum dapat dihitung. Pantauan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPDS, realisasi anggaran dan selisih dari RPDS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memplot kegiatan secara paling.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Pelaksanaan Bakar Batu Lestari di Kab. Kaltu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bakar Batu Lestari di Kabupaten Kaltu Raya dimulai pada tanggal 3 Mei 2024 dengan koordinasi dan komunikasi kelayan. kegiatan ini melibatkan 80 orang kelayan had bakar dari 2 kelompok kelayan di dua desa (Desa Jenjiu Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rangas sebanyak 40 orang). Kegiatan ini juga melibatkan tenaga pengolah sampah yang siap Jaya Pratiwi dan dinas PUPRPKP Kab Kaltu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kemungkan Tokoh serta Pemerintahan dan Pengelolaan yang dilaksanakan Rio dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-1 Jumlah Nasabah yang Ikut dalam Kegiatan BCL di Kab. Kota Raja

Kelurahan	Nasabah	Jumlah (Orang)
Desa Jenjia Kecil	KUB Gelak Dapat	10
	KUB Kasap Makan	10
Desa Sungai Rengas	KUB Maker Jaya	10
	KUB Lindung	10
	KUB Berkembang Laut I	10
	KUB Berkembang Laut II	10
	KUB Berkembang Laut III	10
	KUB Berkembang Laut IV	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 22 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengolahan sampah dan hasil dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh KUB/Kelompok.

Gambar 3.1.2-1 Bimbingan Teknis di Kab. Kota Raja

- Kegiatan Pemilahan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang sejak mei – juni 2022 diperkirakan sebanyak 33.447,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa komposit, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.893.000. KUB Berkembang Laut II menjadi volunteer terbaik dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 9.879,2 kg.

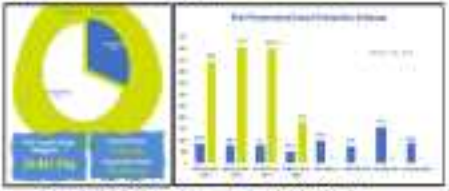

Gambar 3.1.2-2 Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kota Raja

b. Pelaksanaan Bersih Pantai Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang di mulai pada tanggal 01 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Sebapuh Besar sebanyak 18 orang, Kel. Nanga sebanyak 20 orang dan Kel Kuala sebanyak 30 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pemberdayaan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3.3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sebapuh Besar	KUB Surya Pertama	9
	KUB Sumber Rejeki	9
	KUB Nelayan Mandiri	11
Kel. Nanga	KUB Nelam Jaya Abadi	20
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bersi	10
	KUB Bersekode	10

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 21 Mei dan 18 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni cara pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh baik sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh DPDPL Pontianak.

Gambar 3.1.3-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.902,05 kg total sampah terkumpul. Sebanyak lebih sampah sampah non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 4x% Sampah yang berhasil terkumpul sebanyak 47% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.828.000. KUB Nelayan Bersi menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling sampah sebesar 3.333 kg.

Gambar 3.1.3-4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

b. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 01 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dan 6 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Barukbukan dan Desa Kemah Layung) sebanyak 4 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh Inka Bank Sampah Indok Bahkan Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilaksanakan dengan Bimbingan Teknis serta Pembinaan dan Pengangkutan yang dilaksanakan hari dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3-4. Jumlah Kelompok yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (orang)
Desa Sungai Barukbukan	Kub Bina Bersama	20
	Kub Bintang Laut	10
	Kub Kuda Laut	10
	Kub Cinta Lestari	24
Desa Kemah Layung	Kub Bina Harapan Bersama	4

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei dan 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni sosialisasi pengurangan sampah, pemilahan sampah, edukasi cuci pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL dan RPSP, Workshop.

Gambar 3.1.3-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang selama mei – juni 2024 didapatkan sebanyak 4.845,6 kg total sampah terkumpul.

Sebanyak 2.200 Kg sampah berupa kaleng dengan nilai ekonomis sampah sebesar Rp4.196.000.

Gambar 3.1.3-6. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Teluk Lasi

c. Pelaksanaan Bank Clinta Lasi di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Clinta Lasi di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nasabah. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nasabah institusi dari 6 kelompok nasabah di satu kecamatan (Kel. Baru)nggan sebanyak 60 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Simbolisasi Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3-5. Jumlah Nasabah yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (Orang)
Kel. Baru Ilir	KUB Mawasari	20
	KUB Sinar Bahari	10
	KUB Sinar Laut Sejaya	10
	KUB Laut Berdaun Hijau	10
	KUB Amanah Sihalat	10

- Kegiatan Simbolisasi Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Simbolisasi Teknis di Kota Balikpapan dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni sebagai metode yang akan penulis gunakan yakni kegiatan pengumpulan sampah, wawancara singkat pelaksanaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.3-7. Simbolisasi Teknis di Kota Balikpapan

B. Realisasi Anggaran

Komponen KAK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan Rincian Output [4046.000.001] Fasilitasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.2-5. Realisasi Anggaran KAK II Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4046.000.001.001] Fasilitasi Penanggulangan Gangguan Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp880.000.000	Rp 410.760.000 (51,07%)	-
TOTAL		Rp880.000.000	Rp410.760.000 (51,07%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KAK ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp. Rp410.760.000 atau 47,07% dari pagu anggaran sebesar Rp 880.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 3.1.2-6. Realisasi Anggaran KAK II Triwulan I

C. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kesiapsiagaan Tumpahan Minyak di Perairan Laut, kegiatan pemutakhiran dilaksanakan di empat lokasi pelaksanaan Dermaga BOL dengan melibatkan narasumber lokal, instansi asosiasi dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang meliputi meliputi sosialisasi, monitoring/verifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/atau verifikasi perizinan. Teknis mengisi/mengacu dengan mengimplementasikan dan menyempurnakan dokumen operasionalisasi perizinan

pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan dan verifikasi kesesuaian dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan secara berkala dan terintegrasi.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

IKU 3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
KCI 3	Rekomendasi teknis terhadap perizinan pemanfaatan ruang laut yang diusulkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Realisasi 2023	Tahun 2024							Semester 2 (IKU, Continuous)		Semester 2 (IKU, 2024-2026)	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target RPJMN 2020-2024	% Realisasi thd Target RPJMN	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Semester	Target 2024	% Capaian thd Target Semester
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilaporkan pengusulan, karena periode pengusulan dan penerbitan capaian pada Maret IKU diterbitkan kembali tahun ini. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi kelengkapan permohonan KKPR, di Kabupaten Lhoksumawe, Sosialisasi KKPRL di Kota Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya disilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tercantung dalam Renstra DJPVRL 2020-2024 ialah pemanfaatan penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan II 2024 belum dapat disandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulanan dan capaianya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tercantung dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 tersdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat disandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan semoga dengan Triwulan II dapat memotong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini dikarenakan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis karena pada akhir triwulan I belum ada penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut sehingga IKPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPSS realisasi anggaran dan selisih dari IKPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pelestarian Ruang Laut dan melakukan pertukaran fakta secara cermat.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya RO pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut kepada 19 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 14 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Barat sebanyak satu pemohon.

Tabel 3.1.3.6. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	1	April
Kalimantan Timur	14	April - Juni
Kalimantan Utara	4	Mei - Juni
Total	**19**	**April - Juni**

Kegiatan ini juga dilakukan lebih lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL PT Saan Pesisir Tangguh di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 6 Juni 2024.

Gambar 3.1.3.1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 19 subjek yang berada di Kalimantan Tengah (5 subjek), Kalimantan Selatan (2 Subjek), Kalimantan Timur (3 Subjek) dan Kalimantan Utara (7 Subjek). Sebanyak 2 subjek merupakan Lembaga pemerintahan (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Kongsi dan The Angkatan Laut). Sementara 17 subjek lainnya merupakan perseorangan dan perseroangan.

Gambar 2.1.2-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi KKPRL

BRSK, Pertamax sebagai UPT Lingkup Ditjen PKRL menghadiri undangan sosialisasi KKPRL yang diselenggarakan oleh Tim Ivelja Pelaksan Pemanfaatan Ruang Laut, Ditjen PRL kepada Badan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (PERSINDO). PERSINDO merupakan asosiasi yang beranggotakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berupa pelayanan kapal di seluruh Indonesia. Kosialisasi yang diselenggarakan meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Penganalisis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Gambar 2.1.2-3. Sosialisasi KKPRL

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: koordinasi pelaksanaan pelayanan ruang laut di Jakarta Pusat pada tanggal 2 s.d. 3 April 2024 dan koordinasi pelaksanaan KKPRL di Manokwari pada tanggal 14 s.d. 19 April 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3564.067.009.041] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Pemantauan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 (Triwulan I)

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3564.067.009.041] Sosialisasi Penyelenggaraan Konservasi Ruang	Rp 174.774.000	Rp 34.952.200 (19,62%)	-

2.	[2564.RR1.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 376.224.000	Rp 130.711.140 (34,75%)	-
3.	[2564.RR1.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 600.000.000	Rp 127.948.187 (21,32%)	-
TOTAL		Rp 1.100.000.000	Rp303.031.537 (39,69%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp303.031.467 atau 39,69% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.140.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kebutuhan perjalanan dinas biasa dan honorer baru.

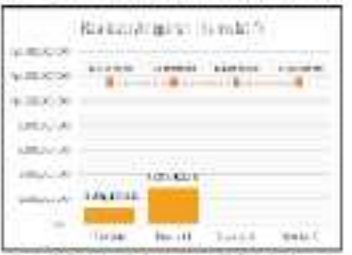

Gambar 3.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran RO 3 hingga Triwulan II

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi dalam pemberian KKPRL lanjutan untuk bulan Juli – September serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah hasil yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 43.447,99 Hektar yaitu kawasan Konservasi di Kabupaten Ketapang Hektaheim Wilayah Hulu Kabupaten Hulu Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan atau tahun berjalan. Hasil tersebut dapat berupa sebuah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Peraturan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 28/KEPDJ.PKRL/2021. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya aspek tersebut dikembangkan indikator menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada tahapan input, proses, output dan outcome.

Gambar 3.1.4.1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4.1. Jumlah indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	3	10.00	9
Proses	3	10.00	13
Output	3	10.00	13
Outcome	4	20.00	8
Total	24		43

Tabel 3.1.A-2. Hasil Isian Nilai Antar Kriteria

Kriteria	Bobot	Nilai	Nilai (%)	Bobot	Hasil (%)
Input	...	1373	...	0.20	...
Proses	...	600	...	0.35	...
Output	...	600	...	0.30	...
Outcome	...	400	...	0.15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:
Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap isi kolom
Nilai Maksimum (Nilai) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (Nk) : Ni / Nmax x 100%
Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : Nk x Bk
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.A-3. Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<60%	Merah	Efektifitas Minimum	Desain dan tentang kawasan sudah dievaluasi dan proses yang cukup sudah dilaksanakan namun masih diperlukan usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan
>60-80%	Kuning	Efektifitas Optimum	Kunci-kunci pengelolaan sudah tercapai secara adekuat dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>80%	Hijau	Efektifitas Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.A-4. Capaian IKU II BPSDL Pontianak

2024	Terselenggara nya pengelolaan dan pengembangan yang baik di wilayah kerja, pusat dan pelayanan, hasil di wilayah kerja BPSDL Pontianak								
2024	Persentase pencapaian nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BPSDL Pontianak (%)								
Indikator Kinerja	Tahun 2023					Renstra BPSDL Pontianak		Renstra DJPPL (2020-2024)	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target 5Y 2020	% Capaian thd Target 5Y	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Capaian
20.xx	Persen Capaian Tahunan		10					17,83 ha	

Sumber data: BPSDL Pontianak dan DJPPL, Maret 2024

1. Capaian IKU Tahunan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 dalam tabel diatas dan pengisian, karena periode belum berakhir dan pelaporan capaian pada Maret RO dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya: survey lokasi biota dilindungi, monitoring kualitas air, pendataan dan identifikasi penting, survei sosial ekonomi dan sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Mahakam Hulu.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU diakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 39,44% lebih besar dari pada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal ini, karena target tahun ini menjadikan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 53,44%.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang Efektif secara berkelanjutan sebesar 17,8 Juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

Selain itu, adanya yang disampaikan dalam penjumlahan kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam 4 ribu seluas 42.000 hektar sehingga total target pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif secara berkelanjutan

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2024 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut adalah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 39,44%. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

8. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyesuaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Poin kunci peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, perlu peningkatan alat pemantau survei terutama dalam monitoring. Pasar Mahakam, kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan berpedoman standar dan prosedure pendukung kawasan konservasi.

9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga realisasi anggaran belum dapat dihitung. Pertimbangan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPHB, realisasi anggaran dan selisih dari RPHB dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Rekapitulasi kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jumlah Biota Bernilai Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi ikan di Mahakam pada periode April - Juni 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan dilaksanakan pagi dilakukan menggunakan kapal Drosella III di Kawasan Konservasi Kabupaten Kutai Barat pada pukul 08.00 – 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya melakukan

dan alat bantu. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1.4-2. Pengambilan Primata Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di area kajian, didapatkan tujuh kelompok air pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang teramati tercatat di Muara Pekalu yaitu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit ditemukan di Sungai Kedang Pantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 09.17. Sementara waktu paling siang ditemukannya pesut yaitu pukul 16.37.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Kelokumran	9	13.13	Sighting
2.	Simpai Kedang Pantau	2	16.37	Sighting
3.	Muara Aru	4	17.58	Sighting
4	Hulu Rimba Aru	14	10.49	Sighting
5	Muara Danau Semayang	5	09.17	Sighting
6	Muara Pela	3	10.21	Sighting
7	Ulang Ulu	3	10.39	Sighting

Pada titik stasiun pengambilan kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan berada pada batu mati sungai dan sebanyak kelas 2 perlu perumbuhan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengamatan terhadap air yang didapatkan di stasiun pengamatan menunjukan nilai suhu berkisar antara 32.4 – 31.0. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2.7 – 3.2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 6.8 – 7.36. Sementara nilai TDS berkisar antara 19 – 44 ppm.

b. Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan berupa monitoring kualitas air di Kawasan Konservasi Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Barat tersebut dilaksanakan pada periode bulan April – Juni 2024. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 16 titik stasiun. Parameter yang diukur meliputi kecepatan arus, kejernihan, suhu air, konduktivitas, kedalam terukur, dan total padat terlarut. Alat yang digunakan yaitu Kolin Quality Checker kamera dan GPS.

Gambar 3.1.4-3. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Mei-Juli 4 tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Masyarakat Hukum Mahakam Hulu berada di dalam ambang batasnya atau mutu kelas dua menurut PP nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-4. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Parameter	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (oC)	33,9	27,4	29,59
pH	6,85	5,6	6,64
TDS (mg/L)	39,5	13,5	24
DO (mg/L)	10,6	3,6	6,87
EC (S/m)	79,4	26,9	48,28
Kuat arus (m/s)	1,36	0	0,79

c. **Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Survei ikan ekonomis penting dilakukan di sepanjang perairan Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara pada tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan sampel yang berasal dari nelayan setempat. Sampel ikan kemudian diukur secara morfometrik dengan mengacu kepada parameter yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang tinggi (panjang cagak), panjang standar (panjang tanpa caudal), panjang kepala, panjang moncong, panjang mata, tinggi badan, tebal badan, panjang sirip punggung, panjang sirip anal, panjang sirip perut, panjang sirip dada, panjang sirip ekor, jari-jari keras dan jari-jari lemah pada sirip punggung, jari-jari keras dan jari-jari lemah pada sirip anal, jari-jari lemah pada sirip perut, jari-jari lemah pada sirip dada, jari-jari lemah pada sirip ekor, serta meristik sisik (sisik gurat lateral, sisik di atas gurat lateral, sisik di bawah gurat lateral, sisik sebelum sirip punggung, sisik sebelum sirip perut, sisik sebelum sirip anal, dan sisik sebelum sirip ekor). Selain itu, pengukuran gonad, dan pemberian skala TKG (Tingkat Kematangan Gonad) juga dilakukan.

Gambar 3.1.4-5. Survei Pendataan Ikan Ekonomi Penting

3. Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survei sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 19 Juni (Desa Long Iti, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara) 20 Juni (Desa Pela, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara), dan 16 Juni (Desa Long Iti, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara). Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat peraga berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku pariwisata dan pemerhati sebagai subjek seperti tetuapan tangkang, tetuyan budidaya, pengrajin cenderamata, dan sebagainya. Sebjen terkait di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hilir di Kab. Kutai Kartanegara dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data dianggap sebagai pemasukan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Responden yang diberikan untuk kegiatan wawancara adalah minimal satu hingga 10 hingga maksimal 40 orang.

Gambar 3.1.4-5. Survei Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu adalah laki-laki (73,3%) dengan persentase selanjutnya 21,3% merupakan responden yang berprofesi sebagai nelayan dan usia mereka berkisar antara 25 hingga 65 tahun. Pada tahun mereka sebagian besar hanya sampai SD, dilanjutkan dengan SMP dan SMA. Pendapatan dari penangkapan ikan yang merupakan sumber utama pengasilan berfluktuasi tergantung musim dan hasil tangkapan. Nelayan menjual ikan seperti haruan, sepat siam, lais, toman, belida, pipih, dan udang kepada pengepul untuk dijual domestik. Nelayan budidaya tanaman mengembangbiakkan ikan jelmi, nila, dan baung.

Gambar 3.1.4-6. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi

Sekitar 93,9% masyarakat menggantungkan hidup pada hasil sungai dan juga hasil dari sekitar Belida, namun hanya 40% yang memahami pentingnya dari kearifan lokal tersebut. Masyarakat mengenal 5 ikta dilindungi seperti Belida Kalimantan (*Chitala borneensis*) dan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*), namun sebanyak 67,6% memanfaatkannya

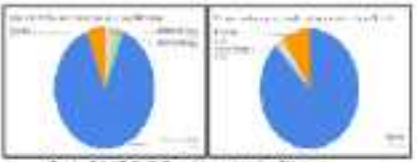

Gambar 3.5.4 T. Grafik Pengetahuan Jenis dan Dilindungi

Sekitar 71,0% responden sekor mengetahui kebaradaan Kawasan Konservasi Maluku. Sekitar 29,0% tidak mengetahui. 75% mengetahui zonasi maksud hanya 63% yang benar-benar memahami dampak contohnya. Mayoritas responden juga menyadari bahwa penangkapan ikan ilegal merusak ekosistem, tetapi hanya 48,1% yang memberikan pendapat ini secara lengkap. Persepsi tentang manfaat jangka panjang kawasan konservasi beragam, dengan 64,8% setuju bahwa kawasan konservasi meningkatkan kualitas hidup, namun ada yang skeptis karena pembatasan akses dan dampak ekonomi negatif.

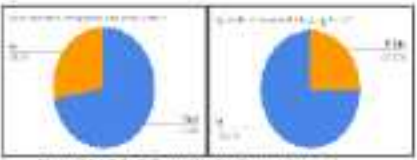

Gambar 3.5.4-E. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi

Selanjutnya 46,9% responden menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur pariwisata di Kawasan Konservasi Maluku Tengah, sementara 27,3% berpendapat sektor pariwisata tidak berkembang. Masyarakat berharap adanya pengembangan infrastruktur pariwisata untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, 37,3% responden merasa kontribusi pariwisata kurang berdampak pada ekonomi lokal. Mereka menilai potensi pariwisata terbatas karena kurangnya point of interest selain pantai dan Tanjung Tamarodi. Hasil serupa, 66,3% responden percaya sektor pariwisata memperbaiki tenaga kerja lokal dan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang mendukung konservasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Maluku Hulu

Kegiatan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Maluku Hulu dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Juni 2024 di Desa Kota Bangun III dan Desa Lang Liu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Maluku Hulu, bahwa

yang disampaikan dalam kegiatan diantaranya pengelolaan kawasan konservasi di Pelabuhan Manakam Wilayah Hulu, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya konservasi pesut mahakam dan habitatnya.

Gambar 3.1.4-8. Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Selain itu, penyelenggaraan materi kawasan konservasi dilakukan melalui pemasangan spanduk-spanduk seperti poster dan x-banner sebanyak 4 (empat) yang tujuan dan lokasi tertu dan strategis. Sosialisasi di Desa Kota Bangun III memanfaatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi, yang dibantu dengan kuisioner peserta sosialisasi dan dianalisis secara tertulis.

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di kawasan konservasi Manakam Hulu dilakukan pada bulan April hingga Juni 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya: Televisi, Kulkas, Dispenser, Lemari, Laptop, DSTV dan Alat Pengukur Arus.

3. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3042.PBW.001] Koordinasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [3042.PBA.902] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3042.PBW.001.060] Koordinasi Efektivitas Pelaksanaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 46.500.000	Rp 11.122.610 (23,92%)	-
2.	[3042.PBW.001.064] Pelayanan Perizinan Bidang Kawasan Konservasi	Rp 16.400.000	Rp 0 (0%)	-
3.	[3042.PBW.001.065] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp 191.000.000	Rp 0 (0%)	-

4.	[3543.REA.003.004] Penyelesaian sengketa dan pengadilan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 900.000.000	Rp 386.434.033 (30,16%)	-
5.	[3543.REA.003.005] Data dan informasi Kawasan Konservasi	Rp 718.260.000	Rp 112.073.602 (15,67%)	-
6.	[3543.REA.003.006] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 350.044.000	Rp 206.003.000 (27,54%)	-
7.	[3543.REA.003.034] Pelayanan Perkantoran Kawasan Konservasi	Rp 362.884.000	Rp 1.070.400 (0,30%)	-
TOTAL		Rp 2.806.334.000	Rp794.704.903 (28,33%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung eki ini pada Triwulan I (Januari dan Januari 2024) yaitu sebesar Rp794.704.903 atau 28,33% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.806.334.000. Realisasi Anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Gambar 3.1.4-18. Realisasi Anggaran Kumulatif KU.4 Hingga Triwulan I

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan III diantaranya: monitoring sosial ekonomi, pendataan pola ikan ekonomis, survei penentuan kawasan, sosialisasi konversi pengelolaan dan survei serta dimulainya di kawasan konservasi kepulauan Hoga.

3.1.1. Sasaran Regional 1: Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 1: Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan penetapan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi kawasan konservasi. Teknis pentifikasian indikator Kinerja dilakukan dengan mengimentarisasi dan menyusulkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses pemrosesan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SKOR	Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU#1	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra (2020-2024)		Renstra (2020-2024)	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi TW II thd Target PK	Target 2024	% Realisasi TW II thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilaksanakan pengusulan, karena periode pengusulan dan pelaporan capaian pada Hari ini IKU dilaksikan secara tahunan. Prioritas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu melaksikan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Rolas Kecil di Kecamatan Tanjungpelalo, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Hariyar IKU dilaksikan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 Daerah, lebih besar dariowile target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 29,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Hariyar IKU dilaksikan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 ialah 1 dokumen di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan

Rencana RPPL. Pembahasan rencana pelaporan capaian pada triwulan IV/ dilaksanakan secara lebih rinci.

5. Analisis Pemyebab Ketidakmacetan/Kegagalan atau Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Permasalahan terkait IKU III tergantung dari kesadaran Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk IKU perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang simfi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat pesisir/pulau secara efektif.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksakan pada Triwulan I tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 – 12 Juni 2024. Terdapat dua kawasan konservasi Perairan Daerah dengan luas total sekitar 25.492,00 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Sinaran dan Pulau Sinatat, serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Pelaka Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau Sambit dengan luas 1163,00 hektar sedang diproses.

Gambar 2.1.6-1. Fasilitasi Usulan Penetapan KKP3K di Kalimantan Utara

8. Dukungan Anggaran

Pelaksanaan IKU III didukung dengan adanya anggaran dari Kewilfikasi Khusus Output [2062.UBA.001] Fasilitasi dan Pendirikan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.6-2. Realisasi anggaran IKU III Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ekstr
1.	[2062.UBA.001.001] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 2.902.836 (3,04%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 2.902.836 (3,04%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pemeliharaan RU III pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.850.500 atau 3,85% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Gambar 3.1 4-3. Realisasi Anggaran Kumulatif RU II Hingga Triwulan I

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BTNPL Pemarakan dalam rangka penyelesaian penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan konservasi kerjasama, pejuang, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasakonstra)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau serangkaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga baik dalam negeri atau luar negeri, untuk mendukung tercapainya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknis mengitung indikator kinerja dilakukan dengan mengkonversikan dan menjumlahkan nilai kesepakatan kerja sama yang dicapai di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan kawasan kegiatan hasil laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SS 3	Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan konservasi kerjasama, pejuang, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
SS 3.3	Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasakonstra)

Capaian 2023	Tahun 2024				Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Target TW 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Kerjasama Capaian Tahunan		1	150	8	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SISMEN, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2022 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasakonstra)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II capaian tersebut belum dapat dikatakan pengukuran kerja namun capaian dari perjalanan kegiatan adalah terlaksana. Namun terdapat progress kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Pendandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 27/DJPRL/KS.2023/V/2024 dan Nomor B-522/KS/KSDN/274.26/06/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Pemerintah Wilayah Kab/Kota Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasakonstra)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (luas ideal) 13 juta hektar pada 2019 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dikandingkan

belanja tersebut jangka menengah kerena pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV) dilakukan secara tahunan.

6. Permasalahan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesadaran (aware) kemitraan kerja sama dan komersial dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pengukuran capaian pada triwulan IV) dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah ditandatangani sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat memberikan harapannya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf nota/perjanjian kerja sama KKHL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Kerkahedara. Selanjutnya draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hal ini dikarenakan hasil tahapan target di triwulan II, sehingga belum dapat dihitung. Namun pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat kami sampaikan sebesar Rp55, realisasi anggaran dan sisanya dari 1720 dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Kota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-833/KS/KSDN/ST4.06/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten di Wilayah Kota Kesepakatan Kutai Kartanegara pada 20 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan klasifikasi Rincian Output (KRO) [2343.FKC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [FKC.007] Kolaborasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.

Tabel 3.1.4-3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung (KU) s/d Triwulan II

No.	Komponen/Sub-komponen	Pagu	Realisasi	Ekstr.
1.	[3063.KWC.001.051.A] Pelaksanaan Kesepakatan Bersama	Rp78.000.000	Rp49.233.671 (90,09%)	-
TOTAL		Rp78.000.000	Rp49.233.671 (90,09%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU s/d Triwulan II (akumulatif) dari Januari 2024 yaitu Rp49.233.671 atau 90,09% dari pagu anggaran Rp78.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Rapat Internal (Evaluasi, Perencanaan Kegiatan, dan Konsultasi Rapat), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksana Kegiatan Narasumber) dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).

Gambar 3.1.4-3. Realisasi Anggaran Kumulatif KU S/d tinggi Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kesehatan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kehanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2024.

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

a. Pertemuan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPVKL, Direktorat Mutu DJPVKL, BPSPL Pontianak, Dinas Kesehatan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kehanegara, dan pihak terkait lainnya.
b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kesehatan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kehanegara

IKU 7. Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berlandaskan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat mitra/pihak, kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koperasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik pantauan indikator Kinerja dilakukan dengan komunikasi/konsultasi dan monitoring/evaluasi kesepakatan kemitraan yang dibuat di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan kesejahteraan kepatuhan dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 2.1.0.2. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

DEFINISI	Meningkatnya pelestarian kawasan dan ekosistem kawasan, jasanya, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 7	Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kode IKU	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI 2020-2024	
	Target Thn X	Realisasi Thn X	% Capaian	Target Thn 2024	% Realisasi thd Target Thn	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
7	Periode Capaian Tahunan		1	100	0	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIMONEV, Tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (kesepakatan)", Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II capaian kinerja belum dapat dikatakan pengukuran kinerja berhasil/berkinerja dan perubahan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah mencapai realisasi 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor B.1460/BPSPL.3/KS.330/V/2023 dan Nomor 6803/UN7.6/KS/2023 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Ekosistem Mangrove Hutan Kabupaten Kubu Kartanegara melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada 25 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (kesepakatan)". Sehingga Triwulan II tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini memberikan Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPPI 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 23 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

A. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan kerja sama dan konservasi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat disampaikan karena perjanjian kerja sama pengelolaan pada Maret (K) dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat memberikan tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah melalui Pengukuran Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf Perjanjian kemitraan tersebut telah dapatkan persetujuan dari kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II, sehingga KPES belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian KPES, realisasi anggaran dan output dan KPES dengan persentase realisasi anggaran.

D. Kendala Pelaksanaan

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Sorong Nomor B.1480/BPSPL.3/KS.320/V/2023 dan Nomor 0003/UNIV.II/AKD/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kotawaringin Melalui Pengukuran Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 20 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta.

Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Kualitas Rincian Output (KRO) [2161.PSO] Kerja Sama dengan Rincian Output [RSE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut ditabelkan dan penjelasannya sebagai berikut:

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	3262.PEE.031.051.A Insentif Jasa yang dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp96.925.400 (96,93%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp96.925.400 (96,93%)	-

Sumber Data: BPSPI, Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan II (akumulatif) dari Januari 2024 yaitu Rp96.925.400 atau 96,93% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal (Spanduk, Seminar Kit, dan Kaos Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksana Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Hotel Rapat di Kalimantan Timur).

Gambar 2.1.4-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPSPI, Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengolahan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan III Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPSPI, Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengolahan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.3 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis liar tertentu dan jumlah dan atau (Rimbun). Teknis terkaitnya dilakukan dengan memberdayakan dan memberikan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ekosistem Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU BPSPL Pontianak

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak
IKU-8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Tren Level 2020	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra (Link, Distribusi)	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target s.d. Triwulan III	% Realisasi s.d. Triwulan III	Target 2024	% Realisasi s.d. Triwulan III 2024	Target 2024	% Capaian s.d. Triwulan Ketiga
2	1	1	100	2	50	3	33,33	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan (LINK), Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 telah dilakukan pengusulan dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah ditetapkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan I sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan terhadap target tahunan sebesar 50%. Progres capaian yang telah direalisasikan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu salah satunya bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pesisir di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 2 kelompok atau 66% kenyuhi. Hal capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II mengalami Triwulan Ke dibandingkan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh komunangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp848.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp342.849.000 pada tahun 2024.

Gambar 3.1.1-1. Grafik capaian Kinerja KSHPAK Triwulan II tiap Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 33,33% dari target Renstra Strategis BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Ketidaktercapaian/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja dilaksanakan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KSHPAK dari Rp360.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp200.040.000 pada tahun 2024. Kekurangan pencapaian IKU ini ditargetkan kepada kelompok kelompok masyarakat dapat memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga RPDS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPDS, realisasi anggaran dan serapan dan RPDS dengan realisasi anggaran.

7. Kendala Pencapaian

Pada Triwulan II ini tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok IKU, yaitu:

a. Penyampaian Hasil Identifikasi

Penyampaian hasil identifikasi dan verifikasi Permohonan Bantuan disesuaikan Peraturan Menteri Sosial Direktur Kesehatan dan Keselamatan Hayati Lain Nomor 8.1/01/KLPHRL.D/PRL.4/01/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- SP Nomor: SP.47/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 untuk Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Pedadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAP6 No: 46/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAST No:45/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No:46/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Pedadi dari Desa Telun Tanjung, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Bantuan komoditi yang diberikan sarana cctv unit komplesan: satu unit kamera underwater dan satu unit housing underwater dengan nilai asessar Rp. 90.200.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Kompensasi B.1978/BPSPL.3/PPK.440/V/2024 tanggal 4 Juni 2024.

Gambar 3.1.7-2. Serah Terima Bantuan KOMPAK

B. Realisasi Anggaran

Kelompok IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3962.QEH.001] Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 6 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[3962.QEH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 580.946.000	Rp123.466.629 (40,80%)	-
TOTAL		Rp 580.946.000	Rp123.466.629 (45,88%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 123.466.629 atau 40,80% dari pagu anggaran sebesar Rp 580.946.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Honorarium Dan Insentif Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pedadi.

Gambar 3.1.1-X. Grafik Realisasi anggaran kumulatif hingga Triwulan I

B. Realisasi Alat Triwulan III Tahun 2023

Memperlakukan pengadaan barang untuk bantuan kelompok masyarakat Penggarap Konservasi di Kalimantan Barat. Melaksanakan asset hasil pemberian bantuan KOMPAK di Kalimantan Barat.

IKU 3. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Darat pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan bantuan sosial yang terorganisasi yang memunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kehutanan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

IKU 3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 3	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Darat pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
Capaian 2023	Tahun 2023					Renstra BPSPL (Kumulatif)		Renstra DJPVL (2020-2024)	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW IV 2023	% Realisasi thd Target TW IV	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
1	Kelompok			1	-	3	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVL, Mei 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena pemberi pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilaksanakan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSKL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Pemanfaatan Alam". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Renstra (Rpjm PKH) 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSKL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang memiliki komoditi konservasi di wilayah kerja BPSKL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka menengah karena selain pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilaksanakan karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat penurunan klasifikasi Revisi Output menjadi [3343.BCC.003] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difasilitasi kapasitasnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga RPD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara RPD, realisasi anggaran dan selisih dari RPD dengan realisasi anggaran.

7. Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan (penundaan) terkait dengan IKU.

8. Realisasi Anggaran

Penerapan IKU ini sebelumnya dengan alokasi anggaran dan klasifikasi Revisi Output [3343.REA.005] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat penurunan klasifikasi Revisi Output menjadi [3343.BCC.003] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difasilitasi kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-2. Rencana IKU 8 Tahunan 1

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Efektif
1.	[3842.000.002.951] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 250.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
TOTAL		Rp 250.000.000	Rp 0 (0,00%)	-

h. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan identifikasi kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat kawasan konservasi.

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Penataan, Penyelarasan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan penataan, penyelarasan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui penataan, penyelarasan, perbaikan habitat pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Teruduk, Pari Air Tawar, Karang, dan Manfalla Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Penetapan Jenis Ikan Dilindungi Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Teruduk, dan Pari Air Tawar
b. Perbaikan Habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengawasan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi Terancam Punah dengan target jenis serta laut dilindungi sejenis manfalla laut

Teknik perlindungan capaian IKU ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dan menjalankan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Penetatan, Penyelarasan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1 Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

IKU 13	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Jasa Perairan yang Efektif dan Berkeadilan (Kawasan dan Wilayah BPSPL Pontianak)								
IKU 13	Jumlah Sub Kawasan Pulau yang Dikelola Pembinaan, Pengelolaannya, Pemanfaatan Berkelanjutan dan Pencadangan Pulau yang Dikelola di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Unit)								
Tahun Laporan 2024	Tahun 2024					Kumulatif (2020 - Sekarang)		Kumulatif (2020-2024)	
	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	% Capaian	Target IKU 2024	% Realisasi thd Target IKU	Target (2020)	% Realisasi thd Target 2020	Target (2024)	% Capaian thd Target Kumulatif
13	Persentase Capaian Tahunan		7	-	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak (LAKIP, Renstra 2020)

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan dapatkan pada Maret IKU diakhiran secara tahunan. Proses kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berkait Kima (penyelesaian data populasi), Karang (pembuatan Coral dan Mamalia Laut (rapat penangan mamalia laut terdampar). Sementara progress kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu untuk 3 jenis berkait Penyu (penyelesaian data populasi), Elmaterial Hiu dan Pari aparatus (penyelesaian data populasi) dan Mamalia Laut (rapat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan II yaitu 5 jenis dari keseluruh pulau telah dilakukan, Selain itu pada Triwulan II juga dilakukan Sosialisasi Biota Dilindungi dan telau terancam punah di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan, namun, pada Triwulan I tahun 2023 terdapat capaian kumulatif sebesar 5 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 (kumulatif 5 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 25% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 0 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL, karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 25% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Operasi YU III dilaksanakan oleh Detasemen Hajatan (sehyeldet) dalam skenario cepat, reaksi cepat memadai, tanggap darurat dan aceleasi bola sol dilindungi Tuhan dan alam. Reaksi cepat memadai dan tanggap merupakan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang erat dengan pelapor. Selain itu, analisis tingkat kejahatan bola tanggap yang sulit diprediksi serta keterbatasan sinyal telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan reaksi cepat. Oleh karena, diperlukan jaring penanganan di wilayah-wilayah sebagai solusi untuk reaksi cepat bola tanggap.

6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilaksanakan analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapai target di Timuden I sehingga HPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan HPSS realisasi anggaran dan sebuah dari HPSS dengan realisasi anggaran. Pembentukan jaring penanganan bola tanggap menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau sinyal kejahatan yang sulit diprediksi.

7. Kegiatan Pendukung

Bola Timuden II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terhadapnya ini, yaitu:

1. Bahrul Penyebaran Bola Pejuang Penyu di Kalimantan Barat

   Kegiatan pelepasliaran bola ini dipusatkan penyu di Kecamatan Barat dilaksanakan di Pantai Dungal Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 3 s.d. 14 Mei 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dahulu ancaman kelompok Pengawasan Wahana Sahabat Paloh. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Pantai Tanjung Api yang merupakan sekretariat atau Pos monitoring penyu dari Kelompok Masyarakat Pengawas Kawasan Konservasi. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

Gambar 2.1.5-1. Bahrul Pelepasliaran Penyu di Kalimantan Barat

Bahrul pemantauan pelepasliaran penyu dilakukan, dengan pemyataan tapi pantai pada hasilnya hanya sebagai sebagian kecil dengan jarak untuk sektor bukan sebagian kecil meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya ditemukan penyu di sektor 3 sampai dengan sektor 7, tetapi ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Hanya yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 4 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang telur rekrasi dengan jumlah telur per sarang

dan Kota Tl. = 100 ekor) yang dipantaukan akan meretas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Pesisir Pantai. Jenis penyu yang seringnya ditemukan adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.

5. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Tanaman Pantai

- Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/tanaman pantai

Selama periode April hingga Juni 2024 tercatat 3 (tiga) laporan informasi adanya terkait biota dilindungi dan atau tanaman pantai yang mati/sakit ketahan terdampar, terjerat jaring, dan lainnya yang serupa. Terdapat 1 (satu) jenis biota dilindungi dan atau tanaman pantai yang ditemukan penanganan yaitu cukut sebanyak 3 ekor, penyu sebanyak 2 ekor dan pasa sebanyak 2 ekor. Sebanyak 1 (satu) kasatan ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1), 4 (empat) kasatan mengalami luka dengan kondisi mati (kode 2, 3 dan 4) dan 1 (satu) kasatan sudah menjadi kerangka (Kode 5). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada asisten lokasi penemuan.

Gambar 3.1.5-3. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

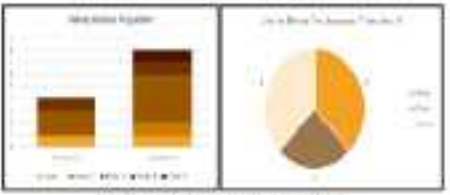

Gambar 3.1.5-5. Grafik Penanganan Biota Terdampar

- Sosialisasi biota laut dilindungi/tanaman pantai

Kegiatan Sosialisasi Biota Laut Dilindungi/Tanaman Pantai dilaksanggarakan para tanggal 3 Mei 2024 di Kantor/Aula Kelurahan Kampung Kampuran Kotagang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa/i Kelurahan serta akademisi yang ada di KKP3. Kendaraangan dan Perairan Sedarnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa hal terkait pentingnya menjaga kelestarian hidup biota perairan yang dilindungi dan atau tanaman pantai.

Gambar 3.1.8-4. Kegiatan Workshop

- Bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juni 2016 di kahayangan Resort, kabupaten Pangkajene, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan materi tali pancing, darat dan plastik dengan mengundang beberapa stakeholder terkait. Kegiatan ini berada sama dengan LSM/O Kolektif sebagai pemateri dalam bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah.

Gambar 3.1.8-5. Bimtek Penanganan Biota Dilindungi

c. Ekumerasi/Pendataan Hiu Pari Aperidks

Kegiatan pendataan satu hiu dan pari aperidks di Antarah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga fasilitator dari dalam ajun – Juni 2016. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Pontianak kapuasara (PPK) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Nunggal Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Aperidks di dapatkan hasil:

- Pendataan Hiu Pari Aperidks di PPI Pemangkat

Pendataan hasil tangkapan Hiu dan Pari Aperidks di PPI Pemangkat pada periode April – Juni didapatkan 9 jenis hiu aperidks sebanyak 274 ekor dan 4 jenis pari aperidks sebanyak 30 ekor. Jenis hiu aperidks tertangkap yang ditemukan yaitu Carcharhinus sorrah sebanyak 135 ekor dan jenis pari aperidks tertangkap yang ditemukan yaitu Rhynchobatus australiae sebanyak 14 Ekor. Jenis hiu aperidks paling sedikit yang ditemukan yaitu Carcharhinus leucas sebanyak 1 ekor dan jenis pari aperidks paling sedikit yang ditemukan yaitu Mobula thurstoni sebanyak 1 ekor.

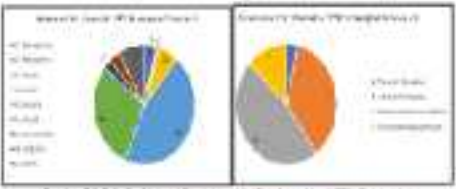

Gambar 3.1.9-6. Grafik Hasil Pemeriksaan Hinjan Apendika di RW Rancagoja

Gambar 3.1.9-7. Dokumentasi pengukuran

- Pemeriksaan Hinjan Apendika di RW Sungai Kalong

Berdasarkan hasil pemeriksaan Hinjan dan Pari Apendika di RW Sungai Kalong pada periode April – Juni, didapatkan 4 jenis hinjan apendika sebanyak 13 ekor dan 6 jenis pari apendika sebanyak 268 ekor. Jenis hinjan apendika terbanyak yang ditemukan yaitu Carcharhinus sorrah sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendika terbanyak yang ditemukan yaitu Rhynchobatus australiae sebanyak 147 ekor. Jenis hinjan apendika paling sedikit yang ditemukan yaitu Carcharhinus brevipinna sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendika paling sedikit yang ditemukan yaitu Glaucostegus typus sebanyak 21 ekor.

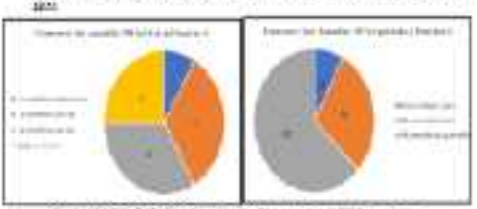

Gambar 3.1.9-8. Grafik Pemeriksaan Hinjan dan Pari Apendika di RW Sungai Kalong

- Pemeriksaan Hiu dan Apendika di RW Manggar

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendika di RW Manggar pada periode April – Juni, didapatkan 9 jenis hiu apendika sebanyak 1.833 ekor dan 1 jenis pari apendika sebanyak 24 ekor. Jenis hiu apendika tertanyak yang ditemukan yaitu Carcharhinus gibbus sebanyak 755 ekor dan jenis pari apendika terbanyak yang

Gambar 2.1.5-5. Grafik Pendataan IKL dan Pari Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah

Gambar 2.1.5-10. Dokumentasi Pengukuran

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2042.RKA.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dikonservasi. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output sesuai dengan tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.1.5-5. Realisasi IKU 10 Triwulan II

No.	Komponen/Kegiatan/Item	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	[2042.RKA.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 216.470.000	Rp 116.370.900 (54,77%)	-
2.	[2042.RKA.001.052] Rehabilitasi Pasca Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp 139.618.000	Rp 122.280.400 (90,17%)	-
3.	[2042.RKA.001.053] Rescon Dalam Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp 56.612.000	Rp 23.001.012 (41,04%)	-
4.	[2042.RKA.001.054] Sosialisasi Biota dilindungi/Terancam Punah	Rp 344.372.000	Rp 121.341.912 (35,24%)	-
TOTAL		Rp 708.000.000	Rp373.800.292	-

	49,73%

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp373.096.350 atau 49,75% dari pagu anggaran sebesar Rp 750.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

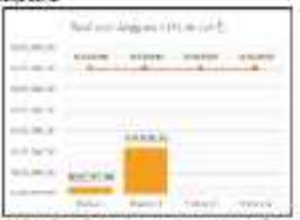

Gambar 2.1.3-41 Grafik Realisasi anggaran kumulatif hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi bulan Bhinneka Tunggal Ika (bulan), sosialisasi pendidikan kepabeanan di Kalimantan Barat, sosialisasi pendidikan cukai di Kalimantan Barat dan mengikuti kegiatan Festival Poster Pabean di Kalimantan Barat.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

a. Pelaporan pantauan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, meliputi Appendiks CITES, dan atau lock alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana).
b. Pemutakhiran data collector dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi berdasar Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana).
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan meliputi Pelaporan pantauan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, meliputi Appendiks CITES, dan/atau lock alike species; pemutakhiran data collector dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi berdasar Appendiks CITES dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

IKU 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw II (Kum)	% Realisasi thd Target Tw II	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	3	-	33	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan secara nasional. Namun, progress capaian Triwulan II Tahun 2024 telah pelaporan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 3 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Terbang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver). Sehingga itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Terbang di Kabupaten Sanggau dan Sintang.

Pelayanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya ditentukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL tahun 2020 – 2024 ditetapkan 30 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU tersebut hanya ditargetkan pada Triwulan IV. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah berjalan sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PHPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Akhir Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 3 jenis telah berjalan sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Kemampuan progres kegiatan dimotong oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses penerbitan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pemanfaatan dan terdapat target di Triwulan I sehingga NPSB belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSB, realisasi anggaran dan sumber daya NPSB dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi secara daring (online) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. **Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi DPJ, DAJI dan Rekomendasi)**
   Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan (Januari – Maret). Kegiatan ini terdiri dari:
   - Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
     Realisasi Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang tercantum dalam atau lampiran CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI

pada Triwulan II terdapat 6 pelaku usaha yang melakukan permohonan Verifikasi SPJI di Provinsi Kalimantan Barat

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi
  Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman inatrade.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat total 97 Surat Rekomendasi dengan 94 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 3 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis iku dan pari look alike species, setanyak 87 surat telah diterbitkan. Sementara itu, setanyak 93 Surat Rekomendasi untuk jenis tongkol telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk iku dan pari look alike terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk tongkol terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 18 surat

Gambar 2.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)
  Pelayanan pada tahap SAJI DN diterbitkan untuk jenis ikan yang ke media dalam jenis ikan yang (dimiliki) dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman inatrade.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat 99 SAJI DN untuk jenis ikan dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, setanyak 711 SAJI DN untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Penerbitan SAJI DN untuk ikan dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 19 surat. Sementara penerbitan SAJI DN untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 157 surat.

Gambar 2.1.9-2. Pemeriksaan BAJI

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)
  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil entri dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KKBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi terhadap ikan yang dapat dikirim pada rentang [illegible] selama Triwulan I terdapat 314 Verifikasi SAJI LN untuk untuk yang Arwana telah dilakukan, Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 211 surat.

- Verifikasi Stok Ikan
  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendix CITES. Hasil entri dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Verifikasi Hasil Panen
  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil entri dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Pembudidayan
  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendix CITES. Hasil entri dari Pengesahan Sertifikat berupa Sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BKIPM, Kemanak.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  Penerimaan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan II (Kumulatif) sebesar Rp1.132.893.341. Total PNBP yang diterima pada April – Juni sebesar Rp551.622.420. Nilai PNBP tertinggi pada Triwulan II disepakati pada bulan Mei sebesar Rp371.113.140, sementara terendah disepakati pada bulan Juni sebesar Rp331.400.876.

Gambar 3.1 9-5: Grafik Perbandingan PHBP

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung sepenuhnya oleh efisiensi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2262.REB.003] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan. Realisasi anggaran terkait pada Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 9-3: Realisasi IKU 11 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2262.REB.003.001] Penyusunan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp 330.000.000	Rp 23.001.937 (11,74%)	-
2.	[2262.REB.003.002] Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp 1.100.000.000	Rp 233.973.314 (21,62%)	-
TOTAL		Rp 1.330.000.000	Rp327.394.947 (25,10%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yang Rp 327.394.947 atau 24,10% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.000.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

C. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu Pelayanan (pelayanan perizinan (verifikasi SIPJ, DAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli – September 2024.

3.1.10. Gagalnya Kegiatan 10 Terlaksananya Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk alternatif pengganti yang berasal dari laut dalam dengan suhu lebih dingin dan 30 manfaatnya dimanfaatkan secara pada kawasan konservasi serta dilakukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara terbatas misalnya 39 hasil. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah kegiatan inventarisasi pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk alternatif laut yang akan dilakukan proses pendinginan. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk membuktikan atau kebenaran dokumen dan data pengusulan pemanfaatan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan dengan pengecekan lapangan di CSR. Teknis perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah usaha/ide identifikasi dan/atau verifikasi pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 di BPSPL Pontianak

IKU 10	Terlaksananya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Capaian 2023	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL Kemenparekraf	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw II 2023	% Realisasi thd Target Tw II	Target 2024	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
1	Periode Capaian Tahunan			1	–	–	–	0	–

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Tahun 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Pada triwulan II 2024 belum ada capaian dikarenakan pengusulan, kurasi, pemilahan dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan II yaitu persiapan verifikasi pendirian Air Laut Selain Energi (ALSE).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut yang terhitung dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 bilasi kawasan yang terfasilitasi pendirian pengelolaan perairan. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pendanaan dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kinerja IKU tercantum dalam lampiran dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengumpulan dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu sosialisasi pemindahan kawasan konservasi, sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi, kemanfaatan progres kegiatan tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan pemanfaatan perairan laut secara lestari. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan nilai realisasi target di Triwulan I sebanyak NIHIL belum dapat dinilai. Pembuangan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPSS realisasi anggaran dan selisih dari IKPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kawasan dan Instalasi Konservasi perairan bersama Balai/Loka/Seksi secara berkala.

9. Kendala Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU, yaitu berupa verifikasi dan Izin Pemanfaatan Air Laut Sekitar Energi (ALSE). Namun, Izin ada permohonan verifikasi perizinan pemanfaatan ALSE di wilayah BPSPL Pontianak pada Triwulan II sehingga tidak terlaksana kegiatan tersebut.

10. Realisasi Anggaran

Penyajian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2265.PBW.003] Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Bioprospecting dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan II

No.	Komponen/Kegiatan/Jenis	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2265.PBW.003.005] Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Bioprospecting air laut	Rp 130.000.000	Rp 23.126.400 (29,12%)	-
TOTAL		Rp 130.000.000	Rp 23.572.997 (29,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari-Juni) yaitu Rp 36.139.400 atau 29,6% dari pagu anggaran sebesar Rp 130.000.000. Realisasi anggaran ini untuk Loka Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Bintan.

Gambar 3.1.10-1. Realisasi anggaran kumulatif hingga Triwulan II

B. Capaian Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pencapaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) adalah ada beberapa permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 12. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikelola penanggulangan pencemaran di wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah Kerja BPSPL Pontianak meliputi Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi pada setiap wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengajaknya kolaborasinya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk caranya dapat dilakukan oleh masyarakat. Teknik pemungutan sampah dilakukan sangat mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga siapa saja dapat melakukannya. Tahun ini BPSPL Pontianak melaksanakan kegiatan pelayanan bulan cinta laut di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.31-1. Capaian IKU IT BPSDL Portanian

IKU 11	Meningkatnya Kerugian Negara dan Pelaku Pelaku Gelap yang Dikembalikan dalam rangka Penanganan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSDL Portanian
IKU 12	Kerugian Negara dan Pelaku Pelaku Gelap yang Ditindaklanjuti Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSDL Portanian (Kumulatif)

Tahun 2023									
Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target IKU 2023	% Realisasi thd Target IKU	Renstra BPSDL Portanian	% Realisasi thd Target Renstra	Target JMPP 2023-2024	% Capaian thd Target Akhir JMPP
-	Periode Capaian Tahunan			2	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSDL Portanian dan SJMPP, Unit 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilaporkan penguraian, karena pendataan dan pelaporan capaian pada triwulan IKU dilakukan secara tahunan. Proyek kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gemas SDL, identifikasi dan verifikasi nasyan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2024

Hal-hal kinerja Kemudian Pelaku dan Pelanggaran Hukum yang ditemukan pertanggungjawaban pencemaran di Wilayah Kerja BPSDL Portanian" mencapaian IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena tidak tersajikan IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengan yang tertuang dalam Renstra SJMPN 2023-2024 yaitu sebanyak 4 komunitas pelaku dan pelanggaran hukum yang ditindaklanjuti penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal itu disebabkan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSDL Portanian 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSDL Portanian Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Realisasi di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Proyek kegiatan yang telah dilaksanakan sampai bahan Triwulan II dapat memotong terlaksananya target di akhir tahun. Meskipun begitu, dalammasilan progres kegiatan yang dilaksanakan sangamung pada koordinasi stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Monitoring/evaluasi dapat mengefektifkan terlaksanakannya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis karena pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Riau berdasarkan target di Triwulan I sehingga RPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPSS realisasi anggaran dan selisih dari RPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Realisasikan kegiatan pendukung hingga saat ini pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Pelaksanaan Kelas Cinta Laut di Kab. Kotu Raya

Kegiatan pelaksanaan Kelas Cinta Laut di Kabupaten Kotu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan trad lokasi dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jenjiu Besar sebanyak 30 orang dan Desa Sungai Rangas sebanyak 40 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola seperti yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPP/P Kab. Kotu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat kegiatan BCL

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jenjiu Besar	KUB Sakat Sejati	10
	KUB Kenali Maryh	10
Desa Sungai Rangas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Lombung	10
	KUB Berombang Laut I	10
	KUB Berombang Laut II	10
	KUB Berombang Laut III	10
	KUB Berombang Laut IV	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengunjungan dan Penangkapan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 30 Mei dan 20 Juni anggur mahal yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan proses cara pengolahan sampah dan mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL dan EPSPL Pemanfaat.

Gambar 3.1.11-1. Bimbingan Teknis di Kab. Kotu Raya

- Kegiatan Pemantangan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 diidentifikasi sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah sampah non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang terkait consume objek dengan total hasil pungutan sampah sebesar Rp4.845.000. Kota Singkawang Laut 3 kategori kelompok tertinggi dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.072,2 kg.

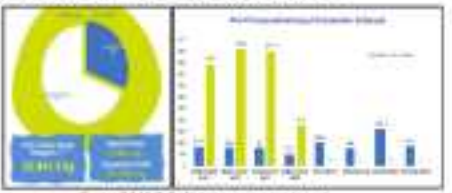

Gambar 2.1.11-8. Grafik data pengumpulan sampah

b. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 20 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktifasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Sebapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Hanam sebanyak 22 orang dan Kel Kasa sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pembersihan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.11-3 Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Singkawang

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kec. Sebapuk Besar	KUB Sungi Pandana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mandiri	11
Kel. Hanam	KUB Hanam Jaya Abadi	22
Kel. Kasa	KUB Nelayan Bersih	10
	KUB Bakakuda	10

F. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh DPDPL Pontianak.

Gambar 2.1.11-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.903,65 Kg. Nilai sampah terkumpul. Sebanyak 50% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 27% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.826.600. Nilai manfaat ekonomi masyarakat nelayan dengan pendampingan sampah paling banyak sebesar 3.333 Kg.

Gambar 2.1.11-4. Grafik data pengumpulan sampah

c. Pelaksanaan Kerja Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan dilaksanakan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut (Minor) pada tanggal 24 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan laut aktif dan 6 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Rukam sebanyak 54 orang dan Desa Rantau Layang sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Indah Bahkan Berkesan. Kemudian kegiatan dilaksanakan dengan Bimbingan Teknis serta Pelatihan dan Pengangkutan yang dilaksanakan hari dua hingga selesai.

Tabel 2.1.11-4. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kab. Tanah Laut

Kecamatan	Kelompok	Jumlah Orang
Desa Sungai Rukam	Kub Bina Bersama	20
	Kub Bintang Laut	10
	Kub Kuda Laut	10
	Kub Cinta Lestari	24
Desa Rantau Layang	Kub Bina Harapan Bersama	6

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi hasil olah sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Teluk Lasi

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang sejak Mei – Juni 2021 mengalami penurunan 4.840,6 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.293 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomi penjualan sampah sebesar Rp4.196.900.

Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah

d. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2021 dengan koordinasi dan sosialisasi kepada kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan) sebanyak 20 orang. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pemberdayaan dan Pengorganisasian yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-6. Jumlah nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggan	KUB Nirapan	26
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Selaya	10
	KUB Les Bahalan Pelar	12
	KUB Anugrah Sinang	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarpras

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Sei Rakyat dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, analisis waste pengelolaan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan EO, dan RPSP, Pemateri

Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Sei Rakyat

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian KU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kasifikasi Rincian Output [4046.000.001] Pasifikasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pelatihan Dinas Biasa dan Belanja Pelatihan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-8. Realisasi anggaran kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarpras Triwulan II

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4046.000.001.001] Biaya Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 415.780.000 (51,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp415.780.000 (51,97%)	-

Sumber Data: RPSP, Pemateri (Update SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU ini pada Triwulan I sampai dgn Januari 2024 yaitu Rp. Rp415.780.000 atau 51,97% dari pada anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.

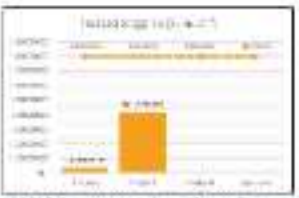

Gambar 3.1.11-9. Realisasi anggaran komulatif hingga Triwulan II

4. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2023

Melakukan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran database kolong ikutan di laut. Kegiatan penutupan dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gemas BDL dengan melibatkan nelayan lokal, mitra daerah dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/Lembaga atau belanja bagian anggaran pengelolaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan 8 indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Deviasi Output – Bobot Penilaian 20%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 83 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ Nilai IKPA < 90 atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi dashg Old DPAK Kementerian Keuangan pada laman https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/dashg/

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Baseline (2023) Pontianak		Capaian (Des 2024) Pontianak		
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Kumulatif
93,00	93	93,00	113,00	93,75	93,71	93	100,0	93	100,0

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPR, Kemenkeu 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak pada Triwulan II diidapatkan nilai sebesar 92,88 dengan kategori baik. Hasil ini diperoleh dari penjumlahan nilai masing-masing indikator sebagai berikut: Revisi DIPA (10,00), Deviasi Halaman III DIPA (13,04), Penyerapan Anggaran (16,75), Belanja Kontraktual (10,00), Penyelesaian Tagihan (10,00), Pengelolaan UP dan TUP (9,34) dan Capaian Output (21,80).

Secara umum capaian pada triwulan I/semester I tahun 2024 telah melebihi dari target 52 pada periode tersebut (112,96%). Capaian ini juga telah melebihi target pada Renstra BPSPL Pontianak untuk tahun 2024 yaitu 58 (103,9%), dan Renstra DJPPI untuk tahun 2024 yaitu 90 (102,8%). Namun, capaian pada triwulan II/semester I belum dapat mencapai target PK 80%, Pertanian Tahun 2024 yaitu 93,79 atau setara 98,71%. Capaian IKK ini disampaikan melalui Nota Dinas Biro Keuangan KKP Nomor 2101/DJ.2/KU.100/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 kal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024 (Surat Sebut KKP, 10 Juli 2024).

Gambar 3.1.1(2) Nilai IKPA Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester I tahun 2024 adalah 93,64 (112,96% dari target semester) sebesar 52 dari 98,71% dari target tahunan sebesar 93,79), sedangkan capaian triwulan II/semester I tahun 2023 adalah 90,66 (97,04% dari target tahunan 93,79). Sehingga capaian triwulan II/semester I tahun 2024 mengalami peningkatan 1,47% dibandingkan capaian triwulan II/semester I tahun 2023.

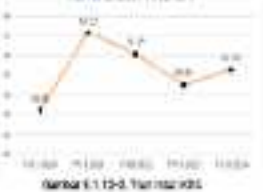

Gambar 3.1.1(3-3). Trend nilai IKPA

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK tersebut terhuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester I tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut sebesar 101,6% (93,64 dari 93). Sehingga capaian

tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

6. Pertanggungjawaban Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 93 untuk tahun 2024. Capaian triwulan II/semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 102,2% (90,88 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

7. Analisis Penyebab Ketidaktercapaian/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ketidaktercapaian pencapaian IKU tersebut dikarenakan dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta optimal. Pencapaian nilai IKPA yang baik dikarenakan oleh kedisiplinan, konsistensi, ketelitian dan kecepatan waktu dalam untuk pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, tim pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Setiap ada permasalahan yang ditemukan akan dievaluasi dan dimonitor perkembangannya.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga IKU00 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKU00, realisasi anggaran dan output dari kinerja dengan realisasi anggaran, biaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara cepat. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi biaya penggunaan e-mail dan whatsapp group untuk memberitahu staf pelaksana keuangan (telah memahami perkembangan peraturan keuangan) mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi permasalahan.

9. Kegiatan Penting lainnya

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya/hal lain yaitu:

a. Revisi DIPA
   - Revisi Halaman III DIPA pada 02 April 2024 (Revisi ke 2)
   - Revisi Kewenangan KPA pada 26 April 2024 (Revisi ke 6)
   - Revisi Kewenangan Kelmin pada 3 Juni 2024 (Revisi ke 7)
   - Revisi Kewenangan DJA pada 11 Juni 2024 (Revisi ke 8)
b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp8.278.264.471 atau 44,40% dari pagu anggaran sebesar Rp18.648.115.000 (Sumber data: OMSPAN per 30 Juni 2024)
c. Data Kontrak sebanyak 9 kontrak pada April – Juni 2024
   - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop Sebanyak 3 Paket sesuai Kontrak No.SP.43/BPSPL.3/PPK/SPK/III.2/2024 tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop, Printer, dan Server Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.3/PPK/SPK/III.2/2024 tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop, Printer, dan Server Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.45/BPSPL.3/PPK/SPK/III.2/2024 tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop, Printer, dan Server Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.46/BPSPL.3/PPK/SPK/III.2/2024 tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Belanja Pemeliharaan Komputer/ Laptop dan Telefon sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.49/BPSPL.3/PPK/SPK/III.2/2024 tanggal 23 April 2024.

- Pengadaan Jasa Pemeliharaan Komprehensif (DIH BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SPK.45/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 April 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KEMITRAAN TA 2024 Kelompok Rotodisi di Kabupaten Sanggau sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 23 Mei 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pembinaan Kelompok Gabung Kegiatan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.52/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

c. Pemyelesaian Tagihan setiap bulan
c. Penyelesaian LP sebanyak 2 kali dari 11 (9 kali
7. Pelaporan Capaian Rincian Output (CRO) periode April – Juni 2024
g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran

- Workshop RPA "Optimalisasi Capaian RPA TA 2024, Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I, Optimalisasi Penyerapan Anggaran serta Identifikasi Sekitar pada 2 s.d. 4 April 2024 di Jakarta.
- Pembahasan Penetapan akun Signifikan PPK pada Entitas akuntansi Lingkup DJPKN, Tahun 2024 pada 22 April 2024
- Tindak lanjut Usulan Penetapan Akun Signifikan PPK BPSPL Pontianak Tahun 2024.
- Final test Penetapan Akun Signifikan PPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKN, tahun 2024 pada 8 Mei 2024 secara daring.
- Pelaksanaan Konsiol Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 Auditor Kantor Kerja BPSPL Pontianak
- Pembahasan Penyusunan identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan Belanja Barun, Barang Konsumsi, Pemberdayaan Sosial/Bantuan ke Masyarakat dan Proyek Investasi atas Penerapan PPK Tahun 2024 pada 3 s.d. 5 Juni 2024 di Jakarta Pusat
- Penyempurnaan Penyusunan identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Tahap 4) dan atau Pemantauan Identifikasi Risiko dan Pengendalian (Tahap A1).
- Revisi atas Pemantau Tahap identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalianya (Tahap 4) dan atau Penyusunan Pemantau Identifikasi Risiko dan Pengendalianya (Tahap A1) PPK Tahun 2024 Lingkup DJPKN, pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta.

B. Analisis Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (2047.004) Layanan Dukungan Manajemen Internal dan (2047.995) Layanan Manajemen Kesangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai contoh:

Tabel 3.1.10.2. Realisasi Anggaran KSK ke Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[054.7.884.994.051] Layanan Aktif	Rp 43.000.000	Rp 248.000 (0,79%)	-
2.	[054.7.884.994.041] Layanan Informasi	Rp 32.000.000	Rp 13.887.671 (39,10%)	-
3.	[054.7.884.994.031] Daji dan Tunjangan	Rp 8.287.000.000	Rp 3.434.758.826 (44,40%)	-
4.	[054.7.884.994.033] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 3.734.204.000	Rp1.870.270.662 (50,09%)	-
5.	[054.7.883.994.041] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 153.880.000	Rp 49.750.000 (37,31%)	-
TOTAL		Rp 9.231.134.000	Rp5.060.920.000 (54,09%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung KSK di pada Triwulan II (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 5.060.920.000 atau 54,09% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Daji dan Tunjangan Lainnya KPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang Jasa.

Gambar 3.1.10.2. Realisasi Anggaran Komulatif Hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

a. Revisi Halaman III DIPA (Kontrangan KSK)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Pemeliharaan bagunan dan pemeliharaan anggaran
d. Pengisian DPC bulan Juli – September 2024

IKM 13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Dengan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja manajerial pengunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau

program dan perhatikan kelemahannya. Aspek ini fokus adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan Informasi Kinerja mengenai pencapaian yang terkait dalam Pemangkuan Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program kementerian/Lembaga. Aspek Kontrol adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan Informasi mengenai kepatuhan Informasi yang tercantum dalam dokumen RKA/DIPA termasuk relevansinya perkembangan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, sebagian analisis kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 kategori, antara lain:

a. Sangat Baik, apabila RKA > 90
b. Baik, apabila RKA >80 – 90;
c. Cukup, apabila RKA >60 – 80
d. Kurang, apabila RKA >60 – 60;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian IKU 12 RKA BPSPL Pontianak Sebagai berikut

Tabel 3.1.12.3. Capaian IKU 12 RKA BPSPL Pontianak

Sasaran	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12: Tata kelola pemerintahan yang baik (unit) di UPT BPSPL Pontianak
IKU 12	IKU Kinerja Anggaran Satker BPSPL Pontianak (KAK)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW (2024)	% Capaian TW I Thd Target TW	Target 2024	% Capaian TW I Thd Target 2024	Target 2024	% Capaian TW I Thd Target Renstra
88	Periode dalam tahunan			90		89	-	89	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, diolah 2024

1. Capaian IKMI Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut terhitung dalam Renstra Ditjen PPKL 2020 – 2024, yaitu nilai RKA adalah 89 pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 89 di tahun 2024. Capaian triwulan pada Triwulan II dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung periode pengukuran tahunan.

5. Analisa Penyebab Ketidaktercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola lapangan BPSFL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran, adanya hal tersebut menjadi modal bagi untuk mulai berpikir/bekerja lebih keras lagi dalam pelayanan selanjutnya.

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisa secara efisiensi atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga RPD belum dapat diinput. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPD, realisasi anggaran dan selisih dari RPD dengan realisasi anggaran. Apabila efisiensi penggunaan sumber daya yang dianalisa yaitu melalukan dengan pada Revisi DIPA dapat secara rinci. Sejak ini penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup mengunggah seluruh revisi output. Perhitungan HVA yang terhadap aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian dilakukan pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Konflik/ Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semesteran Tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 1b. Nilai Unit Kerja Bergerak Menuju WBK di BPSFL Pontianak (Nilai)

Nilai prioritas yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar pemicuan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar pemicuan sebagai berikut:

a. Memiliki nilai total (penjumlahan dari hasil) minimal 75 dengan minimal nilai penguji/ahli adalah 40.
b. Bobot nilai pemaparan penguji minimal 40% untuk semua para penguji.
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya pemenuhan yang Baruh dan Bebas Korupsi minimal 10,00, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 10,0 dan sub komponen Pelaporan LHKPN minimal 5,0.
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Inspektur KII dan/atau Wilayah Pengawasan yang ditandatangani Inspektur KII. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian mengacukan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi senilai 90,01. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2021.

Tabel 3.1.12-6. Capaian IKU ke dalam WBK BPSPL Pontianak

IKU 13	3.1.13. Rasio Capaian 13 Tata Kelola Pemanfaatan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 13	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Pontianak (Nilai)								
Rasio Level 2022	Tahun 2021					Rasio BPSPL Pontianak		Rasio DJPRL, BPSPL Pontianak	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW III 2021	% Realisasi thd Target TW III	Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
0,97	Periode Capaian Tahunan		79	-	-	80	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2022

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan evaluasi capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2022 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini terhitung dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Kerja dan Konsep Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2022 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut terhitung dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2022 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada pelaksanaannya dan pemantauan mandiri pada area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat diskusi sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga IKU3 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

efektivitas pelaksanaan dan pencapaian IKPBS, realisasi anggaran dan sinkronisasi IKPBS dengan realisasi anggaran. Upaya efektivitas pengawasan simtibi daya yang dilakukan yaitu rapat koordinasi internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Anggaran Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercatat sejumlah 100 jenis:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit sesuai suamiya untuk periode Januari – Juni 2024.
b. Audit Internal penerapan sistem manajemen mutu pada tanggal 16 Kosmun 2024 secara hybrid di Kantor BPSPL Pontianak dan zoom meeting.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran ini dilakukan dengan analisis anggaran dan realisasi Rincian Output [2247.004] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2247.994] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.13-6. Realisasi Anggaran WBK Tw. II Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2247.994] 001.005 Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 99.800.000	Rp17.729.300 (29,64%)	-
TOTAL		Rp 99.800.000	Rp 3.729.300 (29,64%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung WBK ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17.729.300 atau 29,64% dari pagu anggaran sebesar Rp 99.800.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.

Gambar 3.1.13-4. Realisasi Anggaran Komulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit sesuai suamiya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi internal sasi pembangunan Zona integritas di BPSPL Pontianak.

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melaksankan tugasnya dengan. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM4. Selanjutnya Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2013 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 29%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 29%
d. Disiplin memiliki bobot 6%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal tertentu yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator rinwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator rinwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/ Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/ Tinggi
71 - 80	Kurang Tidak Profesional/ Rendah
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/ Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/ sangat Rendah

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut dapat langsung dan dapatkan IP ASN KKP yang bersifat dalam informasi Manajemen Kepegawaian di alamat http://mpsdm.kkp.go.id.

Tabel 2.1.17-5 Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

IKM 17	2.1.17 Indeks Kepuasan 17 Tata Cara Pemanfaatan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)								
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPDL 2020-2024	
	Target 2021	Realisasi Tw IV	% Capaian	Target (TC 2020)	% Realisasi thd Target TC	Target 2022	% Realisasi thd Target 2022	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
90,84	83	89,13	107,39	88	24,73	79	112	79	112

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPDL, Tahun 2021

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Nilai triwulan I/semester I tahun 2024, IKM 17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak telah tercapai 66,12 (102,59%) dari target 80. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B-4894/DJPRL.1/KP.720/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Capaian Komposit Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PRL (Sumber: Setditjen PRL 15 Juli 2024). Adapun capaian IKM 17 pada triwulan ini belum dapat mencapai target pada PK BPSPL Pontianak tahun 2024 yaitu 80 (96,72%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian triwulan I/semester I tahun 2024 adalah 66,12 (96,72% dari target triwulan III), sedangkan capaian triwulan I/semester I tahun 2023 adalah 81,74 (99,68% dari target triwulan III). Sehingga capaian triwulan I/semester I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,09% dibandingkan capaian triwulan I/semester I tahun 2023.

Gambar 3.1.10-5 Tren IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 79 pada tahun 2024. Capaian triwulan I/semester I tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 112% (66,12 dari 79). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2022 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 79 pada tahun 2024, capaian triwulan I/semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 112% (66,12 dari 79). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini tidak lepas dari upaya pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi dilaksanakan secara luring dan daring untuk meningkatkan pemahaman Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan hasil tersebut terjadi di Triwulan I sehingga RPIK belum dapat direviu. Pembahasan analisis

efektivitas distribusi dan pemanfaatan HPHS, realisasi anggaran dan sinkron dari HPHS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercatat pada KAK yaitu:

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada April – Juni 2024, diantaranya adalah:
   - Rapat Kerja Teknis Tahun 2024 pada 24 s.d. 25 April 2024 di Semarang.
   - Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pemetaan Habitat Bakal Kawasan Dangkal pada 6 s.d. 7 Mei 2024 di Bogor.
   - Pelatihan Pemrosesan Normatif Perizinan Garis Pantai pada 6 s.d. 8 Mei 2024 di Makassar.
   - Rapat Koordinasi Teknis Kelembagaan Sistem Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut pada 14 s.d. 16 Mei 2024 di Bandung.
   - Pelatihan Identifikasi Ikan Hiu dan Pari "Biologi dan Ekologi Ikan Pari" pada 22 Mei 2024 secara daring.
   - Pelatihan Dasar-dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada 29 Mei 2024 secara daring.
   - Diklatsar Kehumasan "Mengasah Keterampilan Menguatkan Reputasi" pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta.
   - Training Application Coastal Engineering: Rancangan Hidrodinamika pola sedimen dengan Software Delft3D pada 12 s.d. 16 Juni 2024 secara daring.
b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada April – Juni 2024 dan Monitoring Triwulan II 2024.
c. Pemetaan prestasi kerja pegawai pada aplikasi SKPKinerja BKN pada April – Juni 2024.
d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi SKPKinerja BKN pada April – Juni 2024.
e. Rekapitulasi dan monitoring prestasi pegawai pada April – Juni 2024.

8. Realisasi Anggaran

Penyerapan KAK ini sebagai dengan aktivasi anggaran dan klasifikasi Rincian Output (Jika Ada) Layanan Dukungan Manajemen pada Kinerja Internal. Realisasi anggaran per klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.17-7. Realisasi Anggaran KAK 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2567.EBD.994.231] Layanan Manajemen Kinerja	Rp344,465,000	Rp331,912,413 (91,37%)	-
TOTAL		Rp344,465,000	Rp331,912,413 (91,37%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung KAK ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp344,465,000 atau 91,37% dari pagu anggaran sebesar Rp344,465,000. Realisasi anggaran dijabarkan Lebih Detailnya Sebagai

Gambar 2.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan I

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I-I Tahun 2024 yaitu:

a. Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai;
b. Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai;
c. Rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, seminar, seminar strategis workshop yang disiapkan pimpinan baik dari BKN/PPL Pontianak maupun dari instansi lain.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Hasil PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak ini tentu berdasarkan Permen Pan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP yaitu: Perencanaan Kinerja (20%); Pengukuran Kinerja (20%); Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah berdasarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Biro PKPL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 2.1.12-5. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>80 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai ke level individu.
A	>60 - 80	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memenuhi perundahan dalam menciptakan pemerintahan berorientasi hasil, kinerja pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon II/Pengawas/Subkoordinator.

80	+70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa unit sangat baik pada 3/4 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan indikasi terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengawasan kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 koordinator
8	+60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/2 unit kerja khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta koordinasi dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3 dari satu
CC	+50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian, masih perlu banyak perbaikan misalnya tidak mendasarkan evaluasi atas kinerja pada unit kerja
C	+30-50	Kurang Dokum dan tatanan dalam AKIP kurang dapat dipahami. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Dokum dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat dipahami. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Implementasi dalam implementasi SAKIP.

Capaian Kin 10 Sebagai berikut

Tabel 3.1.10-6. Capaian Kin 10 BPSPL Pontianak

Kin 10	3.1.10. Sistem Rujukan 10 Titik Balai Pemantauan yang Berfungsi (BPSPL Pontianak)								
Kin 10	Nilai Kin SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Sasaran 2020	Tahun 2020					Realisasi (BPSPL Pontianak)		Realisasi (UPTD, Direktorat)	
	Target Thn I	Realisasi Thn I	% Capaian	Target Thn 2020	% Realisasi thd Target Thn	Target 2020	% Realisasi thd Target 2020	Target 2020	% Capaian thd Target Renstra
80,3	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	80,13	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan UPTD, Work 2020

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target (no data/-). Periode (ref tabel/ref) ini/tidak/nya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHPL 2020 – 2024 yaitu Nilai PU SAKIP Lingkup Ditjen PHPL sebesar 82,75. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHPL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Rekomendasi Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian semnal dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim pelaporan, pelaporan dan evaluasi kinerja. Pemberlakuan tim pengelola kinerja mengikat aspek/aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah juga diberikan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I sehingga RPD belum dapat direvisi. Pemantauan analisis efisiensi dilakukan dengan mengidentifikasi RPD, realisasi anggaran dan simpan pan RPD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pemutakhiran basis data laporan serta data sunungnya dengan memanfaatkan *analisis google drive* dan aplikasi pendukung lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

a. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Response master Aplikasi Kinerjaku dan eMonev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Nina Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d 4 April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PHL nomor B.1662/D.PHPL.1/TU.4/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.

b. Mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis DJPHPL Tahun 2024 pada 24 dan 25 April 2024 di Padma Hotel, Semarang, sesuai Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Ruang Laut nomor B.2170/DJPHPL.1/TU.203/IV/2024 tanggal 18 April 2024.

i. Menerbitkan penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1230/BPSPL.3/TL.140/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

ii. Mengikuti kegiatan Misgocss Kegiatan Rahasia Kinerja Audit dan Unit Kerjasama Teknis Lingkup Ditjen PHKL Tahun 2024 pada 29 Jan s.d 30 April 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Inspektur Nomor B.28/ITJ.2/IV/2024 tanggal 15 April 2024.

iii. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Renstra Akhir dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Lingkup DJPHKL pada 18 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PHKL Nomor B.2130/SJPHKL.1/TU.203/IV/2024 tanggal 12 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, terungkap nasi capaian kinerja 116 (delapanbelas).

iv. Mengikuti kegiatan Forum Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.121/e/Ci.2.1/RO.4/05/2024 tanggal 13 Mei 2024.

v. Menyerahkan ke Kepala BPSPL Pontianak Nomor B/BPSPL.3/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

vi. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PHKL Nomor B.2930/SJ/PHKL.1/RC.610/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai Kinerja Organisasi (NKO) assessor I (Self-assess) dan NKO Verifikasi assessor I (Self-assess).

vii. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan DJPHKL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di Kab. Bogor sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PHKL Nomor B.3230/SJ/PHKL.1/RC.610/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai EX AKIP sementara sebesar 81,75. Nilai ini telah mencapai target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja namun masih menurun dibandingkan nilai tahun lalu. Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen tambahan sesuai rekomendasi Tim Evaluasi AKIP tersebut dan diharapkan pada awal Juli.

Gambar 2.1.10-2. Kegiatan Evaluasi AKIP

B. Realisasi Anggaran

Komposisi IKM ini disusun dengan akses cloggalan dari Klasifikasi Rincian Output [2267.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2267.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-15 Realisasi Anggaran s.d. Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Triwulan	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 87.000.000	Rp 65.870.227 (67,70%)	-
2.	[2267.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.000.000	Rp 41.748.027 (37,59%)	-
TOTAL		Rp243,000,000	Rp196,434,481 (46,03%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp196,434,481 atau 46,03% dari pagu anggaran sebesar Rp243,000,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan III tahun 2024, pembahasan pelaporan kinerja (triple) Ditjen PKN, Triwulan II tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lengkap SPISPL Permanen (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJKN/KL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan II Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik pemfungsian dilakukan dengan mengimplementasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.13-01 Capaian IKU 12 BPSPL Purwokerto

IKU 12	3.1.13. Rasio Capaian 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Purwokerto								
IKU 13	Layanan SPIP yang Efektif Lingkup BPSPL Purwokerto (Outcome)								
Indikator Kinerja	Tahun 2024					Renstra BPSPL Purwokerto		Renstra DJPPL (Eselon I)	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
A	B	C	D = C/B	E	F = C/E	G	H = C/G	I	J = C/I

Sumber data: BPSPL Purwokerto dan DJPPKL (Juni 2024)

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun tahun 1 tahun 2024 telah terlaksana 2 (dua) (100) hari (100%) dari target 2 (dua) dokumen. Capaian IKU 12 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Purwokerto Nomor 6.SKI.BPSPL.3/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Akhir Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan

b. Surat Kepala BPSPL Purwokerto Nomor B.1102/BPSPL.3/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian triwulan II semester 1 tahun 2023 adalah sama/sebanding meliputi 2 (dua) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tercantum dalam Renstra DJPPL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Dilan Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada triwulan II semester 1 tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Purwokerto 2020 – 2024 yaitu 5 (lampiran) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada triwulan II semester 1 tahun 2024 dengan jumlah 2 (dua) dokumen telah berkontribusi 20% dari Target Renstra BPSPL Purwokerto. Tidak tercapainya target pada Renstra BPSPL Purwokerto 2020 - 2024. Permasalahan dokumen telah berkontribusi pada pemenuhan target PK BPSPL Purwokerto Tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Kendala Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian dokumen SPIP telah terealisasi tanggal 100% dari target triwulan II semester I tahun 2024. Hal ini dibuktikan telah diterima Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPPKL tepat waktu setiap triwulan (ditugaskan pertama setelah triwulan berakhir, maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Triwulan I tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu dokumen tanggal 19 April 2024 (berdasarkan Surat kelambatan Dilan PKPL Nomor B.2074/DJPKPL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pelaksanaan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.13-15 efisiensi dari sasaran IKU 19 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKU 19. Laporan SPIP yang disusun (ruang) BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	24.900.000	0	0	100

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu :

a. Pembahasan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 secara daring pada 23 April 2024.
b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kasatker Pengendalian dengan Pembahasan Manajemen Kantor Tahun 2024.
c. Pembahasan Pencatatan Pemanfaatan SIMTA 2024 secara daring pada 29 Mei 2024.
d. Penyiapan Penilaian Mahmitras SPIP Lingkup Ditjen PHPL TA 2024 pada 7 Juni 2024.
e. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1122/BPSPL.3/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024.
f. Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1322/BPSPL.3/TU.140/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024.
g. Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1610/BPSPL.3/TU.140/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024.
h. Ikut serta pada Webinar Pendalam Materi Pengendalian Intern Kemaritan (SPIP) Terintegrasi pada 16 Mei 2024 secara daring.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2267.BBD] Layanan Manajemen kinerja internal, dengan Rincian Output [BBD.WH] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 19 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp24.900.000 atau 0% dari pagu anggaran Rp24.900.000.

Tabel 3.1.13-16 Realisasi Anggaran kegiatan Pendukung IKU 19 pada Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2267.BBD.WH.001.E] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (53.9 bln)	Rp24.900.000	Rp0 (0%)	-
TOTAL		Rp24.900.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan III adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024, serta melakukan pemaparan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
b. Menyusun Laporan SPIP Bulan Juli, Agustus, dan Triwulan III Tahun 2024

IKM 10. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh material pemerintah sebagai sarana untuk mengidentifikasi, mendigitalisasi, menyebarkan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, disimpan dan dipelajari. Pengimplementasian di tahun ini berdasar dari pemakaian 7 komponen, yaitu Komponen Kesiapan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office 365 pada laman https://portal.kkp.go.id/kkp. Penghitungan kesiapan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 5 poin dan maksimal 6 poin. Adapun kesiapan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W+1H mendapatkan poin 5;
b. Konten berupa info grafis dengan poin 1;
c. Konten video/kampanye dihasilkan berdurasi kurang atau sekitar dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Kesiapan akan dinilai setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan kesiapan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 5 poin dan maksimal 6 poin sesuai kesiapan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 5 dihitung dari kesiapan Bagian I.
- Deskripsi PRL menyesuaikan data hasil rekapan pelaksanaan yang telah eNRF pada setiap triwulan untuk dinilai dan dijadikan nilai IKM UPT masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 10 BPSPL Pontianak

Sasaran 3.1.12	3.1.12. Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Pemerintahan yang Berkualitas Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM 10	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)							
Nama Sasaran 2020	Tahun 2024					Rentang RPJMN Pontianak		Rentang SPPG 2020-2024
	Target Akhir	Realisasi Akhir	% Capaian	Target IKK 2024	% Realisasi thd Target IKK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Rentang
11,00	34	114,67	122	93	122	93	122	93	122

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAPPSL (www.bpspl.id)

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 114,67% dari target nilai 34. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPSL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Lebih lanjut pada pada tahun 2022 target meningkat sebanyak 3 poin dari tahun 2023 yaitu dari 33 menjadi 34. Pada triwulan II/kedua/ 1 tengah IKP 34 dan telah tercapai 100% dan target triwulanan dengan perseimasi capaian 124,11%. Capaian IKP pada Triwulan II 2024 sebanding dengan capaian IKP Triwulan II 2023 yaitu 100%. Capaian IKM 10 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.3074/DJPRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Capaian

Perpanjangan Satuan Kerja UPT Unit/Kantor Di PKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian triwulan II semester I tahun 2024 yaitu 116,67 (124% dari target triwulanan III), sedangkan capaian triwulan III semester I tahun 2023 yaitu 100 (106,76% dari target triwulanan III). Artinya terdapat kenaikan capaian IKP pada triwulan II semester I tahun 2024 sebesar 16,3%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKH tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian triwulan II semester I tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 100% (116,67 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melampaui target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian triwulan II semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 100% (116,67 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian semakin meningkat dengan Triwulan II sebesar 116,67% (124,11% dari target triwulanan III). Hal ini didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal IKP yang digunakan oleh pegawai ingkup BPSPL Pontianak

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pelaksanaan pendampingan dilaksanakan secara daring.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan II ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan penunjang terlaksananya IKH, yaitu Kesekiftar Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office 365. Dokumentasi kegiatan sejak konten yang diinggal telah diverifikasi dengan foto dan terlampir pada Portal IKPTH.

8. Kendala dan Hambatan

Tidak terdapat kendala khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKH ini, sehingga tidak terdapat kendala khusus/signifikan pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan III yaitu, Kesekiftar Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office 365 pada Juli – September 2024.

IKM 21, Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditanghapi dan Disempaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terdiri pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara formal (status tindak lanjut adalah TL/HTL/E) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/review/evaluasi/pemantauan formal rekomendasi tidak masuk dalam sistem maka tindak lanjut rekomendasi dinilai secara manual oleh Satker/Ijen PTL. Jika tidak ada audit/review/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/review/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi maka perhitungan capaian 100 sehingga capaiannya otomatis selesai 100%.

Tabel 3.1.12-19 Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

IKU 19	3.1.12. Jumlah Kapal ex 12 Tata Kelola Pemanfaatan yang Sah Lingkup BPSPL Pontianak
IKU 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditanghapi dan Disempaikan (%)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Semester II 2024 (Kumulasi)		Capaian (Lihat 2023/2024)	
	Target Awal	Realisasi Triwulan	% Capaian	Target Akhir 2024	% Realisasi thd Target Akhir	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Akhir
100	80	100	100	80	100	80	100	80	100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SJPTPL (Versi 2024)

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024, IKU 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditanghapi dan disempaikan telah tercapai 100% (120% dari target 80. Capaian IKM 17 disempaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2972/DJPRL1/HK.410/VI/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PRL" Triwulan II Tahun 2024 (Sumber: Satker/Ijen PKP), 11 Juli 2024), hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 100% (120% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 100% (100% dari target triwulanan 100). Sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 sama dengan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah dari IKU tersebut tertuang dalam Renstra tahun PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditanghapi dan disempaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 100% (100% dari 80%), sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PRL.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPKP, Provinsi 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditanggapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian triwulan I (semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 100% (125% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melampaui/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Penyerapan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring Penyelesaian terhadap rekomendasi inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIMAK untuk melakukan monitoring pada temuan bagaimana status tindak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Kibek untuk melakukan monitoring pada temuan bagaimana status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu penerbitan rekomendasi hasil evaluasi atas audit Kinerja TA. 2023 (SD-1034 berdasar nomor T.153/YT.2/SHP.I/10/8/2024 pada tanggal 9 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 9 dimana 8 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan unggah dokumen pada SIMAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak tercapai anggaran imasus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak tercapai realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Kendala Atau Triwulan III Tahun 2024

Kendala saat yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu, melakukan monitoring terhadap temuan inspektorat jenderal dengan memanfaatkan aplikasi SIMAK.

IKM 22. Persentase Pengelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2022. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.13-16 Capaian IKU 2 (RPJP, Dirjen)

IKU 19	3.1.13. Nilai Kinerja Unit Eselon Pemerintah yang Baik (Angka RPJPN Pemerintah)
IKU 20	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Lulusan SPMB Pemerintah (%)

Indikator Kinerja	Tahun 2023					Rencana RPJPN, Pemerintah		Rencana SJPN, Dirjen Anggaran	
	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Target PK 2023	% Realisasi thd Target PK	Target 2023	% Realisasi thd Target Rencana	Target 2023	% Capaian thd Target Rencana
100	Persentase Capaian Tahunan			100	-	100	-	✓	-

Sumber data: SPMB, Pemerintah dan SJPDSL, Unnal 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Maret di ITU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PAUD, 2020 – 2024 yaitu berisi bahwa implementasi pembelajaran kolaborasi lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PAUD, karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pemberian 2020 – 2024 yaitu pelaksanaan penyelesaian tahunan (>0 80% sampai 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PAUD, karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan data realisasi target di Triwulan II sehingga RPD belum dapat diketahui. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian RPD, realisasi anggaran dan selisih dari RPD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II.

B. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

C. Kendala dan Tindakan di Tahun 2023

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU ini di Triwulan II.

IKM 22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu pemeriksaan dokumen yang lengkap dan pemenuhan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada data/informasi yang terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap kegiatan.
b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan/atau lapangan), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap inflasi kesesuaian bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KIDUTAK, total efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada oleh hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah. Tingkat DJPVTL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1.10-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 80 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 60 - 80	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 40 - 60	Cukup Efektif Keragaan tidak tujuan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 20 - 40	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

4.	3	3-10	**Tidak Efektif** Kegiatan prioritas bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKU 23 Sebagai berikut:

Tabel 3.1. ST-18. Capaian IKU 23 BPSPL Pontianak

IKU 23	23. (%) Rasio Kegiatan di Pulau Selain Pemerintahan yang Telah Lengkap (BPSPL Pontianak)								
IKU 23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Pemerintah Tingkat BPSPL Pontianak (%)								
Keterangan 2023	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI, 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW II (2023)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			40	-	100	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPI, Juni 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melaksukan inventarisasi usaharan KOMPAK yang telah disahkan dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmas).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target (nihil). Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu. Tingkat efektivitas kegiatan berbasis pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,8% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan II.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis efisiensi atas efektivitas penggunaan sumber daya, karena realisasi baru terdapat target di Triwulan I sehingga RPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan RPSS, realisasi anggaran dan selisih dari RPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang memerima bantuan untuk memaksimalkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK yaitu :

a. Melakukan inventarisasi Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dan BPSPL Pontianak
b. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan

8. Realisasi Anggaran

Penyerapan IKK ini dilakukan dengan proses pagu/plan dan Klasifikasi Rincian Output [3062.QBH.001] Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-15 Realisasi Anggaran IKK II Triwulan II

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3062.QBH.001.952] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.455.000	Rp 8.862.427 (18,68%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 8.862.427 (18,68%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.862.427 atau 18,68% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

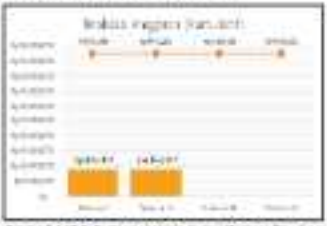

Gambar 3.1.12-5 Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencanan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu memerikasa kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Kelompok Masyarakat yang telah menerima bantuan serta melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup SPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab ada di Biro Umum dan PDU melaksanakan pengawasan kearsipan internal di wilayah Pengawasan adalah kearsipan internal Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal SPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PDU dengan pembentukan Tim Pontak yang ditetapkan masing-masing kuasi kepatuhan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan masing-masing kuasi kami. Hasil dari kategori atas hasil Pengawasan kearsipan yang dipandu dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.12.22. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	+90 – 100
A	Memuaskan	+80 – 90
BB	Sangat Baik	+70 – 80
B	Baik	+60 - 70
CC	Cukup	+50 – 60
C	Kurang	+10 – 50
D	Sangat Kurang	0 - 10

Tabel 3.1.12.23. Capaian IKU 24 SPSPL Pontianak

IKU 12	Tata kelola pengelolaan yang baik (Lingkup IKU 24) meningkat									
IKU 24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup SPSPL Pontianak (Nilai)									
Rencana Aksi 2024	Tahun 2024					Realisasi 2023 Pontianak		Realisasi 2023 (Nasional)		
	Target Thn	Capaian Thn	% Capaian	Target (% 2024)	% Capaian thd Target thn	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Nasional	
0	Target capaian tahunan		82							

sumber data: APAK, Pontianak dan SAKIP, unker 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan, melainkan pencapaian kinerjanya dilakukan secara tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan IKU belum dapat dilaksanakan karena keberhasilan/kegagalan atau permasalahan/solusinya. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam pelaksanaan Pam Ki DPA dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU yaitu:

a. Rapat Ismail Rencana Aksi Penyelamatan Arsip Kementrinan secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2093/BJ.6/TU.020/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

b. Bimbingan Teknis API Media Arsip secara daring pada 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2119/BJ.6/TU.020/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal undangan Bimbingan Teknis arsip Media Arsip.

c. UI Desk Waktu Kerja berdasarkan Kepangkatan secara daring pada 28 Juni 2024 berdasarkan Surat Plh. Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2264/BJ.6/TU.020/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [054.7.BA.U.994.2.047] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kerangka. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II Januari-Juni Tahun 2024 yaitu Rp 9.940.000 atau 10,25% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.400.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.10.05 Realisasi Anggaran IKU 24 Triwulan II

No.	Komponen/Sub-Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[054.7.BA.U.994.2.047] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kerangka	Rp 55.230.000	Rp 1.900.000 (3,37%)	-
TOTAL		Rp 47.400.000	Rp 1.900.000 (3,23%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan untuk dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya IKU ini di Triwulan III.

3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PHKL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar indikator kinerja dapat secara terhitung sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang disalurkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 1 kelompok dari target 1 kelompok (100%). Jika dibandingkan dengan Unit Kerja lain, capaian BPSPL Pontianak tertinggi tersebut. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak menjadi yang tertinggi diantara Unit Kerja lain dengan nilai 93,33. Capaian IKU IP ASN BPSPL Pontianak sebesar 84,12 komponen yang tercantum jika dibandingkan dengan capaian Unit Kerja lain. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PHKL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Tercantum oleh BPSPL Pontianak menjadi yang tercantum diantara unit kerja lain dengan nilai sebesar 114,47% sementara unit kerja lain mencapai nilai 100, 00%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100%.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: 69 DIPA 032.07.3.477436/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.498.113.000. Realisasi anggaran disampaikan dan dipantau secara berkala melalui https://sakti.kemenkeu.go.id/. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 8.278.004.471 atau 44,55% dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi pemrograman sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1 IKU Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	(2646) Pemulungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	8.074.204.000	1.791.889.610	22,20	-
2.	(2648) Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	23.720.496	23,72	-
3.	(2650) Pelestarian Ruang Laut	RM dan PNP	1.150.000.000	263.011.707	22,48	-
4.	(2647) Dukungan Pelayanan Internal (Initial) (PNP) Pengelolaan Ruang Laut	RM	10.671.877.000	5.802.382.620	54,37	-
5.	(4246) Pencegahan dan Penindak Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800.000.000	417.750.000	51,97	-
Total			**12.296.113.000**	**8.278.004.471**	**44,55**	

Sumber data: Aplikasi Dashboard BPSPL Pontianak per 30 Juni 2024

Dalam hal alokasi anggaran dapat dibagi/klasifikasi berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai tersebut pemenuhan hak yang sebagian diterima maupun dibayar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ di luar entitas pelaporan pendukan sosial serta barang persediaan. Belanja barang dikelompokkan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan untuk hal yang berkaitan yang berdiferensi normal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dibelikan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan untuk hal yang berkaitan yang normal berdiferensi

9. Belanja modal pengadaan untuk perbaikan peralatan asset dan atau penambahan nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPDPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1(b)-4.1.1(c): Realisasi anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Triwulan	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1	(51) Pegawai	Triwulan II	4.297.333.000	3.836.390.000	47,88
2	(52) Barang	Triwulan II	11.808.113.000	5.810.903.899	47,89
3	(53) Modal	Triwulan II	783.000.000	406.260.000	51,88

*) Belum Anggaran
Sumber Data : BPDPL Pontianak (Aplikasi Simakun per tanggal 30 Juni 2023)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Juni/Triwulan II) realisasi untuk belanja pegawai sebesar 22,05%, untuk belanja barang sebesar 51,08% dan untuk belanja modal 4,24%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I sebesar Rp 3.836.390.000 (47,88%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS), Bonus PNS dan tunjangan umum PNS yang terkait pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Belum ada realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan II sebesar Rp 11.808.113.000 atau 47,89% dari pagu anggaran Rp 11.808.113.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional : digunakan untuk antara belanja sepanjan penyimpan, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kendaraan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sarana, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan Dinas Biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 783.000.000 (51,88%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai Kontrak No.SP.43/BPDPL.3/PPK/SPK/II/2023 tanggal 1 April 2023.
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Scanner, dan Lemari Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.44/BPDPL.3/PPK/SPK/II/2023A tanggal 1 April 2023A.
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Tabung sebanyak 1 unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.44/BPDPL.3/PPK/SPK/II/2023A tanggal 23 April 2023A.

- Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kompresor SSH BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SPK.46/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 30 April 2024.
- Pengadaan Kerang Bambuu KEMENAG TA 2024 kepentingan Rakyat di Kabupaten Sekadau sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Perahuan Gedung Kelayakan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan perencanaan untuk mencapai sasaran, meskipun terdapat beberapa sasaran belum dapat tercapai sesuai yang telah disepakati pada Triwulan II tahun tersebut. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 jika dihitung dari nilai IKPBB tertinggi dari aplikasi kinerjasi secara rata-rata 105,94% dengan kategori Baik. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan II 2024 sebesar Rp 8.878.804.401 atau 44,02% dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.036.113.000. Untuk capaian indikator kinerja yang belum tercapai di Triwulan II ini sebagai berikut:

1. Penyerahan Bantuan Kompak dengan capaian sebanyak 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Nilai indikator kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar 49,84 dari target sebesar 82 sehingga tercapai 113,87%.
3. Nilai IP KEK dengan capaian sebesar 85,15 dari target sebesar 85 sehingga tercapai 102,59%.
4. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai 100%.
5. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang melaksanakan dokumen Manajemen Pengetahuan Pertumbuhan dengan capaian 116,67 dari target 84 sehingga tercapai 139%.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Ditangvaci dengan capaian 100% dari target 93% sehingga tercapai 139%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan II tercapai secara kesatuhuhan dengan persentase sebesar 100%. Pencapaian target pada Triwulan II masih belum optimal secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 10 indikator kinerja kegiatan memiliki periode capaian yang disesuaikan.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya dapat dapat dioptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan kualifikasi & ASN melalui pengumpulan sertifikat kebutuhan pelatihan pada tiap-tiap lembaga teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu menyesuaikan untuk buka blokir anggaran pada RDA 002. Anggaran sudah dibuka pada bulan Juni dan bertambah menjadi 800.001. Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan sertifikat bimbingan teknis, diklat dan seminar lingkup BPSPL Pontianak dalam rangka pemutakhiran kualifikasi & ASN.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 disusun, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

BPSPL
PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Djoeff Iman Tarisna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Stefanni Raymond P., S.Pi., M.Si.

Ismail Fathu Rohman, S.Si.

Vita Rifmaya Indrayani, S.Si.

Kontributor:

Subdit Pesisir Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Publikasi ini tidak diperdagangkan untuk kepentingan komersial, tetapi dapat digunakan untuk edukasi, 2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai bersama. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka menyajikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selain itu, Lkj ini menyajikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan berikutnya (concern Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut). Dihasilkan program dan kegiatan di Balai BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder kami

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Oktober 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pelabi dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Direktur Jenderal nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Kotak (aplikasi pengelolaan kinerja secara daring melalui https://kotak.kkp.go.id). Proses pelaporan kinerja disampaikan melalui IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program, koordinasi proses pemantauan dilakukan oleh para pengelola kinerja sehingga capaian strategis sesuai dengan penanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Konsolidasi aplikasi Kinerjaku, nilai kinerja Organisasi (nKO) Wajar atau nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 187,66% (hijau + biru).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang tercatat pada Triwulan III yaitu:

1. Terlaksananya likelihood kampak dengan capaian sebanyak 2 kelompok dari target 2 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Laporan DPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 3 laporan dari target 3 laporan sehingga tercapai 100%.
3. Terlaksananya Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terlaksana dengan capaian 133,33 dari target 9+ sehingga tercapai 133%.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindak Lanjuti dan Telah Ditanggapi dengan capaian 100% dari target 80% sehingga tercapai 100%.

Pagu anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 18.096.113.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024 yaitu Rp14.764.609.183 atau 76,39% dari pagu anggaran. Keterbatasan sumber tenaga pelaksanaan program kegiatan yang berdampak pada kinerja BPSPL Pontianak tentunya dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Maksimum Hutu Hal itu dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang kuat bagi Kepala Balai Besar/Balai Konservasi dan Pemerintah untuk melakukan Pelayanan Perizinan di Perairan Umum Daerah. Terdapat perubahan Target Output pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang semula RBA.002 (output 27.000 hektar) menjadi SDO.001 (output 40 orang) sehingga perlu adanya penyesuaian target IKU yang terhitung oleh Kegiatan Kinerja.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan IV dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kelulusannya (apabila pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar secara luring atau daring.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekjen) terkait dengan Perjanjian Kinerja pada tahun KU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mitra pencanangan baru melalui ID (Clang).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Terkait arsip dari kolaps (dimanfaatkan apabila terjadi kiamat) pada Triwulan I tahun 2024 yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kebutuhan pegawai pada diklat, pimpinan tinggi dan seminar secara online atau offline. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Jenis Kelautan (KKP) terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan dan KKP. Berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan umum daratan dikarenakan belum terbitnya aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sampai dengan Triwulan I (SPSP) Perizinan belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan Maharam mlipah Nusa.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vii
Daftar Tabel viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 1
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Kewenangan SDM 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 4
1.4.1. Potensi 4
1.4.2. Permasalahan 5
1.5. Data Kelautan 6
1.6. Kelembagaan Penyuluhan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 9
2.1.1. Misi 9
2.1.2. Visi 9
2.1.3. Tujuan 10
2.1.4. Kasaran Strategis 10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 14
2.3.1. Kumpulan Pengukuran 14
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 19
3.1.1.Capaian Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak 21
3.1.2.Capaian Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang tersikat dalam Capaian Nasional Nilai Ekspor Ikan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.3.3Sasaran Kegiatan 3 Terkelolanya pemanfaatan dan pengembangan wisata laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 29
3.1.4.Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak 34
3.1.5.Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya keasadaran Lacian pemafaatan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 44
3.1.6.Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan komitmen internasional, regional dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. 47
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pembinaan Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak 51
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan atau Dikonservasi di Wilayah BPSPL Pontianak 59
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Cinta Kawasan di Wilayah BPSPL Pontianak 69
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 74
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak 77
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Kelembagaan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak 83
3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain 110
3.3. Alokasi Anggaran 113
BAB IV PENUTUP 116
4.1. Kesimpulan 116
4.2. Rekomendasi 116
4.3. Tindak Lanjut 116
LAMPIRAN 117

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengguna tertentu dan tidak untuk diperbanyak atau disebarluaskan

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 3
Gambar 1.1.2-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 2.1.1-1. Alur Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) 10
Gambar 2.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III 10
Gambar 2.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III 11
Gambar 2.1.1-1. Inpr Capaian PNBP dari Tahun 2022 11
Gambar 2.1.2-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 20
Gambar 2.1.2-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 21
Gambar 2.1.2-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Teluk Laut 27
Gambar 2.1.2-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Berkasalah 27
Gambar 2.1.2-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang 28
Gambar 2.1.2-6. Contoh Kartu sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 28
Gambar 2.1.3-1. Kegiatan Anggaran KU II Triwulan II 29
Gambar 2.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL 31
Gambar 2.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 32
Gambar 2.1.3-3. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut 33
Gambar 2.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran KU 3 hingga Triwulan III 35
Gambar 2.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA 34
Gambar 2.1.4-2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Indonesia Hebi 37
Gambar 2.1.4-3. Kegiatan Monitoring dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 38
Gambar 2.1.4-4. Pelaksanaan Dokumentasi Goes to School 38
Gambar 2.1.4-5. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi 39
Gambar 2.1.4-6. Pengamatan Kegiatan Brasil 39
Gambar 2.1.4-7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu 40
Gambar 2.1.4-8. Survei Pendataan Ikan Dicecomia Penting 41
Gambar 2.1.4-9. Survei Sosial Ekonomi 42
Gambar 2.1.4-10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 42
Gambar 2.1.4-11. Realisasi Anggaran Komulatif KU 4 Hingga Triwulan III 43
Gambar 2.1.5-1. Fasilitasi Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah 45
Gambar 2.1.5-2. Realisasi Anggaran Komulatif KU 5 Hingga Triwulan III 44
Gambar 2.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama 45
Gambar 2.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif KU 6 Hingga Triwulan III 49
Gambar 2.1.6-3. Penandatanganan Hasil Kesepakatan Kolaborasi 51
Gambar 2.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif KU 7 Hingga Triwulan III 53
Gambar 2.1.7-1. Grafik Capaian Sasaran KSMPAK Triwulan III Dan Tahun 54
Gambar 2.1.7-2. Sasaran Tanma Sasaran KSMPAK 55
Gambar 2.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Komulatif hingga Triwulan III 56
Gambar 2.1.7-4. Identifikasi Kelompok Nelayan Pengelolaan Alternatif di KK Mahakam Hulu 58
Gambar 2.1.8-1. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat 61
Gambar 2.1.8-2. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Tentalingan 63
Gambar 2.1.8-3. Grafik Realisasi Anggaran Komulatif hingga Triwulan III 63
Gambar 2.1.8-4. Grafik Hasil Pelatihan Hiu Pari Aplikasi di PPN Pemangkat 63
Gambar 2.1.8-5. Dokumentasi pengukuran 63
Gambar 2.1.8-6. Grafik Pelatihan Hiu dan Pari Lapangan di TP. Sungai Kakap 64
Gambar 2.1.8-7. Grafik Pelatihan Hiu dan Pari Aplikasi PPI Mempawah 64
Gambar 2.1.8-8. Dokumentasi Pengukuran 64
Gambar 2.1.8-9. Monitoring Kawasan MPA 65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.8.10. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Triwulan II 69
Gambar 3.1.9.1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi 69
Gambar 3.1.9.2. Pemeriksaan SAJ 69
Gambar 3.1.9.3. Pemeriksaan Anvario 69
Gambar 3.1.9.4. Pemeriksaan kelengkapan 70
Gambar 3.1.9.5. Grafik Pendapatan PNBP 70
Gambar 3.1.9.6. Dunia Pemanfaatan Aneka 71
Gambar 3.1.9.7. Simulasi Tarif Pemanfaatan Tertentu 71
Gambar 3.1.9.8. Dasar Perhitungan Anvario 72
Gambar 3.1.9.9. Pemantauan dan Pemrosesan Biaya Proses Ekspor Jenis Non Appendix CITES Hasil Pengembangbiakan 73
Gambar 3.1.10.1. Identifikasi Pemanfaatan ALBI di Kalimantan Barat 74
Gambar 3.1.10.2. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 74
Gambar 3.1.11.1. Evaluasi dan Penutupan Balai Dinas Lasit di Kota Kota Raya 79
Gambar 3.1.11.2. Evaluasi dan Penutupan Balai Dinas Lasit di Kota Bhayangkara 79
Gambar 3.1.11.3. Evaluasi dan Penutupan Balai Dinas Lasit di Kab. Tahat Laut 80
Gambar 3.1.11.4. Evaluasi dan Penutupan Balai Dinas Lasit di Kota Balikpapan 80
Gambar 3.1.11.5. Monitoring Kondisi Balai di Kota Singaraliang 80
Gambar 3.1.11.6. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Limbah Industri Sampah 81
Gambar 3.1.11.7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 83
Gambar 3.1.12.1. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 84
Gambar 3.1.12.2. Tren Nilai IKPA Triwulan III 84
Gambar 3.1.12.3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 88
Gambar 3.1.12.4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 92
Gambar 3.1.12.5. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 94
Gambar 3.1.12.6. Kegiatan Work Analysis AKIP 100
Gambar 3.1.12.7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 100
Gambar 3.1.12.8. Hasil HP BPSPL Pontianak 104
Gambar 3.1.12.9. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK 111
Gambar 3.1.12.10. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III 112

Dokumen ini hanya ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 3.1.1.1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 33
Tabel 3.1.1.2. Progres Capaian PKMO BPSPL Pontianak Triwulan III 33
Tabel 3.1.2.1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 34
Tabel 3.1.2.2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 39
Tabel 3.1.3.1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 30
Tabel 3.1.3.2. Jumlah Verifikasi Teknis PKPPL Triwulan III 31
Tabel 3.1.3.3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III 35
Tabel 3.1.4.1. Jumlah Inspektur, Asesor dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria 36
Tabel 3.1.4.2. Perhitungan Nilai akhir PKKL 39
Tabel 3.1.4.3. Status Evaluasi ETAKHIR dan Perbandingan Kenaikan Kelas Hotel 39
Tabel 3.1.4.4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 33
Tabel 3.1.4.5. Hasil Pengamatan Komunitas Plankton 39
Tabel 3.1.4.6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mangrove Hutan 40
Tabel 3.1.4.7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III 42
Tabel 3.1.5.1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 43
Tabel 3.1.5.2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III 46
Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 47
Tabel 3.1.6.2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III 49
Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 50
Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 53
Tabel 3.1.7.2. Realisasi IKU 8 Triwulan III 58
Tabel 3.1.7.3. Kolektasi IKU 8 Triwulan III 58
Tabel 3.1.8.1. Capaian IKU 10 KPSPL Pontianak 59
Tabel 3.1.8.2. Realisasi IKU 10 Triwulan III 63
Tabel 3.1.9.1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 66
Tabel 3.1.9.2. Realisasi IKU 11 Triwulan III 70
Tabel 3.1.10.1. Capaian IKU 12 PKP BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.10.2. Capaian IKU 12 Triwulan III 76
Tabel 3.1.11.1. Capaian IKU 13 KPSPL Pontianak 77
Tabel 3.1.12.1. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 81
Tabel 3.1.13.1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 83
Tabel 3.1.13.2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan III 87
Tabel 3.1.13.3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak 89
Tabel 3.1.13.4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak 90
Tabel 3.1.13.5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III 92
Tabel 3.1.13.6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.13.7. Realisasi Anggaran IKM 17 99
Tabel 3.1.13.8. Kategori Nilai PU SAKIP 90
Tabel 3.1.13.9. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 97
Tabel 3.1.13.10. Komponen Hasil Kompilasi Evaluasi SAKIP 99
Tabel 3.1.13.11. Realisasi Anggaran IKM 19 Triwulan III 100
Tabel 3.1.13.12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 101
Tabel 3.1.13.14. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan III 103

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.12.19. Capaian IKU 23 BPSPL Pontianak 134
Tabel 3.1.12.16. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak 135
Tabel 3.1.12.17. Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak 139
Tabel 3.1.12.18. Kategori Nilai Prioritas Kemitraan Konservasi 139
Tabel 3.1.12.19. Capaian IKU 23 BPSPL Pontianak 150
Tabel 3.1.12.20. Realisasi Anggaran IKU 22 Triwulan III 151
Tabel 3.1.12.21. Kategori Nilai Pengelolaan Kawasan 153
Tabel 3.1.12.22. Capaian IKU 24 BPSPL Pontianak 153
Tabel 3.1.12.23. Tabel Hasil pengawasan kawasan 153
Tabel 3.1.12.24. Realisasi Anggaran IKU 24 Triwulan III 154
Tabel 3.1.13.1. Perkembangan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain 161
Tabel 3.25.1.13.1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III 163
Tabel 3.1.122.3.1.12.3. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024 164

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang secara struktural dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Pokja pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk mengoptimalkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berupa barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya barang, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 68/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 62 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut tingkat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam itu, selain tersebut kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 62 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Kalimantan.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. pelaksanaan konservasi habitat, lanta, dan genetik ikan;
e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas pengangkut ikan dan ikan yang dilindungi;
f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

d. fasilitasi pemanfaatan ruang pesisir dan laut;
f. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
j. pelaksanaan urusan kerjasama.

Disamping itu, selama pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir laut, dan pulau-pulau kecil secara efektifdanefisien di daerah, antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
c. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan kekonteksan tertentu yang daerah pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan lengkap/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan keharisma ekspatfik; Kolektif dan breeding; Memunyai nilai dan kepentingan konservasi khusus (ekonomi/konservasi) secara ekologi/sosial/budaya/ Hidup di habitat khusus (terbatas/terancam punah); yang perlu dilestarikan/dilindungi/dimanfaatkan secara berkelanjutan/ Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi khusus (ekonomi/konservasi) secara ekologi/sosial/budaya/ Hidup di habitat khusus (terbatas/terancam punah); yang perlu dilestarikan/dilindungi/dimanfaatkan secara berkelanjutan/ Hidup di habitat dan daerah tuaja jenis migrasi; Potensi sebagai varietas alam, serta dan atau varietas wilayah nasional;
c. Penyelenggaraan komitmen nasional dalam melaksanakan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHC (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang pelaksanaannya bisa bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan cost), serta melandani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
d. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Pemberdayaan dan fasilitasi daerah dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan komitmen nasional dalam melaksanakan perjanjian tujuan SDG (Sustainable Development Goals), antara lain mengelola tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesehatan lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemandirian masyarakat pesisir.

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan kerja, dan Wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dengan satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas memberikan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, perkantoran, urusan rapat dan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan penatausahaan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL memiliki tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta oseanografi dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengelolaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

Membedakan(n) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021, BPSPL Pontianak telah menyelesaikan evaluasi hsl kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan hsl kerja tersebut terdiri dari (1) Tim Kerja I, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja II, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja III, menangani Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut, Kawasan II (tiga) Tim Kerja tersebut bertaspat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang dikatasi oleh Kepala Subbagian Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

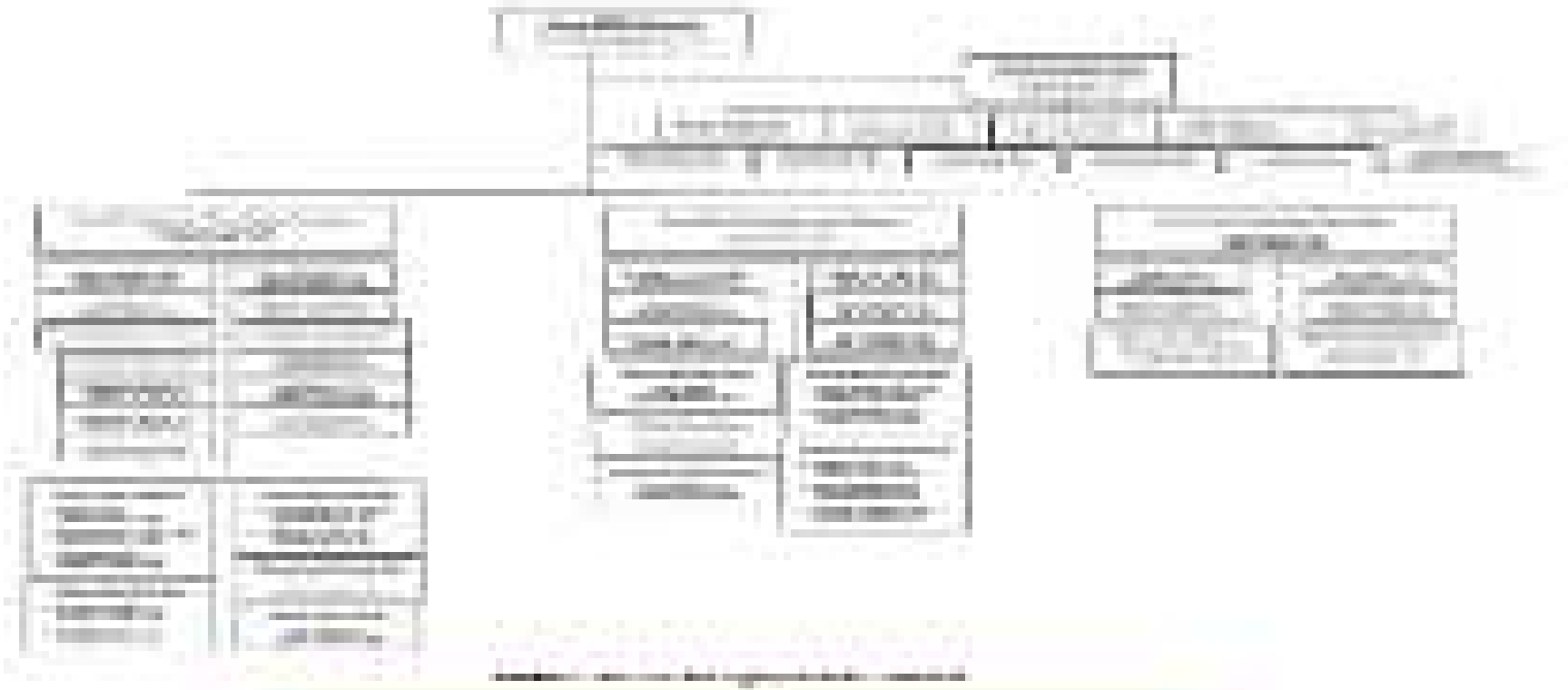

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 72 orang terdiri dari 60 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), 3 Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) 31 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak tersebar dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 31 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengemudi, dan Administrator Kebersihan dan Pertamanan. Negara pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan tugasan kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak tersangkum dalam infografis di bawah ini.

Gambar 1.1 SDM Lingkup BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kawasan dan Perikanan

1.4.1 Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.415,55 km^2 belum lagi luas provinsi disekitarnya Kalimantan Barat Kalimantan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 28 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.756,54 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 cekungan laut/teluk.

1.4.2 Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu diprioritaskan melalui kegiatannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang direncanakan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, diwajibkan dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Apendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Management CITES perlu dilakukan pendataan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan penerapan kapasitas 20%, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendix CITES termasuk di dalamnya pengembangan IPTV dan teknologi.
d. Masih minimnya kesadaran/peran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendix CITES kepada masyarakat.
e. Pencemaran akibat perilaku yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pemecah gelombang. Selain itu, konflik pemanfaatan pesisir dan perlindungan laut yang begitu rentan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti alat bantu perikanan dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
g. Keterbatasan tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terdepan, pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pemanfaatan perikanan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu pemihakan baik dari aspek kesejahteraan, kemahiran, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil mampu bersandingan dengan negara maju/berkembang dapat pencapaian kesejahteraan.

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Balai yang berwenang sesuai UU ITE - 2019

1. Pemanfaatan ekonomi kawasan yang belum optimal sesuai dengan kemampuan lahan dan wisata bahari berbasis pada kearifan lokal serta peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2020 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Birokrasi.
g. Peraturan Direktur Kawasan dan Perairan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pemindahan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk menyampaikan informasi kinerja yang berupa atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara kesimpulan. Penyajian kopasi secara strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja asesmen strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja asesmen strategis tersebut diuraikan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja asesmen strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja asesmen strategis tersebut diuraikan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja akuntansi sosial yang telah dicapai;
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. Kegiatan Pendukung;
viii. Realisasi Anggaran
ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan ditempuh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja
   b. Lampiran yang dianggap perlu

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan mempunyai title issue dalam mencapai asaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 diawali pembangunan arahan RPJPN 2005 - 2025 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. pertahanan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan penuangan Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan visi arahan kepada Menteri Kabutan dan Perkaran untuk:

1. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, kepentingan kebutan dan perkaran dalamnya kepada kebutan, pemberi saya ikan, pelanggan garam, pengguna pemasar hasil kebutan dan perkaran, dan pelanggan garam, serta para pelaku usaha bidang kebutan dan perkaran;
2. meningkatkan dan memberdayakan program perkaran bagi saya.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Selain menjabarkan KP_RPJPN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2010 – 2014 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Renstra Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan pedoman agenda pembangunan, arahan Presidan dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang mendukung Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut yang Berkesejahteraan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam KP_RPJPN 2020-2024, KKP melakukan implementasi empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Pada tahun 2024 Ditjen Kelautan dan Pesisir mendapatkan kedalam untuk kegiatan berikut ini yaitu:

1. Meningkatkan konservasi keanekaragaman laut
2. Pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran di laut
5. Pembentukan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak menerjemahkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penelitian dan Pemanfaatan Jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penelitian dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Selaras pembangunan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan berkelanjutan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 diberikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

1. Tujuan meningkatkan tata kelola maritim, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya pelestarian kualitas laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang dikelola hasil pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Tujuan meningkatkan pelestarian laut pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya perlindungan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya rehabilitasi dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
6. Tujuan meningkatkan tercapainya reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak meliputi berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan indikator kinerja sebagai kinerja tahunan untuk satu unit kerja/ kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan selaras dengan agenda penyusunan dan rancangan anggaran serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran (input, program, dan kegiatan. Selain itu, memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program/nya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/satker lain.

Dokumen Aksi 2024 tersebut kemudian dimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengelola internal dan tidak untuk yang dipublikasikan oleh KKP, 2024

Tabel 3.2-1 Perubahan Kawasan Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kawasan Kegiatan Tahun 2024	Kawasan Kegiatan Tahun 2025
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak
-	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Nasional Rehabilitasi Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan perubahan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan sumberdayagan hayat perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan sumberdayagan hayat perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan konstitusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai ekonomi sumber daya perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber: Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 dan Tahun 2024

Berdasarkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 3.2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

[illegible] Tahun 2024	[illegible] Tahun 2025
[IKU-1] Rekomendasi kebijakan monitoring dan koreksi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan [IKU-1] Dokumen operasionalisasi pengawasan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IKU-2] Kerjasama platform (perluasan kemitraan konservasi yang difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak digunakan
Tidak Tercapai (K)	[IKU-2] Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Pendapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja (KKP/BPSPL Pontianak (Daerah)
[IKU-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IKU-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KOMPAK) yang dilakukan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Tercapai (K)	[IKU-4] Nilai Efektifitas Kawasan Konservasi Indonesia di wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)
[IKU-4] Jenis ikan target/ikan penuh yang dilakukan pendataan pemadaftaran, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkapan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKU-5] Jenis ikan target/ikan penuh yang dilakukan pendataan pemadaftaran, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkapan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKU-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKU-6] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKU-6] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)	[IKU-7] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)
[IKU-7] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran [IKPA] Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-8] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran [IKPA] Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IKU-8] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-9] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-9] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-10] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Tercapai (K)	[IKU-11] Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)
[IK-10] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[IKU-12] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-11] Nilai rekomendasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan, diganti dengan [IKU-13] Nilai PH Zonasi Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Salinan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak perlu ditandatangan basah

[illegible] Tahun 2023	[illegible] Tahun 2024
[IKK-12] Laporan SPP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IKK-14] Laporan SPP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IKK-13] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	[IKK-15] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
[IKK-14] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah ditangkap dan ditanggapi (%)	[IKK-16] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah ditangkap dan ditanggapi (%)
[IKK-15] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-17] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IKK-16] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-18] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Novemb[illegible] 2023 dan revisi 2024

Secara terinci Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3-2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.900.000
2. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	320
3. Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen operasionalisasi peraturan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5. Terverifikasinya keberhasilan usaha penataan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usaha penataan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1

Salinan ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan konservasi kerjasama, sejoring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	1. Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
	2. Kemitraan konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
2. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (KOMPAK) yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
	4. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
3. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan penelitian, penyelidikan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
4. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut sebagai energi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Fasilitasi)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,75
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	80

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Unit Kerja Reformasi Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tersandar (%)	94
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Diduruti Tindak Lanjutnya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti (%)	80
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	90
	24. Nilai pengawasan internal hasil/opini lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85

Sumber data: BPSPL Pontianak (LHKM), Level WBS

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan penghitungan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai sesuai frekuensi pemantauan masing-masing IKU, setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik
   b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari tahun kedua (level 1) sampai ke level D1 dan
   c. Pencapaian kinerja adalah merupakan akumulasi/rata-rata/kombinasi/apapun langsung dari pencapaian kinerja turunannya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja

   Terdapat Perjanjian Kinerja (PK) Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

   Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi kesesuaian IKU, definisi dan cara perhitungan, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan melaporkan IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot masing-masing IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://smartpki.kkp.go.id/app/)
5. Atasan langsung dan setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, relevan dan cermat.
6. Sub Unit verifikasi kinerja di tingkat level 1 dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja secara berjenjang mengacu IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Menganalisa data dan penarikan pembelajaran capaian kinerja.
10. Kepala Biro Bina Mitra Lingkungan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyampaikan laporan hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level 1 kepada masing-masing pimpinan unit kerja dievaluasinya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, dalam hal ini penanggung jawab kegiatan merupakan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ PPK. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sekretaris PPK merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelaksanaan program, kegiatan secara keseluruhan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan indikator kinerja kegiatan (IKU dan IKK). Perhitungan IKU dan IKK diatur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKK) secara online yaitu, http://sakkpks.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta format capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program, koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKK) secara online yaitu http://sakkpks.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta format capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu 107,50% (masuk kategori Hijau + Baik). NKO mengalami peningkatan sebesar 1,04% dari Triwulan II. NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan III) sebesar 111,11%. Terdapat penurunan sebesar 3,61% dari Triwulan III Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan capaian dari target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan III. Terdapat 4 indikator kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan III dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.1. Susunan Kegiatan 1 Menghitung Nilai PNBP BPSPL Pontianak

BKU 1: Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan lahan dan dilindungi dan/atau otoritas pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425121) + Pendapatan Jasa Kesantan dan Pertelaan Lainnya (425522) + Pendapatan Pertelaan Lainnya (425299) yang diperoleh dari kegiatan kerja BPSPL Pontianak.

$PNBP_{2024} = PNBP_{425121} + PNBP_{425522} + PNBP_{425299}$

Simana,

$PNBP_{2024} = SAJI\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ Lit + Denda$

Keterangan:

SAJI DN	=	Pungutan atas Dokumen SAJI DN1 + Pungutan Perdagangan + Dungutan Pengambilan
Surat Rekomendasi	=	Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan
$PNBP_{425121}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Pertelaan Lainnya dan Jasa Kesantan dan Pertelaan
$PNBP_{425522}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendaftaran Barang Milik Negara (BMN)
$PNBP_{425299}$	=	Nilai PNBP yang berasal dari Tambahan Gantti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengambilan jenis ikan yang melebihi kuotna pada dokumen angkut.

Keterangan:

i	=	untuk Ucapa ti ion kuoi (unit) dikenakan tarif 3/6L
j	=	ti ikanesan untuk pengangkutan ian ikan yang berasal pengambilan dari alam sendasarkan kuota yang diberikan

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan	=	Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Perdagangan	=	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Kompetensi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

Misi	Meningkatkan nilai PNBP BPSPL Pontianak									
Sasaran	Nilai PNBP BPSPL Pontianak Terjaga									
Realisasi 2023	Tahun 2024						Semester (SEM) Pertama		Semester (...SEM) 2023 (Rp)	
	Target Thn ini	Realisasi Thn ini	% Capaian	Target Thn 2024 (Rp)	% Realisasi Thn ini Terhadap Thn ini		Target 2024	% Realisasi Thn ini Terhadap Thn 2024	Target 2024	% Capaian Thn ini Terhadap Semester
2.073.032.000	Periode Capaian Tahunan		2.000.000	0			-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIPNBP, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan terdefinisi pada Maret IKU (Realisasi selama tahun ini). Capaian nilai PNBP Triwulan I (per tanggal cetak 1 Januari – 30 September 2024) yaitu sebesar Rp1.928.748.132 atau 96,44% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya diakhiran secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 (Rp1.928.748.132) mengalami peningkatan sebesar 1,13,96% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2023 (Rp1.676.024.702).

Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL, 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRL) Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, hanya pada tahun 2024 ditargetkan target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tahun 2023 – 2024 karena PU. Ini tidak masuk kategori Pendidikan di tahun 2024, namun prosesnya dari PNBP Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 96,44% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketidaksesuaian/Kesiapan atau Peningkatan Pencapaian Kinerja yang Akan/Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 96,44% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut, sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan data tersebut target di Triwulan III sebagian NPBS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPBS realisasi anggaran dan selisih dari NPBS dengan realisasi anggaran, sisanya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi SIMPON untuk memantau dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kinerja Pencapaian

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terjadwal (PU, yaitu Pelayanan Operasional Pemeliharaan (Verifikasi SIKJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu, juga pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan III 2024.

Tabel 3.1.1-1 Progres Capaian PNBP BKBP, Periode Triwulan III

Jenis PNBP	Juli	Agustus	September
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp166.667	Rp333.334	Rp333.334
Pendapatan Pelatihan Lainnya	Rp113.020.000	Rp103.133.000	Rp114.340.000
Pendapatan Jasa Kekayaan dan Pelatihan Lainnya	Rp89.691.816	Rp6.367.005	Rp100.481.200
Jumlah	Rp213.878.483	Rp304.834.339	Rp515.120.434
Total TW III			Rp33.833.374

8. Sisa/Lebih Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat anggaran sisa/lebih untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pelayanan operasional pemeliharaan (Verifikasi SIKJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024, pemanfaatan PNBP untuk kegiatan dan tim yang dibentuk oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di dalam Pengelolaan Kawasan Saya Pesisir dan Laut (MPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa yang memenuhi kebutuhan, dan atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas Kelestarian non fisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Perhitungan:

$TK_{Realisasi} = TK_{Lap.1} + TK_{Lap.2} + TK_{Lap.3} + TK_{Lap.4}$

Keterangan:

$TK_{Realisasi}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{Lap.1}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SKG	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target (s/d 2024)	% Capaian thd Target (s/d 2024)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan		300	0	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilaksanakan setelah tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya, Evaluasi dan Pemulihan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, Evaluasi dan Pemulihan Akhir Bulan Cinta Laut di Kota Makassar, Monitoring Sampah Laut di Kota Singkawang dan Kabupaten Kangkayang, Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kabupaten Sambas. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut semoga dengan bulan Juni 2024 sebanyak 200 realisasi mencapai (100% dari target sebesar 300 orang) yang terlibat monitoring sampah meliputi 60 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengguna tertentu dan dilarang untuk disebarluaskan

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat Aksi "Tersedia lahan yang terintegrasi dengan Operasi Pemulihan Ekosistem Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu sebanyak 4 dokumen posisi dan pelayanjalas versi yang disiarkan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan semakin dengan Triwulan III dapat memotong terlaksananya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan tergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan III sehingga APBN belum dapat direalisasi. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan APBN dengan realisasi anggaran dan sesuai dan APBN dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pencegahan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Rekapitulasi kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Pelepasan dan Penyiapan Bulan Cinta Laut di Kab. Kota Raja**

Kegiatan Evaluasi dan Penyiapan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kota Raja dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 3 kecamatan pesisir di dua desa (Desa Jaruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Pengais sebanyak 10 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kota Raja selama 6 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 22,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,00 ton. Sampah tersebut dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sejumlah Rp4.845.000.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.3-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Nias Raya

b. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di Desa Kelurahan (Kel. Sebayuk Besar sebanyak 22 orang, Kel. Naram sebanyak 20 orang dan Kel.Kuala sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 0,07 ton. Sampah tersebut dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.020.000.

Gambar 3.1.3-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilaksakan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Benah Lapuru sebanyak 5 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh Pihak Bank Sampah induk Sahmar Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomi sebesar Rp4.194.960.

Laporan ini telah didistribusikan kepada publik melalui website yang disediakan oleh KKP, 2024

Gambar 3.1.3-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

c. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilaksakan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di area Kelurahan (Kel. Baclinggan sebanyak 20 orang). Kegiatan ini juga bermitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,04 ton sampah dengan nilai manfaat sampah untuk nelayan sebesar Rp241.740.000.

Gambar 3.1.3-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

d. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan menghitung jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Dingka Island Park, Pantai Kuala Bengkayang, dan Pantai Virzi. Pada masing-masing lokasi tersimpul sampah sebanyak 1.345 kg di Pantai Dingka; 7.887 kg di Pantai Kuala Bengkayang; dan 1.670 kg sampah di Pantai Virzi. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, kertas, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Laporan ini telah disesuaikan berdasarkan masukan tertulis dari Penelaah pada 28 Mei 2025

Gambar 2.1.2-3. Monitoring Sampah Plastik di Kota Singkawang

f. Bazar Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2004 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dan Sosialisi PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Pelestarian Daerah Lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, PEMKABDAS dan pelajar sekampat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,5 ton yang terdiri dari sampah plastik plus kemasan makanan, bungkus kaleng, botol minuman, botol minuman kaca, kaleng bekas dan lain sebagainya.

Gambar 2.1.2-4. Sebelum Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Dongal Bulan, Pantai Dongal Belakan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Dongal Belakan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di lokasi tersebut kebanyakan sampah-sampah yang kemasan makanan dan minuman, botol kaleng dan plastik, botol, sandal, dll.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian RO ini didukung dengan realisasi anggaran dari Kewilayahan Rincian Output [424.000.001] Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan Pengawasan Dinas Kepala dan Kegiatan Pengawasan Dinas Dalam Kota. Rincian realisasi anggaran tersebutlah kemudian dituangkan dalam tabel berikut ini.

Laporan ini telah disampaikan kepada publik melalui website yang dikelola oleh KKP, 2019

Tabel 3.1.3-7. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[054.01.QDC.021.997] Alat Perlengkapan Dalam Pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp300.000.000	Rp710.352.571 (99,43%)	-
TOTAL		Rp300.000.000	Rp710.352.571 (99,43%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp710.352.571 atau 99,43% dari pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 3.1.3-7. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

4. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Ruang Laut yang telah dilaksanakan.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya perencanaan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi, pelaporan, dan/atau verifikasi perizinan. Teknis menghitung dokumen sangat mempertimbangkan dan memaksimalkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, aksesibilasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.21. Capaian IKU UPTD BPSPL Pontianak

IKU 3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 4	Dokumen rencana strategis pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Nomor IKU	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL KSDAERS	
	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	% Capaian	Target PK (Tahun)	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Triwulan		3		-	-	-	-	-

Sumber data: UPTD Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena pemberian penghargaan dan penobatan capaian pada Maluku Riu dilakukan secara tahunan. Proses kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi lapangan permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target capaian Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi pentaan pemanfaatan ruang laut. Hal ini dikarenakan saat ini telah terlaksananya koordinasi dengan pemerintah ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Direktur PSDKP Pontianak dan Direktur PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga IKU belum dapat dinilai. Perhitungan analisis

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengguna tertentu dan tidak untuk yang disebarluaskan lebih lanjut. 2024

efektif dilakukan dengan memanfaatkan jasa KKP, karena anggaran dan sarana dari KKP dengan realisasi anggaran. Efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan pertukan tanda secara daring.

2. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya KKI pada Triwulan III yang telah direncanakan meliputi:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pada Triwulan III, pelaksanaan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 22 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 20 pemohon, sementara verifikasi teknis yang sedang dilakukan di Kalimantan Selatan sebanyak tiga pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan III

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Timur	20	Juli - September
Kalimantan Selatan	2	Juli & September
Total	22	Juli - September

Kegiatan ini juga didukung oleh staf di dengan memastikan teknis secara daring di Kota Balikpapan pada tanggal 4 – 6 September 2024. Pemeriksa teknis dan verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan ditandainya untuk Permohonan KKPRL Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Pemerintahan dan Kemanyoran Kelompok Hidayah Bundaya Au, dan Kelompoknya Alkom Jr. di Kota Balikpapan.

Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 21 subjek yang berada di Kalimantan Selatan (4 subjek), Kalimantan Timur (16 subjek), dan Kalimantan Barat (1 subjek).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.3-5. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Hotel Mesehi Pantainya. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelatihan pemanfaatan ruang laut pada Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari staf ahli kepakan KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dinas Kesehatan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan manfaat LLDK merupakan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut secara di Pemerintah Pusat. Pelatihan dari pemerintah adanya adalah hasil pelatihan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar pemberian Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan pemberian persetujuan KKPRL diterbitkan 14 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk memperhatikan biota laut dan ekosistem pesisirnya, pemberdayaan masyarakat, dan menginformasi kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut adalah sarunya adalah nelayan. Jadi tidak ada privatisasi untuk area pemegang persetujuan KKPRL karena otomatis kawasan memberikan akses nelayan.

Gambar 3.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung KLI ini diantaranya, rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana acara pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 2024, koordinasi ke Direktorat PKL pesisir Pemkab Yamtis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 12 – 14 September 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, 2024

B. Realisasi Anggaran

Komposisi 4(x) ini dilakukan dengan proses anggaran dari Kegiatan Rincian Output [2265.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2-2. Realisasi anggaran s/d 3 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2265.PBT.009.031] Koordinasi Penyelenggaraan Pemaduan Ruang	Rp190.013.000	Rp64.001.200 (33,69%)	-
2.	[2265.PBT.009.032] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp354.990.000	Rp33.832.135 (37,98%)	-
3.	[2265.PBT.009.033] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 600.000.000	Rp430.747.670 (71,79%)	-
	TOTAL	Rp 1.190.003.000	Rp528.341.000 (88,56%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung s/d pada Triwulan II (dalam/oleh dan Januari 2024) yaitu RD528.341.000 atau 44,56% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.190.003.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa.

Gambar 3.1.2-4. Grafik Realisasi Anggaran s/d 3 hingga Triwulan II

C. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut, melakukan verifikasi teknis permohonan KKPRL terjadi untuk bulan Oktober - Desember, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu penyusunan laporan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah hasil yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 43.447,99 Hektar yaitu kawasan Konservasi di Kabupaten (KKP) Hamparan Wilayah Pulau Kabupaten Pulau Karimangara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan atau tahun berjalan. Hasil tersebut dapat berupa sebuah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Peraturan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut nomor 28/KEPDJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya aspek tersebut diterjemahkan ke dalam menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

Gambar 3.1.4.1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4.1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	3	10.00	9
Proses	3	10.00	12
Output	3	10.00	12
Outcome	4	20.00	9
Total	24		42

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.A-2. Hasil Penilaian Nilai Akhir (NA)

Kriteria	Bobot	Nilai	Bobot (%)	NA	Nilai (%)
Input	...	1073	...	0.33	...
Proses	...	600	...	0.33	...
Output	...	600	...	0.33	...
Outcome	...	424	...	0.14	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:
Nilai Indikator (Ni) : Hasil penjumlahan skor pada setiap isi kuisi
Nilai Maksimum (Nilai) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (Nk) : Ni / Nmax x 100%
Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : Nk x Bk
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.A-3. Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<33%	Merah	Efektifitas Minimum	Desain dan lanskap kawasan sudah dikelola dan proses yang dilakukan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan usaha untuk mencapai tujuan pengelolaan
>33-66%	Kuning	Efektifitas Optimum	Kunjungan pengelolaan sudah tercapai secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>67%	Hijau	Efektifitas Berkesinambungan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.A-4. Capaian IKU II BPSPL Pontianak

Misi 4	Terwujudnya sinergi pemanfaatan dan pengelolaan yang lestari di kawasan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
Sasaran	Meningkatnya pemanfaatan nilai ekonomi dan konservasi kawasan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)

Indikator Kinerja	Tahun 2024					Realisasi BPSPL Pontianak		Realisasi DJPPI (Nasional)	
	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	% Capaian	Target (RPJMN 2020)	% Capaian thd Target RPJMN	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Nasional
20.Jml Pemanfaatan Kawasan	Tahunan		12					1123 Unit	

Sumber data: SPKR Pontianak dan DJPPKL, September 2024

1. Capaian IKU Tahun ini (Tahun 2024)

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena definisi pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan, namun berdasarkan Pemberian Insentif/Disinsentif Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Kawasan Mangrove Muara Kendawangan telah berhasil meningkatkan nilai akhir sebesar 82,74% dengan status Pratama (Efektifitas Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 16,31% dari tahun sebelumnya dan telah melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian sebesar (116%). Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Demikian juga dengan Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi (Conservation Effectiveness Evaluation), sedangkan Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi, survey kemiskinan (poverty), survey sosial ekonomi).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 34,44%, lebih besar dari pada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini menjadikan peningkatan nilai EVIKA sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 32,44%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, diperoleh nilai EVIKA Kawasan Konservasi Maluku Utara sebesar 32,75% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 14,31%

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Rencana Aksi PKPL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang Efektif dikelola sebesar 17,5 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, adanya yang dipublikasi dalam penyusunan kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Maluku Utara seluas 42.303 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2024 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sesuai dengan di tahun 2024 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 32,44%. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak, Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun, Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, diperoleh nilai EVIKA Kawasan Konservasi Maluku Utara sebesar 32,75% sehingga telah melebihi target dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat memastikan tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Maluku Utara. Selain itu perlu peningkatan alat pemantau seperti survei terutama dalam monitoring. Pasalnya Maluku, Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan asisten dan prasarana pendukung kawasan konservasi. Tindaklanjut kendala para pelaksanaan pertemuan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Maluku Utara yang belum dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan belum terdapat aturan mengenai pertemuan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah perairan darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat disusun analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga KPI2 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan mengkombinasikan KPI3, realisasi anggaran dan sarana dan KPI3 dengan realisasi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan-kegiatan pendukung konservasi ini pada triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penilaian Efektifitas Kawasan Konservasi

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman dan Ekosistem Direktorat Jenderal PHKA dan Direktur Konservasi dan Rehabilitasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil penilaian disajikan sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input: 740 dari total 1075 (71%)
- Skor penilaian kriteria proses: 255 dari total 400 (62%)
- Skor penilaian kriteria output: 200 dari total 500 (40%)
- Skor penilaian kriteria outcome: 1413 dari total skor 2100 (67,29%)

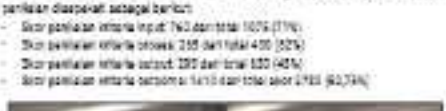

Gambar 2.1.42. Penilaian EKK Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hilir Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 mengalami nilai akhir sebesar 67,29% dengan status Pasti (Efektif Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan oleh pemerintah Kawasan, Menyusun dan melengkapi SOP pengelolaan beserta penerapannya, meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program penyelamatan yang terencana, pemantauan target konservasi dan status secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi perizinan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program pendampingan masyarakat, meningkatkan efektifitas program penyelamatan kelestarian, monitoring dan analisis konflik terjadi konservasi di masing-masing zona.

b. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Umum

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 22-25 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta Sungai Mahakam oleh pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan kawasan konservasi.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.4-5. Pelatihan Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

c. *Conservation Goes to School*

Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Maluku Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan pola lingkungan hidup melalui pembelajaran dan pelestarian kepada generasi muda di wilayah Kawasan Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di Main 2 Kotal Kamarkgara, SMPN 1 Huamu Hila, SMPN 1 Huara Kamian dan SMPN 1 Huara Mumbi. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RAS sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesisir Maluku. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya sumber daya ikan dan karangan di Desa Maluku dengan arif dan lestari. Kegiatan dikemas dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.

Gambar 3.1.4-6. Pelaksanaan Conservation Goes to School

d. **Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi**

Kegiatan sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Maluku Wilayah kepada masyarakat/kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholders terkait dalam rangka upaya pengelolaan, serta pemahaman dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Maluku Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Huara Hanggar dan Desa Huara Kamian ini pada tanggal 2 s.d. 6 September 2004. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa tujuan dari Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi yaitu untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem, habitat dan sumber daya hayati di dalam Kawasan. Kegiatan zonasi kawasan konservasi sebagai berikut: Zona inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lainnya dan Zona Rehabilitasi. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RAS sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesisir Maluku yang memiliki strategis secara nasional serta unggulan untuk melindungi habitat pesisir. Selain itu, penjangkauan materi

Laporan ini telah disesuaikan berdasarkan masukan tertulis tanggal yang diterimakan oleh WWF, 2010

kawasan konservasi (Kabupaten dalam perlindungan bahan zatlah dalam bentuk pasar dan Wilayah kepada masyarakat yang terdiri dari satu dan daerah lokal

Gambar 3.1.4-4. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Survei

c. **Survei Jenis Ikan Di Bindungi di Kawasan Konservasi Maluku Hulu**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pasut maluku pada periode Juli - September 2024 di Kawasan Konservasi Maluku Hulu. Survei pemantauan keberadaan pasut dilakukan menggunakan kapal Orcaella di Ili Yayasan Konservasi RADI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan juga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal lainnya itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1.4-5. Pengamatan Populasi Pasut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pasut dengan jumlah individu sebanyak 43 ekor. Individu terbanyak yang terlihat tercatat di Hulu Pimba Ayo sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kadang Pan'au sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pasut sebagian besar terlihat pada rentan pukul 10 hingga mendekati Tengah. Waktu paling jago ditemukannya pasut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pasut yaitu pukul 16.27.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pasut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pasut	Waktu	Aktivitas
1.	Sangkonteh	9	12.12	Sighting
2.	Sungai Kadang Pan'au	2	14.57	Sighting
3.	Muara Wia	6	17.56	Sighting

Dokumen ini milik pemerintah atau pemerintah daerah dan bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan

5	Muara Rimba Ayu	14	10.48	Lighting
6	Muara Bonsu Kemayung	6	08.17	Lighting
8	Muara Pete	3	10.01	Lighting
7	Lubuk Unit	3	10.08	Lighting

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan tersebut pada kelas mutu sungai dan sebelahnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang disajikan di stasiun pengukuran menunjukan nilai suhu berkisar antara 33,4 – 31 C. Sementara untuk nilai Biological Treatment berkisar antara 2,7 – 5,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 6,8 – 7,05. Sementara nilai TDS berkisar antara 10 – 45 ppm.

1. Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan rutinal monitoring kualitas air di Kawasan Konservasi Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan Juli – September 2020. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 14 titik stasiun. Parameter yang diukur meliputi kecepatan arus, kedalaman, suhu air, konduktifitas, oksigen terlarut, dan total bahan terlarut. Kalyang digunakan ialah alat Water Quality Checker Hanana dan GPS.

Gambar 3.1.4-7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Triwulan III tahun 2024 (Bulan) bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam lampang kelayakan baku mutu kelas dua menjadi PP Nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-4. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Kecamatan	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (oC)	33,8	27,4	29,99
pH	6,85	5,8	6,54
TDS (mg/L)	28,0	13,0	24
DO (mL)	13,0	2,0	6,87
EC (S/m)	79,1	26,9	43,26
Kuat Arus (m/s)	1,84	0	0,79

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

b. Pelatihan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hilir

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada tanggal 14 – 15 September 2024 di Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini merupakan bagian dari Penyadaran Data dan Informasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel pengambilan data diperoleh dari zona pemanfaatan dan zona inti di dalam KK Mahakam Hulu. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan pujau (*Datnioides vitatus*) dan ikan selok (*Oxyeleotris marmorata*). Sebanyak 73 ekor ikan pujau dan 15 ekor ikan selok dilakukan pengukuran morfometrik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang hingga belahan ekor, lebar jari kanan pada sirip, lebar jari sirip kanan kedua pada sirip, jari jari keras pada sirip, jari jari lemah kedua pada sirip, panjang kepala, tinggi kepala, dan pengukuran bobot gonad, dan pembuatan foto.

Gambar 3.1.4.6. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

h. Sosial Budaya Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 9-13 September di Desa Muara Wis dan Desa Muara Muntai Ilir. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan alat panduan berupa kuisioner. Variabel tangkap adalah peralu perikanan dan perikanan sebagai sosial seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel desa ditanggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Informasi yang didapatkan oleh responden di antaranya, profil responden, sikap terhadap kawasan konservasi, dampak terhadap kawasan konservasi pada nelayan, informasi masyarakat, dampak kawasan konservasi, profil nelayan dan produksi, mata pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat, pemanfaatan dan pemasaran, konsumsi rumah tangga. Hasil akhir diperoleh 30 responden yang meliputi sebanyak nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan.

Gambar 3.1.4-9. Sorsel Dasar Ekonomi

1. **Focus Group Discussion Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

   Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada tanggal 19 – 20 September 2024 di Desa Muara Ahu, Desa Pela dan Desa Liang Ihi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan kemampuan adaptasi terkait pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Hulu. Beberapa permasalahan di Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh peserta FGD diantaranya: pendangkalan danau akibat penggunaan lahan, gangguan dan dampak kerusakan oleh jentrik, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan berkurangnya area tangkap yang terhadap Zona Inti. Usaha program pengelolaan dari masyarakat yaitu penegakan hukum bagi pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan, restocking benih ikan serta pelatihan pengolahan dan budidaya ikan.

Gambar 3.1.4-10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

2. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi**

   Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu direalisasi pada bulan Agustus dan September 2024 berupa alat prasarana yang disediakan yaitu CCTV dan Rumah Raifli untuk Monitoring Pesut.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian KU #1 didukung dengan adanya anggaran dari Kegiatan Rincian Output [2842.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [2842.PBW.003] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran KU 4 Tahun II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2842.PBW.001.054] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan	Rp 83.999.000	Rp83.0xx.333 (99,05%)	-

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

	Konservasi Kawasan dan Pulau-Pulau Kecil			
2.	[2363.PEN.001.060] Pelayanan Pelatihan Berbasis Kawasan Konservasi	Rp138.838.000	Rp0 (0%)	-
3.	[2363.PEN.001.064] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp21.247.000	Rp15.974.540 (22,5%)	-
4.	[2363.PEA.002.047] Pemrosesan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp455.100.000	Rp157.196.032 (34,97%)	-
5.	[2363.PEA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp444.311.000	Rp320.756.264 (48,26%)	-
6.	[2363.PEA.002.053] Pelaporan Pelatihan Masyarakat	Rp1.197.312.000	Rp850.609.000 (71,03%)	-
7.	[2363.PEA.002.054] Pelayanan Pelatihan Kawasan Konservasi	Rp246.282.000	Rp1.278.400 (0,44%)	-
	TOTAL	Rp2.986.084.000	Rp1.482.780.668 (33,73%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung KU. III pada Triwulan III (sampai dengan Januari 2024) yang sebesar Rp1.982.738.448 atau 66,76% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.908.206.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

Gambar 2.1.4-11. Realisasi Anggaran Kumulatif KU. I sampai Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan di Triwulan IV diantaranya: monitoring sosial ekonomi; pendataan jenis ikan ekonomis; survei pemanfaatan kawasan; sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi kota dilindungi di Kawasan Konservasi Maluku Hulu. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga direncanakan pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.1. Capaian Regional 5 Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan penetapan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rancana zonasi, pendampingan penyusunan rancana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi kawasan konservasi. Teknis pentifikasi indikator Kinerja dilakukan dengan mengimentarisasi dan menyusulkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses pelengkapan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SPAK	Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra (2020-2024)	
	Target Thn III	Realisasi Thn III	% Capaian	Target Thn 2024	% Realisasi thd Target Thn	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2	Provinsi Capaian Tahunan			7	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena proses pengusulan dan penetapan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Pentahan Evaluasi Efektifitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar dari pada target tahun III yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DItjen PHL 2020 – 2024 yaitu sebesar 20,2 Juta ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sama dengan tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

5. Analisis Penyebab Kesenjangan/Kegagalan atau Peningkatan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini tergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat pertimpun secara rutin.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu Pendampingan Penilaian Efektivitas Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Simusan dan Pulau Simaya di Kawasan Konservasi Perairan Tanjung Pulau Timun. Berdasarkan penilaian, verifikasi hasil penilaian kawasan konservasi yang berada di Kalimantan Utara didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 708 dari total skor 2760 (25,31%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: Penetapan dokumen rencana pengelolaan cobour dengan PERMEN KP No. 31 Tahun 2020; Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kawasan Konservasi; Peningkatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi; Penyusunan dan Penerapan SOP Pengelolaan dan Pemilihan Wahana di Kawasan Konservasi; Peningkatan intensitas Pengawasan dan Patroli; Sosialisasi kegiatan penanaman dalam rangka pengelolaan via kelompok masyarakat; Peningkatan kegiatan Restitusi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi; Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dengan kombinasi dengan anadara isi, dan lainnya.

Gambar 3.1.3-1. Rapat Hasil Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah

Sementara itu, penilaian EVIKA di Kalimantan Tengah dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Gosong Sebangau, Gosong Sebagai, Gosong Baras Kasan, Teluk Bajam Sampai Tanjung Keluang, Seka Perairan Sekitarnya. Berdasarkan penilaian, verifikasi hasil penilaian Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Tengah didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 1683 dari total skor 2760 (60,99%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: - mengusulkan KLHP dalam bentuk UPTD (dokumen Rencana Pengelolaan perlu disusun kembali dengan mengacu kan dengan Permen KP No. 31/2020); Perlu ditambahkan jumlah SDM serta ditingkatkan kompetensi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi; Rekomendasi jumlah EVIKA agar dijadikan dasar dalam melakukan penyusunan anggaran pengelolaan kawasan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

konservasi yang berasal dari APBN, APBD atau sumber pendanaan lainnya; Perlu meningkatkan frekuensi kegiatan di bidang pengamanan minimal 2 (dua) 1 kali dengan melibatkan POKMP dan pihak terkait lainnya serta mendokumentasikan pelaporan dengan baik; Perlu ditingkatkan pemantauan kegiatan penyingkapan penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyertakan target populasi masyarakat yang dijangkau dengan baik; Perlu dilakukan kegiatan pendukung pertimen dalam bentuk sosialisasi atau penyadartahuan, pelayanan, materi dan informasi pertimen serta prosedural pemberian ijin pelatihan dan latihan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2062.054.001], Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2062.054.001.051] Fasilitasi kawasan pelestarian keanekaan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 180.000.000	Rp54.927.402 (54,92%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp54.927.402 (54,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU III pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp54.927.402 atau 54,93% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Gambar 2.1.2-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU III Hingga Triwulan III

C. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka pemaparan penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi; Ketiga, penyusunan laporan juga dilaksanakan setelah pada Triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, 2024

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan konstribusi kerjasama, pejuang, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satuan lebih tersebut berdasarkan asas, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknis menghitung indikator kinerja dilakukan dengan mengkonversikan dan menjumlahkan nilai kesepakatan kerja sama yang dicapai di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan kemitraannya hasil laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SS 3.6	Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan konstribusi kerjasama, pejuang, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 6	Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW 2024	% Realisasi thd Target TW	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Jumlah Capaian Tahunan			1	100	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, sapaksara 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", Sehingga dapat dilaksakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III capaian tersebut belum dapat dilaksakan pengukuran kerjanya berupa pencapaian dari persetujuan kegiatan adalah tahunan. Namun terdapat progress kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07.DJPRL/KS.2023/1/2024 dan Nomor B-523/KD/KSDN/274.06/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang difasilasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan (luas ideal) 13 juta hektar pada 2019 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan

Halaman ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

belajar tersebut jangka menengah tersebut pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV dilakukan secara terlunasi.

6. Pertandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan kerja/MoU kerjasama dan komersial dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian triwulan III Tahun 2024 sudah sesuai dan sebanding dengan Renstra karena penyelesaian capaian pada triwulan IV) dilaksanakan secara terlunasi. Terkait progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah bernomor tinjau sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Penyimpangan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah dilaksanakan rapat monitoring kerjasama kerja sama, KHSN, Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kota Kerjasama. Selanjutnya, hal tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan ditanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hal ini dikarenakan rekat tantangan target di Triwulan III, sehingga RPD6 belum dapat dintung. Namun pagu analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian RPD6, realisasi anggaran dan sisanya dari RPD6 dengan sementara realisasi anggaran.

9. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Kota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 07/DJPRL/KS.320/V/2024 dan Nomor B-833/KS/KSDN/ITA.06/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten di Wilayah Kota Kesepakatan Kutai Kartanegara pada 20 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan klasifikasi Rincian Output (KRO) [2163.PSC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [RO: 001] Kolaborasi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.

Dokumen ini milik Kementerian Kelautan dan Perikanan | Hanya untuk kalangan sendiri

Tabel 3.1.4-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung RKL-RPL pada Triwulan II

No.	Komponen Sub-komponen	Pagu	Realisasi	Ekstr.
1.	[3863.BKC.001.001.A] Pelaksanaan Kesepakatan Bersama	Rp78.000.000	Rp48.233.471 (90,89%)	-
TOTAL		Rp78.000.000	Rp48.233.471 (90,89%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RKL-RPL Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp48.233.471 atau 90,89% dari pagu anggaran Rp78.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Rapat Internal (Biaya Konsumsi, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksana Kegiatan Narasumber); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transpor Peserta).

Gambar 3.1.4-2. Realisasi Anggaran Kumulatif RKL sampai Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024.

9. Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2024

a. Pemrosesan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPVKL, Direktorat Teknis DJPVKL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.

b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kartanegara.

Laporan ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

IKU 7. Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kawasan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterkaitan, dan saling menguntungkan. Kawasan dapat diartikan dengan masyarakat mitra/ch. kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koperasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan mengakumulasikan dari hasil/output kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk melaksanakan kegiatan konservasi dan pemberdayaan kepatuhan dan dilaksanakan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 2.1.0.2. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

DEFINISI	Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk mendukung pembangunan yang adaptif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 7	Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

PERIODE 2020	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI 2020-2024	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target Triwulan	% Realisasi thd Target Thn	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan		1	100	0	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPKL, diolah/diisi oleh

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III capaian tersebut belum dapat dianalisa pengaruhnya terhadap kinerja periode pelaporan dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah mencapai tahap 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan Nomor B.1460/BPSPL.3/KS.330/X/2023 dan Nomor 6803/UN17.4/KS/2023 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kubu Kuntangan Melalui Pengajuan Sumber Daya Manusia, Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada 25 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kawasan konservasi yang ditetapkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga Triwulan III tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Beberapa Jangka Menengah

IKU ini memiliki Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPPI 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (luas lestari) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra jangka menengah karena pelaporan capaian pada Renstra IKU dilakukan secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

A. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target capaian Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan kerja sama dan konservasi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum seperti yang diharapkan dengan Realisasi kinerja perjanjian kerjasama pada Triwulan III) dilaksanakan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat memberikan tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kotal Kamanagara melalui Pengudan Sumber Daya Manusia, Penguatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Adapun draf Perjanjian kemitraan tersebut telah dilakukan pemaparan pada kegiatan Sosialisasi DJPK dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III, sehingga KPSE belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian KPSE, realisasi anggaran dan waktu dan KPSE dengan persentase realisasi anggaran.

D. Kendala Pelaksanaan

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah sesuai Nomor B.1480/BPSPL.3/KS.320/11/2023 dan Nomor 0003/UMP/FAHO/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kubu Kahanegara melalui Pengudan Sumber Daya Manusia, Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada 20 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta.

Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Kas/Real Rincian Output (RO) [3303.PDC] Kerja Sama, dengan Rincian Output [PBE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut ditabelkan non ponsh/sukkom pemanfaatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	3362.PEE.031.251.A Insiasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.589.400 (99,59%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.589.400 (99,59%)	-

Sumber Data: BPSPI, Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU 7 Triwulan III (akumulatif) dan Januari 2024 yaitu Rp99.589.400 atau 99,59% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksana Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Peserta dan Hotel Kuta) di Kalimantan Timur.

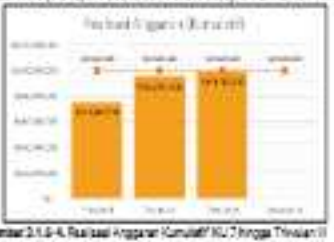

Gambar 3.1.9-4. Realisasi Anggaran Kumulatif KU 7 hingga Triwulan III

Output yang telah dicapai pada Triwulan III dengan realisasi anggaran tersebut adalah Pendampingan Penjaringan Kemitraan BPSPI, Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengolahan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan IV Tahun 2024 adalah Pendampingan Penjaringan Kemitraan BPSPI, Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengolahan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.3 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis liar tertentu untuk tumbuh dan/atau berkembang biak. Teknis mekanisme disalurkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan menjamin akan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai rancangan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU BPSPL Pontianak

SKT	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Tren Lima Tahun Terakhir	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra (Lima Tahun) 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2023	% Realisasi thd target TW III	Target 2024	% Realisasi thd target 2024	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
0	0	0	100	0	100	0	66,67	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, September 2023

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III 2023 telah dilaksanakan pengaturan dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah disalurkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan III sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 yaitu pengadaan dan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Semadak Lestari di Kabupaten Kayong, Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2022

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 2 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Hal ini capaian kinerja IKU III pada Triwulan III mengalami Tidak Lebih Rendah dibandingkan dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh pemangkasan pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp599.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp342.849.000 pada tahun 2024.

Gambar 3.1.3-1. Grafik Capaian Berhasil KOMPAK Triwulan I s/ Tiga Tahun

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PHN, Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL.

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 lalu, pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian realisasi Triwulan III tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 66,67% dari target Rencana Strategis BPSPL Pontianak. Hal itu disebabkan terhadap pencapaian target kinerja dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok yang disebabkan oleh keterbatasnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp268.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja dikarenakan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp268.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp252.545.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini tergantung kepada kesediaan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan IKU tersebut target di Triwulan III sehingga HPP3 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan HPP3, realisasi anggaran dan selisih dari HPP3 dengan realisasi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pendukung terdapatnya IKU, yaitu:

a. Penyampaian Hasil Identifikasi

Penyampaian Hasil Identifikasi dan Verifikasi Polimasnas Pelatih dilakukan melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.1446/DJPKL.4/PKL.4.0/7/2024 tanggal 26 Juli 2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang bantuan Kondisi meliputi:

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.2008/PP.2.10/PL.480/7/2024 tanggal 8 Juli 2024
- Surat Pemesanan Kapal (SPK) nomor 8e/SPK/PL.2.0/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yaitu Pengadaan Barang Bantuan KONVASK TA 2024 Kolom ini Dilipadan Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pemberangkatan No. 01-1/BPSPL.2.0/PK/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
- Berita Acara Pemberangkatan no. 01-2/BPSPL.2.0/PK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB.09/BPSPL.2/PK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 80/BPSPL.2.0/PK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

c. Bast Terima Bantuan

Bast terima bantuan konstruk pada kelompok Masyarakat Kampung Lestari dan Desa Kendawangan Gh. Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 03 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat kemasan fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp. 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.2030/BPSPL.2/PK.440/IX/2024 tanggal 03 September 2024.

Gambar 3.1.7-1. Surat Terima Bantuan KONVASK

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2863.QBH.001] Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Realisasi kegiatan pemberdayaan sampai dengan akhir pelaporan triwulan II

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ekstrk
1.	[2842.QEH.001.001] Pemberian Bantuan Kolektif	Rp 382.648.000	Rp240.011.999 (94,31%)	-
TOTAL		Rp 382.648.000	Rp240.011.999 (94,32%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (pemutakhiran Januari 2024) yaitu Rp240.011.999 atau 94,32% dari pagu anggaran sebesar Rp 382.648.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan bantuan di tahun sebelum. Melaporkan laporan pengelolaan dan contoh bentuk bantuan kepada Masyarakat Pengelola Konservasi (KONPAK) di wilayah kerja BPDPL Pontianak.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPDPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di beberapa/tiap kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/lokasi yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kelompok orang yang terorganisasi yang memiliki pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan anggota kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan usaha bersama di bidang kehutanan dan perikanan. Teknis mengintung dilakukan dengan triangulasi/validasi dan monumentasi kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPDPL Pontianak.

Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak hingga triwulan III

SPOT	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak
IKU 4	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPVL 2020-2024	
Target 2023	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW III 2023	% Capaian thd Target TW III	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan		1	-	2	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVL, September 2023

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III yaitu koordinasi awal dan identifikasi peningkatan mata pencaharian alternatif di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketidaktercapaian/Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilaporkan karena IKUPP tersebut baru diterbitkan pada bulan Juni. Terdapat perubahan klasifikasi Rincian Output menjadi (3262.BDD.002) Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapabilitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 30 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Untuk itu, perlu sinkronisasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL untuk melakukan revisi terhadap kinerja dan menyesuaikan target PK dengan target RO.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis karena realisasi penggunaan sumber daya untuk kinerja IKU tersebut belum terdapat target di Triwulan III sehingga MPSS belum dapat dihitung. Perhitungan efisiensi

Informasi ini hanya ditujukan untuk kepentingan internal Kementerian yang dikecualikan oleh UU KIP, 2010

efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga efisiensi pada RPTD, realisasi anggaran dan sinkron dari RPTD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

a. Identifikasi Kelompok Untuk Mata Pencaharian Alternatif di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan identifikasi kelompok dilaksakan pada tanggal 30-31 Juli 2020 bertempat di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai mata pencaharian yang dapat dijadikan alternatif selain sebagai nelayan bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu wawancara menggunakan alat panduan berupa kuisioner pada enam desa: Desa Sebuntal Hilir, Desa Pela, Desa Liang Ulu, Desa Liang Ilir, Desa Sebelimbingan, Desa Kota Bangun Sebrang. Hasil dari wawancara secara umum menunjukan bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan

Gambar 2.1.7-4. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian alternatif di Kawasan Mahakam Hulu

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output [2042.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2042.000.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difungsikan kepadanya.

Tabel 2.1.7-2. Realisasi IKU II Triwulan II

No.	Komponen Output/Indikator	Pagu	Realisasi	Ket
1.	[2042.000.002.BA1] Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 590.000.000	Rp96.494.281 (16,74%)	-
TOTAL		Rp 590.000.000	Rp95.594.281 (16,24%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2020

Melaksakan pelatihan pelatihan sesuai dengan identifikasi mata pencaharian alternatif kepada nelayan yang berdomisili di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga direncanakan selesai pada Triwulan IV.

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengelola internal Balai/unit yang bersangkutan dan tidak untuk dipublikasikan

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Perlindungan, Penyelamatannya, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan perlindungan, penyelamatannya, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis Ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestarianmya melalui perlindungan, penyelamatannya, perbaikan habitat pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kelangsungan keberadaannya hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Pelosi, Kima, Lola, Tenduk, Pari Air Tawar, Kerang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Perlindungan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Pelosi, Kima, Lola, Tenduk, dan Pari Air Tawar.
b. Perbaikan Habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengawasan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Kerang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan/akumulasi dari penjumlahan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Perlindungan, Penyelamatannya, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

IKU 13	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak								
Indikator	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Perlindungan, Penyelamatannya, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2020	Tahun 2021					Renstra 2020-2024		Jangka Panjang 2005-2025	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target IKU 2021	% Realisasi thd Target IKU	Target 2020	% Realisasi thd Target 2020	Target 2025	% Capaian thd Target Jangka Panjang
13	Pelosi, Capaian Tahunan		7		-	7	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan LAKIP, Sasaran Tahun 2021

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2021

Pada Triwulan III 2021 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Triwulan III/akhir thn dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2021 yaitu untuk 3 jenis (antara: Kima (penyebaran data posisi)). Kerang (pemboatan Cone dan Mamalia Laut (kegiatan dapat penanganan mamalia laut terdampar). Sementara progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2021 yaitu untuk 3 jenis (antara: Lola (penyebaran data posisi), Bhimastasi Ho dan Pari Aparidhis (penyebaran data posisi) dan Mamalia Laut (kegiatan dapat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan III yaitu 6 jenis ikan terancam punah telah dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan II tahun 2023 terdapat progres capaian komulatif sebesar 8 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 (kumulatif 4 jenis), maka progres kegiatan mengalami penurunan sebesar 25% dari progres kegiatan pada Triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah PD tersebut yang tertuang dalam Renstra Dinas PKPL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan komulatif Triwulan III sebanyak 8 jenis memiliki peran sebesar 30% dari capaian target jangka menengan Dinas PKPL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah PD tersebut yang tertuang dalam Renstra BPBPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Dinas PKPL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan komulatif Triwulan III sebanyak 8 jenis memiliki peran sebesar 88,67% dari capaian target Renstra BPBPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data sosial penyu. respon cepat manusia laut tersantar dan sosialisasi bicta laut dilindungi tersantam pantai. Respon cepat manusia dan terdampar memerlukan informasi yang akurat dan masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan semua. Selain itu, akses lokasi kejadian bicta terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, diperlukan upaya penanganan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat bicta terdampar. Hasil Triwulan sesudahnya belum terdapat mata anggaran untuk Pendataan Populasi Tambak dan Peri Air Tawar sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Hal ini telah dikoordinasi dengan tersebut kepada bahwanya Dinas PKPL untuk dengan mata anggaran kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Pertimbangan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Pembandingan tujuannya penanganan bicta terdampar meniadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit dijangkau.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pendukung terdapatnya IKU, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

a. Survei Penyebaran Biota Potensial Lola di Kalimantan Selatan

Kegiatan penyelaman data sosialisasi lola (Trochus niloticus) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kanalyaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 6 – 14 September 2023. Kegiatan survei dilakukan koordinasi dengan tim BNI dan PSDKP Kotamanah terlebih untuk mencari informasi mengenai lokasi lola dan penangkapan lola di Kalimantan Selatan. Selain itu dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Pesisir yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informasi yang terdapatnya lokasi terhadap lola. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melaksanakan pemetaan partisipatif dan masyarakat dan nelayan sekitar terkait lokasi potensial Lola di Pulau Kanalyaan.

Gambar 2.1.3-1. Survei Penyebaran Lola di Kalimantan Barat

Survei lapangan dilakukan di 3 lokasi/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif terhadap masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan menggunakan transek garis pada tiap sampel. Stasiun pertama berlokasi di sagian barat Pulau Kanalyaan. Ditemukan sebanyak 2 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Kanalyaan. Ditemukan sebanyak 11 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di sagian timur Pulau Kanalyaan. Ditemukan sebanyak 2 individu lola di sekitar transek pengamatan. Total sebanyak 24 individu lola yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyebaran data sosialisasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Kanalyaan

b. Penangkaran Biota Laut Dilindungi Tanaman Pantai

Selama periode Triwulan II (Juli hingga September 2024) terdapat 14 (empat belas) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau tanaman bunah yang meliputi kejadian tertangkap, tertangkap jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau tanaman bunah yang ditemukan penanganan yaitu sesuai, penyu, dugong dan cacus. Sebanyak 2 (dua) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1), 12 (dua belas) kejadian menyebabkan biota dengan kondisi mati (kode 2, 3 dan 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pengobatan sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikubur/dibuang pada sekitar lokasi ditemukan.

Laporan ini telah disampaikan kepada pihak terkait sesuai yang ditentukan oleh KKP, 2024

Gambar 3.1.3-2. Dokumentasi Penangkaran Biota Terlampir

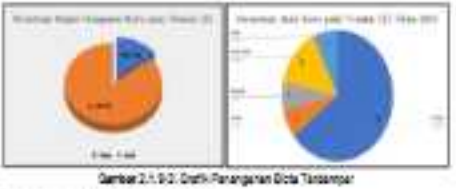

Gambar 2.1.9-3. Grafik Penangkaran Biota Terlampir

c. Monitoring/Pendataan Hiu Pari Apendiks IV

Kegiatan pemantauan data Hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Juli – September 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Kelasinan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Kelasinan Perikanan Indonesia (PPI) Nanga Kalis Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap lokasi:

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari apendiks di PPN Pemangkat pada periode Juli – September, didapatkan total 408 ekor hiu dengan hiu yang tertangkap apendiks sebanyak 384 ekor. Jenis hiu apendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili *Carcharhinidae* sebanyak 370 ekor. Sementara itu, sebanyak total 46 ekor pari didaratkan sejenang Trivulsen I dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 41 ekor. Jenis dari apendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili *Rhinidae* sebanyak 33 Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari family *Hemiscyllidae* sebanyak 1 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili *Dasyatidae* dan *Glaucostegidae* sebanyak masing-masing 3 ekor.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, 2024

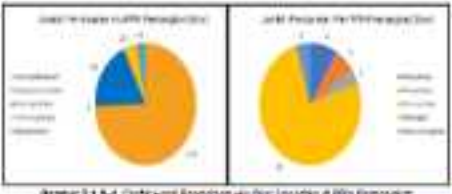

Gambar 3.1.3-4. Grafik hasil Pendataan Hiu dan Aparoidna di PPI Pemongkar

Gambar 3.1.3-4. Dokumentasi pengukuran

- Pendataan Hiu Pari Aparoidna di TPI Dungal Kalsel

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Aparoidna di TPI Dungal Kalsel pada periode Juli – September, didapatkan 4 jenis hiu aparoidna sebanyak 12 ekor dari 2 jenis pari aparoidna sebanyak 285 ekor. Jenis hiu aparoidna tertanyak yaitu Rhizoprionodon acutus sebanyak 4 ekor dari jenis pari aparoidna terbanyak yang ditemukan yaitu Aeyrostalaris zonimaculata sebanyak 147 Ekor. Jenis hiu aparoidna yang sedikit yang ditemukan yaitu Carcharhinus brevipinna sebanyak 1 ekor dari jenis pari aparoidna paling sedikit yaitu Rhynchobatus australis sebanyak 31 ekor.

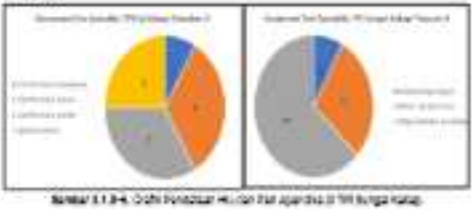

Gambar 3.1.3-4. Grafik Pendataan Hiu dan Pari aparoidna di TPI Dungal Kalsel

- Pendataan Hiu Pari Aparoidna di TPI Manggar

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Aparoidna di PPI Manggar pada periode Juli – September, didapatkan total 429 ekor hiu dengan 5 jenis yang termasuk aparoidna sebanyak 441 ekor. Jenis hiu aparoidna terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 276 ekor. Sementara itu, sebanyak total 153 ekor pari

Salinan ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

diidentifikasi sebanyak 7 famili dan spesifik yang diidentifikasi sebanyak 7 spesies. Jenis cari spesifik tertanyak yang ditemukan yaitu cari famili Rhizidae sebanyak 7 Ekor. Jenis ini yang paling sedikit ditemukan yaitu cari family Hemigaleidae dan Hemipristidae sebanyak masing-masing 1 ekor dari jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu pari famili Rhinidae sebanyak 2 ekor.

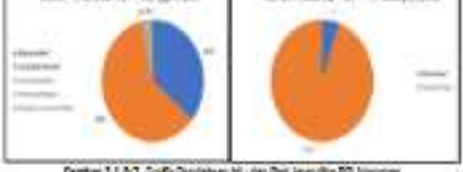

Gambar 3.1.8-7. Grafik Pendaratan HL dan Pari Kepodika PP Trenggar

Gambar 3.1.8-8. Dokumentasi Pengukuran

d. Workshop Penilaian E-PAFI 3 Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PAFI 3 dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2024 di Hotel Ida Style Bojen Kayu Kab. Bojen. Kabupaten ini berfungsi dalam rekolia evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPAFI) tahun 2024 serta yang menjadi 30 jenis ikan prioritas pengelolaan konservasi kelautan dan perikanan. Kemudian penilaian EPAFI-3 memiliki kriteria dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang terbagi menjadi input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 83,33 dengan kategori berkelanjutan.

Gambar 3.1.8-9. Workshop Penilaian E-PAFI 3

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

8. Realisasi Anggaran

Komponen KRO ini dilaksanakan dengan proses anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2262.RBB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Tersancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8-2. Realisasi KRO "C Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Awal	Realisasi	Sisa
1.	[2262.RBB.001.041] Pelayanan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Tersancam Punah	Rp199.3xx.xxx	Rp114.87x.xxx (39,00%)	-
2.	[2262.RBB.001.042] Rehabilitasi Populasi habitat ikan jenis ikan dilindungi/tersancam punah	Rp139.11x.xxx	Rp122.35x.xxx (247,1%)	-
3.	[2262.RBB.001.043] Fasilitasi Cetak Perkiraan Biota dilindungi/tersancam punah	Rp46.x12.xxx	Rp32.971.x12 (72,29%)	-
4.	[2262.RBB.001.044] Sosialisasi Biota Dilindungi/Tersancam Punah	Rp580.x12.xxx	Rp 350.27x.221 (12,02%)	-
TOTAL		Rp 748.000.000	Rp227.xxx.711 (32,67%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KO ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp227.xxx.711 atau 32,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 748.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

Gambar 3.1.8-13. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif tingkat Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi biota dilindungi/tersancam punah, survei pendataan populasi tersebut di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi Ikan air Tawar di Kalimantan Tengah dan rekomendasi cetak perkiraan/ mencetak laut terbatas/ kawin. Kelahiran ikan, pelaksanaan lapangan juga dilaksanakan evaluasi pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

a. Pelayanan penerbitan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan atau lock alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana)
b. Pengadaan data collector dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi (termasuk Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana);
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu appendiks, Pari Appendiks, Terbang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terbang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Penerbitan Rekomendasi/ Jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species penyediaan data collector dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

IKU 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw III (Kum)	% Realisasi thd Target (Kum)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Periode Capaian Tahunan			3		3		20	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan penguraian, karena periode penguraian dan pengecekan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian Triwulan III Tahun 2024 satu pelayanan penerbitan pemanfaatan jenis ikan untuk 3 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Sutjar Red, Arwana Silver dan Terbang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Sutjar Red dan Arwana Silver). Selain itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat dan Bimbingan Teknis Identifikasi Terbang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, Kemenkominfo

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya ditentukan secara tahunan. Namun, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat progres capaian sum outfit sebesar 6 juta. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2024 (outfit 8 juta), maka progres kegiatan lebih tinggi pada tahun 2023.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL tahun 2020 – 2024 sebanyak 30 juta pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 juta telah berjalan sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PHPL.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 2 juta pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 juta telah berjalan sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

6. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perbaikan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan komputerisasi tiri pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses penerimaan PNBP. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perbaikan pemanfaatan lahan dan meminjam jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah diantisipasi dengan Pengadaan Pegawai Kontrak bantuan Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perbaikan yang ada.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat diskusikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan efisiensi efektivitas dilakukan dengan membandingkan NPSS realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kontrakcil secara aging (online) dalam rangka penandatanganan dokumen angkutan jarak jauh.

7. Kendala/ Permasalahan

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pemberkasan tercapainya IKU satu.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SPJ, SAJI dan Rekomendasi)
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada Triwulan II (Juli – September). Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SPJI)
Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SPJI pada Triwulan III terdapat 2 pelaku usaha yang mengajukan permohonan verifikasi SPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi
Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki karakteristik (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman pusatkkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat total 61 Surat Rekomendasi dengan 58 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 3 surat ke luar negeri (LN). Tujuan pengiriman Surat Rekomendasi DN paling banyak dikirim ke Kota Administrasi Jakarta Utara. Sementara itu, untuk tujuan pengiriman Surat Rekomendasi Luar Negeri paling banyak dikirimkan ke negara Malaysia. Untuk jenis ikan dan part (look alike species), sebanyak 42 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 19 Surat Rekomendasi untuk jenis tanpa telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk ikan dan part (look alike) tertanyan berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk tanpa tertanyan berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 surat.

Gambar 2.1.9-1. Pemanfaatan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)
Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman pusatkkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat 91 SAJI DN untuk jenis ikan dan part appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu sebanyak 903 SAJI DN untuk jenis Arwana Scleropages formosus telah diterbitkan, 44 SAJI DN diantaranya juga mengangkut Arwana Osteoglossum bicirrhosum (Arwana Silver). Penerbitan SAJI DN untuk ikan dan part appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 34 surat, kemudian penerbitan SAJI DN untuk arwana tertanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 621 surat.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 2.1.9-2. Pemeriksaan SAU

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)
  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari verifikasi lapangan adalah Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KKBP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [isi tautan]. Selama Triwulan II ini terdapat 268 verifikasi SAJI LN, untuk untuk jenis Arwana tidak dijelaskan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 220 surat, negara dengan tujuan ekspor terbanyak yaitu China dengan 140 surat, kemudian Vietnam dengan 36 surat dan Taiwan dengan 21 surat.

- Pemeriksaan Pemantauan (Monoring) Ikan Arwana
  Pemeriksaan Pemantauan (MONING) Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang telah memiliki SAJI LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan arwana yang disertai telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (scan) pada ikan Arwana. Sepanjang Triwulan II (Juli – September) telah dilakukan 117 pemeriksaan penandaan.

Gambar 2.1.9-2. Pemantauan Arwana

- Pemeriksaan Kebenarglokan
  Pemeriksaan Kebenarglokan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan dibenarglokan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang dibenarglokkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang Triwulan II (Juli – September) telah dilakukan 708 pemeriksaan kebenarglokan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 2.1.9-4. Pemeriksaan kelengkapan

- Verifikasi Stok Ikan
  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Verifikasi Hasil Panen
  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Pemanenan
  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BKIPM, Karantina. Nilai sertifikat Ikannya Hasil Pemanenan yang telah disahkan pada Triwulan III 77.773 sertifikat.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional semual dengan Triwulan II (Kumulatif) sebesar Rp1.914.904.001. Total PNBP yang diterima pada Juli – September sebesar Rp3.211.0.00. total PNBP tertinggi pada Triwulan III didapatkan pada bulan September sebesar Rp214.706.500. sementara terendah didapatkan pada bulan Agustus sebesar Rp208.700.000.

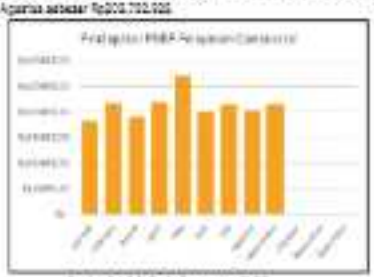

Gambar 2.1.9-5. Grafik Kenaikan PNBP

Informasi ini hanya ditampilkan untuk keperluan internal dan tidak untuk publik

b. Survey Pemanfaatan Arsiana di Kalimantan Barat

Kegiatan Survey Pemanfaatan Arsiana dilakukan pada tanggal 23 – 27 Juli 2024 di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari survey tersebut yaitu untuk mengumpulkan data pemanfaatan arsiana oleh pelaku usaha arsiana, baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha dan pengambilan foto usaha fasilitas pengembangbiakan arsiana. Data - data yang diambil pada kegiatan survey meliputi populasi arsiana yang ditemui, jenis dan jumlah satwa dan prasarana yang dimiliki, luasan area pengembangbiakan, jumlah induk/ras atau benih, metode produksi, metode dan teknologi yang digunakan, tingkat kelangsungan hidup arsiana anakan, dan alur pemasangan, kendaraan ke pelaku usaha rumahan yang terafiliasi dengan 4 perusahaan pun ke 5 IPJ dalam dilakukan wawancara dan pengambilan data.

Gambar 2.1.9-6. Survei Pemanfaatan Arsiana

c. Kegiatan Teknis identifikasi Jenis Tanjung

Kegiatan ini kegiatan teknis identifikasi jenis Tanjung dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPSPL Pontianak ascana darmg dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai peningkatan kapasitas pegawai BPSPL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan verifikasi SAJ maupun Rekomendasi. Kegiatan dilandi dengan pemaparan materi mengenai alur pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Dikat Aparatur (BDA) KKP Sukamandi. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang mencerminkan tindakan dan kepribadian untuk mengidentifikasi kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Gambar 2.1.9-7. Bimbingan Teknis identifikasi Tanjung

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

kegiatan diantaranya dengan pemaparan materi mengenai teknis identifikasi pemanfaatan dan status perlindungan tanaman dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Disampaikan bahwa tanaman merupakan salah satu famili dari tanah buah, yaitu famili Myristicaceae. Dalam penemuan jenis tanaman sarang satu kegiatan tahun yang sangat dijadikan acuan yaitu spesies tanaman yang sangat sering ditemukan di dalam tanaman. Tanaman umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk memperbaiki stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis tanaman yang masuk ke dalam Appendiks CITES, yaitu *Horsfieldia fractiflexa*, *Horsfieldia irianta*, *Horsfieldia iryaghedhi*, *Pleijtella amanea*, *Pleijtella amaz*, dan *Pleijtella rubrifarinata*. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi tanaman dan pratikan sebagai evaluasi kegiatan.

b. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka monitoring pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis liar (Direktorat), appendiks CITES dan non satwa spesies dilindungi.

- Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan

Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan dilaksikan secara rutin setiap bulan dalam rangka monitoring perkembangan perizinan dan tata niaga perdagangan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan non satwa spesies.

- Diskusi monitoring anakan

Diskusi monitoring anakan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan mengundang Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KSBP) dan perwilil BKSDA kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan arwana berdasarkan hasil yang sudah dikembangkan. Diharapkan dengan adanya diskusi monitoring, petugas pelayanan dapat melakukan simulasi perhitungan ikan arwana melalui cara pengolahan data yang memenuhi kaidah ilmiah sebagai dasar validasi stok arwana.

Gambar 3.1 FHS. Diskusi Monitoring Arwana

- Pemaparan dan Rekreasi Alur Proses Bagan Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 20 September dengan melibatkan Komando Bidang Kemanfirmah dan Investasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Pengelolaan dan Pedagang Ikan Kalimantan Barat. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan perpindahan ikan dari KLHK ke KKP untuk beberapa jenis dapat berjalan secara lancar pasca perpindahan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mencari informasi kendala yang dihadapi untuk selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

dapat dilaksanakan berbasis tata kelola, manajerial, infrastruktur dan teknis usaha dan Wisata ke depannya.

Gambar 3.1.0-9. Penyerahan dan Pemasangan Kamera Proses Ekspor Jenis Ikan Upgrading CITES Hasil Pengembangbiakan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3262.REB.002] Kemitrakerjaan Hasil Perikan yang difokus pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.0-5. Realisasi IKU VI Triwulan II

No.	Komponen Kegiatan/Jenis	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3262.REB.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau Appendiks CITES	Rp200.000.000	Rp38.929.913 (34,18%)	-
2.	[3262.REB.002.052] Pelayanan Fasilitasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp1.100.000.000	Rp870.971.592 (47,79%)	-
TOTAL		Rp1.300.000.000	Rp882.901.624 (52,61%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 882.974.624 atau 52,61% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

C. Kendala Atau Triwulan IV Tahun 2024

Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024, survey pemanfaatan tenggang di Kalimantan Timur, survei pemanfaatan arwana di Kalimantan Barat. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga dilaporkan setelah pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/aktivitas tertentu yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dan 50 kiloliter/hari dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan mencatat/mengumpulkan data dan informasi yang menyatakan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses pemanfaatannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengusaan pemanfaat air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat pemohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi pelaksana pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 di BPSPL Pontianak

IKU 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak									
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)									
Capaian 2023	Tahun 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL Jakarta		
	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW III 2023	% Realisasi s/d Target TW III	Target 2024	% Realisasi s/d Target 2023	Target 2024	% Capaian s/d Target Renstra	
1	Periode Capaian Tahunan			1	–	–	–	0	–	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, diperoleh 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengusahaan dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan III yaitu identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut yang terdapat dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 bilasi kawasan yang terfasilitasi pemohon pengelolaan perairan. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka Menengah karena periode pengusahaan dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kinerja IKU tercapai/belum tercapai dalam Renstra Kinerja Pertamina 2020 – 2024: Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan dan tidak tersedia dalam Renstra.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I-II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya KU, yaitu finalisasi penilaian Bersama Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didorong oleh kesiapan pemilihan dalam mengajukan pemanfaatan perairan air laut sebagai energi. Dan kendala itu perlu dilakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan pemanfaatan air laut sebagai energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan hasil tersebut target di Triwulan III sehingga KPDS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan hasil KPDS, realisasi anggaran dan waktu dari KPDS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dianalisis dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan Maritim/Koordinasi pertimbangan perusahaan bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya KU, yaitu Identifikasi pemanfaatan Air Laut Dalam Energi (ALDE) di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 September 2024 pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Sun Indonesia Power (IPP Singkawang), PT DCI, Indo Tenaga yang berlokasi di Kota Pontianak dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Mempawah. Sebelum kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan menyampaikan jenis-jenis pemanfaatan ALDE, KBU yang digunakan, besar investi, parameter untuk pemanfaatan ALDE, pembagian kewenangan dan tarif PNBP.

Gambar 2.1.10-1 Identifikasi Pemanfaatan ALDE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat berupa kuisioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya tujuan pemanfaatan ALDE, kapasitas pemanfaatan ALDE, metode dan teknologi yang digunakan, sarana yang digunakan, waktu operasi dan intensitas dari tenaga kerja yang digunakan. Dari

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

hasil kemampuannya pada ketiga pengawasan tersebut, diberikan informasi berupa tipe/ jenis dari pemanfaatan ALSE yang untuk bahan baku pembuatan sel metode dan/atau/atau air pendingin komposisi dan bahan baku untuk sebuahan domestik. Berapa debit volume pemanfaatan ALSE pada ketiga pengawasan tersebut yaitu 0,06/s – 0,9 m3/detik (debit rata) dan 0,005 – 0,08 m3/detik (debit curah). Metode yang digunakan dari ketiga pengawasan tersebut yaitu Metode Air Baku dan Metode Air Pendingin. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALSE ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan profil pemanfaatan ALSE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2565.PBW.003] Rekomendasi Pemetaan Potensi Bioprospekting dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.12-2. Capaian IKU 12 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2565.PBW.003.002] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp37.494.983 (37,49%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp37.494.983 (37,49%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp37.494.983 atau 37,49% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

C. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) disebis ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga direncanakan selesai pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 12. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditindaklanjuti Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditindaklanjuti penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditindaklanjuti upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak meliputi Selatan Sulawesi Utara Laut (SSU). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan pada satuan wilayah kabupaten/kota. Sulawesi Utara Laut ini merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Sulawesi Utara Laut ini berfungsi untuk meningkatkan pencemaran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang masuk laut dan meningkatkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk kemudian dapat dilakukan oleh masyarakat. Teknik pemilihan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan pemulihan lokasi sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil dengan kegiatan Sulawesi Utara Laut (SSU) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 12 BPSPL Pontianak

Sasaran	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 12	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditindaklanjuti Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Indikator Kinerja	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI 2020-2024	
	Target Tahun	Realisasi Tahun	% Capaian	Target IKU 2024	% Realisasi thd Target 24	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
	Periode Capaian Triwulan			4					

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPKL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya: Identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gemas BDL, koordinasi dan verifikasi rencana dan rencana serta koordinasi tentatif dengan pengampu/pengelola sampah ke pihak tentatif.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Hal-hal/ Kriteria "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditindaklanjuti penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I / Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut di pada tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertulang dalam Renstra DLHKK 2021-2024 yaitu sebanyak 3 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak masuk dalam target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kerangka Strategis IKU terdapat pada tertulang dalam Renstra BPBPL Provinsi 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPBPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat memonitor ketercapaian target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Dan karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisa secara efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan data terkait target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Realisasikan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Proklasi dan Pemotupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kaka Raya**

Kegiatan Proklasi dan Pemotupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kaka Raya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Kongsi sebanyak 60 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kaka Raya selama sebulan hingga telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,10 ton. Dampak langsung dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sejumlah Rp4.843.000.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kutai Kartanegara

c. Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di tiga Kecamatan (Kal. Selapun Besar sebanyak 30 orang, Kec. Tanah sebanyak 23 orang dan Kel Kuala sebanyak 19 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah menyumbang 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 0,07 ton. Sampah nelayan dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp 10.424.800.

Gambar 3.1.11-2. Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Sosialisasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilaksakan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 70 orang dan Desa Banua Lanyung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah untuk Kalimar Manjormacik. Kegiatan aksi Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah menyumbangkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang berhasil ekonomi sebesar Rp4.196.000.

Laporan ini telah disosialisasikan kepada publik melalui website yang dikelola oleh KKP, 2024

Gambar 3.1.11-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

c. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di area Kelurahan Klat. Sepinggan sebanyak 50 orang).

Gambar 3.1.11-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

4. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan menentukan jumlah sampah pada tiga lokasi sampling : Pantai Singkie Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Vila Pada masing – masing lokasi ditemukan sampah sebanyak 1.248 kg di Pantai Singkie, 7.007 kg di Pantai Kuala Singkawang dan 0.019 kg sampah di Pantai Vila. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Gambar 3.1.11-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

1. Bakti Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Bantaeng

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 September 2024 dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dan Jiwadu PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir kabupaten Bantaeng, khususnya di Desa Tamalyar dan Desa Sabalioka. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bantaeng, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didominasi sebanyak 1.4 ton yang terdiri dari sampah plastik atau kemasan makanan, botol/gelas kotor, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng bekas dan lain sebagainya.

Gambar 3.1.11-4. Gerakan Bersih Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Gamar Bolel, Pantai Sungai Balacan dan Pantai Tanjung Ati. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Balacan dan Pantai Tanjung Ati. Sampah yang ada mulai dari sampah lokal tersebut hingga sampah asal kemasan makanan dan minuman botol kotor dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran dari Realisasi Rincian Output (akun 524.000) Realisasi Pemerintah dan kelompok masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pelatihan Dinas Biasa dan Belanja Pelatihan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.11-5. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4346.000.051.351] Kab Penanggulangan Dampak Perubahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp715.585.971 [89,45%]	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp715.585.971 [89,45%]	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp715.585.971 atau 89,45% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 3.1.11.7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Balai Diklat Laut yang telah dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sebuah Kementerian Negara/Lembaga atau kabupaten/kota dengan pertimbangan dengan pelaksanaan anggaran, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Deviasi Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 83 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ Nilai IKPA < 90 atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi dashg Old-SPAN Kementerian Keuangan pada laman https://spanlitsmk.kemenkeu.go.id/spanlit/Default.aspx

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

IKM-14	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak									
IKM-14	IKM: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024						Capaian 2024 (Realisasi / Target 2024)		Capaian 2024 (2024/2023)	
	Target Awal	Perubahan	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	% Realisasi thd Target Akhir	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Akhir
93,02	-	-	-	93,79	93,81	93	100,83	93	100,84	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPR, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan adalah pada triwulan IV) dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan hasil pemantauan nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terakhir pada aplikasi Old-SPAN, progres nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 30 September 2024 sebesar 93,84 dengan kategori baik. Secara umum sejalan pada Triwulan III tahun 2023.

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengguna tertentu dan tidak untuk yang disebarluaskan lebih lanjut

bahwa melebihi target tahunan sebesar 93,7%. Tren bulanan nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami beberapa kali naik pada bulan Maret ke bulan April, Namun nilai IKPA mengalami penurunan secara perlahan dari bulan Mei ke bulan September (Triwulan III).

Gambar 2.1.12.1. Trend Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Namun progres nilai IKPA Triwulan III tahun 2024 adalah 93,66 (99,90% dari target tahunan sebesar 93,76), sedangkan nilai Triwulan III tahun 2023 adalah 91,84 (97,94% dari target tahunan 93,75). Sehingga progress nilai pada Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan 2,12% dibandingkan capaian Triwulan III 2023.

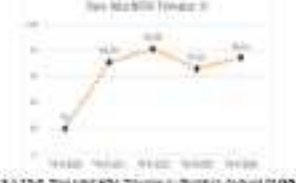

Gambar 2.1.12.2. Trend Nilai IKPA Triwulan III (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra DitJen PPR 2020 – 2024 yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 104,06% (93,66 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melampaui/melebihi target jangka menengan periode tahunan untuk tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena kedua*nya* tidak memiliki target tri*wulan*an. Periode pemantauan Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 90 untuk tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 104,05% (93,65 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang Memenuhi Kaidah yang Telah Ditetapkan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut (flo/land) dengan pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh satker pimpri, konsistensi, ketertiban dan kelengkapan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selain itu*nya* dalam rangka mengoptimalkan perolehan nilai IKPA dan menghadapi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan diminimalisir perkembangannya. Adapun itu, keberhasilan Hasil Analisis Aksi untuk Meraih Kinerja Pelaksanaan Anggaran (AKP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan belum terdapat target di Triwulan III sehingga I-PSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan I-PSS, realisasi anggaran dan waktu dari I-PSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyempurnaan Revisi DIPA secara cepat. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi seperti penggunaan excel dan whatsapp group untuk memantau alur pengiriman kelengkapan dokumen pertanggungan pembayaran bulanan, meng*identifikasi* masalah dan memberdayakan pemeliharaan.

9. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan beberapakah kegiatan pendukung terlaksananya IKU, yaitu:

a. Revisi DIPA
   - 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
   - 1 (satu) kali pada 10 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kamil)
   - 1 (satu) kali pada 9 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
   - 1 (satu) kali pada 23 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp15.183.473.736 atau 72,06% dari pagu anggaran sebesar Rp10.340.110.000 (Sumber Data: DIPSPAN per 30 September 2024)
c. Data kontrak sebanyak 14 kontrak pada Juli – September 2024
   - Pengadaan Perekaman Retrofit Kuang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 03.SPSPL.3.SPPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
   - Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Renovasi Gedung Perkantoran TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK nomor 04/SPSPL.3/SPPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

- Pengadaan Barang Berupa KOMPAK TA 2024 Kabupaten Kemabadan Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 93/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerjanya Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 92/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor Kelompok Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 97/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor Kelompok Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 97/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Drumaster Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 92-A/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Drumaster Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 90/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor SPGPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 99/SPGPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Addendum Kontrak Pengadaan Tenaga Ahli Data (Pranu.band), Pengemudi dan Petugas Kesehatan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor SPGPL Pontianak berupa Display KODK sebanyak 1 Unit SP nomor 41/SPGPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024
- Pengadaan Rumah Pakit Monitoring Pesut di Kawasan Perairan Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 02/SPGPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Juli s.d. September 2024
- Pembayaran atas Belanja Bahan (Bahan Penunjang WBC)
- Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

c. Penyelesaian Tagihan setiap bulan

a. Penyelesaian LP sebanyak 2 kali dan TUP 3 kali

f. Pengadaan Capaian Rincian Output (CRO) periode Juli – September 2024

g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun mengikuti undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran

- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PRL dengan LKPP/KSI Pelitos Semester I TA 2024 pada 10 s.d. 12 Juli 2024 di Yogyakarta.
- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi PNBP DJPRL s.d 31 Agustus 2024 pada 10 September 2024 pada laman (akses http://sikin.kp/Lap_Realisasi_PNBP_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B. 6948/DJPRL.1/TU.320/8/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan Proyeksi PNBP DJPRL s.d 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B. 6949/DJPRL.1/TU.320/8/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri Undangan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Kebun Lingkup Ditjen PRL Tahun 2020 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Rin. Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.3070/S.PRL.1/TU.320/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengelola website Kementerian yang ditunjukkan oleh KSI, 2024

- Mengikuti kegiatan Pemaparan Laporan Pengawasan PWSP tahun 2024 Tahun 2023-2027 pada 13 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PWL Nomor B-2413/DJPWL.1/TU.020/9/2024 tanggal 11 September 2024.
- Mengikuti kegiatan Pembahasan Raja Pengawasan PWSP tahun ke-1/Ke TA. 2024-2027 pada 20 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PWL Nomor B-2706/DJPWL.1/TU.020/9/2024 tanggal 27 September 2024.
- Mengikuti kegiatan Finalisasi Dokumen Pengangguran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Sekwil Wilayah Ditjen PWL pada 30 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PWL Nomor B-2790/DJPWL.1/TU.020/10/2024 tanggal 30 September 2024.
- Mengikuti Verifikasi Data Pengawasan Internal Kegiatan Internal Lingkup UPT Balai/ Unit Pelaksana Teknis 1 tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KSP nomor B-4108/DJ.6/TU.020/10/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini dilakukan dengan akurasi anggaran dan Klasifikasi Rincian Output [3247.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [3247.WBB] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut :

Tabel 3.1.12-2 Realisasi Anggaran IKU 1a Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3247.EBA.994.001] Layanan Sarpri	Rp43.808.000	Rp30.139.200 (68,80%)	-
2.	[3247.FBA.994.001] Layanan Perkantoran	Rp83.808.000	Rp34.804.700 (41,51%)	-
3.	[3247.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp6.297.808.000	Rp4.382.334.202 (77,63%)	-
4.	[3247.FBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp2.704.834.000	Rp2.060.412.279 (76,41%)	-
5.	[3247.EBO.994.001] Layanan Manajemen Keuangan	Rp135.800.000	Rp100.271.700 (74,84%)	-
TOTAL		Rp9.231.134.000	Rp7.102.172.169 (77,16%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 7.102.172.169 atau 77,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup KPPN, Pemeliharaan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor 87,59%, Honorarium dan Belanja Pengadaan Barang Jasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 2.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

II. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

a. Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Pelaksanaan lelang dan penyelesaian anggaran
d. Pengajuan GRC bulan Oktober – Desember 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran Inghop BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Dengan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Kontrak. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Kontrak adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang terkandung dalam dokumen RKA-K/L termasuk rekomendasi perbaikannya apabila ditemukan kelemahan. Hasil Level Belum Kerja, dengan analisis kinerja manajerial aspek implementasi, kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila IKA = 90;
b. Baik, apabila IKA <90 – 80;
c. Cukup, apabila IKA <80 – 66;
d. Kurang, apabila IKA <66 – 55;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 55

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.13-6. Capaian IKU 18 IKA BPSPL Pontianak

2017	3.1.13. Rasio Kegiatan 13 Yang Selaras Pemerintah yang Berlingkup BPSPL Pontianak								
IKU 13	IKU Rasio anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Rasio)								
Realisasi 2022	Tahun 2023					Rencana Kinerja Semarang		Rencana Kinerja 2024-2026	
	Target (a)	Realisasi (b)	% Capaian	Target (a) 2023	% Realisasi (b) thd Target (a)	Target 2024	% Realisasi (b) thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target Semarang
88	Semua Capaian Tahunan			84	-	85	-	85	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAPOL September 2023

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IV/ dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHKL 2020 – 2024, yaitu nilai IKK sebesar 89 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan IV/ dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu IKI di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola dibangun BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut memudahkan tim untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan III sehingga IKI55 belum dapat dihitung. Pembiayan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKI55, realisasi anggaran dan sarana dan IKI55 dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Renal DIPA dapat secara cepat. Salah satu penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang kegiatan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian fitur-fitur subjek. Perhitungan IKU yang

Dokumen ini hanya merupakan cuplikan sebagian kecil dari keseluruhan isi dokumen yang sebenarnya. Untuk isi lengkap dapat dilihat di www.ebpspl.com

kantor/unit kerja. Diskusikan secara formatif, sehingga tidak perlu melakukan pembahasan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III-IV telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya yaitu Input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Juli – Agustus 2024 pada aplikasi SAKIP yang kemudian dinilai pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Kendala Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang menuntang WBK vs. semeggah dan konsep realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan Input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Oktober – Desember 2024 pada aplikasi SAKIP, Monyusun Laporan Komoditi Triwulan III dan IV 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diberikan unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
b. Setiap nilai per area pengungkit minimal 4% untuk semua area pengungkit.
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,00, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan dan komponen Pelaporan LHKPN minimal 5,0.
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 18.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kemenpan RAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Inspektur VI dan/atau Piagam Penghargaan yang diterbitkan oleh Inspektur KKP. Jika pada tahun sebelum telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian merupakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2023 dengan hasil evaluasi sebesar 90,81, sedangkan pada tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal V KKP.

Tabel 3.1.13-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

IKM-16	3.1.13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Kode-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2022	Tahun 2023					Renstra (2020-2024) Pontianak		Renstra (2020-2024) Pontianak	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Akhir 2023	% Realisasi thd Target Akhir	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2022	% Capaian thd Target Renstra
90,81	Periode Capaian Tahunan			75		80		80	

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan ke-III dilaksanakan setiap tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I di Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target yang ingin dicapai oleh BPSPL tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 12 unit Kota yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ungkap Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra 4.0 tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat diisikan sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dilaksanakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dapat terhitung internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan III ini tidak dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terkendala WFH, yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit sangat sulitnya untuk periode Juli – September 2024.
b. Menghadiri Rapat Reviu Aktor Data Dukung PBGPPP Nasional dengan Lokus BPSPL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.2787/SJ/I/TU.330/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
c. Menghadiri Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PRL pada 14 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan undangan dari Sekretariat Ditjen PRL Nomor B.4606/DJPRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

B. Realisasi Anggaran

Komposisi IKU ini disusun dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2267.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2267.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.12.5. Realisasi Anggaran IKU IV Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBA.960.005] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 99.000.000	Rp59.809.000 (60,00%)	-
TOTAL		Rp 99.000.000	Rp59.809.000 (59,08%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp59.809.000 atau 60,08% dari pagu anggaran sebesar Rp 99.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan Honor Panitia Penyusun WBK dan Konsultasi Pakar.

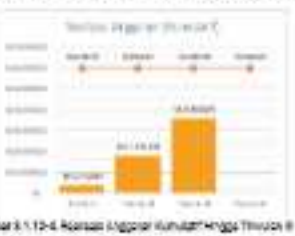

Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

C. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pencanaan aksi pada Triwulan IV yaitu pengumpulan dokumen komponen pendungkit serta bukti dukung untuk bulan Oktober – Desember.

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas aparatur negara pada prinsipnya adalah bagaimana profesionalisme tersebut dapat dicapai dan diwujudkan yang mencakup nilai-nilai dasar, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh aparatur negara. Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kode etik jabatan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017). Misi Indeks Profesionalitas ASN mengukur gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA. Sementara Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai dari setiap tahun dengan menggunakan 4 [empat] dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 20%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

1. Disiplin PNS/ASN sebesar 5%

Kualifikasi diukur dari indikator tingkat pendidikan formal terakhir yang telah diikuti. Kompetensi diukur dari indikator rata-rata persentase kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator rata-rata persentase hukuman disiplin yang pernah diterima selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/ Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/ Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/ Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/ Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/ Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan indikator tersebut diambil langsung dari dashboard IP ASN KKP yang bersumber dari informasi manajemen kepegawaian di laman https://asn.kkp.go.id.

Tabel 2.1.IKK-6. Capaian IKK I7 BPSDM Perikanan

IKK I7	2.1.I7). Rerata Capaian 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSDM Perikanan
IKK I7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSDM Perikanan (Index)
Kebijakan 2025	Tahun 2025					Realisasi (BPSDM, Perikanan)		Realisasi (Ditjen, 2025-2024)	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW III (2024)	% Realisasi thd Target TW III	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2025	% Capaian thd Target Ditjen
90,84	-	-	-	88	95,73	75	110	75	110

Sumber data: SKAK, Perikanan dan E-KPPA, September 2025

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan pemantauan nilai IP ASN terkini akses https://asn.kkp.go.id per tanggal 30 September 2024, 88,84% (rentang) menunjukkan nilai sebesar 95,84 dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini dalam mencapai target pada pelaporan kinerja dengan persentase 106,22%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran. Namun, progress nilai IP ASN pada Triwulan III tahun 2024 adalah 90,48 (106,23% dari target tahunan 85), sedangkan progres capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 90,84 (106,44% dari target tahunan 85). Sehingga progres capaian Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,44% dibandingkan progres capaian Triwulan III tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKK terakhir tertuang dalam Renstra Ditjen PHKL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PHKL Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian ditakukan secara semesteran. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 133% (93,48 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra SPESPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian ditakukan secara semesteran. Namun, progress capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah sebesar 93,48 dari 76. Sehingga capaian tersebut telah melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

II. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKK ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pengembangan kompetensi ini tertuang secara lurus dan datang untuk meningkatkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

III. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisa secara efektif efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan data terkait target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan yang melibatkan kolaborasi dengan pihak lain.

IV. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKK, yaitu :

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang dilaksanakan oleh pihak luar telah diikuti oleh pegawai pada April – Juli 2024 diantaranya adalah :
   - Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi manajemen Risiko pada 10-12 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan nomor B.8474/DJPHKL.1/TU.203/09/2024.
   - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 16-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PHKL nomor B.4692/DJPHKL.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
   - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis identifikasi Tanjang pada tanggal 22 Agustus 2024.
   - Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12 - 14 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PHKL nomor 4634/DJPHKL/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
   - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Lingkup Ditjen PHKL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PHKL Nomor B.5952/DJPHKL.1/TU.220/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

- Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengendalian Kawasan Konservasi dan Pelatihan Liman tanggal 22 - 26 Juli 2024.
- Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Pengelola Mangrove, Pramuka Koordinasi dan Silaturahmi Pemateri pada tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.3040/SJ.7/KP.802/VIII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini turut mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.

b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Juli – September 2024 dan Monitoring Triwulan III 2024.
c. Penilaian predikat kerja pegawai pada semua Eselonering BKH pada Juli – September 2024.
d. Rekapitulasi presensi kerja pegawai pada aplikasi SAKIP@ BKH pada Juli – September 2024.
e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada Juli – September 2024.
f. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 118/KEPMEN-KP/460.2/VII/2024 tentang Pengangkatan Kolektif Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Syarat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.3618/BPSPL.2/KP.820/VIII/2024 tanggal 2 Agustus perihal Pemangkatan untuk Jabatan Kombat.
g. Penyampaian Usulan Calon Peserta Pengembangan PKB ke dalam Jabatan Pengelola Pramuka Perdirnan melalui Penyesuaian dan Permohonan kenda tangan asesor Surat nomor B.3856/BPSPL.2/KP.820/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
h. Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengaktifan Kepala BPSPL Pontianak nomor B.3967/BPSPL.2/KP.440/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas Berkas Pendukung Tugas Belajar.

B. Realisasi Anggaran

Perhitungan RKA ini didukung dengan adanya anggaran dari Kasifikasi RKA dan Output (2267.002) Layanan Dukungan Manajemen 2024 Internal. Realisasi anggaran per Kasifikasi Rincian Output sajar silihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran per 17

No	Kode/Nama Sub-komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	2267.EBO.994.2910 Layanan Manajemen 2024	Rp 304.432.000	Rp 277.318.701 (90,91%)	-
TOTAL		Rp 304.432.000	Rp301.913.413 (99,09%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan (sementara) RM III pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 277.318.701 atau 90,99% dari pagu anggaran asesmen Rp304.432.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kelanja Barang.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

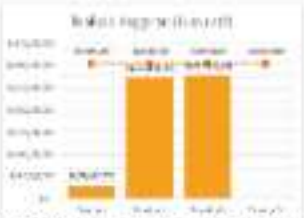

Gambar 2.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

3. Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai.
4. Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Rekapitulasi dan monitoring Pegawai Pegawai serta mengikuti pelatihan, seminar, seminar strategis workshop yang disiapkan pemerintah baik dari BKN/PPL Pemerintah maupun dari pihak lain.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Mild)

Hasil PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak berhasil meraih Predikat Baik dengan Nilai 66 Tahun 2021 Nilai(A) Predikat Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (23%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (18%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri Tim Setmenterial Biro PKPL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 2.1.12-5. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>80 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai ke level individu.
A	>60 - 80	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin pendekatan dalam mengukur pemerintahan tercantum hasil, kinerja pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon I/Pengawas Subkoordinator.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

80	+70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa unit sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Asumsi atas hal yang sangat baik dilandasi dengan indikasi terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengawasan internal telah dilakukan sampai ke level eselon II/koordinator
8	+60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/2 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta koordinasi dalam manajemen kinerja. Penggunaan sinkerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/unit kerja
CC	+50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan mendasar di seluruh aspek tolok ukur kinerja pada unit kerja
C	+40-50	Kurang Dokumen dan laporan dalam AKIP kurang dapat dipercaya. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-40	Sangat Kurang Dokumen dan laporan dalam AKIP sama sekali tidak dapat dipercaya. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 10 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10-9. Capaian IKU 10 BPOM, Pomanas

IKU 10	3.1.10. Sistem Reviu 10 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Unaudit BPOM, Pomanas)								
Misi 3	Misi 3 BPOM (Unaudit BPOM, Pomanas, Mitra)								
Capaian 2023	Tahun 2023					Realisasi s.d Des. Semester		Realisasi s.d Des. 2023 (Akhir)	
	Target Tw I	Realisasi Tw I	% Capaian	Target Tw II-IV	% Realisasi s.d Tw II-IV thd Target	Target 2023	% Realisasi s.d Tw II-IV thd Target 2023	Target 2023	% Capaian s.d Tw II-IV thd Target 2023
80,3	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	80,10	-

Sumber data: BPOM, Pomanas dan LAPOL September 2023

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan ini dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan rapat Cek Bisnis/ Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) tingkat Biro PKPL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024 BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 82,00 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKPL nomor S.8721/D.PKPL.1/KS.810/10/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target sebesar 81 dengan persentase capaian sebesar 106,67%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel sampai

Tabel 3.1.12-15 Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,00
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,25
Predikat Penilaian			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target/realisasi. Periode pengukuran dilakukan secara tahunan. Namun, capaian nilai PKI SAKIP pada tahun 2023 yaitu sebesar 86,5 sehingga terdapat penurunan nilai PKI SAKIP sebesar 3,00 jika dibandingkan dengan nilai PKI SAKIP capaian tahun lalu.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKPL 2020 – 2024 yaitu nilai PKI SAKIP Lingkup Ditjen PKPL sebesar 84,74. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKPL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 83,69 telah mencapai target renstra Ditjen PKPL 2020 – 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 90. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 86,25 belum dapat memenuhi target renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024.

5. Analisis Permasalahan Kelemahan/Kelonggaran atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan triwulan III cukup memadai dan sesuai yang ditargetkan di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja tingkat

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diarahkan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target indikator kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang belum sesuai dengan yang seharusnya dicapai. Laporan Kinerja BPSPL Pontianak telah memuat tabel pembandingan capaian kinerja. BPSPL Makassar, Kupang, dan Ambon belum memuat analisis serta belum terkait permasalahan capaian kinerja, misalnya justifikasi capaian kinerja yang tidak tercapai. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karena berdasarkan hasil IKA pada BPSPL Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2022 sebesar 0,83 sedangkan 2023 sebesar 1,19.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum cukup efektif dan efisien atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan nilai terhadap target di Triwulan III sampaga IKPBS belum dapat dihitung. Pemenuhan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan IKPBS realisasi anggaran dan selisih dari IKPBS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu penguasaan kinerja terhadap tenaga pemantauan capaian kinerja terhadap coring pemboobotan pada saat laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan dropbox google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan google form Monitor (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta pelaporan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Menghadiri kegiatan Verifikasi Pelaporan e-Kinerja Belanjanas dan SMART DJA pada tanggal 1 - 5 Juli 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Pada Verifikasi e-Kinerja Belanjanas unit di BPSPL Pontianak pencapaian terkonfirmasi tinggi bulan Juni 2024 telah mencapai 46%. Pelaksanaan dari Belanjan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juli 2024. Pencairan dengan anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 46,83% sementara pencairan pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 50,20%.

b. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (http://kinerjaku.kkp.go.id). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit Eselon I/Satker BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 100,24% dengan kategori Kinerja (Baik). Capaian Kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 114%.

c. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat DJPRL pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL nomor B.4060/DJPRL.1/TU.220/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.2460/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

e. Menghadiri kegiatan Bimtehgat Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PRL nomor B.4630/DJPRL.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

7. Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,94 dengan predikat baik sesuai surat Sekretaris Ditjen PHKL nomor S.4344/DJPHKL.1/PO.210/10/2024 tanggal 15 agustus 2024.
8. Menghadiri dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen PHKL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 83,83 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (Memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PHKL nomor S.5721/DJPHKL.1/PO.010/10/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.12-6. Kegiatan dalam Evaluasi AKIP

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2267.QBD.002] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2267.QBD.003] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-11 Realisasi Anggaran s.d. Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Awal	Realisasi	Sisa
1.	[2267.QBD.002] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 27.330.000	Rp 22.000.932 (47,70%)	-
2.	[2267.QBD.003] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.680.000	Rp 83.500.527 (76,00%)	-
TOTAL		Rp106,409,000	Rp105.501.479 (81,29%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (Juni/s.d/ dan Januari 2024) yaitu Rp130.501.479 atau 81,29% dari pagu anggaran sebesar Rp206.636.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Gambar 3.1.12-7. Realisasi Anggaran Januari/s.d/ Triwulan II

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

4. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala-kendala yang akan dihadapkan pada Triwulan IV yaitu terkait waktu laporan kinerja Triwulan IV tahun 2024, pembahasan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan IV tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lengkap (PSPL Pontianak) (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan berdasarkan intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Teknis pemantauan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.13-13. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

IKM 19	3.1.13. Sasaran Kegiatan: 13 Tata kelola Pemerintahan yang baik (Lingkup BPSPL Pontianak)								
IKM 19	Laporan SPIP yang disusun lengkap (BPSPL Pontianak) (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Bandara (UPPKL Pontianak)		Pelabuhan (UPPKL Sampit)	
	Target Triw III	Realisasi Triw III	% Capaian	Target Akhir 2024	% Realisasi thd Target Akhir	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Bandara
a	b	c	d = c/b	e	f = c/e			g	
3	3	3	100	4	75			3	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan UPPKL Sepanjang 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 telah tercapai 3 (tiga) dokumen (100%) dari target 3 (tiga) dokumen. Capaian IKM 19 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.80/BPSPL.3/TU.140/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan

b. Surat kepala BPKP, Perwakilan Nomor R-1128/K0/01, 3/TU.140/01/2024 tanggal 10 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

c. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2024/BPSPL.3/TU.140/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

d. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.3/TU.140/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan triwulan 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan triwulanan I tahun 2022 adalah sama realisasi 3 (tiga) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKL 2020 – 2024 yaitu nilai maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pengelola website Kementerian yang ditunjukkan oleh KSO, 2024

Triwulan III Tahun 2024 telah berkontribusi cukup signifikan terhadap dokumen SPIP pada target Renstra DJPPR.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra SPIPPR Portofolio 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2024 dengan jumlah 3 (tiga) dokumen telah berkontribusi 75% dari Target Renstra SPIPPR Portofolio. Tidak tercapainya target pada Renstra SPIPPR Portofolio 2020 – 2024. Permasalahan dokumen tidak berkontribusi pada pencapaian target PK SPIPPR Portofolio Tahun 2024.

7. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian dokumen SPIP telah tercapai sebesar 100% dari target Triwulan III Tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah dilakukan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPPR, tepat waktu sebelum triwulan berjalan berakhir (sebelum tanggal 10). Sedangkan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 10 Oktober 2024 (berdasarkan Surat Kepala SPIPPR Portofolio Nomor B-2440/SPIPPR.D/TU.140/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024).

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efektivitas penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung berupaya, 90% yaitu:

a. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PPR, Nomor S-4132/DJPPR/I.1/HP.602/10/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penjadwalan Pelaksanaan SPIP metode Model Tiga Lini (Three Lines Models).

b. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKPL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-4237/DJPKPL.I/TU.220/10/2024 tanggal 24 Juli 2024.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala KPBPL Portofolio Nomor S-4298/DJPKPL.I/TU.210/10/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (SPI) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PPR, Nomor S-4132/DJPPR/I.1/HP.602/10/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penjadwalan Pelaksanaan SPIP metode Model Tiga Lini (Three Lines Models).

e. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKPL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-4237/DJPKPL.I/TU.220/10/2024 tanggal 24 Juli 2024.

f. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala KPBPL Portofolio Nomor S-4298/DJPKPL.I/TU.210/10/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (SPI) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

g. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PPR, Nomor S-4132/DJPPR/I.1/HP.602/10/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penjadwalan Pelaksanaan SPIP metode Model Tiga Lini (Three Lines Models).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

h. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi WP Lingkup Unit BPSFL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Unit Eselon Unit BPSFL Nomor B.4297/0/BPSFL.1/TU.3.5/9/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

i. Melakukan Rekti terkait atas Surat Kepala BPSFL Pontianak Nomor B.4296/0/BPSFL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pendandatan dengan Pemaparan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

j. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSFL Pontianak nomor B.3264/BPSFL.3/TU.140/VII/2024 5 Juli 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.

k. Bulan Juli 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSFL Pontianak Nomor B.3703/BPSFL.3/TU.140/VII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024.

l. Bulan Agustus telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSFL Pontianak Nomor B.3931/0/BPSFL.3/TU.140/09/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) (2267.EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan Rincian Output (RO) 002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung s/d 10 Triwulan III (sepuluhnya) dari Januari 2024 yaitu Rp.5.340.000 atau 37,99% dari pag. anggaran Rp15.000.000.

Tabel 3.1.10-12 Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung s/d Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBD.002.051.E] Layanan Pelaksanaan Pengendalian Internal (SPIP M/R)	Rp15.000.000	Rp5.340.000 (37,99%)	-
	TOTAL	Rp15.000.000	Rp5.340.000 (37,99%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan IV adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024; serta melakukan (aktifasi) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

b. Menyusun Laporan SPIP Bulan Oktober, Nomember, dan Triwulan IV Tahun 2024.

IKM 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSFL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah sebagai sarana untuk mengidentifikasi, mengelola, mendistribusi, dan mendokumentasikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diadaptasi dan diciptakan. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 7 komponen, yaitu Komponen Kesiapan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office 365 pada laman https://portal.ptp.go.id/sig. Pengintungan kesiapan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan skor pada target minimal mendapatkan 6 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin sesuai kesiapan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang diterapkan adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memberikan unsur SWOT mendapatkan poin 0,5

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

b. Konten berisi informasi tercapai poin 1.
c. Konten video/animasi/ilustrasi/infografis tidak/tidak edukasi atau sesuai dengan poin 2.

Penyusunan dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Klasifikasi level dilakukan setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan klasifikasi dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 8 poin dan maksimal 9 poin (cukup) klasifikasi sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Perlu dicatat level 0 diminta dari klasifikasi tersebut.
- Klasifikasi PPL menyelesaikan data hasil rekapan capaian yang telah diIP pada setiap triwulan untuk dicatat dan dijadikan nilai IKU UP masing-masing unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.13-14. Capaian IKU SOMBI, Kemenkeu

IKPA	3.1.13. Satuan Kegiatan (SK) Telah Selesai Pemanfaatannya yang Sah (Output BMN) Pertama								
IKU 02	Persentase unit kerja Eselon I/UPPK Pertama yang telah mencapai Satuan Kegiatan (Output) yang Terselesaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Semester II (SOMBI, Kemenkeu)		Semester II (SOMBI, 2023-2024)	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW III 2023	% Realisasi thd Target TW III	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Semester
116,66	90	138,89	122	90	122	90	122	90	122

Sumber data: BPPK, Portfolio dan DJPPR, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 IKU tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 122% dengan persentase capaian 138,89% dari target triwulan ini. Sehingga target pada Renstra BPPK, Portfolio Hasil dan Manfaat DJPPR telah tercapai melebihi yang diharapkan. Capaian IKU 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Lain Nomor S-9930/DJPPR.1/TU.1403/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja (JT) Lingkup DJPPR yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024. Nilai IP pada Triwulan III mengalami peningkatan sebesar 19,63% dari Triwulan I dengan rekapitulasi nilai IKP sebesar 122,22%.

Gambar 3.1.13-6. Nilai IKP BPPK, Kemenkeu

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 yaitu 133,33 (120% dari target triwulan ini dari 94, sedangkan capaian Triwulan III 1 tahun 2023 yaitu 100 (106,70% dari target triwulanan 93). Artinya terdapat kenaikan capaian IKP pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 33,33%.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka menengah IKK tersebut tertuang dalam Renstra Biro PBL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut sebesar 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Biro PBL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III/operasional 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut sebesar 120% (133,33 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang Akan/telah Anda/yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 133,33% (120% dari target triwulanan 84). Hal ini didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pelaksanaan pendukung (makan) secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut/IKK lain, yaitu Kesiapan Pelabat Pengelola/Terlantir (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam hal/isi portal Collaboration Office KKP Dokumentasi kegiatan kepatuhan/lainnya yang dianggap telah dilengkapi dengan foto dan keterangan serta tanggal WITH

8. Rencana Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pemenuhan kegiatan yang mendukung IKK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan IV yaitu kesiapan Pelabat Pengelola/Terlantir (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam hal/isi portal Collaboration Office KKP pada Oktober – Desember 2024.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Diskreasi Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKM ini dihitung dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara nyata (closed/tidak ada usulan TL/ATS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tidak terjadi rekomendasi dihitung secara manual oleh Satker PBL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama

belum tercapai. Jika ada audit/rekonsiliasi/pemeriksaan hasilnya tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaiannya di triwulan ini sebesar 100%.

Tabel 3.1.12-10 Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

IKU 21	3.1.12. Nilai Kepatuhan (1 Tata kelola Pemanfaatan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak)
IKU 21	Dokumen Hasil Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditangkap dan Ditampaikan (%)

Capaian 2023	Tahun 2024					Rerata 5 (lima) Capaian	Rerata 5 (lima) 2020-2024		
	Target Triw III	Realisasi Triw III	% Capaian	Target RPJMN	% Realisasi thd Target RPJ	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target RPJMN
100	80	100	125	80	125	80	125	80	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan C-PROL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024, IKU 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditangkap dan disampaikan telah tercapai 100% (125% dari target 80). Capaian IKU 12 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.6923/SJ-PRL.1/HO.4/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 hal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PRL" Triwulan III Tahun 2024 (Sumber: Sekditjen PRL, 10 Oktober 2024). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK-KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 adalah 100% (125% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 100% (125% dari target triwulanan 16). Sehingga capaian Triwulan III Tahun 2024 sama dengan capaian Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditangkap dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 125% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditangkap dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 125% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasil/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat dicapai oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

tidak terjadinya. BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring pada temuan beserta status tidak terulang.

6. Analisis atas Efektivitas Pengguna atas Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efektivitas penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga KPI23 belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan KPI23, realisasi anggaran dan sebuah dari KPI23 dengan realisasi anggaran, apabila efektivitas sumber daya dilakukan dengan memuaskan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring pada temuan beserta status tidak terulangnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi pelaksanaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada bulan sebelumnya, terdapat rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 12/KITJ.1/HP.210/VI/2024 tanggal 3 Juli hal Laporan Hasil Analisis RHBP TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak. Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah ditelaah Inspektorat dan ditunggak pada SIDAK sebagai berikut.

a. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. S.1935/BPSPL.2/KU.540/VI/2024 Tanggal 5 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBP Semester I Tahun 2024.
b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. S.2262/BPSPL.2/PKL.650/VI/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Klarifikasi Hasil Rekomendasi kepada Inspektur RHBP.
c. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No.14/BPSPL.2/HP.410/VI/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi kepada Tim Kerja dan Bendahara Penerimaan.
d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 15/BPSPL.2/PKL.400/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024.
e. Penyampaian SAP Drob No. S.2237/BPSPL.2/KU.512/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024.

Selanjutnya BPSPL Pontianak menghadiri Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada DJPKRL Periode Triwulan III Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 bersamaan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.6535/DJPKRL.1/VTL.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKK III, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Kendala atau Triwulan IV Tahun 2024

Pencarian Arsip yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memanfaat aplikasi SIDAK.

IKM 22. Penyelesaian Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang diindetifikasi, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.13-16 Capaian IKU 2 (KSP), Triwulan

IKU 19	3.1.13. Nilai Capaian 10 Tim Reviu Perkembangan yang Baik (Angka BPDP, Pertanian)								
IKU 20	Persentase Penyerapan Tematik LHP BPK (Angka BPDP, Pertanian) (%)								
Satuan 2023	Tahun 2023					Renstra BPDPS, Pertanian		Renstra DJPPI, Kementan	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TW III 2024	% Realisasi thd Target TW III	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	✓	-

Sumber data: BPDPS, Pertanian dan DJPPI, Kementan 2023

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2023

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan penghitungan, karena periode penyelesaian dari beberapa capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan III.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020 – 2024 yaitu belum tersedia informasi atas formasi penyerapan eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPDPS, Pertanian 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian tahuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Ketercapaian/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis ketercapaian/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan penghitungan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan data terkait realisasi target di Triwulan III sehingga KPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan KPSS realisasi anggaran dan selisih dari KPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

B. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

C. Kendala dan Tindakan di Triwulan III Tahun 2020

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU ini di Triwulan IV.

IKM 22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu pemeriksaan dokumen yang lengkap dan pemenuhan persyaratan undangan yang berlaku dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dan pengaruhnya pada kegiatan.
b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan/atau administratif), melakukan pengecekan lapangan terhadap inflasi kesesuaian bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMTAK, total efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah diberikan pada unit hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah. Tingkat DJPKPL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1.10-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Antisipasi
1.	AA	> 80 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 60 - 80	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 40 - 60	Cukup Efektif Keragaan besar tujuan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 20 - 40	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi pejabat internal Kemenkeu yang membutuhkan data IKU, 2020

4.	2	3-10	Tidak efektif Kegiatan prioritas bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKU 22 Sebagai berikut:

Tabel 3.1. ST-10. Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

IKU 22	22. (...)% Sasaran Kegiatan 22 Pada Balai/Pemerintah yang Telah Lingkup BPSPL Pontianak
IKU 22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Baseline 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPI, 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW III 2024	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	72,8	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPPI, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu terdaksana Inventarisasi bantuan KSH/KK yang telah diberikan dan indikator monitoring rumah dengan nilai tertinggi dan terendah KSH/KK.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target (nihil) data. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PHKA 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tahunan dalam Renstra Ditjen PHKA.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu. Tingkat efektivitas kegiatan bantuan pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 72,8% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dianalisa sebab-musabab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dianalisis secara utuh efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan capaian target di Triwulan III sehingga NFSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NFSS realisasi anggaran dan selisih dari NFSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan kelompok masyarakat yang menerima bantuan untuk memaksimalkan kelengkapan administrasi yang disyaratkan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKK yaitu :

a. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi bantuan kawasan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan monitoring dilakukan kepada Pokmaskesa Penyu Baru yang berlokasi di Desa Sungai Koran, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan Pokmaskesa Pecah Gunung Suma Pantana Island yang berlokasi di Kel. Sebubuk Besar, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang. Secara umum kondisi bantuan sebagian besar dalam kondisi baik. Pemanfaatan bantuan sudah sesuai dengan peruntukannya. Salah untuk menunjang kegiatan konservasi darang bantuan juga dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat. Dalam hal pemanfaatan kawasan dan bantuan, kelompok telah berkomitmen dan melaksanakan komitmen tersebut.

Gambar 3.1.12-5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KKP/PAK

8. Realisasi Anggaran

Penyerapan IKK ini dilakukan dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3562.QEH.001] Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Realisasi anggaran per klasifikasi Output di triwulan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-16 Realisasi Anggaran IKK di Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3562.QEH.001.302] Monitoring dan Evaluasi Kawasan	Rp26.916.000	Rp8.862.457 (32,93%)	-
	TOTAL	Rp26.916.000	Rp8.862.457 (32,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2020) yaitu Rp 8.862.457 atau 32,93% dari pagu anggaran sebesar Rp26.916.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Gambar 2.1.10-18. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pencairan kedalam perhitungan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu memerlukan kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KEMENPAN.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan penciptа arsip. Pengawasan kearsipan internal yang meliputi tata pong, untuk IKM dimana lebih umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan bidang nya masing2. Pengawasan sistem kearsipan internal Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal 48/50. Komponen aksi dukung oleh Ibu Umum dan PBJ dengan pembantuan Tim Penilai yang dilakukan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang dilaporkan dan penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 2.1.10-38. Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>40 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 40

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Tabel 3.1.13-01 Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

IKU 12	Tata Kelola Pariwisata yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 01	Nilai Pengawasan Internal Kawasan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Sasaran 2020	Tahun 2020					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPPL (2020-2024)	
	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Rp.2020)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2020	% Realisasi thd Target 2020	Target 2020	% Capaian thd Target Renstra
9	Target Capaian Tahunan		85	-		-		-	

Sumber data: 2020, Pontianak dan 2.2.IKU, Agustus 2020

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Kawasan Internal Lingkup LPT pada tanggal 7 Agustus 2024, BPSPL Pontianak memanjatkan nilai pengawasan internal kawasan sebesar 94 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 3.1.12-02. Tabel nilai pengawasan kawasan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PHPL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHPL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PHPL karena tidak terdapat IKM tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Kelemahan/Kegagalan dan Permasalahan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dianalisis analisis kelemahan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran.

Informasi ini hanya ditampilkan untuk keperluan evaluasi internal yang dilaksanakan oleh KKP, 2024

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang dalam pelaksanaan Kono DIPA dapat dijelaskan secara detail.

7. Anggaran Pendukung

Pada Triwulan II ini tidak dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut hal ini yaitu:

a. Koordinasi Kesiapan Kementerian Kesehatan dan Perwakilan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor S.2042/SJ.S/TU.320/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

b. Monitoring Verifikasi data Pengawasan Internal Kesiapan Internal Lingkup UPT Bidang Unit Pengelola Tahun Triwulan 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor S.e1669/SJ.S/TU.320/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

c. Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesiapan Lingkup Bidan PKM, pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Bidan PKM, Nomor S.3020/SJP/PKM.1/TU.320/9/2024 tanggal 9 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian RKI ini didukung dengan alokasi anggaran dari KlasifikasI Rincian Output (2267.BBA.962.001) Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kesiapan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 23.098.452 atau 67,30% dari pagu anggaran sebesar Rp 34.320.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pelaksana Dinas Biasa.

Tabel 2.1.12/23. Realisasi Anggaran IKU 24 Triwulan II

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	(2267.BBA.962.001) Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kesiapan	Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-
TOTAL		Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan atau dilaksanakan untuk melanjutkan ketidaksesuaian IKU ini di Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3. C. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSDL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.10 di bawah ini. Kategori faktor pembanding kinerja dalam adalah tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang dicanangkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 2 kelompok dari target 2 kelompok (100%), jika dibandingkan dengan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang (2 kelompok) lebih rendah dibandingkan dengan unit kerja lain (3 kelompok). Hal itu dikarenakan terdapat penurunan target di BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang menjadi 2 kelompok masyarakat pengelola penurunan anggaran sehingga perlu penyesuaian target termasuk anggaran. Pada IKU cakupan KPP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan KPP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terdandar oleh BPSPL Pontianak pada Triwulan III dengan unit kerja lain, yaitu mendapatkan nilai 100.00%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan rincian target hasil penjaminasan sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Tahun 2024 Nomor: 69 DIPA-030.07.2.477436/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp18.998.113.000. Alokasi anggaran disalurkan dan aplikasi online SAKTI/Satker di https://satker.kemenkeu.go.id/. Pada Triwulan III tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp14.764.650.183 atau 79,29% dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23 | 12-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	[2262] Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hasil Laut	RM dan PNP	6.874.304.000	4.964.918.543	66,83	-
2.	[2263] Perizinan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	150.000.000	80.380.000	80,38	-
3.	[2266] Pemberdayaan Pesisir Laut	RM dan PNP	1.150.000.000	816.722.182	71,02	-
4.	[2267] Dukungan Pelaksanaan Internal Unsur Oflah Dukungan Biang Laut	RM	12.471.807.000	9.974.183.074	80,00	-
5.	[4246] Pencegahan dan Penurunan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	500.000.000	778.727.000	97,34	-
Total			18.998.113.000	14.764.650.183	79,29	

Sumber data: aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 30 September 2024

Dalam hal alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai tingkat pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di dan/atau belanja bantuan sosial serta belanja pemeliharaan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dikategorikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam waktu setahun serta alat untuk penyelesaian yang bersifat internal.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

4. Belanja Barang non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dalam jangka pendek dengan tujuan pencapaian target output suatu satuan kerja dan umumnya pelaporan yang bersifat akuntansi.
5. Belanja modal pengadaan untuk pembayaran pembelian aset dan/atau penambahan nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memiliki batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran DIPA PL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1(3)-3.1.1(3.3) Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Triwulan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	51 (1) Pegawai	Triwulan III	4.207.300.000	3.283.962.591	78,05
2.	52 (2) Barang	Triwulan III	11.805.113.000	8.778.870.000	74,38
3.	53 (3) Modal	Triwulan III	793.000.000	622.096.000	78,71

*) Boleh Anggaran
Sumber data: SMAK (Aplikasi Akuntansi Instansi per tanggal 30 September 2024)

Dari total pagu anggaran berdasarkan hasil telaah/ (Bukan Sasaran/Triwulan III) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 33,06%, untuk belanja barang sebesar 61,80% dan untuk belanja modal 4,93%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan II sebesar Rp 3.283.962.591 (93,05%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (tunjangan PPh, jaso-k (Kes), struktural (Str), fungsional (Fu), PPh Pas), Beras Pas dan tunjangan umum (PPh) yang melekat pada pembayaran gaji (PPh) yang hasan dan tunjangan vinaya (Pas). Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan honor.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan III sebesar Rp 8.778.870.000 atau 74,38% dari pagu anggaran Rp 11.805.113.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja operasional perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kendaraan/jasa pelayanan, jasa service pemeliharaan gedung dan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja belanja non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 622.096.000 (79,71%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Pengadaan Laptop di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 66/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
   - Pengadaan Sarana Wilker Vahalam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 07/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

- Pengadaan Barang Kantor Meja Kerja Pejabat Meja Set Rapat Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 67/BPSPL2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Kantor 6 Unit Pemasangan baru Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP nomor 69/BPSPL2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Pengadaan Barang Kantor BPSPL Pembelian barang Display 4 GBK sebanyak 1 Unit SP nomor 61/BPSPL2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rehab Ruang Monitoring Pasut di Kawasan Mahakam Wilayah Kerja TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 65/BPSPL2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan III tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 jika dilihat dari nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 107,5% dengan kategori Baik. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan III 2024 sebesar Rp14.764.920.183 atau 78,29% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.856.113.000. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan III ini sebagai berikut:

1. Penyerahan Berbasis Komputer dengan capaian sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen sehingga tercapai 100%.
2. Laporan KPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 5 laporan dari target 2 laporan sehingga tercapai 100%.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan Kinerjanya dengan capaian 135,33 dari target 94 sehingga tercapai 139%.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindak Lanjuti dengan capaian 100% dari target 50% sehingga tercapai 139%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan III tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan III masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 10 indikator kinerja kegiatan masih IKI berbasis capaian yang dilihat tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kebutuhan pelatihan pada tingkat bimbingan teknis dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan beberapa Direktorat Jenderal PHKA, terkait dengan Penilaian Perjanjian Kinerja pada setiap KU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mitra pendampingan baru mencapai 40 (Orang).

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kebutuhan pelatihan pada tingkat bimbingan teknis dan seminar. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota (Hiu dan Pari) terkait dengan data-data sistem Rekapitasi Destinasi Kawasan Konservasi di Wilayah dapat saja KKP. Hasilnya adalah KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan darat dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Kemarnya, hingga Triwulan III BPSPL belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi untuk wisatawan Hiu.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2024 disusun, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

1. Berita Acara Serah Terima Pemalsuan Bantuan Honorarium Tahun 2024 No B.0003/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024
2. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3121/BPSPL.2/TL.140/09/2024 tanggal 9 September 2024 hal Pengumpulan Laporan Pemalsanggaran SPIP Bulan Agustus Tahun 2024
3. Surat Sekretaris Ditjen PHPL nomor B.6903/DJPHPL.1/KP.720/X/2024 perihal Penyampaian Capaian Pelaksanaan Rencana kerja UPT Lingkup DJPHPL yang Mencakup Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Triwulan III Tahun 2024.
4. Surat Sekretaris Ditjen PHPL nomor B.6903/DJPHPL.1/KP.720/X/2024 perihal Capaian (%) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

BPSPL PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

TAHUNAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Djoeff Iman Tarunia Alkadhi, S.T., M.Si.

Penyusun:

Dhedeni Reynold P., S.Pi., M.Si.

Jamal Fathu Rohman, S.Si.

Ida Fitriana Haryadani, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah dituangnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024. Dalam hal LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Dikerapkan program dan kegiatan di tahun 2025. Pontianak akan menjadi acuan dan kebijakannya dan pemanfaatan bagi stakeholder kami.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Januari 2025
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Nuar Tahuna Alkadrie, S.T., M.Si.

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi elektronik Aplikasi Pengukuran Kinerja secara daring melalui https://kinerja.kkp.go.id. Proses pengukuran kinerja mengacu pada Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses pemantauan dilakukan oleh para pengelola kinerja yang cukup efektif strategis secara daring dan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 84 Indikator Kinerja Kegiatan. Ketersesuaian Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (CI+KI) atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu 107,56% (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja 6 (IK 6), Pontianak yang fokus di tahun 2024 yaitu:

1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai Rp8.431.607 dari target Rp2.000.000 sehingga persentase capaian sebesar 128%.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai 289 orang dari target 250 orang sehingga persentase capaian sebesar 109%.
3. Dokumen Operasional dan Pedoman Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dok/Hok) tercapai 3 Dokumen dari target 3 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 16,21% dari target 14% sehingga persentase capaian sebesar 116,5%.
5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai 1 Daerah dari target 1 Daerah sehingga persentase capaian sebesar 100%.
6. Kelestarian Konservasi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelestarian) tercapai 1 Kelestarian dari target 1 Kelestarian sehingga persentase capaian sebesar 100%.
7. Kemitraan Konservasi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelestarian) tercapai 1 Kelestarian dari target 1 Kelestarian sehingga persentase capaian sebesar 100%.
8. Kemitraan Konservasi untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (KOMPAK) yang Dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai 2 Kelompok dari target 2 Kelompok sehingga persentase capaian sebesar 100%.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Satu (Orang) tercapai 78 Orang dari target 68 Orang sehingga persentase capaian sebesar 114,67%.

10. Jenis Alat Telekomunikasi Pokok yang Diadakan Pemeliharaan, Penyelenggaraan, Perbaikan Hasil/Fabrikasi Perumahan Pegawai dan Penanganan Sisa Dimusnahkan di Wilayah Kerja BPSFL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 7 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 114,29%.
11. Jenis Keterampilan/Latihan Aparat Pelaksana yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSFL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 4 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 128%.
12. Perhitungan/Penetapan AK Lalu Lintas Sisa Hasil yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSFL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
13. Kawasan Sosial dan Pasca-Panas Kasir yang Dilakukan Penanggulangan Kecelakaan di Wilayah Kerja BPSFL Pontianak (Kawasan) tercapai 4 Kawasan dari target 4 Kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSFL Pontianak (Nilai) tercapai 94,98 dari target 95,76 sehingga persentase capaian sebesar 101,38%.
15. Nilai Hasil Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSFL Pontianak (Nilai) Inplus BPSFL Pontianak (Nilai) tercapai 96,11 dari target 71 sehingga persentase capaian sebesar 135%.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Wanuju Wbk di BPSFL Pontianak (Nilai) tercapai 90,01 dari target 75 sehingga persentase capaian sebesar 120%.
17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSFL Pontianak (Indeks) tercapai 90,66 dari target 88 sehingga persentase capaian sebesar 104,09%.
18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSFL Pontianak (Nilai) tercapai 85,55 dari target 81 sehingga persentase capaian sebesar 105,63%.
19. Laporan BPR yang Disusun Lingkup BPSFL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target 4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
20. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSFL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Tersedonce (%) tercapai 133,33% dari target 94% sehingga persentase capaian sebesar 139%.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSFL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Ditanglasi dan Disampaikan (%) tercapai 100% dari target 90% sehingga persentase capaian sebesar 110%.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSFL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
23. Tingkat Madonitas Pelaksanaan Kegiatan Rantkar Pemerintah lingkup BPSFL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 80% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
24. Nilai Pengawasan Internal Kesatuan Lingkup BPSFL Pontianak (Nilai) tercapai 80,26 dari target 60 sehingga persentase capaian sebesar 133%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSFL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-005.07.2.477434/2024, dengan Pagu Revisi anggaran sebesar Rp19.989.625,000. Realisasi anggaran diakses dari aplikasi online SMERAP di https://apan.kemenkeu.go.id/ . Pada Tahun 2024, realisasi anggaran BPSFL Pontianak sebesar Rp18.739.096.816 atau 99,99% dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dan target telah tercapai. Namun capaian kinerja dirasa dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk perbaikan kinerja BPSFL Pontianak.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan pemantauan analisa kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2024.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PHKI, terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 adalah perlu rekomendasi laporan kinerja triwulan sebelumnya yaitu mendorong peningkatan kualitas IP. Alih melalui pengumpulan sertifikat kompetensi pegawai pada awal, simbolgan teknis dan sertifikat sejenis lainnya atau daring. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Direktorat Jenderal PHKI, terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada sebesar IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Desain yang difasilitasi maka perencanaan baru menjadi 40 (Orang).

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iv
Daftar Isi vi
Daftar Gambar viii
Daftar Tabel ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 2
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Kelengkapan SDM 5
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kawasan dan Pemukiman 6
1.4.1. Potensi 6
1.4.2. Permasalahan 8
1.5. Dasar Hukum 7
1.6. Sistematika Penyajian 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2005 - 2009 9
2.1.1. Visi 10
2.1.2. Misi 10
2.1.3. Tujuan 11
2.1.4. Kebijakan Strategis 11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2004 12
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 17
2.3.1. Komponen Pengukuran 17
2.3.2. Pedoman Penyusunan Kinerja 18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 20
3.1.1. Capaian Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PHBP BPSPL Pontianak 21
3.1.2. Capaian Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Kawasan Kawasan Mitra Cipta Lapangan Kerja 40% th. Pontianak 24

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan hasil laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 39
3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 47
3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 60
3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan edukasi kelautan, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 63
3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak ... 71
3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Kawasankawasan Hasil Perairan yang Ditindungi dan atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 80
3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Kawasankawasan Hasil Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 92
3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 109
3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan PSN yang Dikelola di dalam rangka Pengembangan Pariwisata di Wilayah BPSPL Pontianak ... 112
3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... 120
3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain ... 170
3.3. Alokasi Anggaran ... 170
BAB IV PENUTUP ... 180
4.1. Kesimpulan ... 180
4.2. Rekomendasi ... 180
4.3. Tindak Lanjut ... 180
DAFTAR LAMPIRAN ... 180

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 2
Gambar 1.1.2-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 1.1.3-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak 5
Gambar 2.1.1-1. Visi Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak 10
Gambar 2.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun 10
Gambar 2.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 12
Gambar 2.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 20
Gambar 2.1.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2020 20
Gambar 2.1.1-2. Tren Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2024 21
Gambar 2.1.2-1. Identifikasi Lokasi DCL di Kalimantan Selatan 25
Gambar 2.1.2-2. Identifikasi Lokasi DCL di Kalimantan Tengah 25
Gambar 2.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 26
Gambar 2.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 30
Gambar 2.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kota Raya 31
Gambar 2.1.2-6. Grafik data pengampelasan sampah di Kab. Kota Raya 31
Gambar 2.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 32
Gambar 2.1.2-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang 32
Gambar 2.1.2-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 33
Gambar 2.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan pemilahan sampah di Tanah Laut 33
Gambar 2.1.2-11. Bimbingan Teknis di Kota Ketapang 34
Gambar 2.1.2-12. Evaluasi dan Penutupan Buka Cinta Laut di Kab. Kota Raya 37
Gambar 2.1.2-13. Evaluasi dan Penutupan Buka Cinta Laut di Kota Singkawang 37
Gambar 2.1.2-14. Evaluasi dan Penutupan Buka Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 38
Gambar 2.1.2-15. Evaluasi dan Penutupan Buka Cinta Laut di Kota Ketapang 38
Gambar 2.1.2-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang 39
Gambar 2.1.2-17. Carousel Kondisi sampah dan identifikasi Lokasi monitoring sampah 41
Gambar 2.1.2-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 39
Gambar 2.1.2-19. Pendekatan/Metode Gender Pada Pelaksanaan Genus IKU 39
Gambar 2.1.2-1. Tren Target dan Capaian IKU 40
Gambar 2.1.3-2. Identifikasi Permasalahan KKPRL 41
Gambar 2.1.3-3. Sebaran Perizinan Kegiatan yang Pelaksanaan KKPRL 42
Gambar 2.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 42
Gambar 2.1.3-5. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura 43
Gambar 2.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Masjid Hidayatullah 44
Gambar 2.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Singkawang 44
Gambar 2.1.3-8. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024 45
Gambar 2.1.3-9. Pengoordinasikan Dengan para Kegiatan Operasionalisasi KKPRL 46
Gambar 2.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA 47
Gambar 2.1.4-2. Tren Target dan Capaian IKU 4 49
Gambar 2.1.4-3. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Kabupaten Hulu 50
Gambar 2.1.4-4. Kegiatan monitoring dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 51
Gambar 2.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kawasaan Zonasi 51
Gambar 2.1.4-6. Survei Penilaian Ikan Ekonomis Penting 52
Gambar 2.1.4-7. Hasil Survei Pendataan ikan Ekonomis Penting 53
Gambar 2.1.4-8. Pengamatan Produksi Rekrut 55
Gambar 2.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Rekrut 55
Gambar 2.1.4-10. Survei Kualitas Air di Kawasan Konservasi Hulu 54

Gambar 3.1.4-11. Survei Sosial Ekonomi 54
Gambar 3.1.4-12. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi 55
Gambar 3.1.4-13. FGD Sosial- Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 55
Gambar 3.1.4-14. Pelaksanaan Enumeration Cross to Cross 56
Gambar 3.1.4-15. Realisasi Anggaran Kemitraan KKJA Tahun 2024 57
Gambar 3.1.5-1. Tren Capaian IKU 5 59
Gambar 3.1.5-2. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara 60
Gambar 3.1.5-3. Realisasi Anggaran Kunci (ANTF IKU 5 Data) Tahun 2024 61
Gambar 3.1.6-1. Tren Capaian Kerja Sama selama 5 tahun terakhir 64
Gambar 3.1.6-2. Inisiasi dan Pembahasan Draft Kerja Sama 65
Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama 66
Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kunci (ANTF IKU 6 Tahun 2024 68
Gambar 3.1.6-5. Capaian Kinerja Kerjasama/Kemitraan dalam 5 tahun terakhir 69
Gambar 3.1.6-6. Kegiatan inisiasi dan Pembahasan Kemitraan 69
Gambar 3.1.6-7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan 69
Gambar 3.1.6-8. Realisasi Anggaran Kunci (ANTF IKU 7 hingga Tahun 2024 70
Gambar 3.1.7-1. Draft Capaian Bantuan KOBI-PA dalam 5 tahun 72
Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat 73
Gambar 3.1.7-3. Draft Realisasi Anggaran Kunci (ANTF IKU ke tiga Tahun 2024 75
Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KK Mahakam Hulu 76
Gambar 3.1.7-5. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu 76
Gambar 3.1.7-6. Rapat Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu 76
Gambar 3.1.7-7. Pengenalkan/Pemasaran Sentra pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif 80
Gambar 3.1.8-1. Draft Capaian IKU 10 dalam 5 tahun 82
Gambar 3.1.8-2. Survei Pelaksana Survei di Kalimantan Barat 83
Gambar 3.1.8-3. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat 83
Gambar 3.1.8-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat 84
Gambar 3.1.8-5. Penyusunan Data Populasi Terubuk 85
Gambar 3.1.8-6. Survei Penyusunan Data Potensi Ikan Air Tawar 86
Gambar 3.1.8-7. Penyusunan Data Potensi Belida 86
Gambar 3.1.8-8. Pembuatan Cone Shock Damar di Kalimantan Timur 87
Gambar 3.1.8-9. Monitoring Cone Shock Damar di Kalimantan Timur 87
Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Penangkaran Biota Dilindungi 88
Gambar 3.1.8-11. Grafik Penangkaran Biota Dilindungi 89
Gambar 3.1.8-12. Bimbingan Teknis Penangkaran Biota Dilindungi 89
Gambar 3.1.8-13. Sosialisasi Biota Dilindungi 90
Gambar 3.1.8-14. Workshop Penilaian EPAWS 90
Gambar 3.1.8-15. Grafik Realisasi Anggaran Kunci (ANTF pada Tahun 2024 91
Gambar 3.1.9-1. Draft Capaian IKU 11 dalam 5 tahun 93
Gambar 3.1.9-2. Pemaparan Surat Rekomendasi 94
Gambar 3.1.9-3. Pemaparan Surat Rekomendasi 95
Gambar 3.1.9-4. Draft Pengiriman Surat Rekomendasi HIU dan Pari 96
Gambar 3.1.9-5. Draft Pengiriman Surat Rekomendasi Tumpang 96
Gambar 3.1.9-6. Pemaparan SAJI 96
Gambar 3.1.9-7. Draft Pengiriman SAJI OH HIU dan Pari 97
Gambar 3.1.9-8. Draft Pengiriman SAJI OH Barang Bawah 98
Gambar 3.1.9-9. Draft Pengiriman SAJI OH Barang Bawah 98
Gambar 3.1.9-10. Penandatanganan Amanat 99
Gambar 3.1.9-11. Pemantauan kolaborasi 99

Gambar 3.1.9-12. Grafik Pemanfaatan PNBP 100
Gambar 3.1.9-13. Survei Pemanfaatan Arwana 101
Gambar 3.1.9-14. Persentase Legalitas Pemanfaatan Jenis dan Arwana 101
Gambar 3.1.9-15. Kerusakan Ekosistem Arwana Super Red di Kalimantan Barat 102
Gambar 3.1.9-16. Survei Pemanfaatan Tanjung 102
Gambar 3.1.9-17. Bimbingan Teknis Identifikasi Tanjung 103
Gambar 3.1.9-18. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat 104
Gambar 3.1.9-19. Dokumentasi pengukuran 104
Gambar 3.1.9-20. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Nakau 104
Gambar 3.1.9-21. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Mempawah 105
Gambar 3.1.9-22. Dokumentasi Pengukuran 106
Gambar 3.1.9-23. Pelaku Usaha dan Perwakilan Biota Wicara Bisnis Jaring Insang Apendiks CITES Hasil Pengawasan gabungan 106
Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Peraturan Berusaha Jasa Kelautan 110
Gambar 3.1.10-2. Identifikasi Pemanfaatan ALGE di Kalimantan Barat 110
Gambar 3.1.10-3. Identifikasi Pemanfaatan ALGE di Kalimantan Barat 110
Gambar 3.1.10-4. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 111
Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan 114
Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah 114
Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 115
Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 115
Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kotu Raya 116
Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kotu Raya 117
Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 118
Gambar 3.1.11-8. Grafik data mengumpulkan sampah di Kota Singkawang 118
Gambar 3.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 119
Gambar 3.1.11-10. Data realisasi pengumpulan sampah di Tanah Laut 119
Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balingpan 120
Gambar 3.1.11-12. Grafik realisasi pengumpulan sampah di Kota Balingpan 120
Gambar 3.1.11-13. Sosialisasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Kotu Raya 120
Gambar 3.1.11-14. Sosialisasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 121
Gambar 3.1.11-15. Sosialisasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 121
Gambar 3.1.11-16. Sosialisasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 121
Gambar 3.1.11-17. Monitoring Bandah Pesisir di Kota Singkawang 122
Gambar 3.1.11-18. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 122
Gambar 3.1.11-19. Realisasi Anggaran KU 2 Tahun 2024 123
Gambar 3.1.11-20. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Sambas BCL 124
Gambar 3.1.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan 126
Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber Aplikasi DASHPAK) 127
Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 139
Gambar 3.1.12-4. Capaian IKPA BPSPL Pontianak Tahun 2024 139
Gambar 3.1.12-5. Tren target dan capaian PNBP BPSPL Pontianak 140
Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 142
Gambar 3.1.12-7. Tren Capaian IP AKH 144
Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 145
Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Komponen Nilai PII SAKIP Tahun 2023 dan 2024 161
Gambar 3.1.12-10. Kegiatan pers Evaluasi AKIP 164
Gambar 3.1.12-11. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 165
Gambar 3.1.12-12. Nilai IKP BPSPL Pontianak 169
Gambar 3.1.13-13. Tren Target dan Capaian Tahunan 193

Gambar 3.1.12-14. Trend Tingkat Gini Daerah PIV 162
Gambar 3.1.12-15. Trend Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah 167
Gambar 3.1.12-16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KUMPAK Pasca Lokakarl 168
Gambar 3.1.12-17. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KUMPAK Pasca Bom 168
Gambar 3.1.12-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Kerja Pendana Mengenai 169
Gambar 3.1.12-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2004 169
Gambar 3.1.13-1. Perbandingan Penerimaan PNBP dengan Unit Kerja Lain 172
Gambar 3.1.13-2. Perbandingan Capaian Realisasi KPPC dengan Unit Kerja Lain 174
Gambar 3.1.13-3. Perbandingan Capaian Kerja Sama dengan Unit Kerja Lain 174
Gambar 3.1.13-4. Perbandingan Capaian Realisasi IKPA dengan Unit Kerja Lain 175
Gambar 3.1.13-5. Perbandingan Capaian Jenis dan Ditindaklanjuti dengan Unit Kerja Lain 176
Gambar 3.1.13-6. Perbandingan Capaian Jenis dan Ditindaklanjuti dengan Unit Kerja Lain 176
Gambar 3.1.13-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain 176
Gambar 3.1.13-8. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-9. Perbandingan Capaian IKPA dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-10. Perbandingan Capaian IP ADN dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-11. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP dengan Unit Kerja Lain 178
Gambar 3.1.13-12. Perbandingan Nilai Pengelolaan Kearsipan 178

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 13
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 14
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPBPL Pontianak Tahun 2024 15
Tabel 2.1.1-1 Capaian IKU 1 BPBPL Pontianak 30
Tabel 2.1.1-2 Progres Capaian PHKO BPBPL Pontianak Tahun 2024 30
Tabel 2.1.2-1. Capaian IKU 2 BPBPL Pontianak 35
Tabel 2.1.3-1. Jumlah Wabyan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya 33
Tabel 2.1.3-2. Jumlah Wabyan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang 33
Tabel 2.1.3-4. Jumlah Wabyan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut 33
Tabel 2.1.3-5. Jumlah Wabyan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Se Pontianak 34
Tabel 2.1.3-6. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024 37
Tabel 2.1.4-1. Capaian IKU 4 BPBPL Pontianak 43
Tabel 2.1.4-2. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Pemohonan KKPL 41
Tabel 2.1.4-3. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2024 43
Tabel 2.1.4-1. Jumlah Aduanan, Sidoti dan Jumlah Pertanyaan pada setiap ertaks 47
Tabel 2.1.4-2. Pertifikasi Hak Akses EVISA 45
Tabel 2.1.4-3. Status Evaluasi Elektronik Pengelolaan Kawasan Konservasi 45
Tabel 2.1.5-1. Capaian IKU 5 BPBPL Pontianak 48
Tabel 2.1.5-2. Realisasi anggaran IKU 4 Tahun 2024 99
Tabel 2.1.6-1. Capaian IKU 5 BPBPL Pontianak 53
Tabel 2.1.6-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2024 61
Tabel 2.1.6-1. Capaian IKU 6 BPBPL Pontianak 63
Tabel 2.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Tahun 2024 65
Tabel 2.1.6-3. Capaian IKU 7 BPBPL Pontianak 67
Tabel 2.1.6-4. Realisasi anggaran IKU Kompilasi Konservasi 70
Tabel 2.1.7-1. Capaian IKU 8 BPBPL Pontianak 71
Tabel 2.1.7-2. Realisasi IKU 8 Tahun 2024 75
Tabel 2.1.7-2. Realisasi IKU 9 Tahun 2024 79
Tabel 2.1.8-1 Capaian IKU 10 BPBPL Pontianak 81
Tabel 2.1.8-2. Hasil Survei Psikisal Kimia di Kalimantan Barat 84
Tabel 2.1.9-2. Realisasi IKU 10 Tahun 2024 90
Tabel 2.1.9-1. Capaian IKU 11 BPBPL Pontianak 92
Tabel 2.1.9-2. Jumlah RAP Pemain Per Provinsi 99
Tabel 2.1.9-2. Realisasi IKU 11 Tahun 2024 100
Tabel 2.1.10-1. Capaian IKU 12 Th27 BPBPL Pontianak 109
Tabel 2.1.10-2. Capaian IKU 13 Tahun 2024 111
Tabel 2.1.11-1. Capaian IKU 12 BPBPL Pontianak 112
Tabel 2.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya 116
Tabel 2.1.11-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang 117
Tabel 2.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut 118
Tabel 2.1.11-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Se Pontianak 118
Tabel 2.1.11-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 120
Tabel 2.1.12-1. Capaian IKU 14 Nilai IKA BPBPL Pontianak 124
Tabel 2.1.12-2. Realisasi Anggaran IKU 14 Tahun 2024 125
Tabel 2.1.12-3. Capaian IKU 15 Nilai IKA BPBPL Pontianak 129
Tabel 2.1.12-4. Capaian IKU 15 Nilai IKA BPBPL Pontianak 129

Tabel 3.1.12-6. Realisasi Anggaran IKU 16 Tahun 2024 142
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak 144
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKU 17 145
Tabel 3.1.13-8. Kategori Hasil IPK Eselon 148
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak 150
Tabel 3.1.12-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP 153
Tabel 3.1.12-11. Realisasi Anggaran IKU 18 Tahun 2024 154
Tabel 3.1.12-12. Capaian IKU 19 BPSPL Pontianak 156
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 19 pada Tahun 2024 157
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKU 20 BPSPL Pontianak 160
Tabel 3.1.12-15. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak 161
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak 164
Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah 165
Tabel 3.1.12-18. Capaian IKU 23 BPSPL Pontianak 166
Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKU 23 Tahun 2024 169
Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengamanan Kawasan 170
Tabel 3.1.12-21. Capaian IKU 24 BPSPL Pontianak 171
Tabel 3.1.13-22. Tahun mulai pengelolaan kolaborasi 171
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKU 24 Tahun 2024 172
Tabel 3.1.13-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain... 177
Tabel 3.22.1.13-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024 179
Tabel 4.1.13-2 K.1.13-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 183
Tabel 3.1.13-1. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2024 185

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pulau pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang optimal sangat bermanfaat masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah (set- dalam bentuk barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun peraturan lebih lanjut tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 05/PERMEN-KP/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 40 Tahun 2020 tentang Tugas Teknis/ah BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala BPSPL Pontianak sebagai setah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut/ Ingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai kebentuan peraturan perundang-undangan. Salam hal berdasarkan Keputusan Pengelolaan Ruang Laut No. 40 Tahun 2020, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan/ dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu meliputi:

a. melakukan penyusunan dan penetapan Kondisi terkini pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kotal Kehangana;
b. melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kotal Kehangana;
c. melakukan penataan batas;
d. menyusun status target konservasi dan aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kotal Kehangana;
f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
g. melaksanakan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kotal Kehangana; dan

f. Melaksanakan pemanfaatan pemanfaatan kawasan konservasi di Kawasan Konservasi Wilayah Pulau Kabupaten Solok Kerjasama secara berbeda.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan tentang pemanfaatan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. pelaksanaan mitigasi bencana, konservasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir laut, dan pulau pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. pelaksanaan pemanfaatan zona untuk penangkapan ikan dan budidaya ikan;
f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. fasilitasi perairan ruang pesisir dan laut;
h. pelaksanaan dimanfaatkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
i. pelaksanaan urusan kefatalusahaan.

Disamping itu, dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di wilayah antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan keseimbangan terhadap yang akan pelestariannya tidak segera dikembangkan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; monitoring habitat dan ekosistem dan jenisnya spesifik; kriteria dan breeding; kriteria/zonal inti dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas negara; Memiliki; habitat dan daerah ruang jenis migrasi; Potensi sebagai variasi plankton dan/atau variasi wilayah habitat;
d. Pemulihan/perbaikan kerusakan ekosistem dalam melindungi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species); yang pelaksanaannya tidak bisa diotogasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah.
e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan dimangan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
f. Pemerintah dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;

3. Penyelenggaraan kominfotik individu dalam memberdayakan (empowerment) [sic] [Sumberdaya Development Goals], antar lain, menghapus (higher) kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesetaraan lingkungan hidup dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasca bencana menggunakan teknologi dan kemampuan masyarakat pasca.

1.2. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Singkawang, Kota Sukabumi, Kab. Kota Kertanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini:

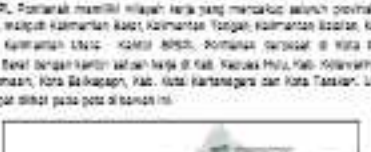

Gambar 1.1 Gb-1 Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan kepegawai, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, perjuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan penangguan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta kelestariannya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing sesuai fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Analis Pengelolaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pendanaan Keuangan (APK) APEK, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Analisanis, dan Statistisi.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja terdiri dari tiga tim (1) Tim Kerja 1, menangani Pembinaan dan Pelatihan; (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat; (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja berunsur transpirat yang mencerminkan indikator kinerja kegiatan yang disusun oleh Kepala Subbagian Umum.

1.3. Kelengkapan SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sesuai kesiapannya sebanyak 72 orang terdiri dari 32 ASN (41% dan 41%), 3 Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) 21 Pegawai non ASN, Pegawai BPSPL Pontianak terbagi dari golongan dan eselon dari staf sampai pimpinan. Adapun rincian Pejabat non ASN yang berjumlah 21 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Pramubakti Kebersihan dan Perkantoran. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak mulai dari SMA sampai dengan S2. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja BPSPL Pontianak. Adapun Kelengkapan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak selengkapnya dalam Infografis di bawah ini.

Gambar 1.1.3.1 Kompetensi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kawasan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.309,99 km^2 tersebar dan ima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 20 Kabupaten/Kota dengan total

(selain) serta perlindya memiliki 9.700,34 km. Selain itu, Kemenhan memiliki 778 pulau (satu kecil dan 4 catur pulau kecil terluar.

I.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, DPGPL Pertanak memiliki beragai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu diprioritaskan melalui kegiatannya. Beragai tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang makabrit saya (seiring). Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang (berpotensi terjadi integrasi antara kehidupan laut ruang dengan kehidupan darat). Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengatasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut sesuai/ng dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal pemnuan pemanfaatan ruang laut, diterjadikan dengan pemberian konsesi/izin kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu mengacu pada/sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (berdasar Appendix CITES belum optimal. RNP sebagai Otoritas Manajemen (OTEE perlu dilakukan pengujian dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi (berdasar Jenis ikan yang tercantum dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai persyaratan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (berdasar) masing-masing appendix CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
d. Masih minimnya kesadaran/peran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini harus didukung kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi (berdasar masing-masing dalam appendix CITES kepada masyarakat.
e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pemecah gelmar. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pesisirnya laut yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan pengujian mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengakibatkan kerusakan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti efisi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
g. Rendahnya tingkat aksesibilitas dan keterjadian sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar/di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian serta keberlanjutan ekosistem untuk pengujian ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil maupun kemandirian dengan tetap memperhitungkan aspek pelestarian ekosistem.
h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti (biofarmakologi) laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Indeks Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Pelaksanaan Birokrasi;
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.4. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja bertujuan untuk menyediakan informasi kinerja yang berisi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi internal pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara ringkas/umum. Penjelasan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut diberikan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

4. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini menjelaskan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut diberikan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja. Alternatif faktor yang bisa diberikan:
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. Kegiatan Pendukung;
viii. Realisasi Anggaran
ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan indikator Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
a. Perjanjian Kinerja
b. Lainnya yang dianggap perlu

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan tercantum dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik kritis dalam mewujudkan asaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2015 - 2024 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. pertahanan bagi seluruh bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam sebelas penyelarasan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Membangun kebahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Keuangan dan Perkaran untuk:

1. memberikan komentasi dengan pemerintah, kecenderungan kebutuhan dan perkiraan ketersediaannya kepada sasaran, pemotongan dana lain, pelembaan garam, pengalihan/pemotongan hasil kekurangan dan perkiraan, dan pelembaan perkiraan, serta cara pelaksanaan serta bidang kebutuhan dan perkiraan;
2. mengarahkan dan mengoptimalkan program pemanfaatan dan daya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI tersebut dengan pertimbangan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2015 – 2019 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2030-2034 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Renstra Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan pedoman agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian misi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Berdaya dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas fungsi dan kewenang yang telah ditandatikan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP telahlama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Menciptai Lingungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2024 Direktur Kelautan dan Perikanan menetapkan kegiatan untuk kegiatan perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan pemungut Yellow atau Bulan Clinic Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Mengacukan misi di atas, BPSPL Pontianak menetapkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pemanfaatan Ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan pemanfaatan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Pelestari dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatnya pelestari dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pemanfaatan kawasan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang di dalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola hutan lestari, pasokan dan pelayanan kayu di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya pelestarian hutan lestari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pasokan dan pelayanan kayu di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Tujuan meningkatkan pelestari dan pemanfaatan lestariasa hutanlari di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terfasilitasinya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati pasokan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimonitor dan/atau dievaluasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya upaya penyelamatan/pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan pengelolaan dan pemulihan kawasan pasokan dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kawasan pasokan dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
6. Tujuan meningkatkan tertib administrasi organisasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja strategis rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja disesuaikan secara dengan agenda penyusunan dan rancangan anggaran serta menyesuaikan komitmen BPSPL Pontianak untuk memasukinya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, output, program, dan kegiatan. Selain itu memuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kegiatan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian dimplementasikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berhasil pada Balanced Scorecard (BSC). Pit BPSPL Pontianak ditandatangani oleh kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 34 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3-1 Perubahan Kawasan Konservasi pada Tahun 2024 dan Tahun 2023

Kawasan Konservasi Tahun 2023	Kawasan Konservasi Tahun 2024
(SK-1) Terselenggarakannya pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-1) Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak
-	(IK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan konservasi Ikan Cetia Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terlindunginya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan perubahan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-4) Terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hasil perairan yang ditangkap dan/atau dibudidayakan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-6) Terkelolanya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hasil perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(IK-7) Meningkatnya pemberdayaan kelompok dan komunitas pengawas, agama, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak	(IK-8) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(IK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(IK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hasil perairan yang ditangkap dan/atau dibudidayakan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(IK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hasil perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(IK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Renstra 2020 dan Renja 2024

Berdasarkan untuk perubahan IK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

[illegible]	[illegible]
Tahun 2024	Tahun 2025
[WB-1] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	[WB-1] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)
[WU-2] Tenaga kerja yang terlibat dalam Kerjasama Nasional Bakau Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak tersedia (0)
[WB-3] Dokumen rekomendasi penilaian pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	[WU-1] Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi kebijakan)
[WU-4] Persentase peningkatan nilai ekonomi kawasan konservasi prioritas di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	[WU-5] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
[WB-5] Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Perlindungan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Perlindungan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
[WB-6] Kerjasama konservasi yang ditindak di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	[WU-3] Kerjasama, joining dan/atau kemitraan konservasi yang ditindak di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
[WB-7] Kemitraan konservasi yang ditindak di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	
[WB-8] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KOMPAK) yang dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[WU-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat pengelola konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
[WU-6] Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	Tidak tersedia (0)
[WB-10] Jenis ikan ikan/hiu/pari (ohat) yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkaran biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[WU-4] Jenis ikan ikan/hiu/pari (ohat) yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penangkaran biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[WB-11] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[WU-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[WU-12] Pemanfaatan ruang laut secara energi yang terverifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak tersedia (0)
[WU-13] Kawasan perairan laut pulau-pulau kecil yang dikelola penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak tersedia (0)

[illegible] Tahun 2024	[illegible] Tahun 2025
(KM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(KU-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(KM-15) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(KM-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(KM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(K-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
(KM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(K-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
(KM-18) Nilai PH SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(K-11) Nilai reformasi birokrasi lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(KM-19) Laporan SPIP yang Diaudit Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(K-12) Laporan SPIP yang Diaudit Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(KM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengelolaan yang terstandar (%)	(K-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengelolaan yang terstandar (%)
(KM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang ditindak lanjutnya telah diselesaikan dan ditanggapi (%)	(K-14) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang ditindak lanjutnya telah diselesaikan dan ditanggapi (%)
(KM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup KKP/KL Pontianak (%)	(K-15) Persentase penyelesaian temuan lingkup KKP/KL Pontianak (%)
(KM-23) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	(K-16) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
(KM-24) Nilai pengelolaan hibah kawasan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak terdapat KU
Tidak terdapat KU	(KM-17) Inovasi Pelayanan Publik yang Dikonsepkan pada KKP/KL Pontianak (Inovasi)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Kuesioner 2023 dan Survei 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penambahan IKU baru sebanyak empat indikator pada tahun 2024. Penambahan IKU-2 dan IKU-12 dikarenakan mendukung/sejalan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pemberdayaan Samudah Pasifik di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut. Sementara itu, penambahan IKU-04 ditujukan untuk mengakomodir perhitungan kawasan lingkup KKP yang ditetapkan setiap tahun. Penambahan IKU-12 dikarenakan untuk mengakomodir anggaran terhadap Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang dikunikan ke UPT

Dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja pada tahun 2024, terdapat adanya untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Kerjasama dan Humas Sekretariat Jenderal KKP nomor 9240/KU.270/DJPDSPKL/2023, sehingga dilaksanakan penyesuaian perubahan perubahan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PWPL pada tanggal 2 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi "Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang sejahtera pengembangan mata pencaharian baru (Orang)" dengan target menjadi 90 orang. Selain itu, terdapat juga penyesuaian pada IKU 14 menjadi "Nilai Kinerja Pengelolaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak". Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3-4 Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.300.000
2. Meningkatnya lembaga kelola yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Lembaga kelola yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	100
3. Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi (KKN/KKD) di Wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)	10
5. Terlembagakannya kesadaran sosial pentingnya kawasan konservasi di lingkungan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan sosial pentingnya kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya pengelolaan konservasi dan konektivitas ekosistem, pulang, dan terumbu karang untuk mendukung ketahanan yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kawasan konservasi yang dikelola di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan/Unit)	1
	7. Kerangan ekosistem yang dikelola di Wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan/Unit)	1
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Berbasis Pemanfaatan Untuk Kesejahtera Masyarakat Pengelola Konservasi (KKN/KKD) yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2

		9.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Maritim pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diberikan pengetahuan/ nuna pemanfaatan lestari (Orang)	40
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10.	Jenis dan tanaman pulau yang dilakukan pendataan, penyelamatannya, pemetaan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan pada di/atau(s) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12.	Pemanfaatan air laut selain energi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11.	Meningkatnya koneksi pakan dan pola pergerakan ikan yang dilestarikan dalam rangka pengelolaan pencemaran di Wilayah kerja BPSPL Pontianak	13.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola pengelolaan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12.	Tata kelola perkantoran yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14.	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	95,79
		15.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	71
		16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
		17.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	78
		18.	Nilai RB SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	61
		19.	Laporan AKIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1) Tata kelola pemerintahan yang baik (Nilai SPBE) Pontianak	20. Persentase Unit Kerja (OPD) Nilai SPBE Pontianak yang memanfaatkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi (%)	10
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan (Nilai SPBE Pontianak yang Ditindak Lanjuti oleh Kepala Unit Kerja/OPD) (%)	10
	22. Persentase Perkembangan Tahunan (IPP SPBE Nilai SPBE Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Penerapan Kebijakan Kemitraan Pemerintah (Nilai SPBE Pontianak (%)	10
	24. Nilai pengelolaan informasi kependudukan (Nilai SPBE Pontianak (Nilai)	10

Sumber data: BPSPL Pontianak, DJPKN, Desember 2023

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menjaga pada triwulan IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Rencana Kinerja (Renja).

2.2.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam menentukan ketercapaian target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam triwulan IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik.
   b. Pengukuran kinerja didukung oleh sumber realisasi (sesuai dengan sumber data).
   c. Pengukuran kinerja dapat menjelaskan akuntabilitas/keberhasilan/kegagalan secara langsung dari pencapaian kinerja berikutnya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Persamaan kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atau PK, manual perhitungan dan pengumpulan data IKU serta didukung sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi kesatuannya IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam melaksanakan, mengukur, mengevaluasi dan mengarahkan IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pemrosesan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Menyajikan (tampil bobot validasi IKU)
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja [http://simpeka.kkp.go.id/app/]
5. Atasan langsung dari setiap level memberikan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub Unit melihat kinerja di tingkat level I dan tingkat kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan keterangan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja secara berjenjang Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perseorangan (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulan/Tahunan berakhir.

Capaian kinerja merupakan data perbandingannya objektif dan sah yang menjadi penanggungjawab kegiatan, sekaligus penanggung jawab kegiatan mengirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sekretaris PRL mengirimkan seluruh hasil yang disajikan dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab keberhasilan pencapaian kegiatan secara keseluruhan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK dan IKU). Perhitungan IKU dan IKK dalam pembahasan tingkat ketelitian IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAKIP) secara online yaitu http://sakip.kkp.go.id. Proses pengitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Penyusunan Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program, kontinuitas proses pengitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap bulannya sehingga akurat dengan ketepatwaktuannya.

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KKP/KPPN BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 yaitu 107,38% (masuk kategori Kiau - Baik). NKO tidak mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan NKO pada Triwulan III, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan II dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan I. Secara umum, seluruh capaian IKU pada tahun 2024 semuanya tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai Rp3.401.607 dari target Rp3.000.000 sehingga persentase capaian sebesar 139%.
2. Tenaga Kerja yang Terfasilitasi dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai 200 orang dari target 200 orang sehingga persentase capaian sebesar 100%.
3. Dokumen Operasionalisasi Kawasan Konservasi yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 3 Dokumen dari target 3 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 16,31% dari target 14% sehingga persentase capaian sebesar 116,5%.

5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai 1 Daerah dari target 1 Daerah sehingga persentase capaian sebesar 100%.
6. Kerjasama Konservasi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
7. Kemitraan Konservasi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai 6 Kelompok dari target 6 Kelompok sehingga persentase capaian sebesar 100%.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Alt. (Orang) tercapai 78 Orang dari target 69 Orang sehingga persentase capaian sebesar 116,67%.
10. Jenis Ikan Terancam Punah yang Diketahui Perkiraan, Penyebarannya, Perbaikan Habitatnya Pemulihan Populasi dan Penangkaran Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 7 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 114,29%.
11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 4 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 100%.
12. Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Pemanfaatannya Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan) tercapai 4 Kawasan dari target 4 Kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
14. Nilai Indikator Kinerja Kelembagaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 94,66 dari target 93,5% sehingga persentase capaian sebesar 101,28%.
15. Nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 98,11 dari target 91 sehingga persentase capaian sebesar 108%.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 90,81 dari target 76 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
17. Nilai Pemberkasan ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 96,44 dari target 88 sehingga persentase capaian sebesar 109,45%.
18. Nilai Nilai SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 80,65 dari target 81 sehingga persentase capaian sebesar 100,61%.
19. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target 4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
20. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terdokumen (%) tercapai 100,5% dari target 96 sehingga persentase capaian sebesar 105%.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Ditindaklanjuti Sesuai Yang Disepakati dan Disampaikan (%) tercapai 98 dari target 100 sehingga persentase capaian sebesar 105%.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Hibah) BPKP, Pemerintah (%) tercapai 108% dari target 80% sehingga persentase capaian sebesar 135%.
24. Hasil Pengawasan Inherial Keuangan Lingkup BPKP, Pemerintah (Hasil) tercapai 91,26 dari target 66 sehingga persentase capaian sebesar 138%.

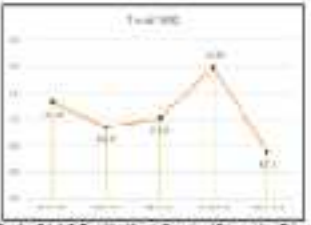

Gambar 2.1.1.2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun

IKO 90 pada Tahun 2022 sebesar 112,09%. Terdapat penurunan 6,39% dari Tahun 2021, jika dibandingkan nilai kinerja organisasi selama lima tahun terakhir, IKO pada tahun 2024 merupakan nilai yang terendah. Penurunan nilai disebabkan karena berkurangnya jumlah Sasaran Kinerja membuat jumlah pembobot menjadi lebih besar sehingga dapat mengurangi nilai akhir jika nilai pencapaian tidak terdapat penngecatan. Selain itu, terdapat beberapa sasaran kinerja yang memiliki nilai maksimum 100% seperti Opini/pernyataan KKPPK, Jumlah Kerusakan BDL dan Identifikasi ALSE hal itu membuat nilai capaian capaian untuk sasaran kinerja tsb pada dibingkatkan. Namun, terdapat sasaran kinerja yang mengalami penurunan capaian secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu pada Sasaran Kinerja Fasilitasi KKPD, Beberapa sasaran kinerja juga seharusnya dapat ditrealisasikan capaiannya yaitu Tenaga Ahli BDL, Fasilitasi KKPD, Pemngkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan/kolaborasi.

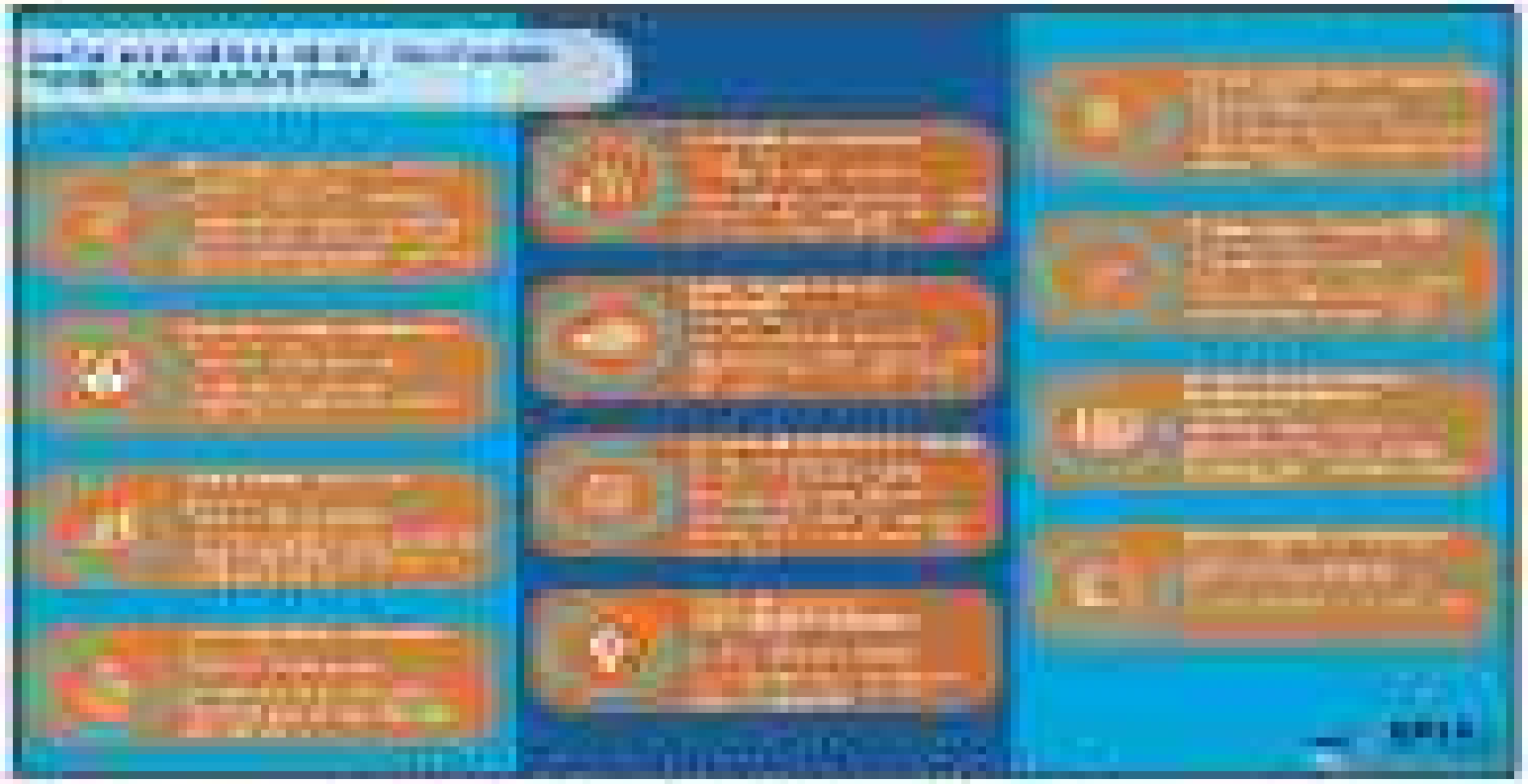

3.1.1. Seorang Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknis Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Biaya Pakan, Karang dan Kangkung (435131) + Pendapatan Jasa Kekarantan dan Pertakan Lainnya (425529) + Pendapatan Pertakan Lainnya (425529) yang diperoleh oleh Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

PNBP ___ = PNBP ___ + PNBP __ + PNBP ___

Dimana,
PNBP ___ = SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJI DN	+	Rangkuman atas Dokumen SAJI DN-1 + Rangkuman Pertanggungan + Rangkuman Pengembalian)
Surat Rekomendasi	+	Rangkuman atas Dokumen Rekomendasi + Rangkuman Pertanggungan
PNBP ___	+	Nilai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Kontinum Lainnya dan Jasa Kekarantan dan Pertakan
PNBP __	+	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Karang Hidup Negara (BHN)
PNBP ___	+	Nilai PNBP yang berasal dari Tambahan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelanggaran fiskal dan hukum

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:
| untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 20%
| dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang ditentukan

Formulasi Penghitungan Rangkuman

Rangkuman Pengambilan	+	Jumlah individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis ikan
Rangkuman Pertanggungan	+	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis ikan
Denda	+	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1 Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Capaian Kinerja & Pembahasan		Target Sasaran Jangka Menengah	
	Alokasi 2024	Rencana	Target 2024 (Rp.000)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
Rp3.874.620.000	Rp3.407.607.415	Rp(4.666.000)	3.000.000	133	3.0	133	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum kepada Tim Kerja Pengelolaan Kawasan dan Sistem Informasi Data PKPL. Capaian nilai PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 (per tanggal bulan 1 Januari – 31 Desember 2024) yaitu sebesar Rp3.407.607.415 atau 121,05% dari target tahunan. Realisasi PNBP tahun ini didapatkan dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.166.670, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 17.755.504, Pendapatan Jasa Kepelatihan dan Pendidikan Lainnya sebesar Rp1.157.220.041, dan Pendapatan Pelatihan Lainnya sebesar Rp1.219.466.800.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar Rp3.874.620.000 dari target rencana sebesar Rp600.000.000 (646%). Realisasi PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi Rp3.407.607.415 atau terdapat peningkatan sebesar Rp46.666.000 (1,37%) jika dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2023 sebesar Rp3.609.033.334, terdapat penurunan pendapatan sebesar 5,67%. Peningkatan PNBP pada tahun 2024 dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat penambahan penerimaan PNBP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

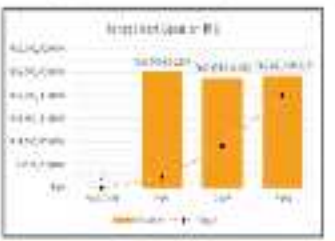

Gambar 3.1.1-1. Trial Capaian PNBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tersedia pada Renstra Ditjen PHL, 2020 – 2024. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrik Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Matrik Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp 3.090.900.000,-. Capaian kinerja tahun 2024 jika dapat dibandingkan dengan target dalam Matrik Kinerja & Pendanaan Tahun 2020 – 2024 telah mencapai target tahunan sebesar 121,28%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian PHBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 121,28% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PHBP. Kendala yang muncul adalah terdapat penggilan atau pembatalan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PHBP. Untuk menghadapai hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PHBP melakukan pelayanan dan pemantauan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPON untuk memonitor dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terkadapnya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP pada tahun 2024.

Tabel 2.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Tahun 2024

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Pertimbangan Lelang	Pendapatan Jasa Kepelabuhan Perikanan Lainnya	Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu
Januari	Rp166.667	Rp97.606.000	Rp84.359.416	
Februari	Rp166.667	Rp93.940.000	Rp122.164.095	
Maret	Rp166.667	Rp82.666.000	Rp100.038.700	Rp11.674.709
April	Rp166.667	Rp119.875.000	Rp160.946.315	
Mei	Rp166.667	Rp132.408.000	Rp128.707.140	
Juni	Rp60.201	Rp134.208.000	Rp77.166.279	
Juli	Rp166.667	Rp119.808.000	Rp95.691.515	
Agustus	Rp333.334	Rp168.168.000	Rp94.997.236	
September	Rp333.334	Rp114.348.000	Rp160.481.000	
Oktober	Rp333.334	Rp73.440.000	Rp92.400.000	

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Perbiritan Lainnya	Pendapatan Jasa Kebadan dan Pemerintah Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
November	Rp202.334	Rp21.758.000	Rp91.306.700	Rp91.404
Desember	Rp202.334	Rp62.316.000	Rp60.991.700	
Jumlah	Rp1.144.673	Rp1.310.464.000	Rp1.193.806.581	Rp11.744.924
Total Pertri				Rp13.431.467.418

Berdasarkan pemantauan penerimaan PNBP bulanan, target PNBP tahun 2024 telah tercapai pada bulan Oktober. Tren penerimaan PNBP pada tahun 2024 fluktuatif dan bulannya namun cenderung menurun dengan rata rata-rata bulanan sebesar Rp201.762.831. Pencapaian tertinggi pada bulan Mei sebesar Rp371.079.901 sementara pendapatan terkecil pada bulan November sebesar Rp194.405.114.

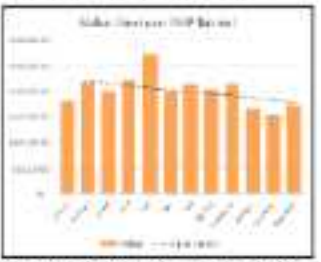

Gambar 3.1.1-2. Tren Bulanan Penerimaan PNBP tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Tahun 2024 tidak tercapai anggaran khusus untuk kegiatan ini sehingga tidak tercapai realisasi anggaran.

B. Pengendalian Internal Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengendalian/kontrol gender pada KU ini dilakukan dengan memastikan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional sebagai petugas pemeriksa PHBF. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Dit pengelola keuangan DPDPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna anggaran nomor 1/WPDPL.2/KU.1101/1/2025 tentang Struktur Pengelola Anggaran tahun kerja KPDPL Pontianak.

C. Rencana Aksi Tahun 2025

Merupakan koordinasi dengan Kementerian Dirjen PHKL tahun konsolo pengendalian PHBF tahun 2025. Target KU pada tahun 2025 sebesar Rp1.600.000.000 dengan jumlah pengelolaan KU dilakukan secara bertahap. Kegiatan pendukung untuk KU ini yang direncanakan yaitu Pelayanan Operasional Pemimpin (Verifikasi SPJU SAJ dan Rekomendasi) dan Konfirmasi PHBF wilayah kerja Tanah, Gedung, dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang memenuhi manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja adalah perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditambahkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Pemberdayaan Samgah di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut.

Teknik perhitungan:

$TK_{terlibat} = TK_{Lain} + TK_{Laut} + TK_{Darat} + TK_{Desa}$

Keterangan:
$TK_{terlibat}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak
TK_{Lain} = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di desa yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2.1. Capaian IKU BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Realisasi 2023	Tahun 2024				Realisasi Tahun 2024 s.d. Pertriwulan			Target Tahun Lanjut (Opsional)	
	Realisasi (s.d. Triwulan)	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target (s.d. Triwulan)	% Realisasi thd Target 2024		Target 2025	% Capaian thd Target 2024
-	200	+	200	100	200	100	50	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak per 3 (Tiga), Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pelaporan dan perhitungan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini diperhitungkan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat BPSPL Pontianak Nomor 3648/BSPL.3/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 telah melibatkan total 200 (dua ratus dua puluh) nelayan meliputi Kota Singkawang sebanyak 50 nelayan, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 50 nelayan, Kabupaten Kota Raya sebanyak 50 nelayan dan Kota Singkawang sebanyak 50 nelayan. Jumlah nelayan yang terlibat telah dilakukan verifikasi melalui Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nelayan di Kec Kolaka Gemas DOL.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Latihan Kesiapsiagaan Nasional Bidang Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditambahkan pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Kementerian bertindak di Laut melalui Gerakan Bidang Cinta Laut. Capaian Tahun 2024 oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Target Rencana Jangka Menengah yaitu sebanyak 49 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Terhadap pencapaian tahun semula target jangka menengah tahun 2020, dengan target dan capaian IKU ini, sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah. Meskipun begitu, capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah tahun JPMN.

5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrika Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut telah tertuang dalam Matrika Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2023 – 2024 yaitu sebanyak 313 orang tenaga kerja yang terlibat dalam Latihan nasional Bakti Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Matrika Kinerja & Pendanaan capaian kinerja IKU ini tahun 2024 telah mencapai target sebesar 100% dibandingkan dengan target dalam Matrika Kinerja & Pendanaan Tahun 2023 – 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memberikan tercapainya target di akhir tahun. Indikator output, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini untuk dapat mengakibatkan terlaksanakannya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor eksternal/fisik lokasi yang mudah diakses juga mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja pemantauan terhadap untuk melakukan identifikasi terhadap capaian meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

D. Kegiatan Pendukung

Rincian kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah direncanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Bantuan BOL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilaksanakan di tiga wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Aluh – aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024 . Di Desa Tanjung, aulat alfa mesin pengolah sampah tersebut yang berasal dari bantuan camatmitah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang down. Tumpukan kompos hidroponik aktif yang sebagian besar anggotanya sudah meninggal dunia di lokasi lokasi tersebut. Sampah yang dihasilkan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanjung, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kapasitas yang terpisah (3) cm. Terdapat biota sampah di kotamadya Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi kesehatannya.

Gambar 3.1.3-1. Identifikasi Lokasi BOL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan di Desa Sungai Bakau, Desa Tabuk Bagath dan Desa Kenaya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah saat, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Tabuk Bagath yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Kenaya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.3-2. Identifikasi Lokasi BOL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Semajun Kecil, Desa Kuala Dua Desa Nusa Kota Singkawang pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. • ada survei sosial

pelaksanaan sampah di kanal tersebut mengakibatkan banyak pengendapan sampah ke-2. Muaranya sampah (kasih masih belum menjadi prioritas program desa. Sehingga yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan tempat pengolahan sejauh 2 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan pada tanggal 15 - 17 Januari 2004. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, relawan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah dan dan pemanfaatan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya sebesar atau sekarang ini 10% tersisihkan dan belum ada kelanjutan dari hal tersebut untuk pengolahan sampah yang bernilai atau model ekonomi sehingga sampah dapat diolah.

b. Identifikasi dan Verifikasi Relawan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan relawan setempat. Terdapat 60 relawan dan KSB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkontribusi untuk mendukung kegiatan BCL, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank setempat pernah/ sempat juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra offline potensial. Indikator penilaian lainnya seperti harga ikan tersedia dan musim masak serta musim pasaknya juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi awal ini bisa mendukung perencanaan dalam penentuan lokasi kegiatan Semana BCL.

Gambar 3.1.2-1 : Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok relawan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kabupten dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, diceritakan pada kunjungan kerjanya di Banjar Kuin-Kuin Kab. Banjar dan Bungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.2-4 : Hasil Kegiatan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data namun di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Perpulut Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di kelurahan Kocar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DPD Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gomas BCL Tahun 2020, dan mengusulkan agar kegiatan Gomas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kegiatannya dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih masih Gomas BCL.

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 mei 2014 dengan sosialisasi dan verifikasi nelayan. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 40 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Hasil Jaya Mandiri dan Dinas DKPPPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-2. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Selat Sugor	10
	KUB Kakap Indah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berambang Laut I	10
	KUB Berambang Laut II	10
	KUB Berambang Laut III	10
	KUB Berambang Laut IV	10

➢ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksakan selama 2 kali pada tanggal 17 Mei 23 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prosedur cara pengelolaan sampah dan intro dan analisis pelaksanaan RKL dan RPPL Pariwisata.

Gambar 3.1.3-6. Bimbingan teknis di Hak Kota Raya

➢ Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 diperoleh sebanyak 19.447,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 46% sampah berupa non-plastik, sehingga sampah plastik terkumpul sebanyak 51%. Sampah yang bernilai ekonomis (dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.662.300. Klub Bersampang Laut I menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.075,2 kg.

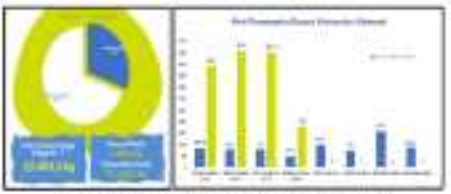

Gambar 3.1.3-6. Grafik data pengumpulan sampah di Klub. Kota Raya

c. Pelaksanaan Dalam Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang simultan pada tanggal 30 April 2024 dengan kesertaan dari sekitar kelayan kegiatan ini melibatkan 65 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Sebagauh Besar sebanyak 20 orang; Kel. Hanam sebanyak 20 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilaksakan dengan Bimbingan Teknis serta Pemberangan dan Pengangkatan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3-1. Jumlah Kelompok yang Telah Dibentuk/Aktif di Kota Singkawang

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (orang)
Kec. Singkawan Barat	KUB Suka Perlahe	9
	KUB Sumber Rejeki	8
Kec. Hakmi	KUB Hidayah Utama	11
	KUB Harum Jaya Abadi	33
Kec. Kota	KUB Hidayah Baru	10
	KUB Berkarya	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimtek di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 sd 20 Mei dan 18 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan tata cara pendataan sampah melalui aplikasi pengelolaan SDL oleh BPKH Pontianak.

Gambar 3.1.3-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Aksi Clinis Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 terkumpul sebanyak 11.909,44 kg. Dari sampah tersebut terdapat 96% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 4%. Sampah yang berupa sisa-nya sebanyak 57% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp13.625.800. KUB Hidayah Baru menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.223 kg.

Gambar 3.1.3-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

a. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 20 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aksinya kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dan 4 kelompok nelayan di dua desa (Desa Sungai Kelau sebanyak 16 orang dan Desa Banyuh Layung sebanyak 8 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh Bina Bahri Bantuan Induk Bahtera Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pemungutan Teknis serta Pembinaan dan Pengangkutan yang dilaksanakan kag dua minggu sekali.

Tabel 2.1.2-9. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Kelau	Kub Bina Kersatria	20
	Kub Bintang Laut	10
	Kub Kuda Laut	10
	Kub Citra Lestari	24
Desa Banyuh Layung	Kub Bina Harapan Bersama	8

- Kegiatan Pemungutan Teknis Pengangkutan dan Pengangkutan Sampah

Kegiatan Pemungutan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan sebanyak 5 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni cara pengambilan sampel, pemilahan sampah, analisa-usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan 4R1 dan 6R4R, Pontianak.

Gambar 2.1.2-8. Pemungutan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 ditoapatkan sebanyak 4.840,6 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.000 kg sampah berupa kaleng dengan nilai ekonomis pengurain sampah sebesar Rp4.726.950.

Gambar 2.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan pengangkutan sampah di Tanah Laut

f. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aksinasi kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dan 4 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 60 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pemberangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan hari dua minggu sekali.

Tabel 2.1.3-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan PSL di Kota Balikpapan

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kec. Sepinggan	KUB Wonasari	30
	KUB Sinar Bahari	10
	KUB Sinar Laut Nusaya	10
	KUB Lao Bahtera Fajar	10
	KUB Anggrek Hitang	10

h. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni, adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengelolaan sampah, edukasi usaha pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan IKU, oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.3-13. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Monitoring dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kutai Barat

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kutai Barat dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jonjo Besar sebanyak 30 orang dan Desa Bungan Rampai sebanyak 30 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kutai Barat selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 22,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,16 ton. Sampah tersebut dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp.4.840.000.

Gambar 3.1.2-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kaur/Raja

b. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Sebalok Besar sebanyak 20 orang, Kel. Hanerh sebanyak 20 orang dan Kel. Kasa sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,6 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 4,37 ton. Sampah tersebut dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.333.000.

Gambar 3.1.2-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

i. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bawau sebanyak 70 orang dan Desa Sawah Layang sebanyak 4 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Bamban Bersemboni. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah menghimpun/kan sebanyak 4,6 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.136.000.

Gambar 3.1.2-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

i. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilaksukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang relawan masyarakat dari 4 kelompok relawan di satu kelurahan (Kel. Kariangau) sebanyak 80 orang). Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 20,84 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk relawan sebesar Rp211.141.700.

Gambar 3.1.3-16. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

k. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilaksukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk mengetahui komposi sampah yang ada di pesisir dan laut serta efektivitas pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan menghitung jumlah sampah pada tiga lokasi sampling. Wanita Singkawang, Pantai Kusau Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,645 kg di Pantai Singkawang, 7,837 kg di Pantai Kusau Singkawang dan 0,019 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, kaleng, styrofoam, kertas, kain, kaca dan organik.

Gambar 3.1.3-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

l. Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 September 2024 dalam rangka memperingati Bulan Bersih Nelayan dan Pantainya dan Sharing PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perempuan Bersih Indonesia Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, PODHAGWAS dan pelajar sekitarnya. Sampah yang berhasil dikumpulkan dan pasarta diidentifikasi sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah

plastik atau kemasan makanan, botol/gelas minum, sumpit/garpu plastik, botol minuman kaca, kaleng cat, ban dan lain sebagainya.

Gambar 2.1.3-17. Dokumentasi Pengambilan Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi untuk monitoring sampah dilakukan di Pantai Taman Ria Jati, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol/gelas dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan KU III didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan Rincian Output (RO) 4045.000.007C Fasilitasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja Pengelolaan Dinas Biasa dan belanja Pengelolaan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3-4. Realisasi Anggaran KU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	(BAL)(EC.001.001) Alat Pelengkapan Dalam Pemerintah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp300.363.000	Rp 299.703.334 (99,97%)	-
TOTAL		Rp300.000.000	Rp 299.703.334 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU III pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp299.703.334 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 300.363.000. Progres realisasi anggaran tersebut/nya dapat disajikan pada grafik berikut ini:

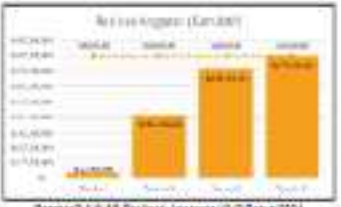

Gambar 3.1.9-18 Realisasi Anggaran KKJI Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kebijakan gender dalam skala global dengan mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak memperoleh sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada KKJI ini diawali dengan empat parameter akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada kepulauninan kegiatan Gemas BCL masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat keterlibatan perempuan sebesar 14% dalam Gemas BCL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gemas BCL banyak keterlibatan dalam kepentian kegiatan, pemonitor materi dan evaluasi kegiatan.

Gambar 3.1.9-19 Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gemas BCL

Pada pelaksanaan Gemas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Sasaran umum, pertanyaan dan permasalahan disampaikan oleh peserta termasuk kelompok penyampaian aspirasi. Ini terlihat sebanyak 200 nelayan yang menjadi peserta Gemas BCL semuanya laki-laki. Pertanyaan yang mengalir dan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan dan kegiatan Gemas BCL ini yakni peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pesisir baik laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil terkait dengan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2025.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKSK 3: Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang disusunkan dan apiya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diterbitkan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang existing, dan atau verifikasi perizinan. Teknis menghitung diterbitkan dengan menginventarisasi dan menganalisa dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilaksanakan secara dengan rekomendasi yang berisi.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU BPSPL Pontianak

SK 3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKSK 3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Capaian Kinerja & Pendanaan		Target Capaian Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Keterangan	Target (%) 2024	% Realisasi thd Target (%)		Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
2	3	4	5	6		7	8	9	10

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAKIP, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui nominasikan Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 28/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tertanggal 31 Desember 2024. Telah disusun dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 (dua) dokumen yang disosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak serta koordinasi terkait dengan pelayanan pemanfaatan ruang laut. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja, capaian IKU ini telah mencapai realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat perubahan ataupun penurunan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 2 dokumen.

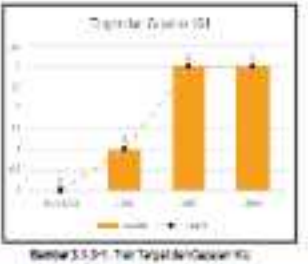

Gambar 3.3.3-1. Trend Target dan Capaian IKU

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL yaitu "Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Pusat dan Daerah (Lokasi)" sebanyak 49 lokasi pada tahun 2024. Terdapat perbedaan sebesar selisih antara target renstra DJPKRL dengan target kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun, Capaian IKU ini dapat berkontribusi dalam pencapaian target jangka menengah.

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrika Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut tidak tertuang dalam Matrika Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024, sehingga target pada tahun 2024 sebanyak 6 Dokumen. Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada Matrika Kinerja dan Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 100%.

D. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan oleh ini telah turut kegiatan tersebut dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi pelaku pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Direktur PSDKP Pontianak dan Direktur PSDKP Tarakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

E. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan pertemuan teknis secara daring. Selain itu, penggunaan sistem aplikasi berbasis web BPSPL Pontianak juga turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem aplikasi berbasis web dan mobile ini memiliki fungsi dan kelebihan untuk mendukung penggunaan dan pengelolaan pemanfaatan ruang laut, proses ini dapat meminimalisir waktu proses perizinan pemanfaatan dan pengendalian ruang laut.

2. Kegiatan Pendukung

Rincian kegiatan pendukung terlaksana nya pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Permohonan Ruang Laut

Sepanjang tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan pemeriksaan teknis dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di seluruh provinsi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan verifikasi ini berupa pengecekan (ceklist) kesesuaian persyaratan perizinan yang disesuaikan oleh Direktorat Pengelolaan Ruang Laut. Tercatat telah telah dilaksanakan pemeriksaan teknis terhadap 120 pemohon dan verifikasi terhadap 92 pemohon yang tersebar di lima provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak. Jumlah verifikasi paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 66 pemohonan, sementara jumlah verifikasi paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 pemohonan.

Tabel 2.1.2-2. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Pemohonan KKPRL

Provinsi	Jumlah Pemohon	Lokasi
Kalimantan Barat	4	Kab. Kompasiah, Kab. Kengkayang, Kab. Ketapang
Kalimantan Tengah	1	Kab. Pulang Pisau
Kalimantan Selatan	16	Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru
Kalimantan Timur	66	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur
Kalimantan Utara	9	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Total	96	

Dari 96 pemmonoran KKPRL yang telah diverifikasi sebanyak 96 pemmonoran telah diterbitkan KKPRL. Sebanyak 96 pemmohonan KKPRL telah dinotifikasikan dan disposisi Pengelolaan Ruang Laut Kepada BPSPL Pontianak. Sebanyak 43 pemmohonan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah dilakukan pembayaran seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total penerimaan PNBP dari PKKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sejumlah Rp68.778.915.400 dengan total luasan pemmohonan seluasa 3.029,30 hektar dan panjang pemmohonan 19,42 km.

Gambar 2.1.2-2. Verifikasi Pemmonoran KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BRSPL Pontianak. Sebagian pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL. Sepanjang tahun 2024, BRSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut pada 49 subjek hukum di 10 Kabupaten/Kota di 3 Provinsi di Wilayah Kerja BSPL Pontianak. Kegiatan monitoring tersebanyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 31 subjek hukum yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Selanjutnya kegiatan monitoring paling sedikit dilakukan di Kalimantan Tengah sebanyak 6 subjek hukum yang tersebar di 2 Kabupaten.

Gambar 3.1.3-3. Sebaran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL

Sebanyak 30 subjek hukum dilakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL, sementara 19 subjek hukum lainnya belum kegiatan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Pelaksanaan penilaian kepatuhan berdasarkan 28 Risk yang memiliki risiko tinggi, banyak ditedapi nasional, berdampak luas, dapat menjadi perhatian, berpotensi menimbulkan konflik, atau belum menyampaikan kewajiban laporan. Dari 30 subjek hukum yang dilakukan penilaian kepatuhan, sebanyak 9 subjek hukum berpredikat "Taat", 14 subjek hukum berpredikat "Taat dengan catatan", 6 subjek hukum berpredikat "Tidak Taat" dan satu subjek hukum tidak dapat dinilai kepatuhan pelaksanaan KKPRL.

Gambar 3.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pada tahun 2024, BRSPL Pontianak menyelenggarakan sosialisasi: Kebijakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak 10x (sepuluh)

- Sosialisasi KKPRL di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Aula Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Civitas Akademika Universitas Tanjungpura sebanyak 64 orang. Narasumber dan kegiatan ini berasal dari BPSR, Pontianak dan Program Studi Teknik Kelautan, Universitas Tanjungpura. Disampaikan bahwa KKPRL (Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut) adalah izin dasar yang wajib dimiliki dan setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari baik untuk kegiatan berusaha maupun OSS Nasional Kementerian Perairan elektronik KKP (E-Sea), dan harus diperoleh sebelum kegiatan dimulai. Izin ini diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang di lokasi kegiatan dan berlaku untuk berbagai usaha di laut seperti pelabuhan, bangunan lepas pantai, pertmbang pantai dan tambatan kabel bawah. Kegiatan seperti reklamasi, yang melibatkan pengerukan dan tambang juga memerlukan KKPRL. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 3.1.3 (i). Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura

- Sosialisasi KKPRL di Maestro Hotel Pontianak

Kegiatan sosialisasi dilaksukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel Maestro Pontianak. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pedoman pemanfaatan ruang dan pola kegiatan di Pesisir Kalimantan Barat. Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya hadir/terlibat dalam kegiatan ini berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan Hasil UUCK kewenangan dalam perencanggaran pemanfaatan ruang laut berada di Perhubungan Pusat, Pemerintah dan pemerintah daerah adalah hasil pelaksan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan pendekatan pemanfaatan KKPRL diberlakukan 15 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan biota laut dan ekosistem pesisir/laut, pemberdayaan masyarakat, dan menghormati kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut sesuai dengan kearifan lokal. Juga harapannya provinsi untuk area pemegang persetujuan KKPRL nantinya dapat kewajiban mari bantuan antara nelayan.

Gambar 3.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Hotel Horison Kota

- Sosialisasi KKPRL di Kota Semarinda

Kegiatan ini dilaksanggarakan pada tanggal 29 Oktober 2024 di Hotel Horison Semarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini ditujukan bagi pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut di perairan Pulau Kalimantan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut, Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta luring sejumlah 24 orang. Disampaikan bahwa laporan tahunan KKPRL wajib disampaikan melalui sistem OSS.id oleh setiap pelaku yang sebelumnya melaporkan melalui email paling lambat tgl 5 Des pada 2023. Laporan tahunan menjadi kewajiban bagi setiap KKPRL yang diterbitkan, dengan jumlah laporan sesuai jumlah KKPRL yang dimiliki, termasuk bagi kegiatan kolektif yang harus disiapkan untuk pemodelkan agar terhindar dari sanksi admin sampai. Pelaporan dilakukan oleh subjek hukum yang tercantum dalam KKPRL, sehingga tanggung jawab kegiatan disesuaikan dengan penanggung jawab tahun berjalan. Laporan ini berbeda dari laporan dari usaha, yang ditujukan ke instansi pengampu, karena laporan KKPRL disampaikan ke KKP (Ditjen PRL) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan ruang laut.

Gambar 3.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Samarinda

a. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilaksakan untuk mendukung IKU ini diantaranya rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana usulan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 23 s.d. 28 Juli 2024 koordinasi ke Direktorat PRL pesisir Perikanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Balingapan pada tanggal 13 – 14 September 2024.

3. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari kegiatan Rincian Output [2265.PET.009] Rekomendasi Hasil dan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-5. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	[2265.PET.009.001] Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Ruang	Rp280.340.000	Rp280.122.942 (99,99%)	-
2.	[2265.PET.009.002] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp348.760.000	Rp348.709.406 (99,99%)	-
3.	[2265.PET.009.003] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp298.800.000	Rp298.709.084 (99,99%)	-
	TOTAL	Rp.1.148.000.000	Rp1.148.481.833 (99,99%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada tahun 2024 (termasuk dari Januari 2025) yaitu Rp1.148.481.833 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp1.148.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa.

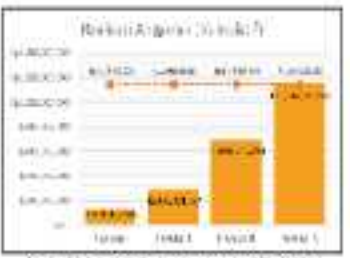

Gambar 3.1.3-6. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

4. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender adalah tindakan dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Implikasi gender pada kegiatan verifikasi dan monitoring KKPRL yang dilakukan BPSPL Pontianak telah melibatkan laki-laki (80%) dan perempuan (20%). Selain itu, upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi KKPRL dengan mengundang perempuan sebagai narasumber.

Gambar 3.1.2-3. Pengamanan Gardan pada Kegiatan Operasional Hasil KKPRL

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Pengamanan Ruang Laut Kementerian Dalam Negeri terkait langkah mendatang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

3.1.4. Gasoran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektifitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dievaluasi adalah efektifitas pengelolaannya adalah 43.647,86 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KAP) meliputi Wilayah Hulu Kabupaten Kota Kalimantan. Dokumen yang disyaratkan dalam pelaksanaan evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan atau tahun berjalan. Hal tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya aspek tersebut dikelompokkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektifitas pengelolaan pada aspek input, proses, output dan outcome.

Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	8	10-20	8
Proses	8	10-20	12
Output	5	10-20	12
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-1 Perhitungan Nilai Akhir IKK

Komponen	Nilai	Bobot	IKK (%)	IKK	Nilai (%)
Input	...	1275	...	0,30	...
Proses	...	420	...	0,26	...
Output	...	840	...	0,39	...
Outcome	...	420	...	0,14	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

Nilai Indikator (Ni)	: Hasil perhitungan skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (Nilai)	: Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (Nk)	: Ni / Nmax x 100%
Bobot Kriteria (Bk)	: Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak)	: Nk x Bk
Nilai Akhir Evaluasi	: Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-2 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<60%	Merah	Efektivitas Minimum	Belum ada kerangka kerja untuk pengelolaan kawasan dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih dijumpai kelemahan pada semua tahapan pengelolaan
>60-85%	Kuning	Efektivitas Optimum	Kerangka kerja pengelolaan sudah berjalan secara sistematik dan baik sesuai dengan pengelolaan sudah terpenuhi
>85%	Hijau	Efektivitas Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang telah didukung oleh lembaga

Tabel 2.1.4-4 Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

IKU 4	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan yang lestari di wilayah kerja, peran serta masyarakat lestari di wilayah kerja BPSPL Pontianak
IKU 4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nama IKU (100)	Tahun 2023				Capaian Kinerja & Perbandingan		Target Kawasan Jangka Menengah	
	Realisasi (100)	Deskripsi	Target (100)	% Realisasi dari Target (%)	Target (100)	% Realisasi dari Target 2022	Target (100)	% Capaian dari Target (100)
IKU4	16,01	+1,01	15	106,5	15	106,5	20,1 ea	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVKL, September 2023

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan Penilaian Efektivitas Efektivitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu mendapatkan nilai akhir sebesar 82,74% dengan status Hijau (Efektif Optimum). Nilai efektif 85%. Kontribusi mengalami peningkatan sebesar 16,51% dari tahun sebelumnya. Capaian ini melampaui target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian sebesar (114%). Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi, identifikasi

Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi, Pendataan Nilai Ekonomi Perikanan, Survei Jenis Ikan Dilindungi, Monitoring Sosial Ekonomi, Sosialisasi Kawasan Konservasi, Peningkatan SDM Pengelola Kawasan, Conservation Goes to School dan Sosialisasi Layanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini tercatat pada tahun 2023 sebesar 34,44%, oleh sebab tercapainya target tahun ini yang sebesar 14% maka itu kemudian target tahun ini meningkatkan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 85,44%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Nasional Hulu sebesar 93,79% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 15,51%.

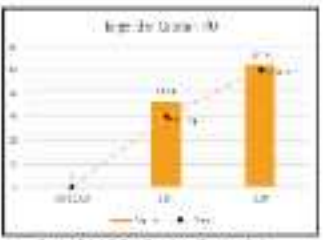

Gambar 3.1.4-2. Tren Target dan Capaian IKU 4

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah Ditjen PHKL tahun 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan konservasi yang Operasional sebesar 20 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan antara satuan yang terhitung dalam Perjanja Jangka Menengah Ditjen PHKL dengan target kinerja tahun 2024. Namun, cangkupan Kawasan Konservasi Nasional Hulu yaitu sebesar 40.000 hektar berkontribusi terhadap target cangkupan Kawasan Konservasi yang operasional sebesar 0,21% dari target Rencana Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Metrika Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matrika Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu Konservasi peningkatan nilai ekonomis kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebesar 14% pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 dilapan berdasarkan nilai EVIKA sebesar 16,21% telah melebihi target Matrika Kinerja & Pendanaan sebesar 114,9%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini yaitu adanya SDM yang kompeten, kerjasama yang baik dengan mitra kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala pada pelaksanaan penilaian pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Hukum Hulu.

yang belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya sinergi pengelola pariwisata pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir darat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pagumal yang terdapat di wilayah kerja pelaksanaan kegiatan untuk meskipun identifikasi sehingga dalam melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran pelaksana. Dalam hal efisiensi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, akademisi, organisasi non profit dan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan dan pencapaian IKU Ini.

7. Kendala Pendukung

Rekapitulasi kegiatan pendukung terlaksanya IKU pada tahun 2024 yang tidak dilaksanakan diantaranya:

a. Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

Penilaian Efektivitas Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Kota Penilaian Objek PKPA dan ahlinya non pemerintah dan Kawasan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu 6(Nol), Komponen. Hasil penilaian menjelaskan sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input: 742 dari total 1070 (71%)
- Nilai penilaian kriteria proses: 265 dari total 400 (66%)
- Skor penilaian kriteria output: 295 dari total 630 (45%)
- Skor penilaian kriteria outcome: 1410 dari total skor 3780 (42,79%).

Gambar 3.1.4-3 Penilaian EFEKTIVITAS Kawasan Konservasi Wahalam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Wahalam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 memperoleh nilai akhir sebesar 52,75% (sangat efektif/Efektif Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektifitas Kawasan Konservasi di Wilayah Wahalam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, monitoring dan meningkatkan kapasitas pengelolaan terkait pengelolaan kawasan konservasi, meningkatkan intensitas penyuluhan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melaksanakan program pendanaan yang berkelanjutan, pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi zonasi dan pemanfaatan di perairan darat, melibatkan program

pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelola pengelolaan masyarakat, monitoring dan evaluasi kondisi terkait konektivitas di masing-masing zona.

b. Peningkatan Kondisi Daya Manfaat Pengelola Kawasan

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotal Kehangkang menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kapasitas dan sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan kawasan konservasi.

Gambar 3.1.4-4. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

c. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan, mengetahui manfaatnya (untuk pelanggaran dan manfaat kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan Maharam Wilayah Hulu. Kegiatan survei dilaksanakan secara rutin setiap tiga kali dalam satu minggu pada bulan Januari hingga November Kemarau. Yayasan Konservasi RASI dan Rotarian terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapang dan Focus Group Discussion (FGD), sehingga metode efektifnya menggunakan analisis deskriptif.

Gambar 3.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Selama tahun 2024, telah dilakukan pemantauan sebanyak 58 kali dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang teridentifikasi sebanyak 62 kejadian dengan melibatkan 120 nelayan. Kegiatan penangkapan ikan ilegal paling sering terjadi pada bulan April sebanyak 22 kejadian. Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap destruktif berupa setrum, trawl dan racun. Berdasarkan itu, hasil dari identifikasi pemanfaatan dan zonasi menyasarkan 5 orang nelayan yang menangkap ikan di Zona inti yang tidak sesuai peruntukannya.

b. Pelaksanaan Ikan Ekonomis Penting

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilaksanakan pada Mei hingga November 2024 di Semenan Desa di kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini merupakan bagian dari pengumpulan data dan informasi konservasi konservasi di kawasan mahakam mintapan Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain pengambilan data sebagaimana dari hasil tangkapan nelayan. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan pipasi (Osteochilus vittatus) dan ikan lepak (Cirrhilabrus sp.) yang merupakan komoditi ikan ekonomis di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu. TAHFA analisis data yang dipunakan adalah pendataan statistik. Informasi jenis ikan yang tertangkap serta pemberian kemudangan gonad secara visual.

Gambar 3.1.4-6. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Sebanyak 317 ekor ikan pipasi dan 134 ekor ikan lepak diukurkan pengukuran morfometrik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang fork, panjang peripheral, panjang dari kepala. Hasil morfologi ikan pipasi yang diidentifikasi berada pada rentang panjang 10 - 16,0 cm dan ikan lepak berkisar 11,0 – 24,0 cm. Hasil pendataan diidentifikasi bahwa sebanyak 42,9% dari jumlah sebanyak 45,9% pada tingkat kematangan gonad sebanyak 35% ikan dalam diidentifikasi, matang gonad sebanyak 20,8% dimuat TKG III sebanyak 19%, TKG I sebanyak 12,5% dan TKG V sebanyak 1,1%. Sebanyak daerah penangkapan oleh nelayan paling banyak di Muara Somayang sebanyak 23,3% komunitas paling kecil di Muara Muntai dan sebanyak 2 ekor.

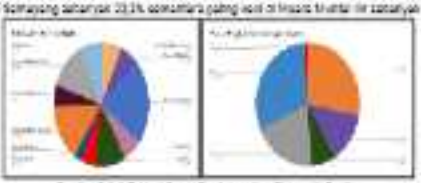

Gambar 3.1.4-7. Hasil Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

c. Kontrol Jalur Ikan Bermigrasi & Monitoring Kualitas Air

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada posisi pasif mahakam Hulu Tim dilakukan pada tahun 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan kondisikan pasif disekitar menggunakan kapal dibawa oleh Yayasan Konservasi Alam Borneo pada sekitar 08.30 - 15.00 WITA, dengan satu perahu hal melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari alat kapal. Kemudian dilakukan pencatatan hasil data berdasarkan statistik yang telah disusun. Pada saat informasi pasif dilakukan pencatatan lokasi, pengamatan koordinat GPS dan jumlah pasif

yang dikirimkan setiap hari juga dilakukan pengambilan data kualitas air di sekitar pengambilan dengan parameter pH, DO, BOD, TDS, Kekeruhan, Temperatur secara insitu menggunakan Water Quality Checker.

Gambar 3.1.4-8. Pengambilan Populasi Plankton

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024, didapatkan 23 kemunculan pasut dengan jumlah individu sebanyak 146 ekor. Individu terbanyak yang diamati berhasil di klangkumkan sebanyak 91 ekor. Kemunculan individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Aktivitas pasut yang diamati sebanyak besar berupa sighting (terlamat) sebanyak 20%, diikuti oleh milling (melakukan aktivitas tanpa orientasi jelas) dan feeding (mencari makan) sebesar 30%. Sebesar 21% pasut yang teramati sedang melakukan fast travel (berenang cepat).

Gambar 3.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Pasut

Pada hasil analisa pengamatan kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan kawasan pada bulan mulai sungai dan sekitarnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukan nilai suhu berkisar antara 29,6 – 3°C. Kemudian untuk nilai Dissolve Oxygen berkisar antara 3,4 – 6,7 mg/L. Nilai pH pada saat dilakukan didapatkan sebesar 5,6 – 7,6. Sementara nilai TDS berkisar antara 8,0 – 74 ppm.

Gambar 3.1.4-12. Survei Kualitas Air di Kawasan Konservasi

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat disimpulkan pada tahun ini kondisi air dikategorikan hasil monitoring sebelumnya. Tahun 2024 diharapkan bahwa hasil pemantauan parameter ekologi Kawasan Konservasi Mahakam hilir/wilayah muara berada di dalam ambang kelas ke baku mutu kelas dua merujuk PP Nomor 22 tahun 2021.

F. Monitoring Sosial Ekonomi

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada bulan April hingga September 2024. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan alat pendata berupa kuesioner. Terhadap target adalah pelaku perikanan dan pemanfaat sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam hilir/wilayah Muara dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data diandalkan sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Hilir/Muara. Informasi yang didapatkan oleh responden di antaranya: profil responden; sikap terhadap kawasan konservasi; dan sikap terhadap kawasan konservasi perairan, interaksi masyarakat dalam kawasan konservasi; profil hukum dan property; mata pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat; penangkapan dan pemasaran, konsumsi rumah tangga.

Gambar 3.1.4-13. Survei Sosial Ekonomi

Hasil akhir diperoleh 120 responden yang tersebar di 4 kecamatan. Responden yang didapatkan didominasi sebagai nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan. Masyarakat pemanfaat di sekitar Kawasan Konservasi memiliki rerata pendapatan antara Rp1.000.000 s.d. Rp3.000.000 /bln sebanyak. Namun, pendapatan dari penangkapan ikan yang menjadi sumber utama penghasilan mengalami fluktuasi tergantung pada musim dan hasil tangkapan. Meskipun masyarakat menyadari manfaat ekonomi jangka panjang dari konservasi, mereka masih menghadapi kendala, seperti hanya 58% responden yang mengetahui tentang

pelatihan dan semua yang berlaku. Selain MPA responden setuju bahwa Kawasan konservasi dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun sebagian masyarakat merasa akses dan mengangap bahwa pembatasan akses dan aktivitas dapat mengikat secara ekonomi.

g. Sosialisasi Kawasan Konservasi

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada masyarakat/kampung masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait dalam rangka upaya pengelolaan, serta penyadarkahuan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni - September 2024. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan Kawasan konservasi Hulu sebagai narasumber untuk memberikan tentang pelestarian hutan mahakam yang memiliki strategis secara nasional serta upaya untuk melindungi habitat pesut. Selain itu penyebarluasan materi kawasan konservasi dilakukan dalam pemberian bahan cetak dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang tinggi dan ramai dan strategis. Hasil kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman dan dukungan masyarakat memahami pentingnya perlindungan sekitar kegiatan.

Gambar 3.1.4-12. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi

h. Sosialisasi Pemilihan pemanfaatan Kawasan Konservasi

Tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemilihan pemanfaatan Kawasan konservasi Perairan yaitu untuk memfasilitasi pengelolaan melalui sosialisasi dan dialogi kepada pemangku kepentingan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Oktober 2024 di Desa Pela dan Desa Long Lunuk Kecamatan Kombeng, Kab. Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bekerjasama dengan Universitas KBKP dan Yayasan Kobi sebagai narasumber.

Gambar 3.1.4-13. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

i. *Ekosistem Sasa to Sohan*

Kegiatan Konservation Sasa to Sohan di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu upaya pemberdayaan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan pedoli lingkungan hidup melalui pendangan dan pelestarian kepada generasi muda di wilayah kawasan

Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di Hotel 3 Kota Kefamenanu. SMPN 1 Insana Induk, SMPN 1 Insana Kefmenen dan SMPN 1 Insana Mumlati. Kegiatan ini juga bersesuaian dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menyelesaikan konflik satwaliar Rasch Indonesia. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya seimbar cara ari dan konservasi di DAS Mollakalen dengan bijak dan menjaga pintalp kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.

Gambar 2.1.4-14 Pelaksanaan Conservation Goes to School

j. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Intaklam Hulu dilakukan pada bulan Januari - Desember 2024. Sarana dan prasarana yang dioptimalkan yaitu Longboat Operasional, Drone, Tablet Pengawas, Motorbike, Alat Komunikasi, Kamera Video, Alat Rengkam Data, GOT- dan Rumah Rasch.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian KU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3343.PBW.001] Kesatuanpatuh Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Lestari dan [3343.RSA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.4-5. Realisasi Anggaran KU Intaklam 2024

No	Komponen/Sub-komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3343.PBW.001.003] Inisiasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 83.548.000	Rp 83.544.333 (100%)	-
2.	[3343.PBW.001.004] Pelayanan Pelatihan Berbasis Kawasan Konservasi	Rp 138.478.000	Rp 138.407.974 (99,95%)	-
3.	[3343.PBW.001.006] Data dan Informasi Perkembangan Kawasan	Rp 212.837.000	Rp 212.836.224 (100%)	-
4.	[3343.RSA.002.001]	Rp 992.000.000	Rp 992.000.000 (99,94%)	-

No.	Komponen Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
	Penyelesaian lanjutan dan pelaksanaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil			
6.	[3262.RBA.002.062] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp288.877.000	Rp 280.888.110 (99,91%)	-
9.	[3262.RBA.002.063] Pemberdayaan Masyarakat	Rp1.197.798.000	Rp1.213.620.070 (102%)	-
7.	[3262.RBA.002.064] Pengelolaan Perairan Kawasan Konservasi	Rp554.658.000	Rp553.147.067 (99,73%)	-
TOTAL		Rp2.980.306.000	Rp2.991.902.132 (99,74%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung Ro ini pada tahun 2024 dilaksanakan dari Januari 2024 yaitu sebesar Rp2.991.902.132 atau 99,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.980.306.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Gambar 3.1.a-1b Realisasi Anggaran Kemuseh TWI, s Tahun 2024

B. Pengembangan Sumber

Kesekretariatan jenderal dalam strategi dengan mengupayakan kesekretariatan antara kebutuhan dan persediaan dalam mengelola dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dan jangkan pembangunan. Upaya pengembangannya pendidikan pada Ro ini masih belum optimal.

C. Kendala dan Solusi Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada tahun 2024 yaitu melakukan koordinasi dengan Direktorat KKP dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kawasan Konservasi Perairan daerah yang belum atau dikelola oleh KKP. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rutin seperti monitoring kinerja dilindungi dan pendataan ikan ekonomis penting.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan penetapan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rancana zonasi, pendampingan penyusunan rancana pengelolaan atau pendekatan lain sesuai konsisi kawasan konservasi. Teknis pemfasilitasan indikator kinerja dilakukan dengan mengkonsentrasikan dan menyinkronkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses penetapan usulan penetapan kawasan konservasi

Tabel 3.1.3-3. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

IKU 3	Terverifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 3	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Capaian Kinerja 5 Tahunan		Target Sampai Akhir Perencanaan	
	Realisasi 2024	Partisipasi	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
2	1	4	1	100	1	100	03 Jul 46	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIMAK, September 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan IKU ini disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pelayanan BPSPL Pontianak nomor: B/BPSPL.2/TU.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, namun, hanya Provinsi Kalimantan Utara saja yang menyelesaikan Surat Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Derawan di Kabupaten Berungan melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor 360.0.5.04/0949/DKP/SUS tanggal 13 Februari 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak telah difasilitasi penetapan usulan Kawasan Konservasi. Jika dibandingkan, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 daerah atau 50%. Bila dibandingkan dengan capaian IKU ini selama 5 tahun terakhir, capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi. Hal ini dikarenakan anggaran adanya penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2023.

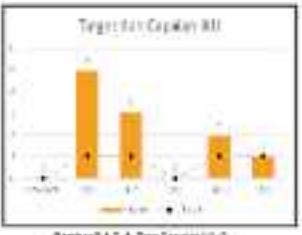

Gambar 3.1.3-1. Tren Capaian IKU 3

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Rencana Jangka menengah (tahun PK) 2020 – 2024 yaitu seluasan 300.000 hektare kawasan konservasi baru pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara Rencana Jangka Menengah Dinas PKSL dengan target kinerja tahun 2024 sehingga capaian tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah. Namun luasan Kawasan Konservasi Polisi Gemilir seluas 1.165,5 hektare yang disusulkan oleh Provinsi Kalimantan Utara telah ditindaklanjuti seluasan 0,10% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSKL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu 1 daerah pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan seluasan 100%.

5. Analisis Faktor(-faktor) Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU III didukung oleh kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka pemaduan penyesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi. Sedangkan faktor penghambat pencapaian IKU III yaitu terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi daerah secara luring jika lebih dari satu daerah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang difasilitasi pencapaian penetapan kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Perairan di Pulau Gemilik Kabupaten Bintulu, Kalimantan Utara. Terdapat beberapa kegiatan pendukung antara penyusunan penetapan Kawasan Konservasi, yaitu:

c. Pelayanan Informasi Konservasi Pengelolaan Zonasi

Kegiatan pelayanan informasi konservasi pengelolaan zonasi kawasan konservasi Pulau Gemfin dilakukan pada Triwulan I – Triwulan II 2024. Tahapan awal pelayanan dilakukan dengan menentukan target konservasi biota ptoritas di Pulau Gemfin. Setelah itu dilakukan survey pengumpulan data ekologis dan pemanfaatan di kawasan konservasi. Kemudian untuk menentukan Zonasi daerah konservasi, digunakan pendekatan Linear MAPPAN (Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Annealing). Setelah itu dilakukan konsultasi publik untuk mengelola masukan dari stakeholder terkait mengenai zonasi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambar 3.1.4-3. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara

b. Pendampingan dan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 – 12 Juni 2024. Terfasilitasi dua Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan luas total seluas 25.483,20 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Binusan dan Pulau Simaja, serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Pasir Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau Gemfin dengan luas 1145,49 hektar sedang diproses.

Gambar 3.1.4-4. Fasilitasi Usulan Penetapan KKP/KK di Kalimantan Utara

c. Evaluasi Teknis Usulan Kawasan Konservasi

Tahapan evaluasi penetapan di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari penyampaian usulan penetapan, evaluasi teknis dan administrasi permohonan, pengajuan dokumen penetapan, pembahasan Protokol Kementerian dan penyusunan Keputusan Menteri.

Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan Surat usulan Penetapan KK Pulau Gemin melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor 500.8.5.5/3548/DKP/2025. Hasil evaluasi terkait proses penetapan Kawasan Konservasi Pulau Gemin di Provinsi Kalimantan Utara menyatakan terdapat perbedaan batasan antara yang tertuang dalam surat usulan Matok RTRW Provinsi dengan yang diusulkan, perlu memastikan garis pantai yang akan digunakan, perlu memastikan kepemilikan lahan pada area yang diajukan Zona Inti.

3. Realisasi Anggaran

Pencapaian KK Ri (Kuantitas) berjalan sinkasi anggaran dari Kegiatan Rincian Output [2262.UBA.001] Realisasi dan Pemantauan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.4-3. Realisasi Anggaran KU 8 Tahun 2024

No.	Komponen/SubKomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2262.UBA.001.01] Rasionasi usulan penetapan kawasan konservasi: perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp98.093.526 (98,09%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp98.093.526 (98,09%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung KU ini pada tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp93.006.526 atau 98,09% dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000. Realisasi anggaran ditampilkan pada Aplikasi Pelayanan Dinas Biasa.

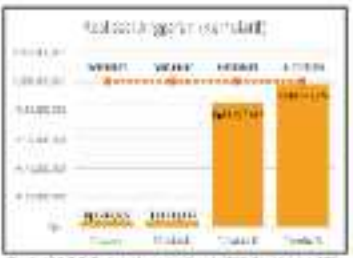

Gambar 2.1.4-3. Realisasi Anggaran Kumulatif KU 8 pada tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada Kb.19 tahun terkait.

10.Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksakan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Sosialisasi dan sosialisasi Dinas Riset, dalam rangka memastikan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.6. Ukuran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konversi dan kontribusi kerjasama, pajang, dan kearifan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang direalisasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerja sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satuan lebih lain baik bidang organisasi untuk mendukung tinaksi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan mengkonsolidasi dan menjumlahkan data kerjasama kerja sama yang dibuat di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, pajang dan/atau kontribusi konservasi yang direalisasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

IKU 6	Meningkatnya pelaksanaan konversi dan kontribusi kerjasama, pajang, dan kearifan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 6	Kerjasama konservasi yang direalisasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kerjasama)

Satuan 2022	Tahun 2024				Capaian Kinerja s.d. Perkinasan		Target Kerjasama Jangka Menengah	
	Realisasi 2023	Peningkatan	Target IKU 2024	% Realisasi thd Target IKU	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	1	1	100	1	100	5	20

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL Sejumlah 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Capaian IKU ini yaitu telah dilakukan Penandatanganan Nota kesepahaman Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kotal Kertanegara asesal Nomor 07/DJPRL/KS.333/X/2024 dan Nomor B-833/KS.M.B/2024/074.03/06/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Wahelam Wilayah Hulu Kabupaten Kotal Kertanegara pada 26 Mei 2024 di Kota Administasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Terdapat sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama yang dicapai pada tahun 2024, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, pajang dan/atau kontribusi konservasi yang direalisasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.

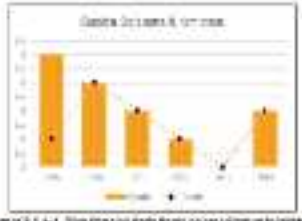

Gambar 3.1 H-1 : Tren Capaian Kerja Sama antara Instansi/Lembaga

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung target Rencana Jangka Menengah Ditjen PHPL 2020 – 2024 yaitu "Konservasi dan Kerja Sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Liar" sebanyak 6 kesepakatan jika tahun pola tahun 2020. Capaian kinerja BPDPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 7 kesepakatan kerja sama telah berkontribusi sebesar 20% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Kinerja & Perjanjian

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Kerjasama Konservasi yang dimiliki di Wilayah Kerja BPDPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target (sesuai Kinerja & Pendanaan).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan Adanya Rencana Kerja Tahunan dan Monitoring implementasi Kerja Sama dilakukan secara berkala. Dukungan Faktor Penghambat sesuai tantangannya anggaran untuk melaksanakan pertemuan secara luring. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pertemuan secara daring.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring. Salah satu optimalisasi anggaran yang berada di wilayah Kerja pertemuan bertujuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya:

a. Inisiasi & Penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama

Kegiatan inisiasi dan jejaring kerja sama di Kawasan Konservasi Perairan Maharam Wilayah Hulu dilaksanakan dengan diskusi antara pihak BPDPL Pontianak dengan pihak Dinas Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada

Tanggal 25 Maret 2024 di Ruang Rapat Dinas Kesatuan dan Pelindung Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin isi dokumen yang ditindaklanjuti yaitu mengenai kejelasan yang akan disampaikan di Komisi Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu selama tahun 2024. Pembahasan dilanjutkan dengan pendataan mengenai matriks kejelasan yang akan disampaikan. Pembahasan lain terkait awal disahkan untuk finalisasi draft perjanjian kerja sama.

Gambar 3.1.4-2. Hasil dari Pembahasan Draft Kerja Sama

Kejelasan pembahasan finalisasi draft dokumen perjanjian kerja sama atau kota kesepakatan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei di kantor BKSDA, Pontianak adalah kering dan lang. Kejelasan ini juga disampaikan oleh Direktorat KKBK, Sekretariat Ditjen PHKA, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin pembahasan yaitu pencatatan mengenai identitas dan fungsi Dinas Kesatuan dan Pelindung Kabupaten Kutai Kartanegara, mendapat pertimbangan data dan informasi menjadi hubbab power data dan informasi serta pembahasan mengenai tahapan administrasi kerja.

c. Penandatanganan kota Kesepakatan Kerja Sama

Penandatanganan Kota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 570.8/PKS/KS.333/X/2024 dan Nomor B-832/KS/KSDA/OTA.0.0/10/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.4-3. Penandatanganan kesepakatan kerja sama

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Kinerja Pada Output [051] 2310 PEC] Kerja Sama dengan Rincian Output [PEC.007] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berkesanan Komponen Sub komponen

Tabel 3.1.4-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung (KU) 4 pada Tahun 2024

No.	Komponen Belanja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa/+
1.	[Desa] PMC.031.391.42 Pelayanan Kesejahteraan Ekonomi	Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-
TOTAL		Rp70.000.000	Rp69.223.671 (98,89%)	-

Sumber Data: BPDPL Pontianak (Aplikasi SAKT) per tanggal 31 Desember 2024

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU 4 tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp69.223.671 atau 98,89% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Operasional, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Pertemuan); dan Belanja Perjalanan Dinas Pelaksanaan Meeting Dalam Kota (Transport Peserta).

Gambar 3.1.4-4. Realisasi Anggaran Kumulatif KU 4 Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPDPL Pontianak dengan Dinas Kesehan dan Perikanan Kabupaten Kota Kumunggala. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2024.

4. Pengawasan/Evaluasi Capaian

Pelaksanaan (action) dapat dicapai dengan mengawang kesenangan antara kinerja dan perencanaan dalam mengelolaa dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengawasan/evaluasi gambar pada KU 4 di dalam tahun

5. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksakan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat PSDP dan Sekretariat Ditjen PRL dalam rangka melaksakan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

IKU 2. Kemitraan konservasi yang dievaluasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasaknas)

kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesepakatan, kesetaraan dan saling menguntungkan, kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koperasi, Lembaga Penelitian dan/atau Pengurus Tinggi. Teknik pembinaan indikator Kinerja dilakukan dengan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kemitraan yang dilakukan di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2023, IKU ini merupakan penggabungan dari IKU "Kolaborasi, jejaring dan kerja kemitraan konservasi yang difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.9-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

No.8	Meningkatnya pengelolaan kemitraan dan inisiatif kolaborasi, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
IKU 7	Kemitraan konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasaknas)

Aspek/IKU 2023	Tahun 2023				Indeks Kinerja (s. Pendahulu)		Target Renstra (akhir strategis)	
	Realisasi 2023	% Capaian	Target Ind 2023	% Realisasi thd Target IKU	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	100	1	100	1	100	5	20

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SUNDIS, September 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Kegiatan IKU ini pada tahun 2024 telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Kerjasama kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah sesuai Nomor B.1485/BPSPL.3/KS.220/X/2023 dan Nomor 8855/UN17.8/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara, kolaborasi Pengusaha Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 08 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2024. IKU ini merupakan penggabungan dari IKU "Kolaborasi, jejaring dan kerja kemitraan konservasi yang difasilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.

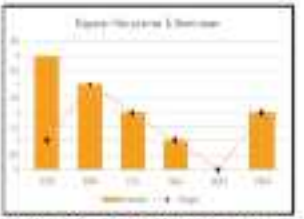

Gambar 3.1.B.5. Capaian Kinerja Kerjasama Kemitraan dalam Dikshar Nasional

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Hal ini mendukung target Rencana Jangka Menengan Dirjen PKRL 2020 – 2024 yaitu tidaknya kemitraan konservasi yang berkualitas) konservasi kawasankonservasi hayati Lestarinya 8 kesepakatan pada tahun 2024. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 1 kesepakatan kerja sama tidak berkontribusi sebesar 33% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrika Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matrika Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu kemitraan Konservasi yang direalisasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matrika Kinerja & Pendanaan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Hahakiam Wilayah Hulu kabupaten Ketai Kertanegara melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor pendukung pencapaian Hal ini adalah kesediaan pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan para pihak. Sementara penghambat yaitu adalah tidak adanya monitoring terdokumentasi Perjanjian Kemitraan secara berkala.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan akademisi dan stakeholder tentang dan melakukan performasi secara daring. Selain itu, optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemerolan bantuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

3. Kegiatan Pendukung

a. Inisiasi & Pemicuan Draft Kerjasama

Kegiatan Inisiasi Kemitraan ini dilaksanakan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang beberapa stakeholder yang memiliknya kepentingan di sekitar Kawasan Konservasi. Mekanisme Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 di Hotel Mercure Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kesehan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Direktorat KSDF Samarinda Ditjen PHKL, Biro Kerjasama dsb.

Penyusunan dan pemaparan draft kesepakan Bersama antara BPDPL, Perikanan dengan PIHK Universitas Mulawarman di Kota Samarinda dilaksakan pada 24 Januari 2024. Beberapa poin hasil diskusi diantaranya yaitu dilakukan atas diskusikan kemitraan dengan masyarakat local, pelu pertimuan dan koordinasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Ruang lingup pemanfaan yang disepakati antara Pengelolan Sumber Daya Manusia, kajian Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pelibatan masyarakat dan Publikasi.

Gambar 2.1.6-4. Kegiatan Inisiasi dan Pembahasan Kemitraan

b. Penandatanganan Kota Kesepakatan

Kegiatan pendukung dalam Perjanjian PKS ini adalah Penandatanganan Kota Kesepakatan Kemitraan antara BPDPL, Perikanan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai nomor B.1488/BPDPL.3/HS.330/V/2024 dan nomor 8683/UN17.4/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Pengelolan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pembelajaran Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Kota Kemintosal Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 2.1.6-7. Penandatanganan Kota Kesepakatan Kemitraan

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan realisasi Rincian Output (RO) [3343.997] Kerja Sama dengan Rincian Output (RO) [3343.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

Tabel 3.1.b-4. Realisasi Anggaran RO Kemitraan Konservasi

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	[3343.998.001.051.A] Imbalan Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.999.439 (99,99%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.999.439 (99,99%)	-

Sumber Data: SPAN, Pembaruan (realisasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung (KL.7 Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.999.439 atau 99,99% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Stamboks, Sertifikat KK dan Bahan Publikasi), Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksana Kegiatan), dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transpor Rapat/Koordinasi dan Rapat Pleno di Kabupaten Timur).

Gambar 3.1.b-8. Realisasi Anggaran Kumulatif KL.7 hingga Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Perjanjian/Kerjasama Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengolahan Sumber Daya Manusia, Mangrove, dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender akan dicapai dengan mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada KL ini calon terlihat

8. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat KKBP dan Sekretariat Ditjen PRL, dalam rangka memastikan tangat dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Ditetapkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis non kawasan sumber daya alam (Ditjen). Tahun ini meningkatkan efektivitas dengan mengimplementasikan dan menjamin bahwa kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sosial tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Reorg Lauf nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1 Capaian IKU BPSPL Pontianak

SS.7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Ditetapkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Realisasi 2023	Tahun 2024				Kontrak Kinerja 5 Tahunan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
0	2	2	2	100	2	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak per 31 DESEMBER 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah dilakukan pengusulan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah ditandatangani Berkasi Pemerintah dan tongol Tahun 2024 sebesar 2 (kelompok), dari target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres bagistan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah disampaikan melalui nomor surat PKH kepada Pemberitahuan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 26/BPSPL.3/TU.140/03/2024 tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, telah dilakukan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Rancah di kabupaten Kimatara sesuai Berita Acara Serah Terima nomor 8 1478/BPSPL.3/PKL.440/10/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan serah terima bantuan untuk kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Gemadan Lestari di Kabupaten Ketapang 8.2263/BPSPL.3/PKL.440/10/2024 tanggal 30 September 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 2 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 tersapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Hal capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2024 mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian tersebut disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp366.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp250.848.000 pada tahun 2024.

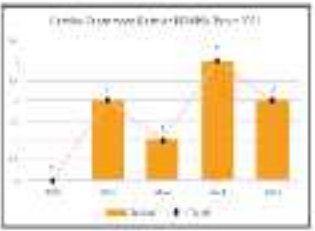

Gambar 2.1.3-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK dalam Rupiah

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Rencana Kerja Unit (RKU) Tahun 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian komulatif Tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat telah terkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 5 kelompok menjadi 3 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp350.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp200.040.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini berpotensi kepada kesiapan kelompok masyarakat dalam memenuhi syarat administratif persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Konservasi Tahun 2024. Telah dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memudahkan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pagu/vol yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pengadaan. Selain itu, pendistribusian dan pendampingan penyusunan proposal juga dilakukan secara daring dapat menghemat efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan.

7. Kendala/Permasalahan

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU, yaitu:

a. Identifikasi, Evaluasi, Konfirmasi dan Pemetaan Kelompok Masyarakat

Identifikasi kelompok masyarakat calon penerima bantuan KOMPAK dilakukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kegiatan identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dilaksakan pada tanggal 14 s.d. 20 Januari 2024 yang bertempat di Desa Tabuk Tambang dan Desa Tanjung Dungkal, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang akan diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Pesisir dan POKMASWAS Selayar Bersama. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berfokus di Desa Tabuk Tambang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, pengangkatan biota laut tertangkap dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2015, kelompok ini didukung/difasilitasi dalam mendapatkan bantuan KOMPAK dan operasional KKMI, berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.

Gambar 8.1.2-8. Identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan

Kegiatan identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Barat dilaksakan pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kendawangan. Identifikasi dilakukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Dampaskan Lestari, POKMASWAS Tangar Bersatu, POKMASWAS Sadar Wilayah Pesisir, POKMASWAS Mangrove Dimana Berseri. Kelompok Masyarakat Pengawas Dampaskan Lestari berlokasi di Dusun Pulau Dampaskan, Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memonitoring kemunculan biota dilindungi (spesies caglog, lumba-lumba, pesut dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat (biota dilindungi (lamun dan penanaman mangrove dan lamun oleh secara swadaya maupun bekerjasama dengan mitra/LSM/pengurusan hingga

Gambar 8.1.2-9. Identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Barat

Pembaharuan hasil identifikasi dan validasi, terhadap dua kelompok yang ditetapkan mendapatkan bantuan yaitu Pokmaswas Pedadi di Kemantan Selatan dan Pokmaswas Gempadak Lestari di Kalimantan Barat. Kedua kelompok ini memenuhi aspirasi antara lain, antara lain tersedia sarana dan prasarana pengawasan seperti speedboat, GPS, dan alat komunikasi, serta memenuhi kriteria penyerahan yang tercantum dalam petunjuk teknis. Selain itu, Pokmaswas Pedadi telah menerima Bantuan Konservasi pada tahun 2019 dan menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan melalui laporan evaluasi Bantuan Konservasi sebelumnya dua tahun berturut-turut dengan nilai baik serta predikat AA (Memuaskan) dalam penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua kelompok ini dinilai layak untuk menerima bantuan guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan Surat Penetapan Hasil Identifikasi dan Verifikasi oleh Direktur KKBP nomor B.1091/DJPKRL.3/PPL.440/11/2024 tanggal 14 Mei 2024 serta Memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor: B.4/BPSPL.3/PPL.440/11/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak menetapkan Pokmaswas Pedadi sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.81/BPSPL.3/PPK/V/2024. Selanjutnya, berdasarkan Surat Penetapan Hasil Identifikasi dan Verifikasi oleh Direktur KKBP nomor B.1662/DJPKRL.3/PPL.440/11/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor: 11/BPSPL.3/KP.440/11/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak juga menetapkan Pokmaswas Gempadak Lestari sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.83/BPSPL.3/PPK/V/2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang bantuan KONPAK melalui:

- SP Nomor SP.47/BPSPL.3/PPK/SP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 untuk Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Pedadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAPB No. 48/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAST No.48/BPSPL.3/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No.28/KP/BPL.3/PPK/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.3338/PPJ.10/PL.460/VI/2024 tanggal 5 Juli 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 58/BPSPL.3/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 6 Juli 2024 untuk Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Gempadak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pemeriksaan No. 57-1/BPSPL.3/PPK/VI/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan No. 01-Q/BPSPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB 69/KP/BPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No.69/BPSPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Pedidi dari Desa Tabit Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Juni 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kompresor, satu unit kompresor silinder dan satu unit housing underwater dengan nilai sebesar Rp. 93.200.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.1070/BPSTL.3/PRL.443/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.

Gambar 3.1.7-4. Serah Terima Bantuan KOMPAK Pedidi

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Dampaksar Lestari dari Desa Kandawangan Kiri, Kecamatan Kandawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat berbahan fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp. 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.3260/BPSTL.3/PRL.443/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

Gambar 3.1.7-5. Serah Terima Bantuan KOMPAK Dampaksar Lestari

B. Realisasi Anggaran

Kegiatan ini berdasarkan dengan adanya anggaran dari kegiatan Rincian Output [RO.QBH.001.021] Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan Rincian Output Capaian Output pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi PJU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa/%
1.	[RO.QBH.001.021] Pelimpahan (anggaran Kominfo)	Rp280.280.000	Rp279.240.400 (99,94%)	-
TOTAL		Rp280.280.000	Rp279.240.400 (99,96%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung PJU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp279.240.400 atau 99,94% dari pagu anggaran sebesar Rp280.280.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dan Uraian Lintas Disarahkan kepada Masyarakat Pemda.

Gambar 2.1.7-2. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Tahun 2023

B. Perspektif Internal Bisnis

Kelestarian jenis ikan dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pelestarian/konservasi jenis ikan pada IKU ini dilakukan dengan melibatkan pegawai konservasi dan pemerintah secara proporsional pada lanskap kegiatan berbasis KSDHEK.

I. Kendala dan Tantangan Tahun 2023

Meskipun koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA telah dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Selain itu juga melakukan monitoring dan asistensi bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah ditetapkan bantuan di tahun 2022.

IKU 9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pendirian rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan anggotanya dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung diakukan dengan Menginventarisasi dan menumbuhkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di kawasan konservasi pada wilayah kerja BPSPL Pontianak.

IKU ini baru terdapat pada tahun 2024 dan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. IKU ini merupakan bentuk kegiatan dari kegiatan inhaja "Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak". meningkatkan/ pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Sektor Lingkup Ditjen PHKL pada tanggal 8 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan pencacahan Kerangka Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi "Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)" dengan target menjadi 40 orang.

Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak Sebagai berikut

IKU 4	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Wilayah BPSPL Pontianak Masyarakat di Kawasan Konservasi dan Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Mendapatkan Izin Pengelolaan atau Kemitraan

Realisasi 2023	Tahun 2024				Analisis Kinerja & Rencana Jangka Pendek		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Capaian	Target 31/12/24	% Capaian thd Target thn	Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target 2026
-	79	-	60	116,67	1	120	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak per 31/12/24, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan. Terdapat realisasi sebanyak 70 (orang) masyarakat di kawasan konservasi (taman nasional) maupun wilayah kerja yang ditasfikasi pengembangan mata pencaharian baru. Capaian tersebut melebihi target sebanyak 60 orang sehingga realisasi terhadap target sebesar 116,67%. Capaian kinerja disampaikan melalui memo Kabid Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 3/s/BPSPL.3/TU.1/01/2024 tanggal 31 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi (taman) pada wilayah kerja BPSPL Pontianak yang ditasfikasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKu tersebut belum terhitung dalam Renstra Ditjen PHKA 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PHKA.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKu tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu sebanyak 60 Orang masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang ditasfikasi pengembangan mata pencaharian baru pada tahun 2024. Capaian IKu tahun 2024 sebesar 70 orang telah berkontribusi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 116,67%.

5. Analisis Penyebab Kelberhasilan/Kegagalan atau Pembelajaran Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat tiket anggaran yang baru dibuka pada bulan juni sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [3053.003.002] Masyarakat Pemerintah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 60 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal (PHKA, untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja dan menyesuaikan target IKu dengan target RO pada bulan Oktober 2024.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pagu/anggaran yang tersedia di tiap-tiap mata pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pelaksana.

7. Kegiatan Pendukung

a. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat

Kegiatan Identifikasi untuk mata pencaharian alternatif bertujuan untuk mengali potensi ekonomi masyarakat dan mengetahui jenis mata pencaharian yang sesuai dan berpotensi sebagai mata pencaharian yang tepat bagi kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2014 bertempat di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam kegiatan ini yaitu memanfaatkan penggunaan kuisioner pada enam desa Desa Sangkuliman, Desa Pela, Desa Ulang Uluh, Desa Ulang Ilir, Desa Batuk Tangan, Desa Kota Bangun Seberang. Sementara metode analisa yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis skoring.

Gambar 2.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KKM Mahakam Hulu

Hasil dari pengumpulan data menunjukan bahwa mayoritas responden (35,02%) berprofesi sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas perikanan menjadi mata pencaharian utama di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Pendapatan Sebagian besar responden berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 atau kurang dari Rp2.556.606. Mayoritas responden memiliki ketertarikan terhadap pengembangan mata pencaharian alternatif yang memberimanfaat langsung dan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Berdasarkan hasil scoring, kegiatan budidaya perikanan dinilai oleh responden sebagai alternatif mata pencaharian yang paling sesuai dan dapat berkelanjutan, difikuti dengan pengolahan produk kerajinan tangan dan pengembangan pariwisata yang berpotensi meningkatkan diversifikasi ekonomi masyarakat.

Gambar 2.1.7-5. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KKM Mahakam Hulu

b. Pelatihan Peningkatan Mata Pencaharian Alternatif

Kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kepulauan Aru serta mengembangkan mata pencaharian alternatif atau cadangan usaha bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mata pencaharian alternatif dilakukan sebanyak dua kali yaitu pelatihan bidang perikanan pada tanggal 6 – 7 November 2024 dan pelatihan bidang pariwisata pada tanggal 10 Desember 2024.

Pelatihan bidang perikanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berlasal dari 7 desa di 3 kecamatan. Kegiatan ini mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota Kemenagara dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu manajerial berusaha penangkapan ikan yang berkelanjutan untuk ikan mas (Cyprinus carpio). Selain itu juga terdapat praktek di lapangan tentang contoh penangkapan ikan.

Gambar 3.1.7-5. Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif (Dokumentasi)

Pelatihan bidang pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 3 kecamatan. Kegiatan ini mengundang Swandiri Craft sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu manajerial pokdar wisata untuk kenyamanan tamu. Selain itu juga terdapat praktek untuk membuat kerajinan tangan berbahan bambu yang bisa dijadikan cinderamata untuk pengelolaan sumber daya pariwisata.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian ini didukung dengan adanya anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2863.AAA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bentuk kerincian kawasan anggaran sampai tahun anggaran ini diberikan pada tahun lain. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2863.BDD.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difungsikan kepadanya.

Tabel 3.1.7-5. Realisasi (Rp) Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Ekstra
1.	[2863.BDD.002] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp206.613.000	Rp206.281.202 (99,83%)	-
TOTAL		Rp206.613.000	Rp206.281.202 (99,83%)	-

Kesetaraan gender dapat diukur dengan menghitung kesenangan antara pria dan wanita dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada KKJI ini diakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah peserta peserta kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif. Pada kegiatan pelatihan perikanan, jumlah peserta laki-laki yang ikut sebanyak 14 orang sementara perempuan sebanyak 34 orang.

Berikut 3.1.7-7. Pengarusutamaan Gender pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif

1.3. Rencana Aksi Tahun 2020

Melalukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020. Selain itu juga melakukan identifikasi area terkait lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dikonservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis

Jenis ikan yang terancam punah yang diakukan pendataan penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadaranan, perbaikan habitat/pemulihan populasi atau penanganan biota dilindungi untuk kelestariannya keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu Kima, Lola Tenebok, Pari Air Tawar Kenang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola Tenebok dan Pari Air Tawar
b. Perbaikan Habitat/Penyu Peer Populasi dan/atau Pengawasan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Kenang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut

Teknis pemilangan capaian IKU ini dilakukan dengan menghimpun/rekap dari mendata/ikan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan,

Perlindungan Habitat atau Perlindungan Populasi dan Penanganan Satwa Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.B-1 Capaian PK 1 UPSPSL Pontianak

IKU 8 IKU 15	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan yang mempunyai Keanekaragaman Hayati Dilindungi dan atau Ekosistemnya di Wilayah BPSPL Pontianak Jenis dan Tanaman Pohon yang Ditanam Pemerintah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Penanganan Satwa Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, (unit)							
Tahun 2023					Kontribusi pada Capaian		Persentase Jangka Menengah	
Capaian 2022	Realisasi 2023	Peningkatan	Target PK 2023	% Realisasi thd Target PK	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023
10	9	-1	7	114,29	7	100	35	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAPPSL, Desember 2023

1. Capaian IKU Tahun 2023

Bentuk penguatan dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara terintegrasi. Rekapitulasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 realisasi IKU ini yaitu sebanyak 9 jenis meliputi Penyu, Kima, Lola, Kerang, Mamalia Laut, Tenbolok, Pari Air Tawar dan Satwa. Tentunya satu kegiatan jenis lain yang menjadi IKU tambahan, yaitu Penyadaran Kima (Aquasi Kima). Sehingga capaian terhadap target penanjian kinerja untuk IKU ini sebesar 114,29%. Capaian IKU ini disampaikan melalui mekanisme Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 6/BPSPL.3/TU.140/1/2023 tanggal 9 Januari 2024. Kegiatan penyadaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya:

a. Penyadaran Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat;
b. Penyadaran Data Populasi Kima di Kalimantan Barat;
c. Penyadaran Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan;
d. Penyadaran Data Populasi Ikan Tenbolok di Kalimantan Barat;
e. Penyadaran Data Potensi Pari Air Tawar di Kalimantan Tengah;
f. Pembuatan Stock Center Kerang di Kalimantan Timur;
g. Rescon Dugaan Penangkapan Biota Dilindungi/Tanaman Pohon; dan
h. Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau Tanaman Pohon

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 12 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (sementara 9 jenis), maka progres kegiatan mengalami penurunan sebesar 25% dari progres kegiatan pada Tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak terdapat anggaran untuk penyadaran data potensi jenis Tenbolok dan Pari Air Tawar. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, maka capaian mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2023 dan penurunan dari tahun 2023 – 2024.

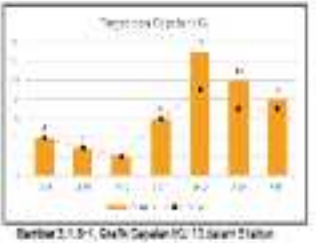

Gambar 3.1.B-1. Grafik Capaian IKU 13 dalam 5 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 30 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki persentase capaian 43% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target yang tertuang dalam matriks kinerja & pendanaan BPKH, Pemantau tahun 2020 – 2024 yaitu 8 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki persentase sebesar 100% dari capaian target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Kelberhasilan/Kegagalan atau (Peningkatan/Penurunan) Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data sosial ekonomi respon cepat manusia laut tersampar dan asset/aset biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat manusia dan tersampar memerlukan informasi yang akurat dan mudah/cepat yang mencakup, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang erat dengan pelapor. Tahun ini, akses lokasi kegiatan biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring pendampingan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat biota terdampar. Faktor pendukung kegiatan ini yaitu tidak terdapat anggaran untuk penyediaan data primer/ baru Tracuk dan Pari Air Tawar. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan berusaha kepada Sekretariat Ditjen PKRL terkait dengan mata anggaran kedua kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pemanfaatan wilayah. Pemanfaatan jejaring pendampingan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung akses kegiatan yang sulit diakses.

7. Kinerja Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung kinerjanya IKU, yaitu:

a. Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data populasi penyu di Kalimantan Barat dilaksanakan di Pantai Bunga Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebubus, Kecamatan

Pelihi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 9 s.d. 14 Mei 2014. Selain hl survei dilakukan koordinasi dengan anggota kelompok masyarakat Mahaina Bahari Pelihi. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Pantai Tanjung Api yang merupakan salahsatu situs Pos monitoring penyu dan kelompok masyarakat Bongkahan Kembang Bemban. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Sambas.

Gambar 2.1.9 2. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Survey pendataan populasi penyu dilakukan dengan penyisiran laut pantai pada malam hari yang dibagi menjadi 3 sektor dengan jarak antar sektor berkisar 600 meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya dilakukan penyu di sektor 2 sampai dengan sektor 7. Namun ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Penyu yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 3 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang telah teridentifikasi dengan jumlah telur per sarang diantara 71 – 116 butir yang diperkirakan akan menetas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Penyu Pelihi. Jenis penyu yang sarangnya diidentifikasi adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.

b. Pengambilan Data Populasi Kima di Kalimantan Barat

Kegiatan penyisikan data populasi kima di Kalimantan Barat dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Lemukutan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 3 – 5 Februari 2014. Sebelum survei, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Aula Kantor Desa Pulau Lemukutan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan warga desa Pulau Lemukutan yang berprofesi sebagai nelayan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Gambar 2.1.9-3. Survei di perairan Kimudi Kalimantan Barat

Metode survey pendataan populasi kima yang dilakukan adalah metode belt transek yaitu dengan menarik garis transek tarus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 4 meter (2,4 meter kanan dan 2,4 meter kiri pengamat), pada 7 stasiun pengamatan. Total jumlah kima (Tridacna sp.) yang ditemukan di 7 lokasi pengamatan di Pulau

Lainnya/lain yaitu 494 ekor berupa jenis Trisakis crocea, Trisakis maxima dan Trisakis squamosa. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Tahiti Kima sebanyak 370 ekor. Sementara jumlah kima paling sedikit ditemukan di Teluk Sumpa dengan sebanyak 69 ekor.

Tabel 2.1.0-3. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. Belau	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	69
2	Tel. Dhe	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	167
3	Tj. Pelimbang	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	122
4	Tanah Kilea	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	376
5	Air Thle	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	119
6	Tj. Batu Belubur	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	88
7	Tj. Hanohom	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	94
Total			994

c. Pemeriksaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan

Kegiatan penyediaan data populasi lola (Trocus niloticus) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kenyasan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 9 - 14 September 2014. Kegiatan survei dilakukan bersamaan dengan ekspedisi dan eksplor Kalimantan Selatan untuk mencari informasi mengenai ikan hiu/pari serta lola di Kalimantan Selatan. Selain itu, dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Pesisir yang berbasis di kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informan yang mengetahui kisaran sebaran lola. Komunikasi kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melakukan pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan nelayan sekitar terhadap lokasi potensial Lola di Pulau Kenyasan.

Gambar 2.1.0-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat

Kunci kegiatan observasi di 6 titik/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif bersama masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan menggunakan transek garis pada titik sampel. Stasiun pertama berlokasi di

bagian barat Pulau Kanyaman. Ditemukan sebanyak 4 individu ikan di sekitar terumbu pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Kanyaman. Ditemukan sebanyak 11 individu ikan di sekitar terumbu pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di bagian timur Pulau Kanyaman. Ditemukan sebanyak 9 individu ikan di sekitar terumbu pengamatan. Total sebanyak 24 individu ikan yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyebaran data populasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Kanyaman.

6. Penyebaran Data Populasi Ikan Tombak di Kalimantan Barat

Kegiatan survey untuk penyebaran data populasi ikan tombak dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 April tahun 2014 di Kabupaten Kompawan, Kota Singkawang dan Kabupaten Kemtaz. Metode pengambilan data dilakukan melalui monitoring wawancara kepada nelayan di lokasi penyebaran data dengan metode penentuan sampel secara acak (random sampling). Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisa deskriptif kualitatif.

Gambar 2.1.9-6. Penyebaran Data Populasi Tombak

Di Kalimantan Barat terdapat dua jenis ikan tombak, yaitu Tetrapodus (U) dan Tetrapodus macrura. Keterbatasan Tetrapodus (U) hanya dikatakan berdasarkan informasi dari wawancara dengan nelayan dan pengepul, sedangkan Tetrapodus macrura teridentifikasi langsung melalui sampel yang diperoleh selama survei. Dalam survei tersebut, ditemukan total 10 ekor ikan tombak dan sebanyak 7 ekor diantaranya dan 9 sampel untuk pengujuan lebih lanjut. Hasil identifikasi morfologi dan morfometrik terhadap seluruh sampel menunjukkan bahwa jenis ikan tersebut adalah Tetrapodus macrura. Selain itu, hasil uji DNA terhadap sampel ikan tombak diduga kuat kode TP11 dan TP13 juga mengarah pada jenis Tetrapodus macrura.

c. Pengolahan Data Potensi Perikanan Tawar di Kalimantan Tengah

Survei penyebaran data potensi ikan air tawar dilakukan pada tanggal 23 – 29 Oktober 2014 di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Karau Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyebaran data dengan metode penentuan sampel secara acak (random sampling). Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisa deskriptif kualitatif.

Gambar 2.1.9-6. Survei Penyebaran Data Potensi Perikanan Tawar

Hasil survei pengadaan data potensi ikan air tawar di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa Ruvittyon signifer (ikan semah/ikan pulih) merupakan jenis ikan air tawar yang ditemukan di Kabupaten Barito Selatan. Sebaran potensinya meliputi sepanjang Sungai Barito serta beberapa danau seperti Danau Raja dan Danau Lasak, yang memiliki karakteristik perairan air putih, agak keruh hingga sedikit gambut dan tergenang pada saat musim air surut dengan kedalaman 2–7 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara, jumlah tangkapan Ruvittyon signifer berkisar antara 2 – 4 ekor di setiap rumah/hari penangkapan oleh dua nelayan.

f. Pengadaan Data Potensi di Kolaka di Kalimantan Tengah

Kegiatan survei lapang pengadaan data potensi benih dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2024 di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyebaran ikan semah dengan metode penomisan sampel secara sengaja (purposive sampling). Terhimpun Tahun 4 nelayan yang didatangkan secara efektif/ efektif kualitatif.

Gambar 6.1 9-1 Pengadaan Data Potensi Benih

Selama survei di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, terdata dua nelayan yang menangkap dan membudidayakan ikan semah. Berdasarkan hasil identifikasi visual, jenis ikan semah yang menjadi primary dibuat adalah Chitala lopis. Meskipun dilakukan identifikasi lebih mendalam untuk memastikan jenisnya secara akurat. Lokasi potensial habitat ikan semah di Kabupaten Barito Selatan ditemukan di sekitar DAS Barito, khususnya perairan Sungai Rotti. Beberapa danau yang menjadi habitat ikan semah meliputi Danau Lasa di Desa Manahan Lama, Danau Raja di Desa Nali, Hiliono Taleng, serta Danau Lasak, Danau Hanyuaten, dan Danau Besar di Desa Kalahien.

g. Pembuatan Stock Center Kerang di Kalimantan Timur

Pembuatan Coral Stock Center dilaksanakan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan Coral Stock Center ini bertujuan untuk mendukung upaya restorasi terumbu karang di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaksanakan oleh tim dari BPSPL Pontianak dan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Maratua Peduli Lingkungan (MPL), Unit Pengelolaan Bandar Udara (UPBU) Maratua, TNI AL Pulau Maratua, PT. Bunga Hijau Lestari (dinas terkait Resort), dan PT Prabasika Aqua (Prabasika Resort).

Gambar 2.1.8-8. Pembuatan Coral Stock Center di Kalimantan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media jaja-jaran (con.rack 1 x 1 meter, dengan jumlah lobi pada masing-masing media berjumlah 16 fragmen lobi karang. Bibit karang diambil dari sekitar lokasi Coral Stock Center pada kedalaman sekitar 8-10 meter. Adapun titik penempatan rak transplantasi berada pada kedalaman 9-10 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan dari 12 (sepuluh) lokasi coral pecahan, lama karang yang ditemukan adalah Acropora spp., Porites sp., Montipora sp. dan Heliopotora sp. dengan jumlah fragmen mencapai 160 fragmen karang.

Gambar 2.1.8-9. Monitoring Coral Stock Center di Kalimantan Timur

Kegiatan monitoring coral stock center dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 oleh Kelompok Masyarakat Mekitha Pesisir Lingkungan bekerja sama dengan Dinas Kelautan Riset, Monitoring dilakukan kepada 160 fragmen karang hasil transplantasi pada bulan Februari 2024 oleh BPSPL Pontianak. Hasil pengukuran pertumbuhan panjang dan lebar fragmen karang ada jenis *Acropora spp, Porites spp, Montipora sp, dan Heliopora sp* menunjukan rata-rata pertumbuhan panjang 0.5 – 1 cm dengan pertumbuhan lebar bervariasi antara 0.3 – 0.8 cm. Tingkat kelangsungan hidup (survival rate) pada karang hasil transplantasi sebesar 99%.

b. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah

Rencana aksi penanganan biota dilindungi dan atau terancam punah dilakukan untuk memberdayakan sebuah tindak pertolongan yang terjadi pada biota laut seperti kejadian terdampar, terjerat jaring dan tindakan penanganan lainnya. Metode pelaksanaan penanganan biota laut dilindungi disesuaikan dengan kondisi biota ditemukan. Penanganan biota yang ditemukan dalam keadaan hidup berupa diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Pada penanganan biota yang ditemukan dalam kondisi mati dapat dilakukan dengan cara dikeluarkan ke laut, dikubur, diotopsi maupun dimanfaatkan (to sun).

Gambar 3.1.9-10. Dokumentasi Penanganan Biota Dilindungi

Sepanjang tahun 2024, terdapat 57 informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau tersangkut pernah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat utang, dan biota yang hanyut. Sebanyak 33 ekor biota dilaporkan dalam kondisi mati, sama halnya sebanyak 33 ekor mamalia biota dilindungi ditemukan dalam kondisi hidup. Biota yang ditemukan dalam kondisi mati masih segar (kode 2) sebanyak 9 kejadian, biota yang ditemukan dalam kondisi mati mulai membusuk (kode 3) sebanyak 10 kejadian, biota yang ditemukan dalam kondisi pembusukan tingkat lanjut (kode 4) sebanyak 12 kejadian, sedangkan biota yang ditemukan dalam bentuk kerangka (kode 5) sebanyak 2 ekor. Jenis biota laut dilindungi yang ditemukan penanganan paling banyak yaitu biawak (*Varanus salvator*) sebanyak 20 kejadian, kemudian penyu hijau (*Chelonia mydas*) sebanyak 8 kejadian, dan lumba-lumba (*Tursiops aduncus*) sebanyak 3 kejadian. Selanjutnya biota laut dilindungi yang ditemukan penanganan paling sedikit yaitu dugong (*Dugong dugon*), duyung (*Dugong dugon*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) masing-masing 1 kejadian.

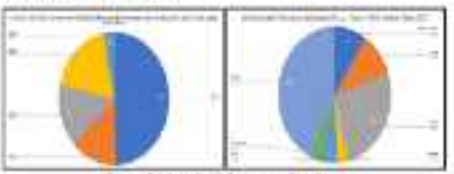

Gambar 3.1.9-11. Grafik Penanganan Biota Dilindungi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pantau data maupun untuk penanganan biota dilindungi, BTDPL Pontianak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar pada tanggal 3 – 4 Juni 2024 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemaparan, diskusi dan praktek. Kegiatan ini menghadirkan beberapa stakeholder terkait dengan penanganan mamalia laut terdampar.

Gambar 3.1.9-12. Bimbingan Teknis Penanganan Biota Dilindungi

Selain itu, materi tentang perlindungan kawasan konservasi sebagai upaya pencegahan UU No 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, BPSPL Pontianak juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Dapat Penanganan dan Pelaporkasan Kasus pada tanggal 11 November 2024 di kantor KPSPL Pontianak. Kegiatan ini diharapkan dan berbagai kalangan dengan melaksanakan pemahan dan tetap konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

I. Sosialisasi Biota Dilindungi dan atau Terancam Punah

Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masyarakat pesisir, bagian penting dari keberlanjutan upaya konservasi jenis ikan dilindungi/terancam punah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode partisipatif sehingga hasil efektif. Hasil materi ini diharapkan materi sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Gambar 2.1.3.13 Sosialisasi Biota Dilindungi

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak lima kali di empat lokasi berbeda: Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Mei 2024, Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Mei 2024, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2024 dan 29 – 30 Juni 2024, serta Kabupaten Bantu Selatan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2024. Sebanyak 555 peserta telah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi biota dilindungi yang dilaksanakan, yang terdiri dari 399 orang laki-laki dan 156 perempuan. Peserta sosialisasi berasal dari pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta stakeholder terkait lainnya seperti HCS, TNI dan BKSDA.

J. Workshop Penilaian E-PAHLI Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PAHLI dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2024 di Hotel Ibis Style Mojor Kaya, Kab. Mojor. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPAHLI) tahun 2024 serta yang menjadi 20 jenis ikan prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerangka penilaian EPAHLI memiliki struktur dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang berbeda menjadi input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 82,19 dengan kategori sangat baik.

Gambar 3.1.0-14. Workshop Penilaian Di PHU

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan/ Rincian Output [2843.998.037] Koordinasi/pengelolaan kegiat Kawasan Taman Nasional yang Dilindungi dan/atau Dikelola Non. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output sebagai berikut pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.0-3. Realisasi IKU 10 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Awal	Realisasi	Sisa/+
1.	[2843.998.037.001] Penyelesaian Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Taksiosam Puncak	Rp190.291.000	Rp190.291.000 (99,97%)	-
2.	[2843.998.037.002] Konservasi Populasi maknet ikan/jenis ikan dilindungi/taksiosam puncak	Rp132.799.000	Rp132.799.000 (99,99%)	-
3.	[2843.998.037.003] Revisi Cetak Pelanggaran Biota dilindungi/taksiosam puncak	Rp60.730.000	Rp60.607.513 (99,97%)	-
4.	[2843.998.037.004] Evaluasi Biota Dilindungi/Taksiosam Puncak	Rp377.224.000	Rp377.276.000 (100%)	-
TOTAL		Rp748.972.000	Rp748.969.331 (99,99%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU III pada Tahun 2024 (posisi/SP Jan Januari 2024) yaitu Rp748.969.331 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp748.972.000. Realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Rintis Biosa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

Gambar 3.1.3-10. Grafik Realisasi Anggaran Komoditi Kopi Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada Ditjen Perkebunan dengan :

10 Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PSP, terkait dengan penyelesaian target cetakan dan penyelesaian kegiatan pada tahun 2024. Selain itu juga melakukan penanganan jalan non struktur yang terdampak aduntic alle rasio.

2.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutannya, meliputi:

a. Pelaksanaan pantauan pemanfaatan jenis ikan dilindungi: meliputi Appendiks CITES, ikan/atau biota alfa spesies (ikhi Appendiks, Peri Appendiks, Terbang, dan Arwana);
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (ikhi Appendiks, Peri Appendiks, Terbang, dan Arwana);
c. Verifikasi atas jenis ikan yang dimanfaatkan (ikhi appendiks, Peri Appendiks, Terbang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah ikhi Appendiks, Peri Appendiks, Terbang, dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik pemfungsian capaian dilakukan dengan mengimentasikan dan menganalisis jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan meliputi Pelayanan Perizinan memanfaatkan jenis ikan dilindungi, meliputi Appendiks CITES, ikan/atau biota alfa spesies, penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi atas jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 2.1.3-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

Sasaran 3	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Jumlah (Tahun 3) Pertama		Tahun ke-3 Terakhir	
	Realisasi 2024	Capaian/Jenis	Target (Jenis)	% Capaian thd Target (1)		Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
5	8	40	5	160		8	160	40	40

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Zulhidi, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Kondisi/kinerja pada tahun 2024 merupakan pada tahun 2024. Realisasi IKU ini yaitu sebanyak 8 jenis meliputi ikhi Appendiks, Peri Appendiks, Arwana Pontianak, Arwana Bekili, Napoleon, Sidat, Belida dan Terbang. Terdapat empat jenis ikan yang menjadi IKU tambahan, yaitu Arwana Bekili, Napoleon, Belida dan Sidat. Penambahan capaian terhadap target penjenjian kinerja untuk IKU ini sebesar 160%. Capaian IKU ini disertai dengan melalui mekanisme Nota Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 0/BPSPL.0/TU.140/0/2025 tanggal 6 Januari 2025. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

i. Pengadaan perlindungan (perlengkapan perlu kerja untuk pembuatan, Apparatus, OTES, pemasangan lain-lain sejenis (Pit Apparatus, Pari Apparatus, Tambang, Hasolench, Solat, Sekda, Amara Formosus dan Amvara Brazil)
ii. Sosialisasi dana potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi (contohnya Apparatus OTES (Pit Apparatus, Pari Apparatus, Tambang, dan Amvara)
iii. Verifikasi atau jenis ikan yang dimanfaatkan (Pit Apparatus, Pari Apparatus, Amvara Formosus dan Amvara Brazil).
iv. Bimbingan Teknis identifikasi Tertentu
v. Evaluasi dan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 6 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (rumus/diff 7 jenis), maka progres kegiatan mengalami peningkatan sebanyak 1 jenis atau sebesar 16,67% dari capaian pada Tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat tambahan capaian jenis hiu/pa Amvara Brazil, hapuskan dan Solat. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, hal tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2023 dan fluktuatif dari tahun 2020 – 2024.

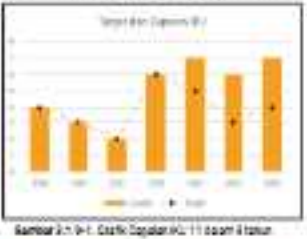

Gambar 3.1.9-1. Grafik Capaian IKU 11 dalam 4 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PHPL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah tercapai sebesar 40% dari Target Jangka Menengah Ditjen PHPL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Strategi & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan DPPPL Pembinaan tahun 2020 – 2024 sebanyak 4 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah tercapai sebesar 133% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 (saat melakukan kunjungan/survei) di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perikanan dilakukan oleh setiap bulan (Januari – Desember) kecamatkan progres kegiatan dokumen dan penggunaan aplikasi dan komputer/e-file pelaporan dan pengarsipan (PNBP) kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga

mempermudah proses permohonan PHBF. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PH pelayaran dan petugas PHBF melakukan pelayanan dan pendaftaran secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jasa dan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini tidak dimungkinkan dengan mengadakan Regional Kontrak bahwa Petugas Pelayanan untuk memberikan pelayanan operasional perizinan jasa dan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecuali satu manual yang dilakukan BPSPL, Pemanfaat dalam rangka efisiensi pelayanan perizinan jasa dan pada tahun 2024 yaitu melalui Format Elektronik Pemanfaatan Jasa dan (FORMAS). Merupakan formulir elektronik sederhana untuk memberikan dokumen hasil pemeriksaan lapangan secara otomatis pada pemeriksaan Surat Angkut Jasa dan (SAJ) di Wilayah BPSPL Pontianak. Formulir ini dikembangkan dengan menggunakan form elektronik google secara gratis yang dilakukan otomatisasi ke dokumen pdf dengan menggunakan formulasi python, sehingga pelayanan lampiran berita acara dapat langsung diterjadikan dapat menggunakan aplikasi printer, di kantor dan dari itu juga. Formasi ini dapat memberikan hasil pelayanan khususnya pada pemeriksaan dokumen lapangan dengan petugas berita acara. Efisiensi waktu sangat signifikan menjadi maks 1 jam dari sebelumnya. Manajemen 3 hari. 4-5 di memudah pemohon siang PHBF dokumen SAJ di proses selanjutnya menjadi lebih cepat.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung diantaranya (4), yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi BPJ, SAJ, dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2024 pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal PHKL serta BPSPL Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di loket/ ruang pelayanan BPSPL Pontianak. Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jasa Ikan (SIJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jasa Ikan (SPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jasa ikan yang dilindungi berlaku appendix CITES. Kegiatan ini berlujuan untuk mengawasi lembaga konservasi dan komoditas dan perizinannya administratif pelaku usaha melalui perizinan langsung. Hasil verifikasi perizinan BPJI pada tahun 2024 telah dilakukan verifikasi SPJI sebanyak 42 kali dari 23 pelaku usaha yang melakukan permohonan. Lokasi paling banyak pelaku usaha yang mengajukan verifikasi dilakukan oleh Kalimantan Barat sebanyak 19 pelaku usaha, disusul Kalimantan Timur sebanyak 3 pelaku usaha dan Kalimantan Utara sebanyak 1 pelaku usaha.

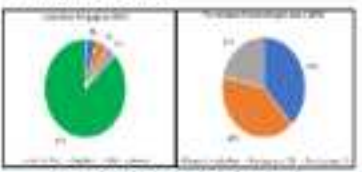

Gambar 5.1 PS Pemanfaatan Surat Rekomendasi

Berdasarkan jenis SPJ yang diterbitkan, terdapat tiga jenis SPJ yaitu SPJ pengambilan/penangkapan sebanyak 38% SPJ pembudidayaan dalam negeri sebanyak 41% dan SPJ perdagangan ikan negara sebanyak 21%. Sebagian besar pelaku usaha yang mengajukan SPJ berorientasi pada pemanfaatan jenis ikan arwana. Sementara hanya untuk jenis ikanya (hiu/pari, napoleon, arwit) hanya 4% dari keseluruhan permintaan.

- Rekapitulasi Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk satu Unit jenis ikan yang memiliki kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman https://kkp.go.id. Namun tetap verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara konvensional langsung atau daring (jarak jauh). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diuji.

Gambar 3.1 9-5. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

Selama Tahun 2024 terdapat total 312 Surat Rekomendasi. Hiu gari dan 81 Surat Rekomendasi Terbanyak telah diterbitkan oleh BPSPL Pontianak. Surat rekomendasi Arwana paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Utara sebanyak 65 surat, sementara surat rekomendasi ikan/pari paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ikan/pari diterbitkan untuk dalam negeri (DN) sebanyak 235 surat dengan provinsi Jawa Timur menjadi tujuan dalam negeri (DN) yang paling banyak sebesar 77 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri yang banyak diterbitkan ke negara Malaysia. Terdapat 27 jenis ikan dan pari look alike species yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan Maccabelis pavoni (Pari Bintang) menjadi species yang paling banyak diterbitkan.

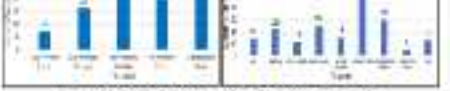

Gambar 3.1 9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Hiu dan Pari

Surat rekomendasi tertinggi paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 32 surat, sementara surat rekomendasi terendah paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 1 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi tertinggi dikirimkan untuk ekspor negara (Ctr) sebanyak 66 surat dengan provinsi jawa timur menjadi tujuan ekspor negara (Ctr) yang paling banyak sebesar 20 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri paling banyak dituliskan ke negara Malaysia Tertinggi 33 jenis tertinggi yang diterbitkannya pada tahun 2024 dengan jenis Hoothuria scabra (Teripang Pasir) menjadi jenis paling banyak diterbitkan.

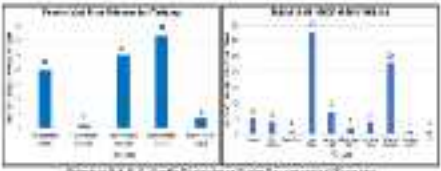

Gambar 3.1.9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Tertinggi

- Kelayakan Peralatan Surat angkut jenis ikan (SAJI) dalam negeri (Dn)

Pelayanan penerbitan SAJI Dn diberikan untuk satu kiriman jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Pelayanan diberikan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman inaf.kkp.go.id. Selama Tahun 2024 terdapat 108 SAJI Dn untuk jenis ikan dan 1 appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu sebanyak 1.936 SAJI Dn untuk jenis Arwana Scleropages formosus telah diterbitkan. 172 SAJI Dn SAJI Dn untuk Arwana Osteoglossum bicirrhosum (Arwana Hitam). Selain itu tertinggi penerbitan SAJI Dn untuk jenis Hippocampus (Chaetodon unimaculatus) dan Banda (Chaetodon octo).

Gambar 3.1.9-5. Pemeriksaan SAJI

SAJI Dn Ikan paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 13 surat, sementara SAJI Dn Ikan paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 17 surat. Tujuan pengiriman SAJI Dn Ikan paling diterbitkan oleh pengiriman ke Provinsi Jawa Timur sebanyak 99 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak satu surat. Tertinggi 26 spesies Ikan dari dari Appendiks CITES yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan Rhynchobatus australiae (Pari Kamejan) menjadi spesies paling banyak diterbitkan.

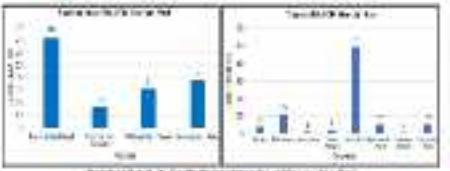

Gambar 3.1.9-1. Grafik Pengiriman Ikan Hias dan Non Hias

Peraturan SAJI DN Arwana Kalimantan (Osteoglossum formosus) diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 1.940 ekor, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Selatan sebanyak 4 ekor. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak ditujukan ke DKI Jakarta sebanyak 677 ekor. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi di wilayah Timur Indonesia sebanyak masing-masing satu ekor. Terdapat 2 jenis ikan hias (Arwana Kalimantan yang diterbitkan sepanjang tahun 2024 (Ikan Arwana Super Red merupakan varian yang paling banyak diterbitkan sebanyak 50.000 ekor. Peraturan SAJI DN Arwana Brasil (Osteoglossum bicirrhosum) seluruhnya berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 176 ekor. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Brasil paling banyak ditujukan ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 101 ekor, Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau sebanyak masing-masing satu ekor. Jumlah Ikan Arwana Brasil yang diterbitkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 274.626 ekor.

Jenis ikan lain yang diterbitkan SAJI pada tahun 2024 yaitu, jenis napoleon (Cheilinus undulatus) sebanyak satu surat dan jenis sotong (Ommastrephes) sebanyak satu surat. SAJI untuk jenis napoleon berupa SAJI pelepasan yang diterbitkan dari Kalimantan Timur ke Sulawesi Selatan sebanyak 35 ekor. Permintaan napoleon masih terjaga hingga dengan size 800 yang berada di gudang pelaku usaha hasil penangkapan, hal tersebut karena nilai HDP dan napoleon masih negatif, sehingga pemanfaatan dari alam tidak dioptimalkan. Sementara SAJI untuk jenis belida berupa SAJI untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sebanyak 70 ekor yang diterbitkan dari Kalimantan Selatan ke Jawa Timur.

- Pelayanan Penerbitan SAJI DN Barang

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk satu kesatuan jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi (apendiks appendiks II/III) pada pengiriman di dalam negeri yang memerlukan barang berupa (tengkorak/ kepala/ tulang rahang/ gigi/ taring/ kulit/ sisik/ duri/ gelembung renang/ kerangka/ tubuh/ bagian tubuh/ turunan) dengan jumlah maksimal 2 ekor. Pada tahun 2024, sebanyak 450 SAJI DN Barang Sarasah telah diterbitkan. Jumlah SAJI DN Barang Sarasah paling banyak terdapat pada bulan Januari – Maret dengan jumlah lebih dari 100 surat setiap bulannya. Namun, jumlah penerbitan menurun tajam pada bulan berikutnya hingga kurang dari 30 surat tiap bulannya, hal tersebut karena ketersediaan persediaan berupa (hasil olahan) yang mencapai pemasangannya SAJI DN barang sarasah.

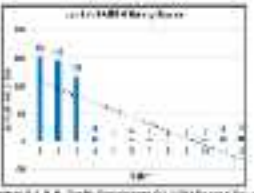

Gambar 5.1 9-6: Grafik Pungutan SAJI/LH Barang Kayak

➢ Verifikasi Lapangan Surat Angkut Ikan Hias (SAJI) Luar Negeri (LN)

Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk lalu lintas ikan hias yang terfasilasi dalam jenis ikan yang dilindungi sehatsu appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil entri dari Verifikasi Lapangan berupa skema skema Rekomendasi sebagai dalam untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KSDP. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman satiksda.id. Selama tahun 2024 terdapat 915 Verifikasi SAJI LN untuk jenis Arwana Kalimantan telah diselesaikan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 288 surat, negara dengan tujuan ekspor terbanyak didominasi oleh yaitu, China dengan 317 surat, kemudian Vietnam dengan 162 surat dan Taiwan dengan 83 surat. Negara dengan tujuan ekspor yang sedikit yaitu Kanada sebanyak 6 surat.

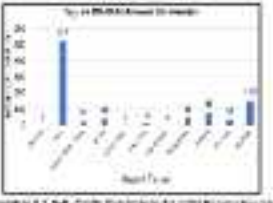

Gambar 5.1 9-6: Grafik Pungutan SAJI/LH Barang Kayak

➢ Pemanfaatan Penerbitan Microchip Ikan Arwana

Pemanfaatan Penerbitan Microchip Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah menerbit SAJI-LN terlebih. Tujuan dari pemanfaatan ini untuk memastikan semua jenis ukuran dan nomor chip Ikan Arwana yang diterima telah sesuai dengan SAJI-LN yang sudah terbit. Pemanfaatan dilakukan dengan cocokmasi pemasangan chip ikan dan penerbitan (scan) pada ikan Arwana terjenjang tahun 0304 telah dilakukan 487 pemanfaatan penerbitan.

Gambar 2.1.8-10 Pemeriksaan Arwana

➢ Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan Kelengkapan dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang akan dikeringkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan jenis ikan, ukuran dan nomor chip ikan yang dikeringkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan untuk 2.708 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan sebanyak 848.400.

Gambar 2.1.8-11 Pemeriksaan kelengkapan

➢ Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen sering disebut dengan Pemanenan. Dalam SLI, penerbitan sertifikat hasil pemanenan diperlukan sebagai perlindungan bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakan dan bukan berasal dari tangkapan alam. Pada tahun 2024, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 250 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Lokasi verifikasi hasil pemanenan paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan barat untuk 165.327 ekor ikan arwana. Sementara lokasi verifikasi hasil panen paling sedikit dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 214 ekor.

Tabel 2.1.8-3. Jumlah SAP Panen Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah SAP	Jumlah Ikan (Ekor)	Jumlah Pelaku Usaha
1	Kalimantan Barat	601	165.827	43
2	Kalimantan Selatan	3	725	1
3	Kalimantan Timur	2	214	1

Sedangkan tahun 2024 telah diterbitkan sertifikat untuk Arivana Kalimantan sebanyak 87.658 sertifikat. Penerbitan sertifikat paling banyak diterbitkan pada bulan Januari sebanyak 10.676 sertifikat. Sementara penerbitan paling sedikit berada di bulan Agustus sebanyak 3.414 sertifikat. Berdasarkan rincian triwulan arivana, Jenis cupar tor paling banyak diterbitkan sertifikatnya sebanyak 69.579 sertifikat, diikuti hanjar tor sebanyak 1.183 sertifikat, gnasi 316 sertifikat dan golden rod 12 sertifikat.

➢ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan PNBP yang bersasal dari Pelayanan Operasional semcal dengan tahun 2024 (kumulatif) sebesar Rp3.466.676.261. Trch penerimaan PNBP tertinggi pada tahun 2024 sebanding dengan realisasi tiap bulannya. Realisasi efektifitas penerimaan PNBP Operasional Pertahun sebesar Rp3.00.555.270 tiap bulannya. Nilai PNBP tertinggi pada tahun 2024 diraperkan pada bulan Mei sebesar Rp371.110.143, sementara terendah diraperkan pada bulan November sebesar Rp116.371.748.

Gambar 2.1.3-12 Grafik Penerimaan PNBP

b. Survei Pemanfaatan Arivana di Kalimantan Barat

Kegiatan Survei Pemanfaatan Arivana bertujuan untuk mengetahui sebarah dan jeri pemanfaatan arivana, mengetahui data potensi produksi hasil pengembangannya, mengetahui alur pemasaran arivana dan mengetahui laju pertumbuhan arivana di Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan selama kurun waktu Juli – November 2024. Lokasi kegiatan survei pemanfaatan arivana dilakukan di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak. Teknik pengambilan data dilakukan metode wawancara dengan purposive sampling atau berdasarkan pertimbangan tertentu/ahli tertentu. Selain itu, dilakukan pengumpulan data spasial pengambilan titik koordinat dan foto udara menggunakan drone pada farm arivana di lokasi survei. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif data hasil wawancara, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) dan analisis laju pertumbuhan spasial.

Gambar 2.1.9-10. Survei Pemanfaatan Arwana

Dari hasil pengumpulan data di lapangan, terdapat 668 responden yang memiliki dan tidak pelaku usaha dengan hanya 8% yang telah memiliki izin. Sebanyak 17% pelaku usaha melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain yang telah memiliki izin dan 74% asalnya tidak memiliki izin. Tingginya pelaku usaha yang tidak memiliki izin disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingginya permintaan pasar dan kurangnya pengawasan pemerintah. Sebanyak lokasi budidaya disampaikan oleh responden lebih infrastruktur dan kemudahan akses pasar. Alur distribusi arwana di Kalimantan Barat memperlihatkan kompleksitas rantai pasok yang melibatkan beragam aktor dan lokasi. Daerah hulu menjadi pusat utama produksi benih yang kemudian dipasok ke kota. Kota Hulu dan kota menjadi sebagai pusat pengepasan dan pembentukan lalu sebelum dikirim ke pasar domestik maupun internasional.

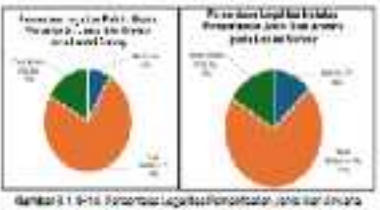

Gambar 2.1.9-11. Komoditas Logistik Perdagangan Jenis dan Arwana

Pada survei pemanfaatan arwana tahun 2024 yang melibatkan 16 pelaku usaha di Kapuas Hulu, Kubu Raya, Mempawah, Sekadau, dan Sintang, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) menunjukkan nilai sampel antara 104 hingga 12.312 ekor, dengan PS. Dari Angka tersebut PPHP tertinggi sebesar 12.312 ekor, sedangkan terendah perusahaan tertinggi dari Sudono dengan 2.117 ekor. Beberapa perusahaan seperti PT. Jaya Arwana Indonesia, CV. Lucky Inco Aquatic, PT. Nov Borneo Arwana, dan PS. Dari Angka total mencapai PPHP berdasarkan data PPHP 2020, dengan nilai masing-masing 8.804, 7.884, 3.000, dan 4.099 ekor. Dibandingkan dengan hasil survei tahun 2024, terjadi peningkatan produksi di tiga perusahaan, yaitu PT. Jaya Arwana Indonesia dari 8.804 menjadi 11.007 ekor (+2.203), CV. Lucky Inco Aquatic dari 7.884 menjadi 8.166 ekor (+601), dan PS. Dari Angka dari 4.099 menjadi 12.312 ekor (+8.213). sebaliknya PT. Nov Borneo Arwana mengalami penurunan dari 3.000 menjadi 2.722 ekor (-1.100).

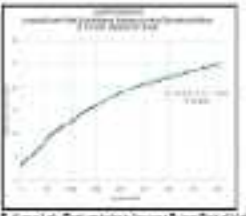

Gambar 3.1.9-13. Kurva Laju Pertumbuhan Arwana Super Red di Kalimantan Barat

Hasil wawancara dengan pelaku usaha arwana di Kalimantan Barat menunjukkan laju pertumbuhan ukuran arwana Super Red pada beragam kisaran ukuran: 1–11 cm sebesar 1,119 mm/hari, 12–20 cm sebesar 1,000 mm/hari, 21–30 cm sebesar 0,762 mm/hari, 31–40 cm sebesar 0,667 mm/hari, dan 41–50 cm sebesar 0,200 mm/hari. Kurva pertumbuhan arwana Super Red yang dikembangkan digambarkan menggunakan model polinomial dengan persamaan $y = 6 \times 10^{-14}x^3 - 7.0133$ dan nilai matriks determinasi (R^2) sebesar 0,9965. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat akurasi yang semakin tinggi dalam menaksirkan pola pertumbuhan ikan arwana berdasarkan data yang diamati.

c. Survei Pemanfaatan Terbang di Kalimantan Timur

Kegiatan survei pemanfaatan terbang bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis terbang dan potensi ekonomi dari yang dimanfaatkan terbang di Kabupaten Berau. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 19 Oktober 2024 di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan purposive sampling atau kombinasi pertimbangan karakteristik tertentu dan hasil wawancara terhadap 16-17 jenis terbang yang umum diburu dan ditawarkan. Jenis terbang yang dominan dipercayai dan yaitu jenis terbang gamat batu/gamat buku (*S. monotuberculata* dan *S. hammani*). Jenis ini juga memiliki harga yang paling tinggi dipasarkan dengan terbang kering, berkisar antara Rp10.000 – Rp50.000 per kg dalam kondisi basah dan Rp80.000 – Rp1.000.000 per kg setelah proses dikeringkan.

Gambar 3.1.9-14. Kurva Hubungan Terbang

b. Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Tanaman

Kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Tanaman dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPDTL Pontianak secara daring dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai pemenuhan kepastian pegawai BPDTL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan verifikasi SAU maupun Rekomendasi. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai etika pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Diklat Aparatur (BDA) KKP Samarinda. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan tindakan dan kepribadian untuk mempersiapkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Gambar 3.1.9-13. Bimbingan Teknis Identifikasi Tanaman

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai botani identifikasi pemanfaatan dan status perlindungan tanaman dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Disampaikan bahwa tanaman merupakan salah satu famili dari tanah laut, yaitu famili Hydrocharitaceae. Nama penemuan jenis tanaman, salah satu bagian tubuh yang dapat diidentifikasi adalah yaitu simbol-simbolnya dalam yang berbentuk di dalam tanaman. Tanaman umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk mempertahankan stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis tanaman yang masuk ke dalam Appendiks CITES, yaitu Hydrilla Hydrophyt, Hydrilla, Hydrilla, Hydrilla Verticillata. Thalassia ekanes. Thalassia sp. dan Thalassia hydrallarata. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi tanaman dan praktek sebagai evaluasi kegiatan.

c. Sosialisasi/Penyebaran Info Peri Appendiks

Kegiatan penyebaran data hiu dan peri appendiks di wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Kelautan dan Iklan Januari – Desember 2024. Kegiatan penyebaran ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Bunggur Kalimantan Timur. Hasil dari penyebaran info hiu dan ikan appendiks dari hasil tiap lokasi

> Ikan tertuna info dan appendiks di PPN Pemangkat

Berdasarkan hasil enumerasi info dan Ikan Appendiks di PPN Pemangkat pada periode Januari – Desember, didapatkan total 1.704 ekor hiu dengan hiu yang termasuk appendiks sebanyak 72,68%. Jenis hiu appendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 1.182 ekor. Sementara itu, sebanyak total 227 ekor dari diidentifikasi sepanjang tahun 2024 dengan dari appendiks yang diidentifikasi sebanyak 42% ekor. Jenis pari appendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Mobulidae sebanyak 166 Ekor. Jenis hiu

yang paling sedikit ditemukan yaitu dari family Scrombidae sebanyak 149 ekor dan jenis ikan yang paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Hemiscylliidae sebanyak 1 ekor.

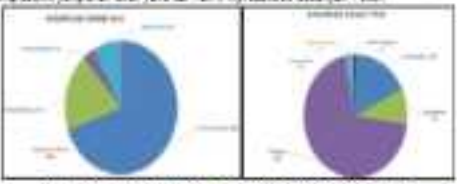

Gambar 3.1.9-13. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Aperolika di PPN Pemangkat

Gambar 3.1.9-13. Dokumentasi pengukuran

- Pendataan Hiu Pari Aperolika di TPI Sungai Kakap

Pendataan hasil tangkapan Hiu dan Pari aperolika di TPI Sungai Kakap pada periode Januari – Desember, ditepatkan total 877 ekor hiu dengan Hiu yang tertangkap aperolika sebanyak 354 ekor. Jenis hiu aperolika tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 316 ekor. Sementara itu, sebanyak total 84 (dua) ekor pari didaratkan sepanjang tahun 2024 dengan pari aperolika yang didaratkan sebanyak 16 (dua) ekor. Jenis pari aperolika tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 14 (tujuh belas) Ekor. Jenis hiu yang paling sedikit ditemukan yaitu dari family Scrombidae sebanyak 27 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Urolophidae sebanyak 4 ekor.

Gambar 3.1.9-50. Grafik Hasil Pendataan Hiu dan Aperolika di TPI Sungai Kakap

➢ Hal terkait Hiu dan Pari Apendiks II (Pi Hiu/Jar)

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks II PT. Mangrove pada periode Januari – Desember didapatkan total 2.775 ekor Hiu dengan Hiu yang tertangkan apendiks sebanyak 2.677 ekor. Jenis Hiu apendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 2.127 ekor. Kemudian Hiu sebanyak total 465 ekor dari Sphyrnidae sebanyak Tahun 2024 dengan dari apendiks yang didaratkan sebanyak 21 ekor. Jenis dari apendiks tertangkap yang ditemukan yaitu dari famili Rhynchobatidae sebanyak 72 Ekor. Jenis Hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari famili Hemiscyllidae sebanyak 4 ekor dari jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 3 ekor.

Gambar 3.1.9-51. Diagra Komposisi Hiu dan Pari Apendiks PT. Mangrove

Gambar 3.1.9-52. Dokumentasi Pengukuran

4. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi apendiks CITES dan kode alfa apodos diantaranya:

➢ Rapat/rakor tinjau pelayanan jenis ikan

Rapat/rakor tinjau pelayanan jenis ikan dilaksakan secara rutin setiap bulan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dan tata kelola pemberdayaan jenis ikan dilindungi apendiks CITES dan kode alfa apodos.

➢ Pemantauan dan Pendataan Bonik Proses Ekspor Jenis Ikan Apendiks CITES Hasil Perpanjangan/pelaksan

Kegiatan tersebut dilaksakan pada tanggal 3s/d/sampai dengan melaksakan koordinasi Bidang Konservasi dan Invasifasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Ekspor Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan pengendalian hasil dan kuota ex ANP untuk beberapa jenis dapat berjalan secara lancar pasca perpanjangan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memberi

informasi kendala yang dihadapi untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan tata kelola mengenai informasi dari pelaku usaha dan tindakan ke depannya.

Gambar 2.1.3-33. Pemantauan dan Pemrosesan Kisaran Proses Biaya Jarak Hari Kapandibu OITR3 Hasil Pengembangkan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya anggaran dari Kegiatan Rincian Output [3262.R55.010] Keamanankegaman Hasil Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3-3. Realisasi IKU 11 Tahun 2024

No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3262.R55.010.001] Penyusunan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas di OITR3	Rp124.082.000	Rp118.492.835 (95,24%)	-
2.	[3262.R55.010.002] Pelayanan Pengelolaan Perikanan Jenis Ikan dilindungi dan Kepandibu OITR3	Rp1.073.648.000	Rp1.072.370.132 (99,07%)	-
TOTAL		Rp1.262.730.000	Rp1.241.840.060 (98,48%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (anomalisasi dari Januari 2024) yaitu Rp1.241.362.060 atau 98,87% dari pagu anggaran sebesar Rp1.257.730.000. Realisasi anggaran dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Barang dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Pengarusutamaan Gender

Kebijakan gender aspek strategi dengan mengarahkan kebijakan untuk lahirnya dan penempatan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada RS ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan gender yang terlihat dalam pelayanan operasional serta Non Structural. Hal ini dilakukan melalui kesetaraan gender pada tim pelayanan BPSRL Pondaknek sesuai dengan Surat Tugas tim pelayanan nomor 8.2760/BPSRL.3/KP.xxii/xii/2024 tanggal 6 agustus 2024.

10.Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL tentang dengan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Kode RS juga melaksanakan pelayanan operasional pelatihan (Hemiplegi SIRS, SAK dan Keperawatan) pada bulan Mei-Juli 2025.

3.1.10. Capaian Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut dalam energi adalah pemanfaatan air laut dalam energi yang mengkajikan produk/teknologi terbaruk yang berasal dari laut dalam dengan suhu lebih besar dari 20 (dua puluh) derajat celcius pada kedalaman kondisional serta dibutuhkan untuk kepentingan termasuk listrik laut yang mana fluktuasi suhu laut semula mencapai minimal 20 (dua puluh) derajat celcius. Identifikasi pemanfaatan air laut dalam energi adalah kegiatan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk komoditas yang akan dikaji/dinilai proses pemanfaatnya. Verifikasi pemanfaatan air laut dalam energi adalah pemeriksaan untuk memastikan data kebenaran dokumen dan atau pengkajian pemanfaatan air laut dalam energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat pemindahan di Dibk. Kasha pemfilogan apabila IKU ini dilakukan dengan mengkesentralisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi pemanfaatan air laut dalam energi. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan tidak terdapat IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan IKU ini dilaksanakan untuk mengakomodir anggaran identifikasi pemanfaatan air laut dalam energi (ALME) yang dilaksanakan ke UPT

Tabel 3.1.10-1 Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak

IKU 12	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Indeks Kinerja Jangka Menengah		Periode Jangka Menengah	
	Target 2024	Perubahan	Target PK 2024	Realisasi 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	1	-	1	1	100	1	100	4	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPVKL Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen berupa Laporan Sosialisasi Pemilihan Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi sehingga persen realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Kepala Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XI/2024 tanggal 20 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang terdapat dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi pemanfaatan pengelolaan perairan. Terdapat perbedaan adalah antara target yang terhitung dalam Renstra

(LKIP), dengan target kinerja tahun 2024 sehingga apabila tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan target jangka menengah. Namun, perkembangan IKU ini masih senantiasa dalam pantauan target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrik Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matrik Kinerja & Pendanaan (PSFL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebesar 1 (satu) kontrak pada tahun 2020. Capaian tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen telah terkontribusi sebesar 100% dibandingkan dengan target dalam Matrik Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Kelemahan/Kegagalan dan Pembelajaran Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi pentahan Bersama Bidang Jasa Kelautan, telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh kolaborasi pentahan dalam mengajukan pemanfaatan perairan air laut selain energi. Telah dilakukan sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dengan pentahan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan pada pelaksanaan IKU ini yaitu penggunaan zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi Rancangan Pemanfaatan ALSE. Hal ini membantu, menjadikan peserta lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini yaitu:

a. Sosialisasi Pentahan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Kegiatan Sosialisasi Pentahan Bersama Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 di Hotel Nomat Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 orang yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan stakeholder terkait. Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pentahan Berusaha Berbasis Risiko sedang diterbitkan termasuk pentahan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan pentahan lainnya. Contoh pentahan berusaha di bidang jasa kelautan antara lain ijin pemanfaatan pasir laut, ijin pelaksanaan reklamasi, ijin pemanfaatan air laut dan lainnya. Pemanfaatan ALSE dibagi menjadi dua KBLI: 36001 (penampungan, pengolahan dan penyaluran air minum) dan 36001 (penampungan dan penyaluran air laut). Kewajiban dan penyelesaian khusus menjadi pada menjadi pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Pentahan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.1.18-1. Sosialisasi Pemilihan Konsorsia Jasa Kalibrasi

b. Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Dalam Energi (ALDE)

Identifikasi pemanfaatan Air Laut Dalam Energi (ALDE) dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kegiatan identifikasi di Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 September 2024 pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Pln Indonesia Power UBP Singkawang, PT GCL Ngo Tanjung yang berlokasi di Kota Mempawah dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Kayong Utara. Sebelum kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan memaparkan jenis-jenis pemanfaatan ALDE, KBLI yang digunakan, dasar hukum, gambaran umum pemanfaatan ALDE, perhitungan keuntungan dan tarif PNBP.

Gambar 2.1.18-2. Identifikasi Pemanfaatan ALDE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat berupa banyak kuisioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya tujuan pemanfaatan ALDE, kapasitas pemanfaatan ALDE, metode dan teknologi yang digunakan, sistem yang digunakan, waktu operasi dan monitoring dan tenaga kerja yang digunakan. Dari hasil wawancara ke pada ketiga perusahaan tersebut didapatkan informasi bahwa tujuan dari pemanfaatan ALDE yaitu untuk sistem back pemboosan uap, metode dominasinya air pendingin kompressor dan sistem back untuk kebutuhan domestik. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALDE ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan profil pemanfaatan ALDE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.18-3. Identifikasi Pemanfaatan ALDE di Kalimantan Barat

Kegiatan Inspeksi Pemanfaatan ALSB di Kawasan Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Inspeksi ini dilakukan pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Tarus Balikpapan dan PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan. Pemanfaatan air laut sebagai energi yang dilakukan PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Tarus Balikpapan digunakan sebagai sistem pendingin kondensor (cooling water), sistem proteksi dan kebutuhan domestik (service water). Sedangkan Pemanfaatan air laut sebagai energi yang dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan yaitu air laut sebagai bahan baku pembuatan uap, metode desalinasi/distilasi dan sebagai air pendingin kondensor.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian KU ini didukung dengan realisasi anggaran dari kegiatan Rincian Output (2565.PBW.002) Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tahun 2.1.10-3. Capaian KU 1) Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2565.PBW.002.002] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp99.981.632 (99,98%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.981.632 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KU ini pada Tahun 2024 dilaksanakan dari Januari 2024) yaitu Rp99.981.632 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

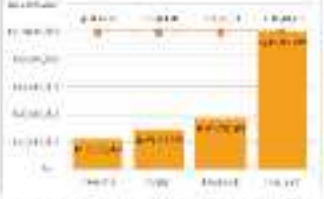

Gambar 2.1.10-4 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

C. Pengembangan/Inovasi Capaian

Keberhasilan capaian dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara kinerja dan perencanaan dalam mengevaluasi dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan KU ini masih dipantau oleh stakeholder, namun terdapat beberapa permasalahan terkait hak hasil dalam sosialisasi. Inovasi dari bhan bakas usaha yang dibuat/fikasi.

D. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

3.1.11. Luasnya Kegiatan Yi Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 12. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (GCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi pada satuan wilayah kabupaten/kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas nasional kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengajak kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan pengelolaan sampah plastik untuk kemudian sudah disetop oleh masyarakat. Tentu pembinaan dapat dilakukan dengan mengkreatifasikan dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil seperti kegiatan Bulan Cinta Laut (GCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1 Capaian IKU 12 BPSPL Pontianak

Sasaran Strategis (SS) 1	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak							
Key Performance Indicator (KPI) 1	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)							
Nama IKU (12)	Tahun 2024				Indikator Kinerja Lainnya Pencemaran		Pencemaran Lainnya Ditanggulangi	
	Target Awal 2024	Penyesuaian	Target TW I 2024	% Capaian thd Target TW I	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
	4	-	4	100	4	100	3	80

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIAKIN, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Kotua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat #PKH, Kontrak Kinerja Nomor 3648/PKH, SITU Nomor 0333/a tanggal 31 Desember 2024. Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut telah dilaksanakan di 4 lokasi wilayah kerja BPSPL Pontianak yaitu Kota Singkawang, Kab. Tanah Laut, Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak. Pencapaian capaian terhadap target IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Jangka menengah yaitu sebanyak 2 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPKPL sebesar 50%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU ini telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan DPKPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 4 Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Capaian selama tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Penyimpangan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Misalnya dengan, dokumentasi progres kegiatan yang dilaksanakan sangat mendukung pada kegiatan dilaksanakan tahun depan pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dapat memperbaiki rencana/strategi pelaksanaan kegiatan. Dan karena itu dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor aksesibilitas lokasi yang mudah dijangkau juga mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan juga optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja pemantauan termasuk untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Bamal BKL**

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti Cinta Laut dilaksanakan di tiga lokasi Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tambak Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bawah Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. Di Desa Tambak sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2019, namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di lokasi lokasi tersebut. Sampah yang dihasilkan di lokasi lokasi tersebut didominasi oleh sampah sayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di wilayah Desa Tambak, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi kualitasnya.

Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Tabon Bogam dan Desa Kereya Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 13 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah saat, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Tabon Bogam yang sudah memiliki mitra pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampai di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Kereya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi SCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Sungkun Besar Desa Kuala Dak Desa Nanga Kompelawang pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah saat, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan titik penjatuhan sekitar 2 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pendaratan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengambilan sampah laut dan pemanfaatan disekitar hingga pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model ekonomi sirkular lainnya dan sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Kelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Setelah Nasional Bulan Cinta Laut (Bencinta) di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan kelayan setempat. Terdapat 66 kelayan dan KLE yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkontribusi untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan universitas setempat. Beberapa kami sampaikan pengaruh sampah juga dampak diidentifikasi sebagai mitra efektif potensial. Indikator penilaian lainnya seperti harga ikan tersedia dan mudah melapat serta mudah pelanik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensial lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gemas BCL.

Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Kakap Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang kerin kampan yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data nelayan di Kota

Singkarak) terbagi sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil terdata kelompok nelayan di Sebapoh Besar dan Kuala sebanyak 2 (dambaan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Pronto Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan OPD Kota Balikpapan pada intinya mendukung pelaksanaan kegiatan Gemas BOL Tahun 2024 dan merupakan agar kegiatan Gemas ini dapa dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk mengajak kuli agar tetap berhati melalui Gemas BOL.

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan koordinasi dan rumusan kelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan meliputi 40 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jungkat sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.11-3. Jumlah nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah Orang
Desa Jungkat Besar	KUB Selah Sopor	10
	KUB Kerap Manah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Motor Jaya	10
	KUB Lumbung	10
	KUB Berkembang Laut I	10
	KUB Berkembang Laut II	10
	KUB Berkembang Laut III	10
	KUB Berkembang Laut IV	10

➢ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pendampingan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksikan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 23 Mei dan 28 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya pemilahan sampah dan pengolahan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh SPGPL Pontianak.

Gambar 2.1.11-6 Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

➢ Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembersihan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 20.467,2 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 99% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 91%. Sampah yang bernilai ekonomi dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.965.000. Klub Belambang Laut I menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 6.070,3 kg.

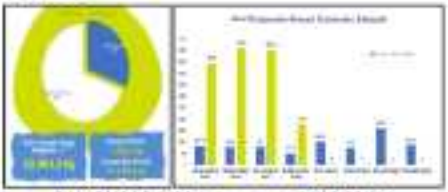

Gambar 3.1.11-6. Grafik Sebaran Jenis dan Jumlah Sampah Kab. Kota Kayu

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 20 April 2024 dengan Sosialisasi dan edukasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di tiga kecamatan (Kec. Selakau Besar sebanyak 28 orang, Kec. Hanam sebanyak 22 orang dan Kec Kiara sebanyak 30 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pembersihan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-3. Jumlah nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kec. Selakau Besar	KUB Surya Pantama	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mufara	11
Kec. Hanam	KUB Hanam Jaya Abadi	22
Kec. Kiara	KUB Nelayan Bahri	10
	KUB Bahakoto	10

➢ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 18 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh DKPP, Pemkanak.

Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 dikejelikan sebanyak 11.993,55 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 67% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.624.000. Kuli Nelayan Kawal melayani kebutuhan nelayan dengan pengambilan sampah paling banyak sebesar 3.237 kg.

Gambar 3.1.11-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

a. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di dua Desa Desa Sungai Bakau sebanyak 24 orang dan Desa Banyuh Layung sebanyak 6 orang. Kegiatan ini juga didukung oleh mitra kerja Sampah Hijau Bermas Berkemajuan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pemmbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan hari dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	Kuli Bina Bersama	30
	Kuli Bintang Laut	10
	Kuli Kuda Laut	10
	Kuli Cinta Lestari	24
Desa Banyuh Layung	Kuli Bina Harapan Bersama	6

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 17 (hari) 21 Hari dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan KLL dan BPSRL Pontianak.

Gambar 3.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 diinputkan sebanyak 6.969,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 3.359 kg sampah berupa residu dengan nilai ekonomi penjualan sampah sebesar Rp4.196.900.

Gambar 3.1.11-10. Dokumentasi pengumpulan dan pemilahan sampah di Tanah Laut

f. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Kearifan Kegiatan ini melibatkan 60 orang kearifan tradisional dan 4 kelompok kearifan di satu Kawasan (Kel. Kariangau sebanyak 60 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pemilahan dan Pengangkutan yang dilaksanakan hari dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-5. Jumlah kearifan yang Terlibat dalam kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kawasan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Kariangau	KLB Mirasad	20
	KLB Sinar Bahari	12
	KLB Sinar Laut Sehaya	10
	KLB Laa Bahakan Pelet	12
	KLB Anapreh Sinergi	12

f. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan ialah upaya pengurangan sampah, strategi usaha pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BSL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Evaluasi dan Pemetaan Aksi Cinta Laut di Kabupaten Kota Raja

Kegiatan evaluasi dan pemetaan aksi cinta laut di Kabupaten Kota Raja dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jaraja Besar sebanyak 30 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 40 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kota Raja selama 9 (Sembilan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,15 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sejumlah Rp.6.643.000.

Gambar 3.1.11-12. Evaluasi dan Pemetaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kota Raja

h. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Pemetaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga kecamatan (Kec. Selakau Besar sebanyak 25 orang, Kec. Hanam sebanyak 15 orang dan Kec Kasia sebanyak 20 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,6 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 4,37 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.929.000.

Gambar 3.1.11-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

i. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dan 5 kelompok nelayan di desa Desa (Desa Sungai Kakau sebanyak 7x orang dan Desa Kenoh sayang sebanyak x orang). Kegiatan ini juga didukung oleh Ketua Kami Kampak Kota Baharu Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4.0 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomi sebesar Rp4.196.000.

Gambar 3.1.11-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

j. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dan 5 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 50 orang). Kegiatan ini juga bermitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 20,04 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.141.200.

Gambar 3.1.11-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

b. Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 10 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menghitung jenis dan menimbang total jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singkawang Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1.240 kg di Pantai Singkawang Island Park, 7.807 kg di Pantai Kuala Singkawang, dan 0.970 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, kertas, kain/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Gambar 2.1.11-16. monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

I. Daerah Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 September 2024 dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dan Bakorsi PSDKP mengajak seluruh kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Dispernakot Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1.4 ton yang terdiri dari sampah plastik atau kemasan makanan bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng obat nyamuk dan lain sebagainya.

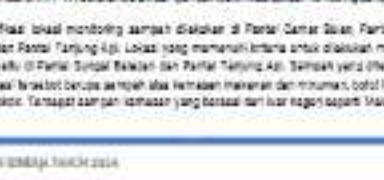

Gambar 2.1.11-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Kpi. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah atau kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Tersapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

3. Realisasi Anggaran

Realisasi atas RO ini didukung dengan alokasi anggaran dari kegiatan Rincian Output (4046.000.001) Fasilitasi Pemilihan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.11-4 Realisasi anggaran RO 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	(4046.000.001.051) Alat Perlengkapan kantor Kompos Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp 799.782.256 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RO III pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp799.782.256 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran tersebutkan rinci dan disajikan pada grafik berikut ini:

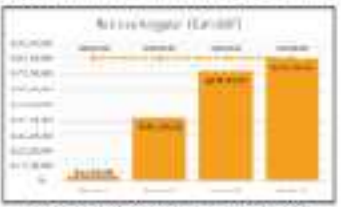

Realisasi 3.1.11-18. Realisasi Anggaran RO 3 Tahun 2024

4. Pengelolaan Gender

- Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada RO III ditandai dengan empat parameter akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada kesekolahan kegiatan gemas BDL masih didominasi oleh laki-laki, namun sebagian besar kelompok perempuan sebesar 14% dalam Gemas BDL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gemas BDL berupa keterlibatan dalam kepanitian kegiatan, pemberian materi dan evaluasi kegiatan.

Berikut 5.1.11-19. Penjelasan dan Hasil Survei Pada Pelaksanaan Gemas BCL

Pada pelaksanaan Gemas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Secara umum, pertanyaan dan pernyataan didominasi oleh peserta laki-laki. Rata-rata penyampaian aspirasi ini berasal sebanyak 335 nelayan yang menjadi peserta Gemas BCL semuanya laki-laki. Pertanyaan yang mengajukan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Gemas BCL ini yaitu peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pesisir baik lokasi maupun perairannya.

5.6 Rencana Aksi Tahun 2025

Kegiatan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait dengan keberlanjutan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2024.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan Kementerian Negara/Lembaga atau kesesuaian antara penerapan dengan pelaksanaan anggaran, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 12%
b. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 12%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 15%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 13%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 4%
h. Capaian Output – Bobot Penilaian 23%

Kategori Capaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) meliputi 4 (empat) antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 83 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ Nilai IKPA < 80 atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengacupada dari Aplikasi dashing Old-SPAN Kementerian Keuangan pada laman https://spanlitekomponen.djpb.kemenkeu.go.id/spanlite/dashboard/

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKU 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPSPL Pontianak
IKU-14	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Realisasi 2023	Tahun 2024				Capaian Kinerja 3 Tahun (2022-2024)			
	Target 2024	Realisasi	Target (%) 2024	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
93,83	93,00	+1,00	93,73	101,0	93	100,0	93	100,0

Sumber data: aplikasi, Arsip dan SAKIP, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini tahun 2024 dilakukan secara semesteran. Berdasarkan hasil pemantauan nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terakhir pada situs OMSPAN progres nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 94,00 dengan kategori baik. Capaian IKU nilai IKPA disampaikan melalui Kota Emas dapat Biro Keuangan dan Barang KSP nomor

19/PB.3.3/PK-KT/01/2025. Selanjutnya untuk capaian pada pada tahun 2024 telah melebihi target tahunan sebesar 93,76 atau telah capai sebesar 107,3%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai IKPA pada tahun 2023 sebesar 93,55. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,98 atau meningkat sebesar 2,09%. Peningkatan nilai tersebut dikarenakan terdapat peningkatan pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan nilai target dan capaian nilai IKPA selama 5 tahun terakhir, nilai IKPA tahun 2024 berada pada nilai tertgah (median). Nilai IKPA tertinggi didapatkan pada tahun 2021 sebesar 96,26 sementara nilai IKPA terendah didapatkan pada tahun 2019 sebesar 74,63. Tren target dan capaian nilai IKPA selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

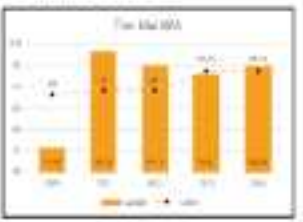

Gambar 3.3.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2022 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 99 pada tahun 2024. Progres capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 105,55% (94,99 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu Nilai IKPA sebesar 93 untuk tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024 sebesar 100,93% (94,06 dari 93). Capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut (tunjang) dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketaatan dan kelengkapan serta dalam unsur pelaksanaan anggaran. Sehingga dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengantisipasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

Gambar 3.1.10-5. Tren Nilai RPK Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi SMART)

Selain itu, berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPMA, Pemberian rekomendasi untuk melakukan penyesuaian RPK secara rutin setiap bulan hingga akhir Tahun. Berdasarkan hasil pemantauan, Tren bulanan nilai RPK pada tahun 2024 mengalami penurunan tajam pada bulan Maret ke bulan April. Namun, nilai RPK mengalami peningkatan secara perlahan dari bulan Mei hingga mencapai target pada bulan Desember. Nilai RPK tertinggi diraih pada bulan Mei dengan nilai 98,48 sementara nilai RPK terendah didapatkan pada bulan Mei dengan nilai 90,29.

b. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyesuaian Revisi DIPA secara cepat. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan e-mail dan whatsapp group untuk memberitahu staf pengelola keuangan dalam memberikan pemahaman pelaporan keuangan, mengoptimalkan meeting dan memodifikasi permasalahan.

7. Kegiatan Penting yang

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan perbaharui kerjasama lain, yaitu :

a. Revisi DIPA
- 1 (satu) kali pada 30 Januari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 13 Februari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kemen)
- 1 (satu) kali pada 12 Maret 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 22 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Halaman III DIPA)
- 1 (satu) kali pada 29 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 3 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kemen)
- 1 (satu) kali pada 11 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi DJA)
- 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 12 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kemen)
- 1 (satu) kali pada 6 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)

- 1 (satu) kali pada 20 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 8 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi Kelima)
- 1 (satu) kali pada 29 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi Keenam)
- 1 (satu) kali pada 14 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi DIPA)
- 1 (satu) kali pada 28 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi Ketujuh)
- 1 (satu) kali pada 06 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 17 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (Kesmbl)
- 1 (satu) kali pada 20 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (POK)
- 2 (Dua) kali pada 25 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (POK)
- 1 (satu) kali pada 26 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Sekian (POK dan Pemotongan BPA)

g. Konyerasian anggaran contoh sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.769.636.000 atau 98,59% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp16.999.628.000 (Sumber Data: SIMSPAN per 27 Desember 2024)

z. Data kontrak sebanyak 27 sepanjang tahun 2024 (bulan Januari – Desember):

- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Kemanusiaan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.26/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 8 Februari 2024
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Penyelam sebanyak 5 Unit Xtender selama 1 Tahun sesuai SP.27/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 8 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Nakoda/ABK sebanyak 1 Unit Pantarer selama 1 Tahun sesuai SP.28/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 8 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pengelolaan Bun sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pulosaribu sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Makassar Hilu sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.32/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.27/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Pendukung Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Komunikasi Pelayanan sebanyak 1 Unit sesuai SP.28/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.

- Belanja Kejahatan Perkantoran - Pengadaan Belanjam Pecahan BPSR, Pontianak TA 2024 sebanyak 95 Dok sesuai SPK.40/BPSRL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kabel dan Longgar sebanyak 2 Paket sesuai SPK.42/BPSRL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Lan700 sebanyak 2 Paket sesuai SP.43/BPSRL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kacl, Bravo2 dan Lomer sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSRL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Taksid sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.45/BPSRL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 03 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya - Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSRL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.46/BPSRL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Pasadi di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSRL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.48/BPSRL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 6 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Pemeliharaan dan Pengelolaan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.30/BPSRL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai SP.51/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Pemeliharaan Hrta Gedung dan Bangunan - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.52/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 53/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembalian Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 34/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Campaka Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSRL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 19 Juli 2024.

- Pengadaan Sarpras Virtual Multiplatform Hasil Belanja Headphone Mega dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 37/BPSRL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Virtual Multiplatform Hasil Belanja Headphone Mega dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 47/BPSRL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Pramubakti Kebersihan dan Pemeliharaan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 28/A/BPSRL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Pramubakti Kebersihan dan Pemeliharaan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 38/B/BPSRL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSRL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 49/BPSRL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Kebersihan sebanyak 4 Paket SP Nomor 02/BPSRL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSRL Pontianak berupa Display KKDR sebanyak 1 Unit SP Nomor 51/BPSRL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Kaca Monitoring Roach di Kawasan Hutanlain Wilayah Kerja TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 60/BPSRL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 17001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebanyak 1 Paket sesuai SP.29/BPSRL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Hutanlain wilayah kerja sebanyak 1 Paket sesuai SPK.51/BPSRL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Pembayaran honorarium Regional Non ASN periode Januari s.d. Desember 2024
- Pembayaran atas Belanja Sewa
- Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

c. Penyelesaian Tagihan setiap bulan

a. Penyelesaian UP sebanyak 2 kali dan TUP 2 kali

f. Pengisian Kepatuhan Wajib Outputi (SPK) periode Juli – September 2024

g. Kegiatan yang dilaksanakan secara Hibrid misalnya Hybrid/Blended undangan evaluasi dalam rangka pelaksanaan anggaran:

- Menghadiri kegiatan Finalisasi Penyelesaian Target dan Pagu Penggunaan PNBP TA 2024 pada 3 – 6 Januari 2024 di Horizont Hotel Ciloh Jakarta.
- Melaksukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPHPL Nomor S.007/DJPHPL.1/TU/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP lingkup Ditjen PHPL melalui Surat kepada BPSPL Pontianak Nomor S.190/BPSPL.2/KU.440/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 hal Penyelesaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP di BPSPL Pontianak.
- Menghadiri kegiatan Rapat Finalisasi Dokumen Penandatanganan Kinerja Tahun 2024 dan Monitoring DJPHPL 2024 pada 17 – 19 Januari 2024 sesuai dengan undangan dari Surat Sekretaris DJPHPL Nomor S.235/DJPHPL.1/TU.2/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Lingkup DJPHPL
- Menghadiri kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi pada 25 – 26 Januari 2024 di Horizont Bandung City Centre Bandung berdasarkan Surat Sekretaris DJPHPL Nomor S.668/DJPHPL.1/TU.2/1/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Dialog

Hidup Organisasi dan Pakar Koordinasi Capaian Target serta Pengawasan Pagu PNBP Tahun 2024 Ingkubo Ditjen PHKL.
- Menghadiri undangan pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut pada 15 Februari 2024.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kepulauan Riau A1 Nomor B-0777/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Penyampaian Informasi Batas Wakhu Pemrosesan RPD hal di DIPA Tahunan 1 Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.
- Menghadiri undangan Sekretaris DJPRL Nomor B-1256/DJPRL.1/TL.310/9/2024 hal Undangan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan DJPRL yang disertai KSP dan Sinkronisasi Kegiatan yang Termasuk Program Unggulan Kementerian Bisnis pada 28 Februari 2024 secara daring.
- Menghadiri pembahasan penggunaan PNBP BDA 2024 pada 28 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPRL Nomor B-132a.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B-1418/DJPRL.1/KK.410.1/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Pemanfaatan dan Kapasitas Lingkup Ditjen PHKL.
- Menghadiri pembahasan Rencana Kerja Pemanfaatan Biaya (RKPP) dan Penyusunan Penelitian PNBP Lainnya secara daring pada 7-8 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B-1481/DJPRL.1/TL.310/3/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Undangan Kerja Rapat Koordinasi Kerja Dalam DJPRL.
- Melaksakan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-1104/BPSPL.3/PL.700/3/2024 tanggal 18 April 2024 hal Permohonan Hibah Aset Tanah untuk UPT Balai Pengelolaan Kawasan Laut Kayu Raden dan Laut (BPKRL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut kepada Bupati Kotal Kehamigara.
- Melaksakan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-1138/BPSPL.3/PL.760/4/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Konsep Proposal Profil Organisasi dan Site Plan Permohonan Hibah Tanah BPSPL Pontianak Wilayah Kerja Pengelolaan Sub kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Pengadaan PNBP BDA kelautan pada 20 s.d. 22 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B-2710/DJPRL.1/TU.330/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.
- Melaksakan tindak lanjut atas Konsultasi TOR dan RAB Pengunduh PNBP BDA Kelautan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-1508/BPSPL.3/KU.440.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Penyampaian Usulan dan Data Sulung Pengunduh PNBP BDA 2024. Selanjutnya rekapitulasi disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B-3270/DJPRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Hasil Rapat Penyusunan TOR dan RAB Pengunduh PNBP BDA Kelautan.
- Menyampaikan Permohonan Usulan Tunda Usulan Revisi anggaran di BPSPL Pontianak TA 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-1808/BPSPL.3/HM.020.1/6/2024 tanggal 20 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PHKL.
- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PHKL dengan LAPRAK Periode Semester I TA 2024 pada 10 s.d. 12 Juli 2024 di Yogyakarta.

- Menghadiri kegiatan Pembahasan dan Evaluasi Realisasi PHBP DJPKPL s.d 31 Agustus 2024 pada 12 September 2024 pada laman https://bit.ly/Lap_Realisasi_PHBP_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKPL nomor B-xxxx/S.PKPL.1/TU.220/12/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan Progres PHBP DJPKPL s.d 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor B-2248/DJPKPL.1/TU.220/09/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Pendahuluan Sekwil Lingkup Ditjen PKPL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plt. Sekretaris Ditjen PKPL Nomor B-2575/S.PKPL.1/TU.220/12/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PHBP tahun 2024 Tahun 2025-2027 pada 10 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL nomor B-2412/S.PKPL.1/TU.220/09/2024 tanggal 11 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Revisi Penggunaan PHBP tahun 2024 TA. 2025-2027 pada 20 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL nomor B-2736/S.PKPL.1/TU.220/09/2024 tanggal 27 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembinaan Evaluasi Pengelenggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2024 Sekwil Lingkup Ditjen PKPL pada 03 September - 6 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor B-2736/S.PKPL.1/TU.220/09/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembinaan Evaluasi Pengenggaran Pagu alokasi anggaran TA. 2025 Sekwil lingkup Ditjen PKPL pada 30 September - 3 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor B-2736/S.PKPL.1/TU.220/09/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal PKPL pada 7 Oktober 2024 secara daring berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor B-2828/DJPKPL.1/TU.220/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Mengadasi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awalan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 pada 28 Oktober 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Kepegawaian dan BMN Nomor B-4059/SJ.3/TU.220/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal undangan Rosarita
- Melakukan pencairan/pelaporan Uang Tunjangan Kinerja Tahun 2024 dan Pembukuan Tunjangan Kinerja Tahun 2027 - 2028 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-4200/BPSPL.3/PB2.314.120/X/2024 tanggal 9 Desember 2024.
- Melakukan Verifikasi laporan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.1492/SJ.6/KU.510/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penyelesaian Pelimpan Bendahara dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Pedoman Teknis Mekanisme Koreksi Penampungan akhir Tahun anggaran di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan/pencucian RKA sudah melibatkan pihak yang berkompeten baik secara aspek teknis, hirarki, dan keuangan. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan pegawai dan pencantian Tim Kerja BPSPL Pontianak secara luring dan daring dalam penyusunan RKA. Selain itu hasil penyusunan RKA telah diteliti ulang oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal KKP.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi KAK ini didukung dengan adanya anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2267.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2267.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut.

Tabel 3.1.13-5 Realisasi Anggaran KAK 1-4 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Kantor	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBA.LS4.051] Layanan SDM	Rp40.000.000	Rp40.774.000 [99,94%]	-
2.	[2267.EBA.LS5.051] Layanan Komunikasi	Rp 55.565.000	Rp 55.565.000 [100,00%]	-
3.	[2267.EBA.LS4.051] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.727.913.000	Rp 6.660.744.239 [99,00%]	-
4.	[2267.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.734.934.000	Rp 2.704.029.984 [98,90%]	-
5.	[2267.EBD.LS4.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp122.800.000	Rp 122.781.102 [100,00%]	-
TOTAL		Rp8.940.911.000	Rp8.687.901.006 [99,41%]	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung KAK ini pada Tahun 2024 (per oktober) dari Januari 2024 yaitu Rp8.687.901.006 atau 99,41% dari Pagu Rental anggaran sebesar Rp8.940.911.000. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja Pemakaian Bahan Baku, Belanja Honorarium dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup KPPN, Honorarium, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.

Gambar 3.1.13-5 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada KAK ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola kawasan BPSPL Pontianak sesuai dengan

Kepatuhan Kasie Pengelola Anggaran nomor 1/BPSPL.DKU.TKI/I/2024 tentang Standar Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

1.6 Kendala dan Solusi Tahun 2023

Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL terkait dan pelaksana tenaga kerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. Selain itu juga melakukan kegiatan rutin tahun dengan pelaksanaan anggaran seperti pengisian Lung Kesadaran TA 2024, Rona Awal, melaksanakan kontrak Pengadaan dan pertyelesaian tagihan serta penyelesaian anggaran.

IKM 13. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah nilai yang diraihnya atas kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sebagai perubahan dari IKU "Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak" mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 5250/S.2/TU.210/10/2024 dan ditindaklanjuti pelaksanaan pendataan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PHPL pada tanggal 8 Oktober 2024.

Berdasarkan PMK nomor 62 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK nomor 465 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran. Nilai kinerja Anggaran diatur berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menyimpulkan hasil perhatian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 6 (lima), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila NKPA > 105
b. Baik, apabila NKPA >95 – 95
c. Cukup, apabila NKPA >85 – 85
d. Kurang, apabila NKPA >65 – 45
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Teknik Menghitung

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil penilaian antara Capaian RO, Pengelolaan SAK dan Efisiensi SAK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektifitas (70)	1.Capaian RO	70
Efisiensi (30)	1.Pengelolaan SAK	10
	2.efisiensi SAK	15

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

c. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CAR = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RERO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CAR	: Capaian RO tingkat Satker
RERO	: Realisasi Volume RO
TVRO	: Target Volume RO
n	: Jumlah RO

d. Efisiensi

1) Penyerapan SBK

Indikator Penyerapan SBK diukur dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-KL dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-KL dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO KRAK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK walaupun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU walaupun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran indikator pengguna hasil SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum \text{RO SBKK} + \sum \text{RO SBKU}}{\sum \text{RO SBKK} + \text{RO SBKU} + \sum \text{RO Non SBK}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan nilai penghematan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\text{Indeks SBK} - \text{Indeks Ex Ante}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK}	: Efisiensi SBK tingkat Satker
Indeks SBK	: Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks Ex Ante SBK$_i$	: Indeks Realisasi RO i SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times Wi_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times Wi_{Penggunaan\ SBK}) + (NE_{Lower} \times WE_{Lower})$$

Keterangan:

NKPA Satker	: Nilai Kinerja Satker
CRO	: Capaian RO
Penggunaan SBK	: Penggunaan SBK
NilaiLower	: Nilai Efisiensi Anggaran

Capaian IKU 12 KKP4 BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.12-3 Capaian IKU 12 KKP4 BPSPL Pontianak

IKU 12	12.1.12. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Baik (Angka) BPSPL Pontianak							
IKU 12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Angka) BPSPL Pontianak (Nilai)							
	Tahun 2023				Kinerja Lainnya & Perilaku yang Diharapkan			
Akhir Des 2023	Realisasi 2023	Peningkatan	Target Ind 2023	% Realisasi thd Target (%)	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023
-	98,11	-	77	125	95	103	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak per 2 JANUARI Desember 2023

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dari penetapan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan data pada aplikasi SMART DJA (monev.kemenkeu.go.id) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 93,11. Nilai ini didapatkan dari perhitungan efektivitas (capaian RO) sebesar 110, efisiensi penggunaan SBK sebesar 139 dan efisiensi SDK sebesar 87,4. Persentase realisasi terhadap target Penjelan. Kinerja sebesar 120%. Capaian NKPA BPSPL Pontianak disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 193/ELJ.3/TU.213.1/2025 tanggal 15 Januari 2025.

Gambar 3.1.12-4 Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat capaian "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran". Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena nilai tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tidak terdapat target mengenai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terhitung dalam Renstra DItjen PKRL 2020 – 2024 sehingga capaian IKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 tidak dapat dibandingkan. Namun, terdapat target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99 pada Renstra Ditjen PKRL tahun 2024. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sehingga capaian IKPA BPSPL Pontianak berkontribusi terhadap pencapaian NKA Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Manfaat Kinerja & Perbaikan

Terdapat target mengenai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terhitung dalam Indeks Kinerja & Pelayanan 2020 – 2024 sebesar 71 pada tahun 2024. Capaian IKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 sebesar 98,11 tidak mencapai target Indeks Kinerja & Pelayanan sebesar lebih dari 100% jika dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Kasus/Masalah/Kegagalan atau Keberhasilan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian nilai tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak melaksanakan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran, adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan/mencari solusinya. Faktor pendorong lainnya keberhasilan kinerja ini yaitu sinkronisasi dalam penentuan/perubahan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini tidak ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk memperoleh persetujuan data yang sudah diinput.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyempurnaan Renja SPA cepat secara berkala, salah satu penggunaan aplikasi SMART DJA yang salah satunya integrasi dengan aplikasi perencanaan keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian tindak output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya WBK, yaitu input Capaian Minimal Output (CMO) secara Januari hingga Desember 2024, SOP pada aplikasi SMART yang kemudian diverifikasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran

a. menghadiri kegiatan Finalisasi Penyusunan Target dan Reja Penggunaan PNBP TA 2025 pada 3 – 6 Januari 2024 di Mercure Hotel Cikini Jakarta.
b. Melaksakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor S-327/DJPRL.1/TL/1/403/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP (Impact) Ditjen PRL masalu Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor S.108/BPSPL.2/KU.440/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP di BPSPL Pontianak.
c. Melaksakan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Nomor S-977/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Konsolidasi Informasi Reliasi Waktu Penyelesaian PPS dan WDPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.

f. Menghadiri pertemuan pembahasan PHBP 2024-2026 pada 22 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPPR Nomor S-1035/DJPPR.1/PK.410/II/2024

g. Menghadiri pembahasan Pendanaan Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) dan Penugasan Pemerintah Pusat Lainnya secara daring pada 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPPR Nomor S-1437/DJPPR.1/TU.020/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Pembahasan Waktu Rapat Koordinasi Rental DPA DJPPR.

h. Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PHBP 2024 Kawasan pada 20 s.d. 23 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PPR, Nomor S-2716/DJPPR.1/TU.020/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

i. Menindaklanjuti Permohonan Arahan terhadi Usulan Rental Anggaran di BPDPL Pontianak TA 2024 Inspirasi Rental Kopasi BPBSR, Permohonan Nomor R.1680/BPBSR, DHP.020/V/2024 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PKPL

h. Menghadiri undangan Pelayanan Dokumen Pengangaran Sekber Lingkup Ditjen PKPL Tahun 2025 di Cisno Mansura Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 10 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat PA Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-3970/DJPPR.1/TU.020/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

i. Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PHBP Non DAK Tahun 2025-2027 pada 19 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-5473/DJPPR.1/TU.020/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

j. Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Penggunaan PHBP Non DAK TA 2025-2027 pada 23 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-4786/DJPPR.1/TU.020/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

k. Melaksakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal PKPL Nomor S-5410/DJPPR.1/TU.020/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 melalui Surat Kepala BPBSR, Pontianak Nomor R.2021/BPBSR, DHU.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Penggunaan PHBP BPBSR Pontianak Tahun 2025 – 2027

l. Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Pengangaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Sekber lingkup Ditjen PKPL pada 23 September - 5 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-4700/DJPPR.1/TU.020/IX/2024 tanggal 24 September 2024.

m. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-5940/DJPPR.1/TU.140/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Hasil Rapat Pembahasan Pagu Penggunaan PHBP Tahun 2025 – 2027.

n. Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Usulan Target dan Pagu Penggunaan PHBP Kementerian Keuangan dan Perhitungan TA. 2026 pada tanggal 3 – 6 Desember 2024 sesuai Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang nomor S-6824/KLI.3/KU.040/XII/2024.

B. Realisasi Anggaran

Pada tanggal sangatan sinusu untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU itu, sehingga tidak terdapat terhadi anggaran pada Tahun 2024.

C. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat diupa dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan memperoleh sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada BG ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan melalui keseimbangan gender pada tim pengelola kegiatan BPDPL Pontianak sesuai dengan

Kepatuhan Kelas Pengguna Anggaran nomor 1/BPSPL.2/KU.1101/2024 tentang Struktur Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

6. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA, terkait dengan target kinerja IKU IKPA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu praktik yang dijalankan unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 70 dengan minimal nilai pengungkit sebesar nol.
b. Subot nilai per area pengungkit minimal 50% untuk semua area penjelas (PK).
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,45, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 18,6 dan sub komponen Penanganan Tuntut minimal 9,0
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.

Hasil penilaian Tim Penilai internal KKP (reformasi birokrasi) atau Tim Reviu nasional (Kementerian PAN dan RB) yang dibentuk dalam SK Menteri KP dan/atau Pejam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) pada tanggal 14 – 17 Maret 2023 dengan hasil evaluasi sebesar 90,01. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.13-4. Capaian IKM 16 Unit di BPSPL KSDA, Pontianak

IKU 15	3.1.15. Opini Atas Laporan Keuangan yang Sesuai Standar (BPSPL Pontianak)							
IKM 16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2022	Nilai 2023				Kondisi Kinerja s.d. Akhir Tahun		Faktor yang Mempengaruhi	
	Target 2023	Keterangan	Target Akhir 2023	% Realisasi thd Target Akhir 2023	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
90,01	90,01	0	75	120	76	120	77	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPHKL, Desember 2023

1. Capaian IKM Tahun 2024

Perlindungan dan pengawetan dapatkan pada IKM 16 dilakukan secara berkala. Capaian KU ini disampaikan melalui memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kawasan dan Ruang Laut nomor 30 /SJDKRL.1/TU.210/1/2025 tanggal 6 Januari 2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPSPL Pontianak memperoleh nilai

sebesar 90,81 yang didapatkan dari hasil pemantauan periode TPI KKP tahun 2023. Persen realisasi capaian IKK ini terhadap target Perangkat Kinerja sebesar 120%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar 90,81. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan tidak ada penilaian WBK dan komentarnya RB/PAN untuk BPSPL Pontianak pada tahun 2023 dan 2024, sehingga capaian kinerja waktu tahun tersebut menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 90,81. Berbeda lagi dengan capaian nilai WBK BPSPL Pontianak selama 5 tahun terakhir, nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar 91,73. Sementara, nilai terendah didapatkan pada tahun 2021 sebesar 89,93.

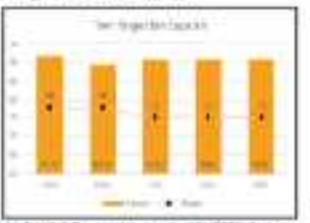

Gambar 2.1.10-5. Perbandingan capaian WBK BPSPL Pontianak

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK ini terhitung dalam Renstra Ditjen PHKL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Ditjen Pengelolaan Hutang Lestari. Tentapan pencapaian target antara yang tertuang dalam Renstra Ditjen PHKL dengan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang didapatkan BPSPL Pontianak telah berkontribusi terhadap capaian target jangka menengan Ditjen PHKL sebesar 10%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Manfaat Kinerja & Perubahan

Target yang tertuang dalam Matrika Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebesar 90,81 telah berkontribusi sebesar 90% dari 100% dari target matrika Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melaksakan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala pencetakan/pengadaan dan pemutakhiran/pengkinian area pembangunan. Pemantauan berbasis IKI juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat koordinasi internal dilakukan secara *hybrid* menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung ketatausahaan lain, yaitu:

a. Pengumpulan data/item komputasi penghunjuk aset/aset bulanannya untuk periode Januari - Desember 2024.

b. Melaksanakan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Surveilance ISO 9001:2015 di KPKNL Pontianak pada tanggal 26 Februari hingga 15 Maret 2024. Hasil Surveillance ISO 9001:2015 ini berupa Sertifikat Nomor QHC/ID/1711414-1 tanggal 13 Maret 2024.

c. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Pln. Sekretaris DJPPR Nomor S-1912/LPPR/L.1/TU.210/12/2023 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penerapan Perjadwalan Unit Kerja Dalam Hari Unit Pelaksana Teknis.

d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Pln. Sekretaris DJPPR Nomor S-1910/LPPR/L.1/TU.210/12/2023 tanggal 7 Maret 2024 hal Hasil Pelaksanaan KIPPN UPP Lingkup Ditjen PPR Tahun 2024.

e. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Pln. Sekretaris DJPPR Nomor S-1911/LPPR/L.1/TU.210/12/2023 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

f. Melaksanakan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja 2024 pada 18 Maret 2024 berdasarkan Surat Kepala KPKNL Pontianak Nomor S-457/KPKNL.2/TU.220/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Undangan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja.

g. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPPR Nomor S-1903/LPPR/L.1/TU.210/12/2023 tanggal 01 Maret 2024 hal Permohonan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2024.

h. Pengumuman Kepala KPKNL Pontianak Nomor S-969/KPKNL.2/OT.710/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Pegawai pada Hari Raya di Lingkungan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alkatan dan Laut Kontainer.

i. Pengumuman Kepala KPKNL Pontianak Nomor S-990/KPKNL.2/OT.710/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Penggunaan Jasa Kawanan pada Hari Raya di Lingkungan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alkatan dan Laut Kontainer.

j. Menghadiri kegiatan Kekonsultasi Gotong Royong Menyambut Kegiatan Masyarakat Publik Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 kemudian Direksi Pengelolaan Pengadaan Pelayanan pada 14 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor S-2665/DJPKRL.1/TU.530/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

k. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Pln. Sekretaris Ditjen PRL Nomor S-2021/DJPKRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Permohonan Standar Pelayanan Unit Pemberanggaran Pelayanan Publik (UPP) Lingkup Ditjen PKRL.

l. Menghadiri Rapat Kerja Kelas Data Gabung (RKDP) Regional dengan Lokus KPKNL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal Nomor S-2780/SJ.1/TU.220/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

m. Menghadiri Pemaparan Data Gabung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL pada 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan Undangan dari Sekretariat Ditjen PKRL Nomor S-4626/DJPKRL.1/TU.220/VII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

n. Menghadiri Kekonsultasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 pada 14 dan 15 November 2024 sesuai Surat Pln. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor S-6411/DJPKRL.1/TU.230/XI/2024.

c. Pendelegasian penetapan Tertib Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4039/BPSPL.2/KP.440/X/2024 tanggal 15 November 2024 hal Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.

d. Pendelegasian Tertib Lantai atau tertib kemitraan Ditjen PHKL Nomor B.6803/SJ/PHRL.3/KP.420/X/2024 tanggal 10 November 2024 hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PENDIPP) Wilayah Indonesia pada UPP Lingkup Ditjen PHKL Tahun 2024.

e. Pelaksanaan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Sertifikasi ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak pada tanggal 18 Februari hingga 6 Desember 2024. Hasil Sertifikasi ISO 37001:2016 ini berupa Sertifikat Nomor CAC19011111A4, tanggal 9 Desember 2024.

f. Pendelegasian internalisasi Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM pada tanggal 4 November dan 11 Desember 2024 di Kantor BPSPL Pontianak.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan Rincian Output [2267.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2267.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.13-6 Realisasi anggaran IKK ke Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Tahun	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBA.998.005] Layanan Pelaksanaan Administrasi Kantor di Lingkungan KKP	Rp84.280.000	Rp84.221.400 (99,94%)	-
TOTAL		Rp84.280.000	Rp84.221.400 (99,94%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp84.221.400 atau 99,94% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp84.280.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Pendukung IKK dan Konsumsi Rapat.

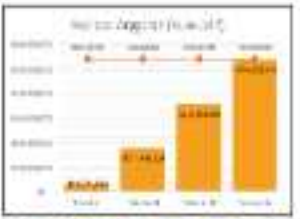

Gambar 2.1.13-4 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

6. Pengembangan Gender

Kesetaraan gender akan dapat dicapai dengan meningkatnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada BKI ini dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan publik. Hal ini dibuktikan melalui keberadaan gender pada tim Sistem Manajemen Integrasi BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak nomor B.4083/BPSPL.2/KP.04/11/2024 tanggal 18 November 2024 ke Tim implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.

10 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi pada tahun 2025 yaitu melakukan perbaikan dan pemeliharan dokumen dalam rangka penilaian Zona integritas tahun 2024. Dilanjutkan pada tahun 2026 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Internal)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh BKI SDM4. Sehubungan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) domain, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 39%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 18%
d. Disiplin memiliki bobot 3%

Kualifikasi diukur dari indikator ekspor pendidikan formal terakhir yang telah diraih. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut disimpan lengkap dan dashboard IP ASN ESP yang terbaca. Dalam informasi Manajemen Kepegawaian di laman https://esp.ang.go.id.

Tabel 2.1.12-6 Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak

IKU-17	17 (17). Tersedia kapasitas 17 Unit Kelola Mutu Hasilan yang baik (Logis) BPSPL Pontianak
IKU-17	Hasilan Pembelajaran Mutu Logis (LPMU) Pontianak (Hasilan)

Hasil pada 2023	Tahun 2024				Capaian Orang 1 Pertama		Capaian Jangka Menengah	
	Target 2024	Capaian	Target (s/d 2024)	% Capaian thd Target (c)	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
91,84	90,01	+4,01	98	108,45	75	120	75	120

Sumber data: BPSPL Pontianak dan ESPRO, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Berdasarkan semestaan nilai IP ASN melalui situs https://esp.ang.go.id pemangga 31 Desember 2024, 89,69. Pontianar mencapainkan nilai sebesar 98,44 dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini telah melebihi target pada perjanjian kinerja dengan persentase 108,22%. Capaian IKU ini disampaikan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor B.136/SJ/PKRL.1/Pu.1.00/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Periode pencapaian empat tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perkembangan. Namun, capaian nilai IP ASN pada tahun 2024 sebesar 90,69 (108,22% dari target tahunan 83), sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 90,84 (108,44% dari target tahunan 83). Sehingga progres capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sejumlah 3,61 dibandingkan progres capaian tahun 2023 atau meningkat sebesar 3,98% jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Then nilai IP ASN mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan nilai tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Nilai tertendah didapatkan pada tahun 2020 sebesar 70,41. Peningkatan nilai IP ASN didukung oleh pemenuhan pool untuk pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar maupun Ijin Belajar. Selain itu, penyelesaian sertifikasi latihan, pelatihan dan seminar menjadi nilai tambah untuk penilaian IP ASN.

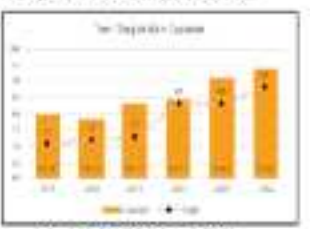

Gambar 2.1.12-7. Tren Capaian IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKH tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 70 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap jangka menengah Ditjen PKRL sebesar 120% (60,00 dari 70). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi target jangka menengah tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan DJPKPL Pertanak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 132% (80,65 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKH ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan setiap pegawai. Pengembangan kompetensi dilaksanakan secara luring dan daring untuk meningkatkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN DJPKPL Pertanak. Selain itu, telah adanya pemberian kesempatan bagi pegawai untuk belajar dalam rangka pertingkatan jenjang pendidikan formal pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKH ini yaitu proses anggaran di Aplikasi SAKTI yang terkendala dalam system, IKH ini telah ditindaklanjuti dengan memahami perkembangan layanan terkini dari Kantor Pusat pada Tim pegawai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengampuan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diupload, sehingga sehingga mempercepat proses permintaan IP ASN pada situs corp.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terhadapnya IKH, yaitu :

a. Pelatihan Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak ketiga telah diikuti oleh pegawai pada Januari – Desember 2024
b. Kegiatan pendukung terkait dengan kepegawaian lingkup DJPKPL Pertanak pada Januari – Desember 2024 diantaranya adalah :
   - Melaksanakan Rapat terkait atas Surat Sekretaris DJPKPL Nomor B.121/DJPKPL.I.HOP.7/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyesuaian Pangkat dan Pensiun bagi Thoriqun H dan Abdi Gerbos Tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL.
   - Menghadiri kegiatan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKPL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APUK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada 16 – 19 Januari 2024 di Surabaya berdasarkan Surat Sekretaris DJPKPL Nomor B.235/DJPKPL.I/TU.330/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKPL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APUK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
   - Melaksanakan rapat lanjut atas Performance Metasoft oleh Yuga atas nama Aki Yuliadin, S.E. tanggal 11 Januari 2024 dan Bisatun Nafathiha Hadi, Pengelolaan Hutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (DKPU) Pertanak ke Biro Pengelolaan Sumber Daya

Pelabuhan dan Laut (BPSPL) Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.157/BPSPL.2/KP.442.1/2024 tanggal 19 Januari 2024 hal Mutasi/Alih Tugas.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat DJPRL Nomor B.23/DJPRL.1/RC.330/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Data BNBN terkait Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Melakukan penyampaian Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.473/DJPRL.1/TU.210/1/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Penyampaian Jadwal Retatihat dan Sertifikat Kompetensi terkait Kesehatan Pelaut di Bidang Akademik dan Pendidikannya.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembahasan Pilot Aplikasi Kinerja pegawai di Lingkungan kementerian kesehatan dan Pemaparan pada 1 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Tim Hal Pengajuan PAK Integrasi Tahun di 2-Minggu 2024.
- Menghadiri undangan Kepala Pemerintah Kementerian Keuangan Kalimantan Barat Nomor UND-S-PWK.19/2024 tanggal 15 Februari 2024 hal Undangan Sosialisasi Deadline LPDP Tahun 2024 di Kalimantan Barat pada 15 Februari di Balai Diklat Keuangan Pontianak.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Kesekretaris DJPRL B.1048 hal Pelaksanaan Pengembalian Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional PPLP dan APJK.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1044 hal Usulan Kenaikan Pangkat Periode April 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.629/SJ.7/TU.210/2/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Pemberitahuan terkait Cuti Elektronik.
- Menghadiri Pengarahan PPPK Lingkup Ditjen PHKL pada 29 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengumuman Uji Kompetensi Jabatan Pengawas Kinerja Kepegawaian dan Statistisi.
- Melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai BPSPL Pontianak Tahun 2023.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1937/DJPRL.1/KP.750/3/2024 tanggal 1 Maret 2024 hal Pengajuan Lembar Hasil SPT Tahunan Periode Tahun 2023 Pejabat DJPRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1414/DJPRL.1/KP.820/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Informasi Beasiswa Lulusan Kedokteran Gigi Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP Tahun 2024.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1511/DJPRL.1/KP.820/3/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Lingkup DJPRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1628/DJPRL.1/KP.820/3/2024 tanggal 12 Maret 2024 hal Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Jalur Pendidikan.
- Menghadiri kegiatan Penanganan Hoax di ASN Lingkup Ditjen PHKL bertempat di Kantor Pangkat PNS Lingkup Ditjen PHKL Tahun 2024, serta Pemaparan Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi Lain pada 2 dan 3 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PHL Nomor B.1920/DJPRL.1/TU.330/4/2024 tanggal 28 Maret 2024

- Mengikuti kegiatan Pendampingan Penyelesaian Tagihan ASN Serta Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Kepegawaian dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepegawaian di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan di Hotel Ibis Styles Jakarta Kemayoran pada tanggal 15 s.d. 17 April 2024 sesuai Surat Undangan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Layanan Nomor S-1/KI.3/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Undangan Pendampingan Penyelesaian Tagihan ASN Serta Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Kepegawaian dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepegawaian di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mengikuti kegiatan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda pada tanggal 15 s.d. 17 April 2024 sesuai Surat Undangan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Timur Nomor S-1/WPB.13/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Undangan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Anggaran 2023.
- Melakukan tindak lanjut atas Permohonan Mutasi dan Tugas melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B-1668/BPSPL.2/KP.4401/2024 tanggal 17 April 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPPR Nomor S-224/S.JPPR/L.1/TU.212/IV/2024 tanggal April 2024 hal Permohonan Pengisian Form Pemeriksaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeriksa Kompetensi.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPPR Nomor S-227/S.JPPR/L.1/KP.402/IV/2024 tanggal 19 April hal Penyampaian Hasil Kenaikan Pangkat Pegawai Periode April 2024 dan Usul Kenaikan Pangkat Periode Juni 2024. Adapun pegawai BPSPL Pontianak yang mendapatkan kenaikan pangkat yaitu a.n. Andrian Saputra, Hetty Priyani Effendi, Hanbarni, dan Hendrikus Luat Nading.
- Melakukan Penyampaian Laporan Calon Peserta Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pelatihan melalui Penyelesaian dan Pemrosesan Tagihan Tendik sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor S-1268/BPSPL.2/KP.903/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
- Mengikuti Coaching Clinic Konsolidasi ASN dan Pemenuhan Jabatan Fungsional PKAP dan APJK serta Pelaksanaan Layanan Kepegawaian pada 29 s.d. 31 Mei 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PPR Nomor S-2966/S.DJPPR/L.1/TU.220/5/2024 tanggal 27 Mei 2024.
- Mengikuti kegiatan sosialisasi Pembangunan Data Direct Koneksi pada aplikasi Mutasi BKN secara daring pada 26 Juni 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-3438/S.JPPR/L.1/TU.220/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Aset pada 19-20 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan nomor S-5474/DJPPR/L.1/TU.220.00/2024
- Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Koordinator Ditjen PKPL nomor S-4602/S.JPPR/L.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Identifikasi Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12 - 14 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PPR nomor 4604/S.JPPR/L.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Lingkup Ditjen PKPL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKPL Nomor S-5280/S.JPPR/L.1/TU.220/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Pelatihan Umum tanggal 22 - 25 Juli 2024.
- Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 sesuai Undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B-5543/SJ.TH3/KS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini turut mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.

c. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Januari - Desember 2024 dan monitoring Tahun 2024.

c. Pemberian Umpan balik kegiatan pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.

d. Rekapitulasi predikat kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.

f. Rekapitulasi dan Monitoring prosentase pegawai pada Januari – Desember 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan adanya anggaran dari Kegiatan/ Output [2867.EBO.004 007] Layanan Manajemen SDM. Realisasi anggaran dari Kegiatan/ Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.10.7 Realisasi Anggaran IKK 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Kegiatan	Realisasi	Sisa
1.	[2867.EBO.004.007] Layanan Manajemen SDM	Rp 304.482.000	Rp 304.071.025 (99,87%)	-
TOTAL		Rp 304.482.000	Rp 304.071.025 (99,87%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Tahun 2024 (posisi akhir Januari 2024) yaitu Rp 304.071.025 atau 99,87% dari Pagu Kegiatan sebesar Rp304.482.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.

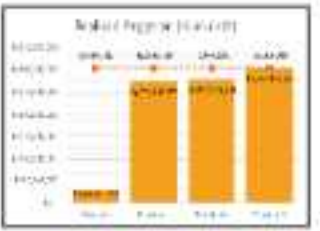

Gambar 3.1.10.6 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

B. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

I. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan dan Piutang Lacita hal target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak sebagai acuan pelaksanaan Peraturan Menteri dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Unit PPPL. Kategori Nilai PM SAKIP yaitu

Tabel 2.1.13-6 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terimplut Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pola sikap yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reformi). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah unit kerja sejak memimpin perubahan dalam meningkatkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada SKPD unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan terpadu termasuk teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terdapat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta konsistensi dalam menerapkan kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian, masih perlu banyak perbaikan, misalnya tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
C	<55,00	Kurang Target dan Sasaran dalam AKIP kurang dapat dipahami. Dalam pelaksanaannya dalam mencapai kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di sana-sini.
D	0,00	Sangat Kurang Target dan Sasaran dalam AKIP sama sekali tidak dapat dipahami. Sama sekali belum tercapai penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan besar-besaran yang effektif agar mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 15 Sebagai berikut:

Tabel 2.1.15-9 Capaian IKU 15 BPSPL Pontianak

IKU-15	2.1.15. Dokumen Kegiatan 15 Tata Kelola Pemanfaatan yang Baik (Logbuk BPSPL Pontianak)
Satuan	Nilai Hasil IKP Logbuk BPSPL Pontianak (Nilai)

Target 2024	Tahun 2024				Capaian Kinerja s.d. Triwulan		Capaian Jangka Menengah	
	Hasil tahun 2024	Peningkatan	Target Perjanjian	% Hasil thd Target Perjanjian	Target 2024	% Hasil thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
80,0	80,00	0,00	81	100,00	80	100,0	80,00	100

Sumber data: BPSPL Pontianak (Di LPKPL Desember 2024)

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan penilaian capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kinerja Dilan PKPL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 80,00 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) secara sangat sesuai Keputusan Direktur PKPL nomor B.8721/D.PKPL.1/KS.410/10/2024 perihal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target perjanjian kinerja dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.15-10. komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Internal	25	19,29
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,00
Predikat Pelaporan			A

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Hasil evaluasi penilaian IKU di atas pada tahun 2023 dan 2024 disajikan secara komparatif. Capaian nilai PK SAKIP pada tahun 2023 sebesar 80,2 sehingga terdapat penurunan nilai PK SAKIP sebanyak 2,05 atau menurun sebesar 2% jika dibandingkan dengan nilai PK SAKIP tahun 2024. Jika dibandingkan dengan nilai per komponen antara tahun 2023 dengan 2024, terdapat penurunan yang signifikan pada komponen Evaluasi Kinerja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penurunan nilai kinerja anggaran dan persentase capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun begitu, terdapat peningkatan nilai pada komponen pengukuran dan pelaporan anggaran.

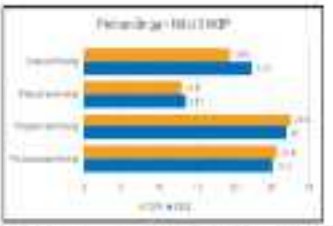

Gambar 2.1.10 9. Perbandingan Komponen Nilai PK SAKIP Tahun 2023 dan 2024

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PK SAKIP Unggul Ditjen PKRL sebesar 85,76. Capaian tahun 2024 sebesar 84,64 telah berkontribusi terhadap target jangka menengah Ditjen PKRL 2020 – 2024 sebesar 102%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target jangka menengah IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai PK SAKIP BPSPL Pontianak sebesar 80. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan Matriks Kinerja & Pendanaan, capaian tahun 2024 sebesar 85,85 telah mencapai target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 106,31%

5. Analisis Penyebab Kasus Inaktivasi/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2024 dapat menstimulus terwujudnya target di akhir tahun. Hal itu didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan ada tim perencanaan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola dinaria mengenai aplikasi/alat evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dipahami agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya achievable. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak tidak memiliki tabel perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain. Namun, belum memiliki analisis lebih lanjut terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang lebih rendah. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat/media dan informasi kinerja secara berkesinambungan hasil nilai pada BPSPL

Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar 0,62 sedangkan 2022 sebesar 1,15.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan cara kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data cukup/nya dengan memanfaatkan program, google drive dan aplikasi pendukung lainnya. Salah satu komponen pengamatannya: google drive Monitor (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak sebagai media penyimpanan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta pelaporan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, laporan output di SAKTI, Laporan SPIP IBR, dan sin-kan data antar bidang.

7. Kegiatan Pendukung

a. Melakukan rerik Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat dan UPT lingkup DJPVKL dengan hasil Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 BPSPL Pontianak tanggal 7 Februari 2024.

b. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPVKL nomor B.1236/DJPVKL.1/VK.162/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPVKL nomor B.1236/DJPVKL.1/VK.162/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

d. Menghadiri undangan Rapat Finalisasi Manasi Indikator Kinerja Level 2 Tahun 2024 lingkup DJPVKL pada 30 – 31 Maret 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPVKL nomor B.1601/DJPVKL.1/TU.330/3/2024 tanggal 19 Maret 2024.

e. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Inka Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d.s April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL nomor B.1582/DJPVKL.1/TU.330/3/2024 tanggal 26 Maret 2024.

f. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024 Lingkup DJPVKL pada 16 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL nomor B.2120/DJPVKL.1/TU.330/4/2024 tanggal 16 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, diperoleh hasil capaian kinerja 113 (Optimasi).

g. Mengikuti kegiatan Reviu Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan nomor B.1214/BJ.1/RO.510/1/2024 tanggal 10 Mei 2024.

h. Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.80/BPL.3/TU.310/1/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

i. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja ESAKIP (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL nomor B.2455/DJPVKL.1/PG.610/1/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113 (Optimasi) dan NKO Verifikasi sebesar 113 (Optimasi).

j. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan DJPVKL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di Kab. Bekasi sesuai

dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL Nomor B.3448/D.JPKRL.1/PD.810/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai PM Sakip sementara sebesar 91,75. Nilai ini tidak memenuhi target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, namun masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Hal tahun lalu, Unit ini, yaitu dipertahankan sebesar tambahan dalam rangka menambah nilai SAKIP hingga dibanding pada saat pleno.

n. Mengikuti kegiatan Verifikasi Pelaporan e-Kinerja Bagpenas dan SMART DJA pada tanggal 1 - 8 Juli 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Pada Verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase terverifikasi hingga bulan Juni 2024 telah mencapai 48%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Konsentrasi belanja anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 48,31% sementara terverifikasi pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 50,25%.

l. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (http://kinerjaku.kkp.go.id). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk KU dan KU BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 100,24% dengan kategori Kiau (Baik). Capaian kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 116%.

m. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat DJPKRL pada tanggal 10 sam 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4.2853/D.JPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.

n. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Pesisir Laut melalui surat nomor B.3453/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

o. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4.e/303/D.JPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 agustus 2024.

p. Berkesanan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,24 dengan predikat baik sesuai surat konfirmasi dengan (NKO) nomor B.4.2844/D.JPKRL.1/PD.810/VII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.

q. Menghadiri pleno Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Ditjen PKRL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak mempunyai nilai sebesar 84,84 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/D.JPKRL.1/PD.810/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

r. Menghadiri Undangan Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Rencana Triwulan III dan Pemaparan Kegiatan DJPKRL secara daring pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6827/D.JPKRL.1/TU.330/X/2024.

s. Menghadiri Undangan Pembahasan Perubahan Perjanjian Kinerja Setkor Inspektorat DJPKRL Tahun 2024 secara daring pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6881/D.JPKRL.1/TU.330/X/2024.

t. Menghadiri Undangan Verifikasi Laporan Online melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Inspektorat DJPKRL pada tanggal 9 - 13 Oktober 2024 secara daring sesuai dengan surat undangan Sekretaris Ditjen

PKRL nomor S-5965/DJPKRL.1/TU.030/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Perihal Verifikasi e-Monev Sebelas/as untuk SPSP). Pantauan persentase ketercapaian Kinerja sesar September 2024 telah mencapai 89%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran sendirinya meningkat dan sudah sampai tengah juni 2024. Kemarahan hasil verifikasi capaian kinerja (KPI). Pantauan pada Triwulan II mendapatkan nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 127,5% dengan predikat Baik.

c. Menghadiri Undangan Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL dan Sosialisasi PKRL Triwulan III Tahun 2024 sesuai dengan surat tanggal 15 – 19 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor S-5838/DJPKRL.1/TU.030/10/2024.

d. Menghadiri Undangan Pemantauan Kegiatan Prioritas dan Khusus DJPKRL sampai dengan Akhir Desember Tahun 2024 pada tanggal 9 Desember 2024 sesuai dengan sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor S-6707/DJPKRL.1/TU.030/00/2024.

e. Menghadiri undangan Pembahasan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja Setiap Unit/Eselon Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 19 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor S-6839/DJPKRL.1/TU.030/00/2024.

f. Menghadiri undangan Penyusunan Rencana Strategis Ditjen PKRL tahun 2025 – 2029 pada tanggal 17 – 19 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor S-6838/DJPKRL.1/TU.030/00/2024.

Gambar 5.1.13-10 Kegiatan pemantauan oleh P

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kas/Rkas Rincian Output [2267.EBD.002] Layanan Perencanaan dan Pengangguran dan [2267.EBD.003] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 5.1.13-11 Realisasi anggaran unit di Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2267.EBD.002] Layanan Perkolahasan dan Pengangguran	Rp 84.066.000	Rp 84.032.291 [99,96%]	-
2.	[2267.EBD.003] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 100.000.000	Rp 100.400.648 [99,92%]	-
TOTAL		Rp184.066.000	Rp184.483.859 [99,94%]	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp184.483.859 atau 99,94% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp184.566.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Gambar 3.1.12-11 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya penyelarasan/kesetaraan gender pada BKI ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.178/BPSPL.3/KS.410/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

10.Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana Aksi pada tahun 2023 yaitu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV atau Tahunan 2024. Perlu mengadakan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Selain itu dalam rangka pengelolaan kinerja tahun 2025, perlu melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Rencana Kerja.

IKM 19 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun sendiri oleh unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan II Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Teknis pembuatan dilakukan dengan mengimplementasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.17-12 Capaian IKK 12 BPSPL Pontianak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.17.	Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kegiatan BPSPL Pontianak								
3.1.17.12	Laporan SPIP yang disusun Kegiatan BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Nama Data 2023	Tahun 2023					Hasil Pk Kinerja & Perjanjian Kinerja		Perjanjian Kinerja Triwulan	
	Target Tw IV	Realisasi Tw IV	Penanggung Jawab	Target Th 2023	% Realisasi thd Target Th	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023
4	0	4	0	4	100	4	100	0	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKL, Desember 2023

1. Capaian IKK Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tersusun 4 (empat) dokumen (100%) dari target 4 (empat) dokumen. Capaian IKK 12 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.80/BPSPL.3/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Akhir Desember dan Triwulan IV Tahun 2023

b. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1102/BPSPL.3/TU.140/IV/2024 tanggal 10 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

c. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.3/TU.140/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

d. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.3/TU.140/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 adalah sama-sama mencapai 4 (empat) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKL 2020 – 2024 yaitu nilai Maturitas SPIP Level PKL sebesar 3. Capaian Kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena berbeda satuan dan cara perhitungan. Namun, capaian kinerja pada Tahun 2024 telah berkontribusi untuk nilai maturitas SPIP Level PKL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2022 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen SPIP yang disampaikan pada tahun 2024. Capaian kinerja pada tahun 2024 dengan jumlah 4 (empat) dokumen telah tercantum/ 100% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Permasalahan/Penyimpangan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian dokumen SPIP telah sesuai tersaji 100% dari target Tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKL tepat waktu setiap triwulan (hingga periode sebelum triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.80/BPSPL.3/TU.140/I/2024 tanggal 7 Januari 2024). Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu kemampuan pemahaman pengisian pendalaman Laporan SPIP link yang masih belum optimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengkaitkan kegiatan pemantauan SPIP yang dilakukan setiap enam bulan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilaksanakan pelaksanaan kegiatan pendukung tersebut, yaitu :

a. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor S-412/D.JPKRL.1/VII.662/8/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pengawasan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines of Model)

b. Menghadiri kegiatan Pemaparan Hasil Evaluasi Inf. Lingkup Ditjen PKRL Tk 2024 pada 04 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B-4297/D.JPKRL.1/TU.510/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024.

c. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B-4298/BPSPL.1/TU.213/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pendandatan Perjanjian Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

d. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan IV Tahun 2023 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.09/BPSPL.2/TU.160/1/2024 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan IV Tahun 2023.

e. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.1125/BPSPL.2/TU.160/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

f. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan II Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.142/VIII/2024 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.

g. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan III Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3140/BPSPL.2/TU.142/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Kas/Riasi Rincian Output (KRO) '2267.EBB) Layanan Manajemen Kinerja internal, dengan Rincian Output (RO) 002.002) Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Alokasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU 15 Tahun 2024 (avumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 6.348.000 atau 99,09% dari Pagu Revisi anggaran Rp 6.008.000.

Tabel 2.1.12-12. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 15 pada Tahun 2024

No.	Komponen/Sub-komponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	[2267.EBB.002.007.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP-M)	Rp 6.348.000	Rp6.331.000 (99,09%)	-
TOTAL		Rp 6.348.000	Rp6.331.000 (99,09%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menikmati manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada RO ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara

pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui keseriusan pendidikan pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.475/BPSPL.2/HM.440/IV/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2024.

1.6 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2024 yaitu melaksanakan koordinasi dengan pengelola Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025, penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, serta melakukan penyusunan manajemen risiko untuk kegiatan tahun 2025.

IKM 20. Persentase (%) Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstruktur (%)

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, mendistribusikan, menyajikan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, disebarluaskan dan dipelajari. Pengintegrasian indikator ini terdapat dari penilaian 3 komponen, yaitu komponen kesiapan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaborative Office KKP pada laman https://portal.kkp.go.id/co. Penghitungan kesiapan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komponen target minimal mendapatkan 0 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin sesuai kesiapan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Komponen yang dimaksud adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan kesatuan manajemen konservasi perairan (bentuk dengan memenuhi unsur 5W+1H mendapatkan poin 0,5)
b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
c. Konten video/animasi yang diharapkan bersifat edukasi atau asesmen dengan poin 2.

Pengukuran indikator setiap triwulan dengan metode:

- Kesiapan akan diisikan setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan kesiapan diakumulasi setiap hari dalam satu triwulan dengan komponen minimal mendapatkan 0 poin dan maksimal 4 poin sesuai kesiapan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran suvei ini bertujuan dan kesiapan sesuai ii
- Sasaran: PIC) menyelesaikan data hasil kinerja pelatihan yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diisikan dan dijadikan nilai IKM UP masing-masing unit kerja sesuai ii.

Tabel 2.1.15-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

IKM 15	2.1.15. Sistem Kesiapan TI Pada Pelaksanaan yang Berlingkup BPSPL Pontianak								
IKM 20	Persentase (%) Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstruktur (%)								
Hasil IKM 2023	Tahun 2024					Hasil IKM Triwulan III Tahun 2024		Hasil IKM Triwulan IV Tahun 2024	
	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan	Target IKM 2024	% Hasil IKM thd Target IKM	Target 2024	% Hasil IKM thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100,00	90	100,00	0	90	100	90	100	90	100

Sumber data: BPSPL Pontianak, Oktober 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Nilai Triwulan IV Tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 120% dengan persentase capaian 133,33% dari target nilai 94. Sehingga target pada Matrika Kinerja & Pendanaan maupun Renstra DJPKL telah tercapai meskipun yang ditargetkan capaian IKM 30 disampaikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Laut Nomor B.1344/KPPRL.I/TU.140/1/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.

Sumber: 5.13-03 IKM-IKP BPKP_Portofolio

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja pada tahun 2024 yaitu 133,33 sedangkan capaian tahun 2023 yaitu 133. Artinya tidak terdapat terhadap meskipun peningkatan capaian menerapkan pengetahuan terstandar pada tahun 2023 dan 2024. Jika dibandingkan dengan tren 5 tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2023 cenderung meningkat. Hal ini karena terdapat perhitungan metode pembobotan dan terindeks informasi yang dipenuhi.

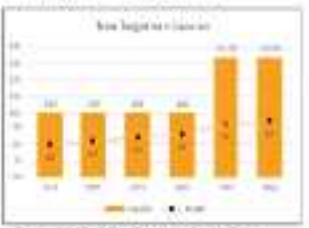

Gambar 5.1.10-16. Tren Pengelolaan Capaian Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKL 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 ini mampu target jangka menengah tersebut sebesar 133% (133,33 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPKPL Pontianak pada Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKL.

6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Metrik Kinerja & Pembanding

Tingkat capaian indeks kinerja & pembanding 80%/6, rentangan 3000 – 3034 yaitu unit kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Tahun 2024 tahun 2024 termasuk target Renstra tersebut adalah 133% (133,33 dari 90), sehingga capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan.

8. Analisis Penyebab Kasus/Kendala/Kegagalan atau Keberhasilan/Keunikan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2023 sebesar 133,33%. (133% dari target tahunannya 90). Hal ini didukung oleh partisipasinya aktifasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai dan jajaran eKP lingkup BPSPL Pontianak dan memenuhi target keaktifan minimal 2 poin.

9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tercapai efisiensi penggunaan sumber daya 130% karena pelaksanaan pendukung dilakukan secara daring. Selain itu, pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pegawai dan pejabat eKP, Pimpinan pada grup whatsapp memberikan memperlancar pengisian kegiatan pada aplikasi portal.

7. Kerjasama Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung fungsionalnya WI, yaitu Keputusan Pejabat Pungutanal Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam aplikasi portal Collaboration Office KKP. Dokumentasi kegiatan rapat/seminar yang dilampirkan telah diverifikasi dengan foto dan notulensi serta hasil SWOT.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya kesetaraan/kesamaan gender pada WI ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan sistem manajemen pengelolaan tersebut. Hal ini didukung melalui keterlibatan gender pada tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP, Pimpinan sesuai dengan penunjukan Kunsi kepala KKP, Pontianak Nomor B.224/BPSPL.2/KP.4401/2024 tanggal 30 Januari 2024 tsi Surat Tugas Tim BPSPSPL Pontianak Tahun 2024.

10 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Pimpinan pada Pejabat Pungutanal Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam aplikasi portal Collaboration Office KKP pada tahun 2025.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Diterima dan Ditanggapi (%)

Capaian IKU ini dihitung dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Tahun 2024 Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TL/HTL(2) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemeriksaan normh rekomendasi tidak masuk dalam aplet, maka tindak lanjut rekomendasi dilihat secara manual oleh Satuker PTL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemeriksaan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemeriksaan normh tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaiannya kinerjanya optimal 120%.

Tabel 3.1.13-15. Capaian IKU(2) BPSPL Pontianak

SK-13	**3.1.13. Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemanfaatan yang Berkelanjutan BPSPL Pontianak**
IKU 21	**Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Diterima dan Ditanggapi (%)**

Realisasi 2023	Tahun 2024				Kondisi Kinerja & Hambatan		Kondisi Upaya & Kegiatan	
	Realisasi 2024	Akumulasi	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
100	100	0	80	100	80	100	80	100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Pada Tahun 2024, IKM 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah diterima dan ditanggapi telah tercapai 100% (125% dari target 80). Capaian IKM 12 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 8.94/DJPRL.1/HP.470.1/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PRL" Tahun 2024 (Sambar Satdikjen PRL 9 Januari 2025). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (125% dari target triwulan 80%), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (100% dari target triwulan 70). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Kesesuaian perbandingan target dan capaian dalam rma tahun tersebut, capaian kinerja IKU ini dikatakan kesesuaian tertinggi permintaan target secara periodik.

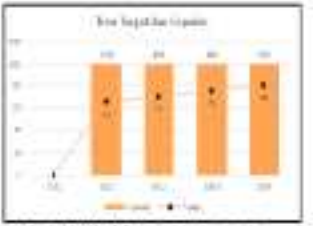

Gambar 3.1.10-14. Tren Target dan Capaian IKU

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditanggapi dan ditampaikan sebesar 90% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (100% dari 90%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% timbul lebih hasil rekomendasi telah berkekuatan hukum terhadap target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Metrik Kinerja & Pendanaan

Target dalam metrik kinerja & pendanaan 2023 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah ditanggapi dan ditampaikan sebesar 90% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (100% dari 90%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target metrik kinerja & pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang Memenuhi Sukses yang Telah Ditetapkan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut dapat dicapai oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi inspektorat Jenderal terhadap BPSPL tersebut. Dalam hal tersebut BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya. Salah satu faktor pengharusan yaitu update tindak lanjut LHA non yang belum diolah sebelumnya aplikasi SIDAK. Hal ini tidak ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak Inspektorat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapainya keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tidak lanjutnya.

7. Kendala Pendukung

Untuk periode tahun 2024 (Januari – Desember) terdapat beberapa rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya:

a. Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 20 – 29 Januari 2024. Laporan hasil audit kinerja disampaikan melalui Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor T.1021/IJ.2/HP.210/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.

b. Evaluasi PNBP TA 2023 – 2024 pada tanggal 24 – 29 Juni 2024. Hasil evaluasi PNBP disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 1268/TU.1/KP.410/VI/2024 tanggal 3 Juli hal Laporan Hasil Evaluasi PNBP TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.

Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah ditindaklanjuti tindak lanjut dan dilanggali pada SIDAK sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 2060.01.00/IT.II/PL.430/III/2024 tanggal 01 Maret 2024.
b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. B.1765/BPSPL.3/KL.340/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBP Semester I Tahun 2024.
c. Penyampaian Surat kepada BPSPL Pontianak no. B.2362/KP.MPA.3/PKL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Koordinasi Hasil Rekomendasi kepada Direktur KKP.
d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 14/BPSPL.3/HP.410/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi Kepada Tim Kerja dan Bendahara Pengeluaran.
e. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 15/BPSPL.3/PKL.430/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024.
f. Penyampaian BAP Sidak No. B.2227/BPSPL.3/KP.510/VII/2024 Tanggal 3 Juli 2024

Selanjutnya BPSPL Pontianak melaksanakan Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada DJPRL Periode Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 sebagaimana Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4434/D.DPRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

B. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

C. Pengembangan/Inovasi Lainnya

Pengembangan pencapaian target dilakukan dengan mengupayakan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.

D. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir dan laut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir dan laut.

E. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan inspektorat jenderal dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP EPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bidang Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.17-19: Capaian IKU [3] BPSPL Purwakarta

IKU 19	3.1.19. Nilai Capaian Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Telah Selesai BPSPL Purwakarta
IKU 02	Persentase Penyerapan Tenaga Lulusan BPSPL Purwakarta (%)

Realisasi 2022	Tahun 2023				Indikator Kinerja & Perjanjian		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2023	Peningkatan	Target (Perjanjian)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	100	100	100	100	47	-

Sumber data: BPSPL Purwakarta dan SAPRS, Desember 2023

1. Capaian IKU Tahun 2024

Perlu ada penjelasan dari pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di Inspektorat BPSPL Purwakarta, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum kesepakatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor 166/DJPKRL.1/HP.3201/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas IHP tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (100% dari target tahunan 100), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (100% dari target tahunan 100). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Kesesuaian perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak berdampak pada peningkatan target secara periodik.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini adalah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengawasan akuntansi lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan satuan dan metoda perhitungan. Namun capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap capaian Renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Kinerja & Perjanjian

Target Jangka Menengah IKU tertuang dalam Matriks Kinerja & Perjanjian BPSPL Purwakarta 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Perjanjian sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat dicapai oleh adanya monitoring menyelesaikan terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Purwakarti. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada tahun 2024 terhadap BPSPL Purwakarta menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKU ini.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian sinergi. Tidak terdapat temuan BPK pada tahun 2024 ini, sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 tidak ada sasar dari IKK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan jaminan dasar disabel dengan mempunyai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat tomson IKK pada tahun 2024 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKK ini di Tahun 2025.

IKK 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup SPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dikembangkan adalah:

a. *Desk Evaluation*, yaitu pemeriksaan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern yang mempengaruhi oleh pengelola program kegiatan.
b. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji petik/test), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap hasil/output bantuan pemerintah

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektifitasnya adalah bantuan konstruksi, hasil efektifitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada pada hasil penilaian evaluasi efektifitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup SUPKPL. Nilai Efektifitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1.12-17. Kategori Nilai Efektifitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Keterangan
1.	11	• 61 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	9	• 51 - 60	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
3.	B	> 65 - 80	**Cukup Efektif** Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 65	**Kurang Efektif** Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berjalannya tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	**Tidak Efektif** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai sebutir tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melaksanakan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKK 33 Sebagai berikut

Tabel 3.1.13-10. Capaian IKK 33 BPSPL Pontianak

IKK-13	3.1.13. Capaian kegiatan 13 Tata kelola Pelaku Usaha yang baik (Logbook BPSPL Pontianak)
IKK-33	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2023 (Persentase (%))

Hasil pada 2023	Tahun 2024				Lompat Kinerja 2. Semakin Jangka Panjang		Lompat Kinerja 5. Semakin Jangka Menengah	
	Hasil pada 2023	Peningkatan	Target (% 2024)	% Realisasi thd Target (%)	Target 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target 2029	% Realisasi thd Target 2029
100	100	0	80	100	122	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKL, Desember 2024

1. Capaian IKK Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKK ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan ini disampaikan melalui surat Sekretaris Direktorat PKRL nomor B.6003/D.PKRL.1/TU.140/10/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023. BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang diberikan pada tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 100 sehingga perbandingan capaian tahun 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Berdasarkan hal tersebut dalam 4 tahun terakhir capaian IKK ini juga tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan meskipun terpenuhi pencapaian target secara terbaik.

Gambar 3.1.13-10. Tren Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tentuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Renstra IKK tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,0% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar lebih dari 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung dalamanya adalah pemanfaatan bantuan telah memberi dampak yang signifikan mengenai Konsepsi Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu kolaborasi koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk memperpendek rangkaian administrasi yang dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK, yaitu :

a. Monitoring Bantuan Pemerintah

Kegiatan monitoring Bantuan Pemerintah dilakukan dalam rangka pemantauan terhadap terhadap kondisi dan manfaat barang bantuan yang telah diberikan oleh BPSPL Pontianak sesuai dengan Kepdirjen PKRL nomor 71 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Metode yang digunakan dalam melaksanakan monitoring yaitu observasi langsung, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Pada tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melakukan monitoring bantuan konservasi kepada seluruh penerima bantuan tahun 2022 yaitu sebanyak 3 (tiga) kelompok.

➢ Pokmaswas Pasir Lestari

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pasir Lestari dilaksakan pada tanggal 22 Juli 2024 berlokasi di Desa Rata, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan kelompok ini yaitu pembangunan kawasan konservasi perairan kearifan dan pelestarian jenis ikan tersebarnya cumah dan/atau dilindungi (Pasut) serta ikan ekonomis di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Kearifan Wilayah Hulu. Pada tahun 2022, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp58.646.700 berupa terbentuk papan informasi dan pelewatan elektronik untuk mendukung kegiatan kelompok. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik/ barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat sehingga kegiatan pemanfaatan aktivitas pengelolaan bisa lebih optimal.

Gambar 3.1.13-14 Monitoring Bantuan Kompak Kelompok Pasir Lestari

➢ Pokmaswas Penyu Baru

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Penyu Baru dilaksakan pada tanggal 10 September 2024 berlokasi di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Kengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu Pembangunan kawasan konservasi dan pelestarian jenis ikan tersimpan penyu dan/atau dilindungi (Penyu). Pada tahun 2022, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp93.434.400 berupa sarana pendukung kegiatan seperti GPS, Handy Talkie, Radio Rig dan lainnya. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik/ barang bantuan dalam keadan baik dan telah memberikan manfaat dalam pemanfaatan penyu.

Gambar 3.1.13-17 Monitoring Bantuan Kompak Pokmaswas Penyu Baru

➢ Perkumpulan Petuni Mangrove Sungai Paloh Makmur

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Perkumpulan Petuni Mangrove Sungai Makmur dilaksakan pada tanggal 13 September 2024 berlokasi di Kelurahan Sebagai Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu pembangunan kawasan dan pelestarian mangrove. Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp80.112.780 berupa peralatan fiber dan pasatan elektronik untuk penunjang kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik/

bahang berikan dapat meskipun baik dan tetap memberikan manfaat dalam menunjang kegiatan dan efisiensi waktu.

Gambar 5.1.12-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Surya Pandan Mangrove

b. Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Kegiatan evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen PWL pada tanggal 9 – 13 Oktober 2023 secara daring melalui zoom meeting. Berdasarkan hasil penilaian pada kertas kerja evaluasi efektivitas bantuan pemerintah TA 2022, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang diberikan pada tahun 2021 sesuai surat Sekretaris Ditjen PWL nomor: S.6535/DJPWL.1/TU.140/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan Rincian Output (2065.DBH.001.032 Monitoring dan Evaluasi KONSPAL

Tabel 5.1.13-19. Realisasi anggaran IKK di Tahun 2024

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Total	Realisasi	Sisa
1.	2065.DBH.001.032 Monitoring dan Evaluasi KONSPAL	Rp17.319.000	Rp17.319.000 (100%)	-
TOTAL		Rp17.319.000	Rp17.319.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17.319.000 atau 100% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp17.319.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Pelaksanaan Dinas Harian.

Gambar 5.1.13-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

6. Pengembangan Sarana

Kerjasama perlu terus dijaga dengan mengutamakan keseimbangan antara kondisi dan permintaan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengembangannya perlu dilakukan dengan mengutamakan keseimbangan antara partisipasi teknisi dan pemerintah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah/ Unpluq BPSPL Pontianak tahun 2024.

I.5 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kewilayan Lingkup BPSPL Pontianak (WLI)

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024, dan belum ada IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Penerapan IKU ini diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kewilayan lingkup KKP yang dilaksanakan setiap tahun.

Audit kewilayan internal adalah Audit kewilayan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kewilayan Internal atas pengelolaan aset di wilayah di lingkungan pencipta aset. Pengawasan kewilayan internal yang menjadi tanggung jawab UKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kewilayan internal ini adalah Pengawasan aset oleh kewilayan internal Pengawasan Pengelolaan Aset, Aset dan Pengawasan penyelenggaran aset pada internal

Hasil pengawasan kewilayan internal BPKN, Inspektorat pusat diatur oleh Biro Umum dan PBJ dengan berkoordinasi Tim Pelitar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan kewilayan yang dilakukan dan disimpan termasuk Biaya Pengawasan lainnya.

Tabel 2.1.13-99. Kategori Hasil Pengawasan Kewilayan

Kategori		Interval Nilai
AA	Sangat Memuaskan	+90 – 100
A	Memuaskan	+80 – 90
BB	Sangat Baik	+70 – 80
B	Baik	+60 - 70
CC	Cukup	+50 - 60
D	Kurang	+30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 2.1.13-01. Capaian IKU 04 BPKP, Pontianak

IKU 13	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPKP, Pontianak							
IKU 01	Nilai Pengawasan Internal Kewilayahan Lingkup BPKP, Pontianak (Nilai)							
Uraian IKU	Tahun 2023				Matrik Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2022	Peningkatan	Target IKU 2023	% Realisasi thd Target IKU	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023
-	81,29	+	80	102	80	102	-	-

Sumber data: BPKP, Pontianak dan DJPDN, Desember 2023

1. Capaian IKU Tahun 2023

Pentuk pengukuran dan pelaporan capaian pada untuk IKU ini ditetapkan secara tahunan. Capaian Kinerja IKU ini disampaikan melalui Nota Pb Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 2457/DJU/TU.03/01/2024 tanggal 14 Oktober perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kewilayah Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKN. Berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Kewilayah Internal Lingkup UPT, BPKP, Pontianak mendapatkan nilai pengawasan internal kewilayah sebesar 81,29 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 2.1.13-02. Tabel nilai pengawasan kewilayah

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kewilayah sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKN, 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKN, karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKN.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matrik Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matrik Kinerja & Pendanaan BPKP, Pontianak 2020 – 2024 sebesar 80. Capaian tahun 2024 telah mencapai target sebesar lebih dari 100% jika dibandingkan dengan Matrik Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKU ini yaitu adanya Analisis Ahli Pertama yang mutasi ke BPKP, Pontianak sehingga tugas kewilayah dapat dilakukan oleh ADI yang pernah joblot.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menyatakan cara atau faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan pada pencapaian IKI ini yaitu mengikuti kegiatan pelatihan pengawasan internal kearsipan secara daring sehingga dapat menjadwalkan pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU yaitu:

a. Menerbitkan timbal balik atas surat Sekretaris DJKPL nomor B-1476/DJKPL.1/HK.410/10/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal menyampaikan laporan Kepchasan Direktur Jenderal Pengelolaan Kekayaan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Penyimpanan dan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL
b. Rapat rutinan Rencana Aksi Pengawasan atas Kearsipan dilaksanakan secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B-2900/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
c. Mengikuti Bimbingan Teknis aim media Arsip secara daring pada 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B-3174/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan Bimtek Teknis Alih Media Arsip.
d. Menghadiri undangan kegiatan Pemusnahan Arsip RPH Pemerintah pada tanggal 14 September 2024 sesuai surat undangan nomor B-5868/RPH.3/HK/TU.930/10/2024.
e. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Setelah Unit Pengolah Tahun Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B-4188/SJ.6/TU.330/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
f. Koordinasi Kearsipan Kepchasan dan Pokhasan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B-3942/SJ.6/TU.330/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
g. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal kearsipan internal Lingkup UPT Setelah Unit Pengolah Tahun Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B-4188/SJ.6/TU.330/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
h. Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B-3000/SJ.PKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKI ini didukung dengan efektif anggaran dari Realisasi Revisi Output [2067.EBA.992.007] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) satu Rp 35.036.440 atau 47,33% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp 74.033.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

Tabel 3.1.15-03. Realisasi Anggaran IKI-24 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa/%
1.	[2067.EBA.992.007] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 74.033.000	Rp 35.036.440 (47,33%)	-
TOTAL		Rp 74.033.000	Rp 35.036.440 (47,33%)	-

4. Pengembangan Sumber

Koordinasi gender aspek sosial dengan mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada PU ini masih belum optimal dilaksanakan partisipasi pegawai dalam kegiatan ini masih dominasi perempuan saja/tunggal.

I.5 Rencana Aksi Tahun 2023

Pada rancangan kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang terlaksananya RPI ini di Triwulan IV.

II. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSDL) dan di Lingkup Ditjen PRL dapat dilihat pada Tabel 2.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki indikator kinerja yang sama sebanyak 22 indikator dari 24 indikator kinerja di BPSPL Pontianak, Hal itu dikarenakan BPSPL Pontianak mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan yang otomatisnya akan dinilai oleh unit kerja PSDL lainnya. Perbandingan capaian kinerja dari indikator kinerja yang sama dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai PNBP (Rp000)

Berdasarkan perbandingan, nilai PNBP yang diterima oleh BPSPL Pontianak pada tahun 2024 berada di urutan ketiga di bawah BPSPL Denpasar dan LPSPL Serang. Capaian nilai PNBP BPSPL Pontianak lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPSPL Padang, BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Namun, jika dibandingkan berdasarkan capaian dengan target penerimaan PNBP, BPSPL Pontianak berada di urutan ke lima dari seluruh unit kerja. Hal ini dikarenakan target penerimaan PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.

Berikut 2.1.12-1. Perbandingan Pencapaian PNBP dengan Unit Kerja Lain

2. Tenaga Kerja yang Tersertifikasikan Berdasarkan Nasional Bidang Cinta Laut (Orang)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk tenaga kerja yang tersertifikasi dalam Series SDI sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 333 orang dari 333 orang, kecuali BPSPL Padang yang memiliki capaian melebihi target yaitu 333 orang dari 333 orang. Demikian itu, BPSPL Denpasar memiliki target dan capaian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan unit lain yaitu 140 orang dari 140 orang.

3. Dokumen Operasionalisasi Penetapan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Dikaji (Dokumen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk Dokumen Operasionalisasi Penetapan Pemanfaatan Ruang Laut sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 0 dokumen dari 0 dokumen.

4. Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi (Daerah)

Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak untuk Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

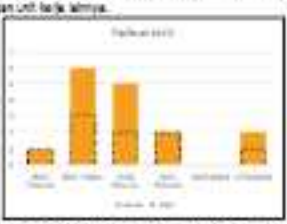

Gambar 3.1.12-3. Perbandingan Capaian Fasilitasi KKPD dengan Unit Kerja Lain

5. Kerjasama Konservasi yang Difasilitasi (Kesepakatan)

Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak bersama dengan BPSPL lainnya untuk Kerjasama Konservasi yang Difasilitasi menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal ini dikarenakan pada sasaran kinerja kerjasama/kemitraan hanya BPSPL Pontianak yang memiliki dua indikator kinerja yaitu kerja sama dan kemitraan sehingga capaian realisasinya hanya dua (PKS) sebanyak 100%.

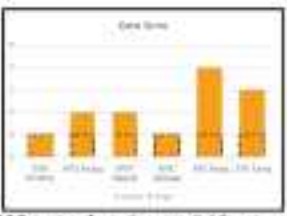

Gambar 3.1.13-3. Perbandingan Capaian Kesepakatan Kerja Sama dengan unit Kerja Lain

6. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Konservasi (Kelompok)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian capaian BPSPL Pontianak untuk bantuan KKMPAN sama dengan unit kerja lainnya. Terdapat penurunan target dan capaian menjadi 0 kelompok jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal itu dikarenakan terdapat penurunan anggaran yang signifikan untuk bantuan KKMPAN di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

7. Masyarakat di Kawasan Konservasi yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (Masyarakat)

Berdasarkan perbandingan, capaian BPDPL Pontianak untuk jumlah orang pada Fasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian alternatif berada di urutan ketiga di bawah BPKPL Makassar dan LPSPL Sorong. Jumlah orang yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian alternatif di BPDPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPDPL Denpasar, BPSPL Padang dan LPGPL Ciamis, namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPSPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.

Gambar 3.1.12-4. Perbandingan Capaian Kuantitas Hitra dengan Unit Kerja Lain

8. Jenis ikan tersebar apabila yang dilakukan pemijahan dan pelestarian (Unit)

Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPDPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan tersebar pulau yang dilakukan pemijahan dan pelestarian berada di atas nilai tengah median. Jumlah jenis ikan tersebar pulau yang dilakukan pemijahan dan pelestarian di BPDPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPDPL Denpasar, LPDPL Sorong dan LPMPL Kupang, namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPMPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.

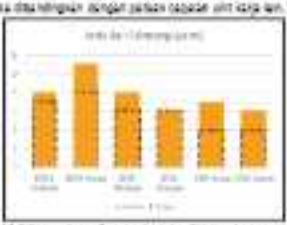

Gambar 3.1.12-5. Perbandingan Capaian Jenis ikan (Kelompok) pengelolaan Kerja Lain

9. Jenis kearifanlokalpengelolaan flayasi perairan yang diimplementasikan secara berkelanjutan (Jenis)

Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPDPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan tersebar pulau yang dimanfaatkan sama dengan BPSPL Padang dan lebih tinggi dari BPSPL Denpasar, LPSPL Serang dan LPSPL Sorong, hanya BPSPL Makassar yang memiliki capaian lebih tinggi dari BPSPL Pontianak. Jika dibandingkan dengan target, persentase capaian BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.

Gambar 2.1.13-6. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain

13. Perkembangan Jenis Luas Kawasan Hutan yang Diidentifikasi (Ekosistem)

Berdasarkan perbandingan secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk identifikasi pemanfaatan air laut selain energi sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 1 dokumen dari 1 dokumen.

11. Kawasan TSK yang Ditetapkan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum pencapaian capaian KPI(%) Pontianak mencapai yang tertinggi penanggulangan pencemaran dibandingkan dengan unit kerja lainnya, yaitu 100%. Hanya LPSPL Serang yang memiliki target dan capaian yang lebih rendah yaitu 2 kawasan dari 2 kawasan.

12. Nilai IKPA

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai IKPA BPSPL Pontianak merupakan yang paling rendah. Nilai IKPA paling tinggi dicapai oleh BPSPL Makassar dengan nilai 93,73.

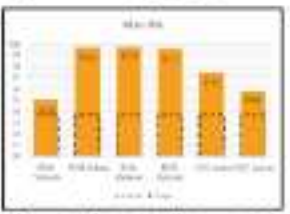

Gambar 2.1.13-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

13. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 89%. Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar Nomor, jika dibandingkan dengan unit kerja lain, nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPSPL Pontianak masih lebih rendah.

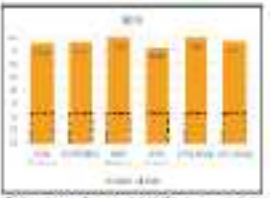

Gambar 2.1.10-9. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai evaluasi pembangunan Zona Integritas BPSPL Pontianak menduduki yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 telah berhasil memenuhi WBK sehingga nilai yang diperoleh oleh BPSPL Pontianak meningkat nilai pada tahun 2023.

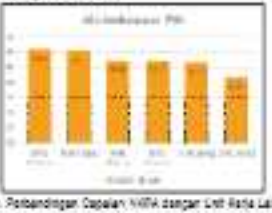

Gambar 2.1.10-9. Perbandingan Capaian IKPA dengan Unit Kerja Lain

15. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai Indeks profesionalitas ASN BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan unit kerja lain.

Gambar 2.1.10-10. Perbandingan Capaian IP ASN dengan Unit Kerja Lain

16. Nilai PM SAKIP (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan UPSPL Sorong. Namun capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan unit kerja lainnya.

Gambar 3.1.13-11. Perbandingan Capaian Nilai IKU Eselon I dengan Unit Kerja Lain

17. Laporan SPIP yang disusun (Laporan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian laporan SPIP yang disusun oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 100% atau 4 laporan dari target 4 laporan.

18. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 80%.

19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian penyelesaian temuan LHP BKP yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 100%.

20. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 120% atau sebesar 130% dari target 80%. Hanya BPSPL Denpasar yang memperoleh nilai 97,69% dari target 80%.

21. Persentase Unit Kerja yang Melaksanakan Kinerja Manajemen Pengetahuan Terdaftar (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian laporan SPIP yang disusun oleh BPSPL yaitu lebih dari 100% atau sebesar 133,33% dari target 94%.

22. Nilai Pengawasan Internal Kesetaraan (nilai)

Kesimpulan perbandingan, secara umum persen capaian nilai Pengawasan Internal Kesetaraan yang diperoleh oleh BPSPL Pontianak setara lebih besar dari BPSPL Makassar. Namun nilai pengawasan internal kesetaraan BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

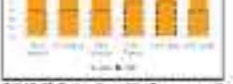

Gambar 3.1.13-12. Perbandingan Nilai Pengawasan Kesetaraan

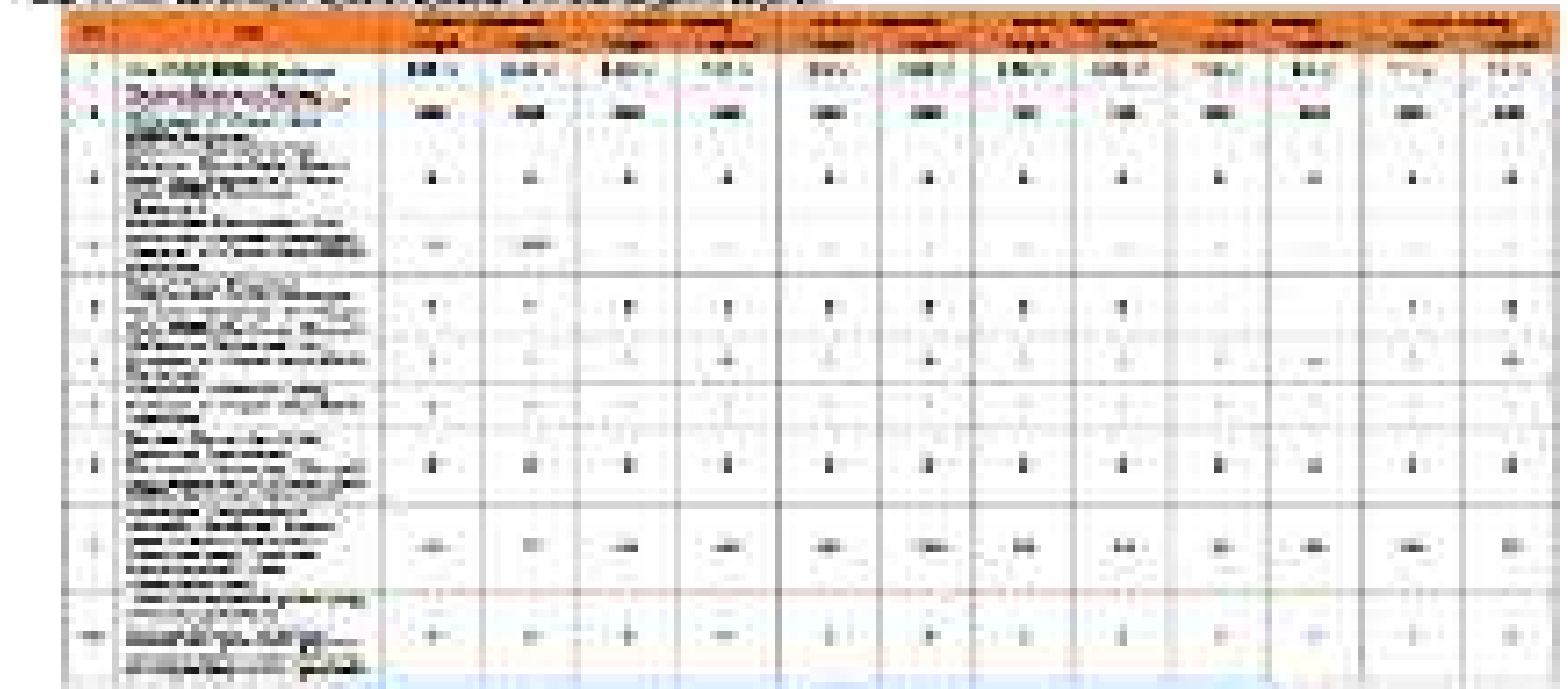

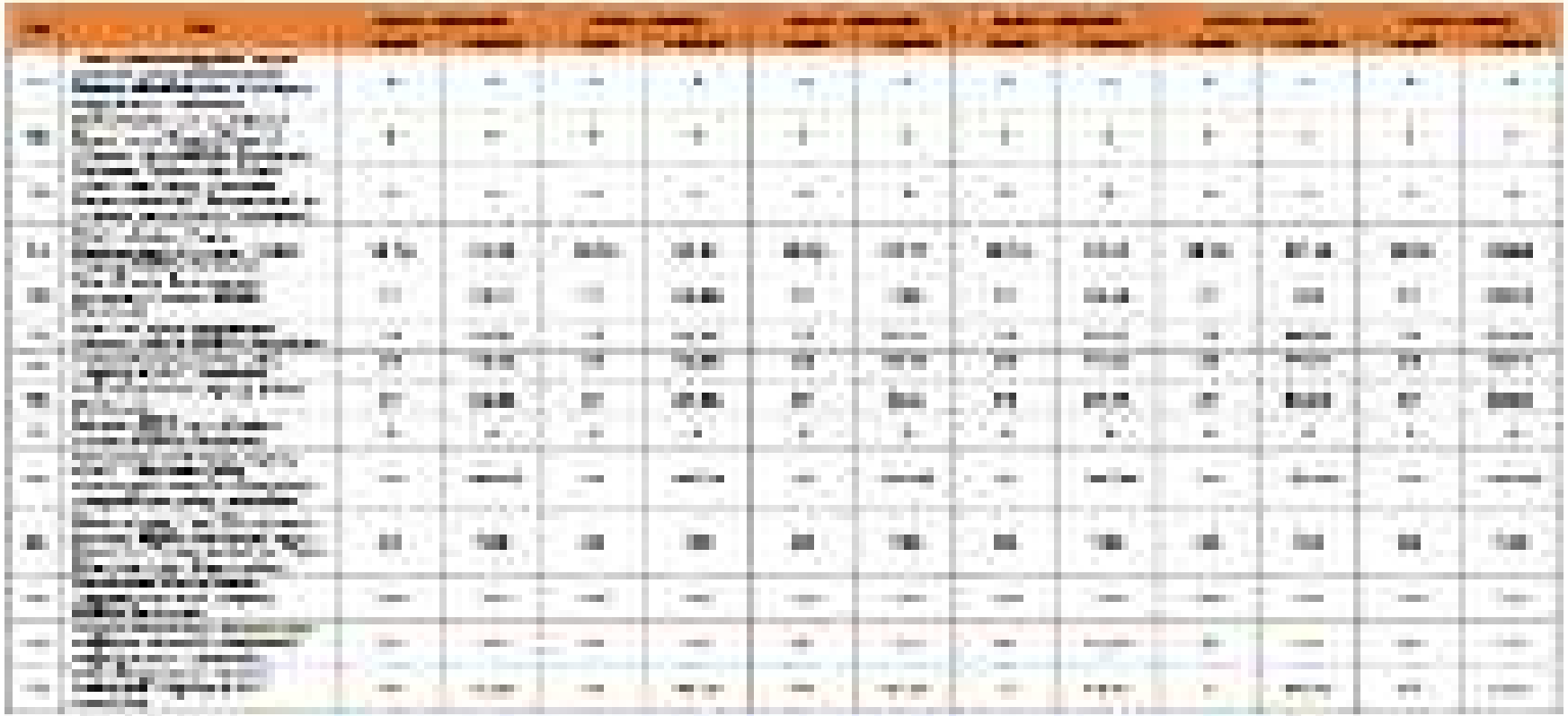

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas Tahun 2024 Nomor: SP DIPA 002.07.2.417426/2024 dengan Pagu Revisi anggaran sebesar Rp16.889.409.000. Realisasi anggaran diproses dari aplikasi online SMERAP di https://apps.perbendaharaan.go.id/. Pada Tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar 16.720.906.818 atau 98,99% dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per-kegiatan sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1 Tabel Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024

No	Kegiatan	Realisasi Waktu	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	(2868) Pemberdayaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan Lindung dan Hutan Lainnya di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PHI dan PNP	4.874.284.000	4.719.142.814	97,34	-
2.	(2868) Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	RM	100.000.000	99.987.452	99,99	-
3.	(2868) Pengelolaan Hutan Lindung	RM dan PNP	1.100.000.000	1.148.207.822	99,99	-
4.	(2847) Dukungan Manajemen Internal Unit/Organisasi/Satuan Kerja	RM	11.082.016.000	10.971.097.966	99,00	-
5.	(2846) Pengelolaan dan Pemulihan Kawasan Hutan dan Hutan Pulau Kecil	RM	638.000.000	709.780.226	99,97	-
Total			**16.889.409.000**	**16.720.906.818**	**98,99**	

Sumber data: aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 30 September 2024

Dalam hal alokasi anggaran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 5 (lima) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai tingkat pemerintah baik yang berhutang dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dari organisasi pemerintah
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dalam rangka belanja bantuan sosial serta belanja pemeliharaan. Belanja barang dipergunakan untuk :
3. Belanja Barang Operasional mengalokasi pemakaian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari suatu satuan kerja dan untuk penyediaan pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang non Operasional: merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dalam rangka dalam rangka pemenuhan target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat sistemik.
5. Belanja modal pengadaan untuk pembayaran pembelian aset dan/atau penambahan nilai aset berupa aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memiliki batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran DIPDPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.1(2)-2.1.12-3. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Periode	Pagu Awal (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	51 Pegawai	Tahun 2024	6.727.912.000	6.697.116.381	99,54
2.	52 Barang	Tahun 2024	11.334.381.000	11.334.447.114	99,94
3.	53 Modal	Tahun 2024	848.133.000	844.280.823	99,55

*) Data Anggaran
Sumber Data : SAKTI, Monitoring Kegiatan Output per tanggal 31 Desember 2024

Dari total Pagu Awal anggaran belanjaannya kerja tersebut (Belanja Pegawai Tahun 2024) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 99,82%. Untuk belanja barang sebesar 99,94% dan untuk belanja modal 99,90%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp6.628.116.381 (99,82%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri 3%), anak (6%), struktural (6%), fungsional (6%), PPh (5%), Beras (%) dan tunjangan umum (%) yang meliputi pajak penghasilan gaji (PPh yang melekat dan tunjangan khusus (%). Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan (GTK).
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2024 sebesar Rp11.245.647.114 atau 99,94% dari Pagu Awal anggaran Rp11.400.981.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang adalah sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), servis kendaraan perjalanan, jasa lainnya pemeliharaan gedung dan bangunan, jamu manusia (perjalanan dan makan).
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, servis, jasa profesi, jasa lainnya perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sempat dengan Tahun 2024 sebesar Rp844.280.823 (99,90%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 unit selama 12 Bulan sesuai SPK No.58/SPK-SPP/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.
   - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 2 Unit Hyander selama 1 Tahun sesuai SP.27/SPP-PL.3/PPK/SPP/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.

- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pengawasan sebanyak 1 Unit Fortuner selama 1 Tahun sesuai SP.03/BPSFL.2/PPK/SP/I/2024 tanggal 9 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pengawasan Ikan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.09/BPSFL.2/PPK/SP/I/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pengawasan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.08/BPSFL.2/PPK/SP/I/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 unit selama 12 Bulan sesuai SPK.01/BPSFL.2/PPK/SP/I/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Makassar Kolu sebanyak 1 unit selama 12 Bulan sesuai SPK.04/BPSFL.2/PPK/SP/II/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.27/BPSFL.2/PPK/SP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Komunikasi Pelabuhan sebanyak1 Unit sesuai SP.28/BPSFL.2/PPK/SP/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- Belanja Kegiatan Konsinyasi - Bongkaran Barang Rapat BRSK, Konsinyasi TA 2024 sebanyak 85 Dok sesuai SPK.40/BPSFL.2/PPK/SP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Kabel dan Longkar sebanyak 2 Paket sesuai SPK.42/BPSFL.2/PPK/SP/IV/2024 tanggal 23 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai SP.45/BPSFL.2/PPK/SP/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Kursi, Brankas dan Lemari sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSFL.2/PPK/SP/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Teropong sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.JUL/BPSFL.2/PPK/SP/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya - Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSFL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.48/BPSFL.2/PPK/SP/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Belanja Perlengkapan dan Mesin untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Pasadi di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSFL.2/PPK/SP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSFL.2/PPK/SP/V/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendorong Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 unit sesuai SP.46/BPSFL.2/PPK/SP/V/2024 tanggal 3 Juni 2024.

- Belanja Modal Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pemotongan Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK:50/BPSPL.3/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Pemeliharaan dan Irigasi - Pengadaan Konstruksi Pemasangan Konservasi Vehicle CCTV sebanyak 1 Paket sesuai SP.51/BPSPL.3/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Pemeliharaan Alat Gedung dan Bangunan - Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Rolling Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.55/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Pemotongan Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 65/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemotongan Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 54/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pemeliharaan Bangunan Gedung Bermesin KOMPAK TA 2024 Kerohanian Pemeliharaan Lokasi di Kemahan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pelataran Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Modulator Hajj dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 67/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Modulator Hajj dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 67/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Pemeliharaan Kesehatan dan Kebersihan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 59A/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Pemeliharaan Kesehatan dan Kebersihan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 484/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 69/BPSPL.3/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan TAHAPAN Alih Daya (Pramubakti, Pengelola dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display AVDAK sebanyak 1 Unit SP Nomor 81/BPSPL.3/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Kasir Incentoring Resort di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 83/BPSPL.3/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 4 September 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Arti Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.Kpu/BPSPL.3/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu sebanyak : 1 Paket sesuai SPK.st.68/BPSPL.3/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis pencapaian sasaran/tujuan kinerja tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Agregasi Kinerja/nilai nilai Organisasi (NKO) (IKU+IKM) atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu 107,58% (Sangat Hijau + Biru). Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Pada tahun 2024 sebesar Rp18.739.996.813 atau 93,89% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp19.960.636.000. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja telah tercapai. Hal ini jika dibandingkan dengan capaian unit kerja lain, masih banyak capaian kinerja BPSPL Pontianak yang lebih rendah. Capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan lebih tinggi agi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak. Untuk itu, ke depannya perlu melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dan upaya pemecahan masalah pada saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga perlu mengidentifikasi Sasaran Kinerja pada tahun 2025 yang dapat meningkatkan Nilai Kinerja Organisasi secara signifikan sehingga kegiatan berikutnya untuk Sasaran Kinerja tersebut dapat dioptimalkan.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya dapat dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

1. Melakukan pemantauan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara triwulan sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari rekomendasi tujuan kinerja periode sebelumnya sebagai upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1.15-1. Tindak lanjut rekomendasi capaian kinerja pada tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2023			
1	Melakukan koordinasi secara aktif rutin dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut.	Telah melakukan koordinasi secara aktif ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada tanggal berikut ini: 1. 18 – 20 Januari 2024. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. 4 – 7 Februari 2024, Rapat koordinasi Penyusun dokumen KKPRL LPT Lingkup Ditjen PHPL	https://bit.ly/TLLKPRK2024
Triwulan I Tahun 2024			
2	Mengusahakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka monitoring	Telah mengusahakan untuk suda revisi anggaran pada RBA 003. Anggaran sudah	https://bit.ly/TLLKPRK2024

No	Kegiatan/output	Target Luaran	Data Dukung
	anggaran yang disiapkan	diharapkan pada bulan Juni dan kemudian menjadi 200.000.	
3.	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kompetensi pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui kelengkapan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat	https://bit.ly/TLUJ4PKS2024
Triwulan II Tahun 2024			
4.	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kompetensi pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui kelengkapan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring	https://bit.ly/TLUJ4PKS2024
5	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KSBP) terkait dengan dasar hukum Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan oleh KKP	https://bit.ly/TLUJ4PKS2024
Triwulan III Tahun 2024			
6.	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat kompetensi pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui kelengkapan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring	https://bit.ly/TLUJ4PKS2024
7	Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada sebuah IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang	Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada sebuah IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mana perumahan kan menjadi ke (Orang)	https://bit.ly/TLUJ4PKS2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
	Efektifkan Tata penanaman dan Pemeliharaan Taman		

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPKH, Pemerintah dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran cara dukung Laporan Kinerja ini dapat diakses pada tautan https://bit.ly/DataDukungLKIP2024. Lampiran ini meliputi:

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 dan Penetapan Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024;
2. Penghargaan yang diterima oleh BPSPL Pontianak Pada tahun 2024:
   - Sertifikat Dengan Predikat Anggaran Terfokus Tahun 2023 Lingkup Pusat dan UPT pada tanggal 16 Januari 2024
   - Link Kerja Berprestasi "Informasi" dalam Forum Koordinasi Informasi Publik Ingkup Kkdl Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024
   - 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tanggal 9 Oktober 2024
   - Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 5 Desember 2024
   - Link Pengumuman Unit/Kasi Terbaik III di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024
3. Matrik Kinerja Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024
4. Memorandum Kerjasa Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Dalam/atau Dilain PNBL nomor B.5/DJPKRL.3/TU.330/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Capaian PNBP Lingkup Dilain PNBL Tahun 2024;
5. Memorandum Kerja Tim Kerja Kemandirian Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 29/BPSPL.3/TU.140/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Pemanfaatan Berkelanjutan Berkemasan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
6. Memorandum Kerja Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 34/BPSPL.3/TU.140/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Indikator Dokumentasikan Nominal Pemanfaatan Ruang Laut yang Diawasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
7. Memorandum Kerja Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 4/BPSPL.3/TU.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
8. Memorandum Kerja Tim Kerja Pemberdayan dan Restorasi BPSPL Pontianak nomor 8/BPSPL.3/TU.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Dokumen Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
9. Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kota Kabangpora Nomor 01/DJPKRL/KS.310/1/2024 dan nomor 8-452/KK/KSP/01/VI/04/2024 tentang

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Maluku/Unit Wilayah Kerja Kabupaten Kota Kepulauan.

10. Perjanjian Kerjasama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Nomor: B.1485/BPSPL.0105.2/01/1/2025 dan Nomor 0002/UN17.4/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Maluku/Unit Wilayah Kerja Kabupaten Kota Kepulauan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.

11. Memorandum Kerja Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 39/BPSPL.2/TU.140/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyerahan Capaian Kinerja IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi (KOMPAK) yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kompoc).

12. Memorandum Kerja Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 38/BPSPL.2/TU.140/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang).

13. Memorandum Kerja TIP Kerja Perencanaan dan Kerjasama BPSPL Pontianak nomor 3/BPSPL.2/TU.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 Penyampaian Capaian Kinerja IKU Jaring Insang Tetap (Gillnet) yang Dioperasikan Nelayan, Penyesuaian Ukuran Mata Jaring dan Penandaan Rumah yang Diakukan Penelitian, Penyesuaian Ukuran Mata Jaring dan Penandaan Rumah yang Diakukan Penelitian, Pertukaran Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

14. Memorandum Kerja Tim Kerja Pengawasan Pemanfaatan Hasil Laut BPSPL Pontianak nomor 2/BPSPL.2/TU.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Laporan Kegiatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilakukan Secara Berkelanjutan.

15. Memorandum Kerja Tim Kerja Pengawas Pemanfaatan Hasil Laut BPSPL Pontianak nomor 34/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Pemanfaatan Air Laut Telah Bhakti yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

16. Memorandum Kerja Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 39/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

17. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 194/SJ.2/KC.4/III/2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perkiraan Semester II Tahun 2024.

18. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 183/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Kilat Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan III TA. 2024.

19. Memorandum Kerja Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Kekeluhan Unit PKBL nomor 20 /DJPRL.1/TU.210/1/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berprestasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

33. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.1[illegible]/PHKL.1/TU.140/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Hibah Profesional Apatelki Sidi Kepala [illegible] Kinerja Semester I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PHKL.

34. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.5721/DJPHKL.1/PK.613/10/2024 tanggal 27 September 2024 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada [illegible] Pontianak.

35. Laporan SPIP [illegible] Pontianak/Triwulan IV tahun 2023 dan Laporan SPIP [illegible] Pontianak Triwulan I – II Tahun 2024.

36. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.134/DJPHKL.1/TU.140.1/02/24 tanggal 12 Januari 2024 perihal Capaian Perjanjian Tahun Kerja UPT Lingkup DJPHKL yang menandatangani Dalam Menalamkan Pengadaanan yang Tandatangi Triwulan IV Tahun 2024.

37. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.940/DJPHKL.1/HP.140/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Pemerikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PHKL Triwulan IV Tahun 2024.

38. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.156/DJPHKL.1/HP.202/1/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Penyesalan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Kantor Lit KKP tahun 2022.

39. Surat Direktur Jenderal PHKL nomor B.6939/DJPHKL.1/TU.140.03/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Kerjasan Pemerintah Tahun 2023.

37. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Selaku Ketua Sekretariat Jenderal KKP nomor 2487/SJ.5/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengamatan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PHKL tahun 2024.

RENCANA KERJA

[redacted]

2024

Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

2020 - 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 2020 - 2024 dapat diselesaikan. Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan periode ke-3 (tiga) tahunan yang disusun untuk menjabarkan misi ke-tiga Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021).

Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan organisasi. Dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta mampu mengantisipasi segala perubahan dalam upaya menuju menjadi instansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara, produktif, berkelanjutan dan menyebabkannya bagi masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak, 28 Desember 2021

Kepala BPSPL Pontianak

Ir. R. Andhy I. Soemorumekso, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... - 26 -
DAFTAR ISI 26
BAB I PENDAHULUAN ..... - 1 -
A. Latar Belakang ..... - 1 -
B. Kondisi Umum ..... - 5 -
C. Potensi dan Permasalahan ..... - 9 -
D. Lingkungan Strategis ..... - 33 -
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS ..... - 26 -
A. Visi Komisioner Kekerasan dan Perbatasan ..... - 26 -
B. Misi Komisioner Kekerasan dan Perbatasan ..... - 26 -
C. Tujuan ..... - 27 -
D. Sasaran 28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..... - 31 -
A. Arah Kebijakan dan Strategi Orjen PHI ..... - 31 -
B. Kerangka Kelembagaan ..... - 33 -
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 37
A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024 ..... 37 -
B. Kerangka Pendanaan 42
BAB V PENUTUP 43
LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DPSPL PONTIANAK TAHUN 2020-2024 37

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 - 2024 merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai tujuan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Jokowi, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RKJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan dan menanya kerjakan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam rangkaian RPJMN dan arahan Presiden RI tersebut dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ditetapkan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai arahan dan pencapaian agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun ke depan.

B. Kondisi Umum

Periode kurun waktu 2015-2019, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Pontianak, Dinas PSL baik secara kelembagaan maupun kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam energi-energi dampak lainnya alam maupun aktivitas manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan 'kesetiaannya' yang ada, BPSPL Pontianak berupaya untuk menyesuaikan tantangan dalam pengelolaan ruang laut di seluruh wilayah kerjanya yakni pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah se-Kalimantan.

Secara garis besar, target indikator Kinerja Utama (IKU) BPSPL Pontianak telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSPL Pontianak terkait: melakukan upaya pemanfaatan ruang laut yaitu pendampingan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur untuk melakukan penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah (Perda).

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041

Adanya UU No.11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ketentuan dari PP ini diubah/diatur 2 menjadi 1 Pemen KP
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan dari PP ini diubah/diatur dari 10 menjadi 3 Pemen KP
3. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, ketentuan dari PP ini diubah/diatur dari 40 menjadi 11 Pemen KP

PP Nomor 21 Tahun 2021 mengenai/ubi penyusunan dokumen rencana zonasi di DK. Pemanfaatan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain :

- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan ditetapkan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan ditetapkan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis ruang pemulihan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan ditetapkan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- Penyusunan materi teknis ruang pemulihan di sekitar PWP3K (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan ditetapkan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sesuai kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- Pembentuk peraturan teknis materi teknis Pemulihan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi TA. 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi selama 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang ditentukan koordinasi UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya OU Cipta Kerja mengakibatkan proses bisnis berubah dengan adanya PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dimana Dit. PEL memberikan Rekomendasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan berbasis

provinsi. UPT BNPB mengelola aduan serta rekomendasi pemeliharaan dan perbaikan tanggul existing di provinsi prioritas.

Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kalimantan, BPSPL Pontianak telah melaksanakan survei biofisik dan sosial ekonomi sebagai rangka pendukung penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat pada tahun 2019. Selain itu juga melakukan pengumpulan data dukung RPZ di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

BPSPL Pontianak juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka konservasi jenis diantaranya :

1. Pelayanan perizinan rekomendasi Ular dan Buaya di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Rekomendasi yang telah terbit dalam kurun tahun 2015 – 2019 pada seluruhnya 1600 surat.
2. Penyelesaian data survei Penyu yang dimulai sejak tahun 2015 di Pantai Pulau, Kalimantan Barat (Pulau Datuk, Pulau Penambilan, dan Pulau Sambar Gelap (Kalimantan Selatan) , dan Pulau Pasir-Birahan Kalimantan Timur). Cakupan survei tahun 2015 – 2019 jenis penyu yang ditemukan Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan Penyu Lekang.
3. Penyelesaian data survei Ikan dan Pari yang dimulai sejak tahun 2015 – 2019 di lokasi pelabuhan perikanan dan Kabupaten Barat (PP Bunga Kuku dan PPN Pemangkat) dan tahun 2016 – 2019 di Muara Kintap, Kalimantan Selatan dan di PPI Muaggar, Kalimantan Timur.
4. Monitoring Kima yang dilaksanakan di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2015.
5. Monitoring Kima dan penyusunan Taman Kima di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Taman

Kimia Lemukutan selanjutnya diresmikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bersama Bupati Bengkayang.

6. Monitoring Dugong yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang Barat, Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Lokasi monitoringnya terdapat di perairan Kecamatan Kendal (Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, dan Desa Teluk Bagam).
7. Monitoring Hiu Paus yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Tabalayan, Kalimantan Timur. Hiu paus ditemukan sebanyak 17 ekor yang terdiri dari 16 ekor jantan dan 1 ekor betina.
8. Monitoring terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
9. Monitoring Penyu yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kalimantan Barat. Lokasi konservasinya terdapat di Pemuteri Tanjung, Desa Pulau Simping Lebih, Teluk Batang, dan Muara Hantakan.
10. Survei potensi ekosistem pesisir dan laut dalam rangka penyediaan data series di KKPD Pulau Derawan, Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2019.
11. Pengembangungan dan rehabilitasi Taman Kima di Pulau Lemukutan dan Pulau Derawan pada tahun 2019.
12. Respon cepat penanganan Biota Laut terdampar di wilayah kerja BPSPL Pontianak dalam kurun tahun 2015 - 2019.

BPSPL Pontianak berperan dalam pemberian bantuan pemerintah untuk Kelompok Pengawak Konservasi (KOMPAK) melalui pelaksanaan proses identifikasi calon kelompok penerima bantuan KOMPAK. Pada tahun 2018, ada 6 kelompok masyarakat yang mengelola kawasan konservasi yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahun 2019, ada 4 kelompok yang mengelola kawasan perairan yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Dalam rangka pengembangan potensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

1. Identifikasi kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kalimantan Barat pada tahun 2016. Penyerahan lahir seluas 50.000 lahir di Kabupaten Singkawang, 130.000 lahir di Kabupaten Bengkayang, dan 10.000 di Kabupaten Mempawah untuk dilakukan penanaman mangrove.
2. Jejaring kemitraan dengan melaksanakan Pengawasan Bersama melalui Kemah Pemuda Pesisir pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 dilakukan Kemah Pemuda Pesisir 3 Negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)
3. Pemberian Bantuan Sarana Pengolah Sampah Plastik untuk ECOBlox Berakah di Desa Akit-Akit Besar, Kec. Akit-Akit, Kab. Bintan, Kalimantan Selatan dan KSM Nibung Alam Hijau di Desa Sei Nibung, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2017
4. Pendampingan dalam rangka pemberian bantuan berupa satu paket peralatan selam di Pulau Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2018
5. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (BPL) di Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan Pantai Sakinang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2018 serta di Pantai Kura-Kura, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2019
6. Dukungan kelompok nelayan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bantuan sarana dan prasarana di Pulau Marabatuan, Kalimantan Selatan pada tahun 2019

2018% Pentarak juga menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas prestasi memperoleh predikat sebagai unit kerja meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan memiliki sumber daya alam yang penting bagi pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya alam hayati dan non hayati pesisir terdiri dari terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.430,39 km² terdiri dari, lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 8.700,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 338 pulau-pulau kecil dari 4 pulau prioritas kecil tersebut.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah serta sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ekosistem mangrove hampir terdapat di semua pesisir Kalimantan Barat. Luas ekosistem mangrove di Kalimantan Barat yaitu 177.479,51 Ha yang tersebar di 7 kabupaten/ kota pesisir. Keanekaragaman pada mangrove di Kalimantan Barat sangat tinggi dan lengkap, di Kabupaten Kota Kayu terdapat beberapa spesies pohon langka seperti *Bruguiera hainesii* (Bakau Kota Baru) yang hanya terdapat di Singapura, Malaysia, Papua, Sulawesi dan Indonesia, serta *Xanthostemon verdugo* (Lenggadai Betina yang merupakan endemik Kalimantan dan Sumatera. Mangrove di Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Pesut (*Orcaella brevirostris*). Dari total luasan mangrove di

Kalbar. Kabu Raya merupakan kawasan terluas, yakni 129.604,125 hektar. Di kawasan mangrove Kubu Raya juga terdapat 33 jenis mangrove sejati dari 40 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia. Kondisi mangrove di Kabupaten Barat secara keseluruhan tergolong dalam kondisi "sedang" hingga "baik" dengan spesies dominan adalah *Avicennia* spp. dan *Rhizopora* spp.

Ekosistem terumbu karang di Kabupaten Barat banyak terdapat di perairan Kabupaten Bantaba, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sintang. Luas ekosistem Terumbu Karang secara keseluruhan yaitu 71.634, 42 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang, kondisi terumbu karang tergolong dalam kondisi "sedang" hingga "baik" dengan tutupan karang hidup berkisar antara 34% - 51%.

Ekosistem lamun di Kalimantan Barat hanya terdapat di perairan Kabupaten Bengkayang dan Ketapang dengan luas keseluruhan yaitu 29.345,30 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang ekosistem lamun hanya terlihat spot - spot kecil yang tersebar di Pulau Lemukutan dan pulau Pesata. Besar tutupan kategori tutupan jarang dan tergolong dalam kondisi "miskin", dengan spesies yang di temukan yaitu *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*.

Sedangkan di perairan Kabupaten Ketapang, berdasarkan hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019, lamun ditemui hanya beberapa yang bisa diobservasi dengan padang lamun. Padang lamun di perairan Pulau Gelam Ketapang, memiliki tutupan terpadang kategori padat dengan rata-rata tutupan lamun sebesar 51,04 %, mengacu pada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 status kondisi padang lamun termasuk ke dalam kategori baik. Terdapat 7 spesies lamun yang ditemukan di perairan Ketapang yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendron Ciliatum*.

Di Kalimantan Barat terdapat habitat peneluran penyu sepanjang 63 km di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Penyu yang sering bertelur adalah jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Selain di Sambas, habitat peneluran penyu juga terdapat di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Pulau Randayan, Pulau Sebuku dan Pulau Bawa Kabupaten Bengkayang serta Pantai Wisang Kabupaten Kubu Raya. Dari beberapa kejadian mamalia laut terdampar, dibuga perairan laut Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari beberapa jenis mamalia laut yaitu Pesut Pesisir (*Orcaella brevirostris*), Lumba-Lumba Bungkuk Indo Pasifik (*Sousa chinensis*), Lumba-Lumba Tanpa Sirip (*Neophocaena phocaenoides*) dan Duyung (*Dugong dugon*). Duyung hanya dijumpai di perairan laut Kabupaten Ketapang dikarenakan banyak ditemukan lamun sebagai makanan utamanya. WPP 711 juga merupakan daerah penangkapan ikan dari jenis yang sebagian besar hasil tangkapannya di daratkan di TPI Sungai Kakap Kubu Raya. Dari hasil pemantauan oleh enumerator ikan dari jenis yang didaratkan di TPI Sungai Kakap diidentifikasi jenis ikan yaitu Kakatua (*Scarus sp*) dan 8 cucukanan serta dari genus *Carcharhinus*, endangkan jenis ikan yang didaratkan yaitu *Rhynchobatus australiae*, *R. djiddensis*, *Glaucostegus thouin* dan *Rhina ancylostoma*. Di perairan laut Kalimantan Barat juga terdapat spesies endemik yaitu *Arwana* (*Scleropages formosus*) terdapat di danau-danau yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu juga terdapat Ikan Belida (*Chitala borneensis*).

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah dengan topografi datar terutama pada wilayah bagian selatan provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah dengan ketinggian sekitar 23,92% terletak pada ketinggian 0-7 m dpl. Untuk wilayah pesisir sebagian besar wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, yang berkisar antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kotawi yang memiliki ketinggian yang lebih rendah 500 m terutama

di bagian utara. Kondisi wilayah pesisir dengan ketinggian < 5 m, menyebabkan tsunami secara periodik terutama pada saat pasang tertinggi dan curah hujan cukup tinggi, seperti Kecamatan Jelai, sebagian Pantai Lamil, Benyuar Hilir, Benyuar Hilir Timur, sebagian Kotawaringin Kuala dan Kapuas Kuala. Kemiringan lahan wilayah pesisir Kalimantan Tengah dominan pada wilayah datar dan bergelombang (0-8 %) yang meliputi 94,10% dari luas total wilayah pesisir, tersebar di di seluruh Kecamatan Pesisir, kecuali di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yang memiliki kelerengan bergelombang sampai berbukit (8 – 25%). Hasil analisa bathimetri dari Peta Portolitho-AL (2016) menunjukkan di perairan < 4 mil laut kedalaman maksimum hanya 8 m. Kedalaman landai tersurut terdapat di wilayah Kecamatan Jelai yakni Tanjung Sekiku (arah), dimana kontur kedalaman 3 meter/pal jarak 7,2 km. Sedangkan di wilayah Pantai Lamil kontur kedalaman 3 m mencapai jarak 3,7 – 4,6 km. Untuk perairan sungai terutama alur dan muara Sungai Jelai mencapai 9 m. Perairan pesisir Kalimantan Tengah merupakan daerah yang relatif cukup terbuka dari serangan gelombang laut dalam karena berhadapan dengan Laut Jawa. Akibat kerusakan gelombang tersebut, menyebabkan wilayah ini sebagian besar pantainya telah tererosi dan Pantai Jelai sampai Pantai Kapuas, sebagian di muara sungai telah tertutup sedimentasi.

Ekosistem mangrove wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Luas hutan mangrove di provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan seluas lebih 316.540 Ha yang tersebar di sepanjang pantainya. Mangrove di Kalimantan Tengah dapat ditemukan hampir pada semua kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Kotawaringin di wilayah paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Mangrove di Kabupaten Kotawaringin tersebar mulai pantai di sebelah barat Sungai Jelai sampai Desa Sungai Pasir. Sungai Jelai sebelah timur juga

dikenalkan oleh kami mangrove seperti Desa Sungai Pandurg. Secara umum jenis mangrove yang ditemukan adalah jenis Api-api, Bakau, Nipah, Cemara Laut dan Rambai. Sedangkan di Kabupaten Kabupaten Kapuas, jenis mangrove yang ditemukan adalah Api-api, Bakau, Pidada dan Nipah. Perbedaan komposisi tegakan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Tengah ini dipengaruhkan karena adanya pengaruh salinitas tanah (Supriharyono, 2000).

Terumbu karang di provinsi Kalimantan Tengah secara umumnya tersebar dengan tipe gosong/taka (patch reef) yang terpusat di Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan peta Pushidros TNI AL ditemukan di sekitar Gosong Sengguru dan Gosong Sepagar yang terletak di sisi barat pantai Tanjung Puting atau arah tenggara dari Tanjung Pengkrajan. Terumbu karang di Gosong Sengguru tumbuh pada kedalaman 1-8 m, dimana jarak puncaknya terendam memiliki kisaran 3,11-3,27 m sampai dasar perairan pada saat surut, di saat pasang 3,55-3,96 m. Karakteristik karang di perairan Gosong Sengguru merupakan karang yang umum dijumpai di perairan lainnya. Beberapa genera karang yang dijumpai pada rataan terumbu seperti Acropora bercabang, Coniopora, Favia, Porites, Goniastrea, Galaxea, Fungia, Turbinaria, Montipora, Pectinia, Diploastra dan Porites. Sementara pada lereng terumbu umumnya dijumpai Galaxea, Turbinaria, Porites, Favia, Pectinia dan Tubastrea. Semua jenis karang termasuk kedalam filum Cnidaria (Coelenterata). Ancaman tersebut terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah banjir akibat kegiatan deforestrasi dan illegal logging sehingga jangkauan air tawar semakin jauh menembus kawasan terumbu selain itu penggunaan alat tangkap seperti kompresi yang merupakan dasar perairan dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan.

Padang lamun di pesisir Kalimantan Tengah sejauh ini hanya ditemukan di perairan perairan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di sepanjang pantai dan Laut, lamun yang tersebut di sepanjang

pantai pada kedalaman berkisar antara 0-2 meter hingga 3 meter, sedangkan yang tumbuh di perairan laut pada kedalaman yang berkisar antara 3 meter hingga 6 meter. Sebanyak 6 sepanjang pantai meliputi Desa Kuba, Tanjung Keluang, Tanjung Pandan, Bangau Belusu, Teluk Sepam dan Tanjung Penghujan dengan mempertimbangkan lamun yang tumbuh berpola distribusi tunggal pada kedalaman sedangkan Sedangkan di perairan laut meliputi Gosong Penggir, Gosong Sepapar, Gosong Berendam dan Gosong Senggora dengan jenis lamun cenderung berpola campuran pada Thalassia hemprichii, Halophila minor, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides berkembang bersama-sama dengan saling menutupi ruang tumbuh. Jenis lamun yang teridentifikasi ini termasuk dalam famili Hydrocharitaceae, berasal jenis Cymodocea serrulata yang termasuk famili Potamogetonaceae.

Biota dilindungi di Kalimantan Tengah antara lain dugong, tempayang, penyu, pesut, lumba-lumba, dugong, biu dan pari. Dugong dilindungi berdasarkan ke dalam gosong senggora-senggor, gosong benar banah di kawasan perairan Kumai untuk ekosistem makan di kawasan padang lamun yang terdapat di perairan tersebut. Biota migrasi penyu di Kalimantan Tengah dapat ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah seperti pantai Sungai Cabang Barat, Pantai Sungai Pelik dan Pantai Tanjung Keluang.

Secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan laut Kabupaten pesisir terdiri 31 kecamatan pesisir dari lima kabupaten pesisir antara dengan rincian pada Kabupaten Barito Kuala dan Banjar (masing-masing memiliki 1 kecamatan pesisir), Tanah Laut dan Tanah Bumbu (masing-masing memiliki 8 kecamatan pesisir) dan Kabupaten Kotabaru (memiliki 13 kecamatan pesisir). Total luas kecamatan pesisir tersebut sebesar 10.723,95 km2 atau 42,49% dari total luas kabupaten pesisir atau 28,78% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tipe ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan, didominasi oleh *Rhizophora* sp., *Bruguiera* sp. dan *Excoecaria* spp. *Xylocarpus* sp., *Sonneratia* sp. Berdasarkan pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan muara sungai Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 28 jenis mangrove.

Wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki ekosistem terumbu karang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Hamparan terumbu karang di wilayah Tanah Bumbu tersebar mulai dari kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kuster Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui, dengan jarak antara 200 – 9.300 meter (0,11 – 5,13 mil laut) dari garis pantai dan kedalaman berkisar 0 – 16 meter. Angka 0 menunjukkan bahwa karang berada sangat dekat dengan permukaan air laut, bahkan terkikis pada saat surut terendah, berdasarkan hasil analisis citra Alos tahun rekam 2010/2011 dan Citra Landsat (2016) diidentifikasi lebih banyak titik gugusan karang di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak 77 titik dengan total luas gugusan 340,42 Ha. Sedangkan di kabupaten Kotabaru didapatkan luas gugusan terumbu karang sebesar 10942,200 ha. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan di wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa genera karang dari ordo Scleractinia (*true coral*), *Non Scleractinia* dan ordo Alcyonacea (soft coral).

Ekosistem padang lamun (*sea grass*) di wilayah pesisir Kalimantan Selatan hanya ditemukan pada perairan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Pada umumnya, hamparan ini berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kedalaman yang dangkal 1 – 6 m, pada substrat pasir halus, pasir kasar campur sedangan bercampur dengan sedikit gugusan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Alos (2011) dan Landsat (2016) diperoleh luas lamun/alga sebesar 1.375,22 ha di perairan Kabupaten Kotabaru dan luas lamun/alga sebesar 30,27 ha. Di wilayah Kabupaten Kotabaru antara lain di perairan Kecamatan Pulau Laut Barat, perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan perairan Kecamatan Pulau Sebuku dan perairan Sungai Dua Laut Kabupaten

Barat Bertiu. Jenis laman yang ditemukan di Kecamatan Pulau Laut Barat adalah jenis *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata*, *Enhalus acoroides* dan *C. rotundata* yang tersebar di beberapa lokasi seperti Teluk Tambang dan Tanjung Kunjik. Di perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan jenis laman yang ditemukan seperti *Halodule pinifolia*, *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*, sedangkan jenis *Halophila beccarii* hanya di pantai Timur Pulau Kerayaan. Jenis lamun ini umumnya tersebar di Pulau Kerayaan, Pulau Teplok Melaja, Pulau Kerakas, Pulau Kerumputan dan Pulau Tikman Indah. Untuk jenis *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata* dan *Enhalus acoroides* umumnya ditemukan di perairan Kecamatan Pulau Sebuku, yakni di Pulau Sumber Gelap. Sedangkan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu hanya antara lain perairan Desa Bunga Dua Laut (Tanjung Kandang Haur, Karang Penyulingan, Karang Kahung dan Pulau Burung. Di perairan kabupaten ini cukup sedikit potensi padang lamunnya. Berdasarkan hasil kegiatan jenis lamun yang ada di perairan Desa Bunga Dua laut adalah *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halophila ovalis* dan *Thalassia hemprichii* sedangkan di perairan Pulau Burung hanya ditemukan 1 jenis yakni *Enhalus acoroides*.

Beberapa kota endemik dan dilindungi di Kalimantan Selatan yaitu perairan dengan wilayah migrasi di Kabupaten Kotabaru seperti wilayah selatan yakni pulau-pulau di Kecamatan Pulau Sebuku, Teluk Tambang, pulau-pulau kecil di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan kepulauan, wilayah timur yakni Kepulauan Sembilan Belas, Gunung Mangkok dan Pulau Laut Tanjung, wilayah utara yakni Tanjung Pemancingan. Ikan paus (cetacea) jenis Pseudorca crassidens atau yang biasa disebut dengan Pilot killer whale, di perairan sebelah barat Pulau Tegal Melaja atau sebelah selatan Pulau Kerumputan. Dugong/ Duyung (*Dugong dugon*), Penyu di wilayah perairan Kotabaru, Lumba-lumba, Ikan dan Pari.

Mangrove di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur dominan berupa formasi bergabung (50,98%)

dengan kelas kerapatan 20% - 60% (65.58%) yang tersebar di sepanjang pesisir kecuali di wilayah Bulwis - Bilok Bawah yang menyukai wilayah hutan, daerah perbukitan dengan kerapatan berat (60% - 81%) sebanyak 22.01% tersebar di wilayah yang jauh dari pesisir tersebar di wilayah barat Pasir, Bongkot Pasir Utara dan sebagian wilayah Kutai Timur dan Barat Bentu. Kondisi DAS juga sangat mempengaruhi wilayah pesisir, setidaknya terdapat 80 DAS yang berada di wilayah ini. Dari peta Pudidresi (2013) dan pengolahan, menunjukkan bahwa kedalaman perairannya sangat beragam mulai dari 1 – 4800 m. Hal ini sebagai pembatas antar lempeng Kalimantan dan lempeng Sulawesi yang terjadi oleh Sistat Pertemuan dan Laut Sulawesi. Ada 4 (four) dari pengaruh oceanografi dan iklim geografis diperiksa: bahwa kondisi pesisir dan pulau – pulau kecil di Kalimantan Timur berada di pantai timur Kalimantan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan gelombang.

Hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau – pulau kecil dan wisata sungai Provinsi Kalimantan Timur ditemukan 37 spesies tumbuhan di kawasan ekosistem. Mangrove khusus ditemukannya terdapat 14 jenis mangrove sejati yaitu *Avicennia marina, Avicennia alba, Avicennia rumphiana, Avicennia officinalis, Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Bruguiera sphlindrica, Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, Nypah fruticans, Xylocarpus granatum, Kandelia candel*. Berdasarkan hasil analisis, luas hutan mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Timur sebesar 244.432,32 ha, sebagiannya dikelolah mangrove hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Pulau Kita Samarinda dengan kondisi lahan dan kerapatan yang berbeda dominan di sekitar muara sungai.

Wilayah pesisir Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem terumbu karang dengan keanekaragaman yang sangat tinggi (terdiskripsi terdapat 400 jenis) yang tersebar mulai dari pesisir utara (laut Sulawesi) sampai selatan (selat Pantai) dengan tipe-

karang elemi (endik), karang teji (Pringing), karang penghalang (barrier reef) dan karang fora patas gosong (tepi kedalaman 1 m sampai dengan 40 m). Tingginya keanekaragaman biodiversitas berada di wilayah ini merupakan sub ekosistem ekologi dalam suatu kesatuan region Coral triangle. Kawasan Coral Triangle dikenal sebagai pusat karang dunia yang merupakan wilayah terumbu karang terluas di dunia dengan luas 98.000 km2, memiliki sekitar 500 spesies terumbu karang, 3000 spesies ikan, sumber penghidupan 120 juta penduduk dengan perputaran ekonomi US$ 2.1 Miliar/tahun. Selain itu, kawasan ini berfungsi sebagai sumber plasma nutfah dan sumber bahan farmasi di masa depan, wilayah regional laut dan maritim, kawasan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menyangga perubahan iklim dunia. Berdasarkan hasil analisis citra landsat (2017 – 2018) total luas gugusan terumbu karang di wilayah perairan Kalimantan Timur 118.963,418 ha.

Ekosistem padang lamun (sea grass) di wilayah pesisir Kalimantan Timur banyak tumbuh dan berkembang pada daerah – daerah yang relatif tenang dan terdapat gugusan karang (delapan sebagai penghalang. Pada umumnya, tumbuhan ini berada di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dengan kedalaman dangkal 1 – 6 m, pada substrat pasir halus, pasir lumpur atau pasir bercampur dengan sedikit pecahan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat (2017/2018) dan Data LIPI dan BIG diperoleh luas lamun/algae sebesar 13.119.004 ha. Secara spasial sebaran ini ditunjukkan pada beberapa lokasi, untuk memastikan lamun atau alga yang terdapat di lokasi tersebut dilakukan survey lapangan (ground check) sehingga diharapkan wilayah potensi lamun dan/atau asosiasi dengan alga. Oleh karena itu adanya partial nodata dilakukan beberapa penggunaan yang dilakukan secara pervalidasi daerah lamun yang dianggap cukup banyak. Data hasil perhitungan tutupan lamun dikaitkan untuk menentukan status padang lamun berdasar Keputusan LH Nomor 200 tahun 2004, dapat diklasifikasikan status baik kondisi kaya/sehat dengan penutupan > 30 – 59,9% dan status

masuk kembali sekitar dengan persentase < 29.9%. Jenis yang dikonservasi di wilayah ini seperti *Bekalo tumadas*, *Dalbergia Aeropicta*, *Cynodontis nitrandata*, *Cynodontis nervalata*, *Melodia stenoura*, *Melodia yinifolia*, *Polyalthi nemia*, *Syringodium isoetifolium*. Wilayah pesisir Berau dan Bontang merupakan daerah yang memiliki padang lamun, karena wilayah ini relating terlindung dengan substrat dasar pasir dan pasir halus.

Salah satu biota endemik dan dilindungi di Kalimantan Timur adalah Pesut Mahakam (*Orcaella*). Orcaella yang sering juga disebut dengan lumba – lumba air tawar. Pesut Mahakam sendiri merupakan kerabat dari pesut mirip di Asia Tenggara dan satu – satunya habitat mereka hanya di sini di Sungai Mahakam dan Delta Berau, Kalimantan Timur. Pada tahun 2015 diestimasi kurang lebih terdapat 71 ekor keberadaannya terbatas lalu diklasifikasi sangat punah. Beberapa biota laut yang termasuk dilindungi seperti Ikan Paus di Talisayan, Bagahrot dan beberapa jenis spesies Hiu dan Pari yang masuk dalam kategori Appendiks II CITES yang sering ditemukan di perairan *Rhincodon typicus*, *Carcharhinus falciformis*, *Carcharhinus longimanus*, *Sphyrna lewini* dan *Alopias pelagicus* masih sering ditangkap di wilayah perairan Kalimantan Timur. Buat ini juga terdapat pemantauan tempat peneluran penyu yang semula berjumlah 8 lokasi menjadi 6 pulau yang terdapat di pesisir Kabupaten Berau, adapun jenis penyu yang dilestarikan adalah penyu Hijau.

Provinsi Kalimantan Utara adalah terbaru provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Kalimantan. Secara geografis, Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur di bagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di bagian selatan. Sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-

pulau kecil di Provinsi Kaltara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 km². Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (344 km²), Pulau Sebatik (249 km²), Pulau Bunyu (232 km²), dan Pulau Tanah Merah (202 km²). Pulau-Pulau Kecil Terluar terletak di Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang juga merupakan obyek vital Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Adapun panjang garis pantai provinsi Kaltara adalah sepanjang 3.933 km, 906 km (23%) merupakan garis pantai daratan dan 3.047 km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

Morfologi pantai di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah estuari yang ditumbuhi mangrove dengan persentase sekitar 89,34% dari panjang total garis pantai Provinsi Kalimantan Utara. Delta merupakan jenis morfologi pantai yang paling sedikit ditemui di Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah estuaria dimanfaat banyak ditemukan di Kabupaten Bulungan dengan luas 1951,18 Ha yang ditumbuhi mangrove. Sebuah itu Kabupaten Bulungan juga merupakan daerah terluas untuk pantai jenis pantai berpasir, pantai berbatu, dan pantai teluing.

Kawasan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara bertambah baik setahun sposisi. Kawasannya mencapai 100.983,7 ha dengan kondisi sebesar dominasi lumpur berpasir. Dari luas tersebut, kawasan mangrove terbesar berada di wilayah pesisir Kabupaten Bulungan dengan luas sekitar 77.171,3 Ha atau sekitar 42,64% dari luas total. Sementara itu, wilayah dengan luas tutupan mangrove paling sedikit adalah Kota Tarakan hanya sekitar 687,9 Ha atau sekitar 0,32% dari luas total. Jenis vegetasi mangrove yang ditemukan di Provinsi Kaltara diantaranya *Bruguiera gymnorrhiza*, *Bruguiera sylindrica*, *Nypa fruticans*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculata*, *Avicennia officinalis*, *Aegiceras floridum*.

Akhmad ruang untuk area hutan Mangrove yang masuk dalam wilayah pemanfaatan KSPPTK Provinsi Kalimantan Utara hanya terdiri dari satu area (KPU-HM-PT) dan satu subarea (KPU-HM-PT-01) dengan luasan sekitar 49,28 ha. Kawasan Hutan Mangrove ini terdapat di pesisir Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Dari segi jenis

pemanfaatannya. Status mangrove yang masuk dalam kriteria rusak ini termasuk dalam kategori hutan mangrove Pemanfaatan terbuka.

Provinsi Kaltara juga memiliki wisata ekosistem hutan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas mencapai sekitar 10,8 Ha. Jenis hutan yang dimiliki satu jenis *Avicennia* sedih, *Rhizophora* sedih, dan *Nypa fruticans* dengan kerapatan yang bervariasi dari 40 – 70 %.

Terumbu karang di Provinsi Kalimantan Utara ditemukan beberapa jenis kategori terumbu karang, yakni kategori dead coral alga, pecahan karang, dan karang hidup. Luas terumbu karang terbesar ditemukan di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yakni sebesar 68,49 Ha. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkat produktivitas dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu biotanya yang dilindungi dimanfaatkan satu dan Napoleon dengan status Appendiks II CITES.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi biota satu penyu. Penyu yang paling banyak ditemukan yaitu Penyu Hijau. Salah satu Jalur migrasi penyu hijau di Provinsi Kalimantan Utara adalah berasal dari Pulau Sipadan Pulau Sebatik, Bunyu, Tanah Kuning, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat bertelur penyu. Selain penyu, Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi lumba-lumba. Salah satu lokasi migrasi (rute) lumba-lumba adalah di perairan Sungai Sesayap Tana Tidung-Malinau dan perairan Tarakan sampai ke Sesayap dan akhir migrasi lumba-lumba lainnya, dari Bunyu ke Sesayap. Penyu dan lumba-lumba merupakan biota laut yang dilindungi penuh dengan status Appendiks I CITES.

Wilayah Kalimantan juga mempunyai potensi dalam pengelolaan biofarmakologi seperti pemanfaatan sumber daya alam yang diteliti di perairan Kabupaten Bambas, Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Kupang masih menghadapi berbagai isu pengelolaan penting yang menjadi tantangan dan perlu dijawab untuk kepentingan. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1) Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang memberikan dampak dilarang. Hal ini perlu adanya integrasi antara ruang darat dan ruang laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Dalam hal pemanfaatan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
2) Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi satu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
3) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. IKAN sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan pengaturan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan data dan teknologi.
4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi biota laut yang dilindungi. Hal ini untuk dilakukan langkah

sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan dan/atau masuk dalam agenda CTDS kepada masyarakat.

3) Ancaman alih fungsi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

4) Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti alat bervili pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

5) Kurangnya tingkat akseptabilitas dan keterampilan sumber penanaman dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk pengelolaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil mampu kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

6) Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti seperti bioprospeksi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercermin dalam analisa SWOT berikut ini.

Kekuatan	Kelemahan
• Memiliki potensi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) yang berlimpah • Memiliki potensi keanekaragaman hayati laut dan jenis ikan prioritas pengelolaan SKP yang tinggi • Dukungan pihak seperti Pemerintah Daerah, NGO, dan kelompok masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	• Pengelolaan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan • Pendataan dan Penilaian belum komprehensif serta konsisten untuk menggali potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. • Belum pemanfaatan pelayanan di wilayah kerja yang masih belum lengkap
Peluang	**Ancaman**
• Adanya potensi PNBP melalui penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) rekomendasi, Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan rekomendasi untuk para pengusaha yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (lampiran appendiks CITES) serta Rekomendasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Sorong	• Kerusakan alamai pantai yang dapat mematik ekosistem pesisir. • Pemanfaatan jenis ikan yang tidak sesuai ketentuan pemanfaatan. • Pencemaran pesisir dan laut yang mengganggu kehidupan biota laut • Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung • Perizinan pemanfaatan modal asing di pulau-pulau kecil dan

• Meningkatnya kolaborasi dengan mitra dalam pengelolaan konservasi	pulau-pulau kecil terluar di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang belum akses sinyal telpon, terbitnya di wilayah kerja BPSPL Pontianak, rusaknya Pulau Maniamo dan Pulau Sambit yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSDM, Pusmanjo adalah: **"Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL"**

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP merumuskan misinya dari dan untuk misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan".

2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Masyarakat Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan", dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DKP".

Dalam rangka mendukung misi DKP tersebut, Ditjen PRL menyusun 3 (tiga) misi, yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Pontianak, maka ditetapkan Misi BPSPL Pontianak yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang laut di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak
2. Peningkatan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
3. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
4. Pemantau dan Pengendalian Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Kerja Pontianak;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak.

C. Tujuan

Merujuk pada misi di atas, BPSPL Pontianak menetapkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan luas kawasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Perlindungan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   1) meningkatkan cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   2) Meningkatkan pengelolaan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Bidang wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak

D. Sasaran

Sasaran pemberdayaan kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang dilaksanakan, meliputi program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan fungsi kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang dikelola konservasinya di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Tujuan meningkatkan pemanfaatan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Terfasilitasinya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan sumberdaya non hayati pesisir di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   2) Meningkatnya pengelolaan sumberdayanon hayati pesisir yang dimanfaatkan dan/atau dikonservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   3) Meningkatnya pengelolaan sumberdayanon hayati pesisir yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   4) Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konversi konservasi sumberdayanon hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
5. Tujuan meningkatkan perencanaan dan pemulihan berwawasan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terlaksana pemeriksaan yang baik di BPSPL Pontianak.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah "Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengaturan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Konservasi Laut melalui koordinasi dengan instansi terkait". Berdasarkan kebijakan ini maka ditetapkan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, aman dan implementatif;
2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang adaptif dan berkelanjutan;
3) pendayagunaan pesisir dan pulau pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4) pencegahan dan penindakan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5) penataan dan pemanfaatan dasar kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL.

Strategi pelaksanaan kegiatan RPSPL Pertamak yang akan dikerjakan untuk tujuan - tujuan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, aman, dan implementatif melalui:
   a. Pendampingan dalam penerbitan KKPRL yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja RPSPL Pertamak;

b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut secara berupa struktur non ruang/ struktur utama di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
c. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
d. Pengelolaan dana KKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
a. Pembangunan Pembentuk Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
b. Pembangunan pengelolaan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKD di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
d. Perlindungan (populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
f. Rehabilitasi Habitat lamun jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
g. Pengawasan Ikan Dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
h. Pelayanan perizinan/ pemberian pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
i. Inisiasi jejaring dan kerjasama konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
j. Pembentukan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3. Pendampingan pelatih dan pelaku-pelaku usaha yang lestari dan mandiri melalui:
   a. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL Pontianak

4. Perangkatan dan Penyiapan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:
   a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Pemasangan Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Pembangunan Pusat Informasi dan Pengembangan ekowisata Pesisir di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

5. Pemetaan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
   a. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
   a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata kelama di BPSPL Pontianak;
   b. Penguatan Akuntabilitas kinerja di BPSPL Pontianak;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSL Pontianak;
   d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BPSPL Pontianak.

B. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPSPL Pontianak diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

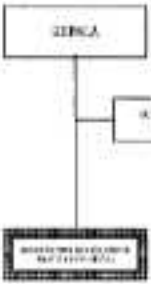

Struktur Organisasi BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut Kalimantan. Saat ini, ada 2 (dua) kantor wilayah kerja yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selanjutnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Adapun Jabatan Pengawas Terkait (JPT) yang ada di BPSPL Pontianak yaitu, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengelola Ahli Muda, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama.

Total SDM yang dimiliki BPSPL Pontianak hingga tahun 2021 dalam mencapai pencapaian tujuan organisasi adalah 50 orang, yang terdiri dari 46 berstatus ASN dan 14 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di BPSPL Pontianak pada saat Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dengan total SDM 9 orang yang terdiri dari 2 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 6 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
   - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda (1 Orang)
   - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (1 Orang)
   - Perencana Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (1 Orang)
   - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (1 Orang)
   - Pelaksana Pengelolaan (2 Orang)
   - Analis Organisasi dan Tata Laksana (1 Orang)
   - Pengadministrasian Barang Milik Negara (1 Orang)
   - Pengadministrasian Perkantoran (1 Orang)
   - Pengadministrasian Umum (1 Orang)
2. Sub Koordinator Program dan Evaluasi, dengan total SDM 7 orang yang terdiri dari 1 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 6 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
   - JF Perencana Muda (1 Orang)
   - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (3 Orang)
   - Analis Perencanaan (3 Orang)
3. Sub Koordinator pemberdayaan dan Pelestarian, dengan total SDM 29 orang yang terdiri dari 16 Jabatan Fungsional PKLP dan 13 Jabatan Fungsional Umum
   - JF PKLP Muda (1 Orang)
   - JF PKLP Pertama (15 Orang)
   - Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir (4 Orang)
   - Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3 Orang)
   - Analis Kekuatan dan Perlakuan (3 Orang)
   - Pengadministrasian Umum (2 Orang)

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, ke depan diperlukan pengembangan SDM yang lebih profesional dengan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu JF Analis

Pengelolaan dan Sekretariat, 3) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut serta 4) Subbagian.

Untuk meningkatkan efektivitas dan tertang kontak yang lebih dekat, maka BDN tersebut dioperasikan pada 3 provinsi sebagai kerja BPSPL Pontianak, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Total mencakup 30 Kabupaten/Kota Pesisir yang tersebar di 3 Provinsi di Pulau Kalimantan. Wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah seperti pada peta dan gambar di bawah ini.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Perhubungan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ditjen PRL, maka DPSPL Provinsi telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan DPSPL Provinsi 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini.

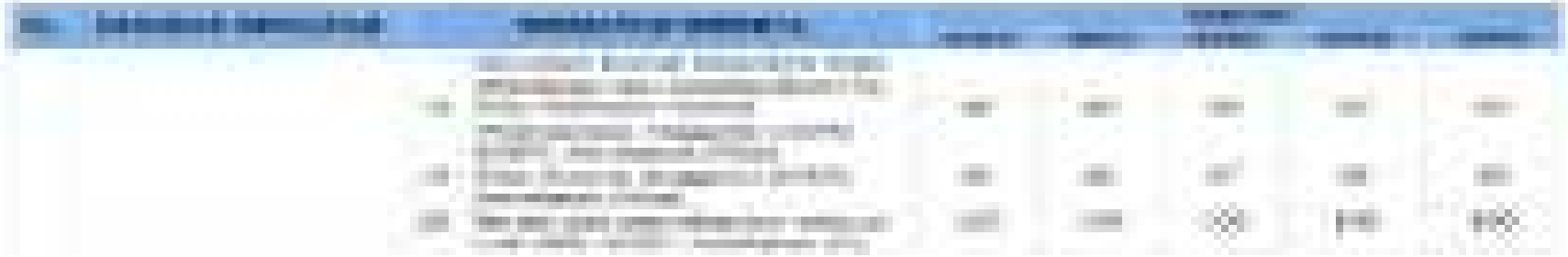

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kerangka kebutuhan dana dalam rangka memenuhi seluruh kegiatan RPSPL Pembangunan selama lima tahun ke depan. Sumber dana pendanaan RPSPL Pembangunan diperoleh dari sumber APBN yang secara rinci tercantum pada lampiran matriks kerangka pendanaan.

BAB V
PENUTUP

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), Renstra KKP tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2020), dan Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Pontianak dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja BPSPL Pontianak, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga sangat tergantung adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dan seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berhasil guna dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE